INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

2022 Annual Report

Laporan Tahunan 2022

Memberikan Perlindungan, Melahirkan Harapan, Menjangkau Semua Lapisan

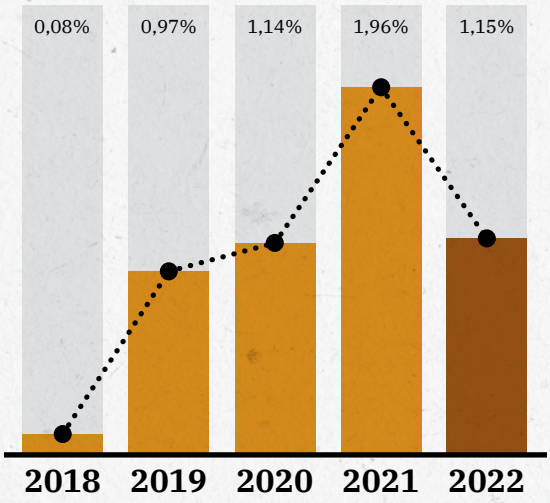
GIVING PROTECTION, BRINGING HOPES, AND REACHING OUT TO ALL LAYERS



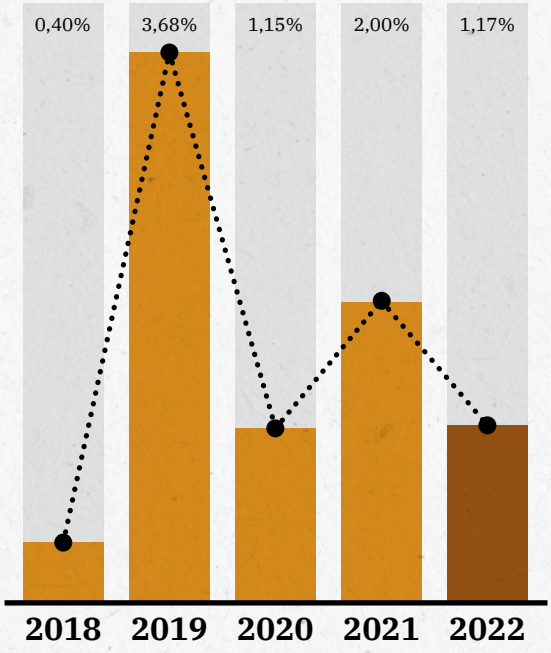
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Summary of Key Financial Highlight

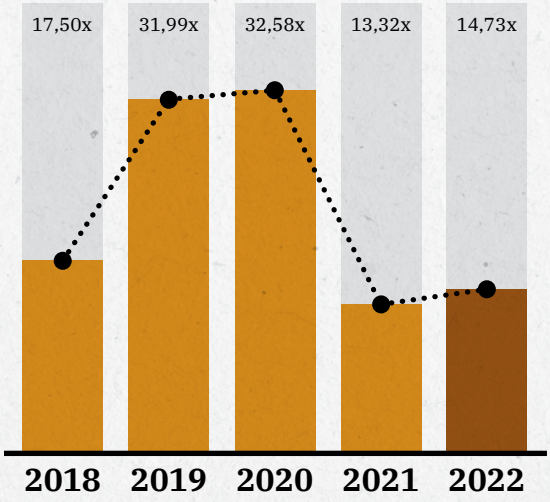
ROA
ROA



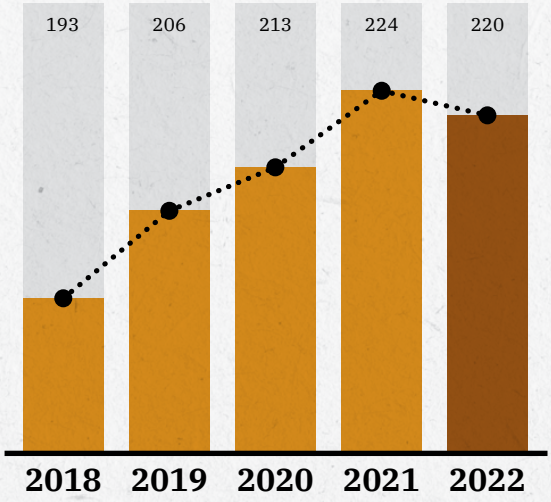
ROE
ROE

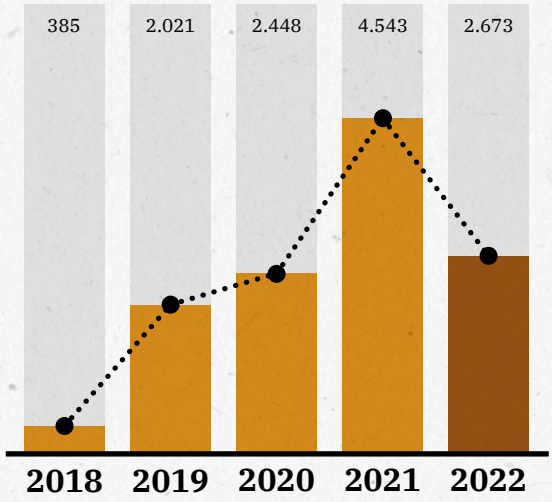


Rasio Lancar
Current Ratio



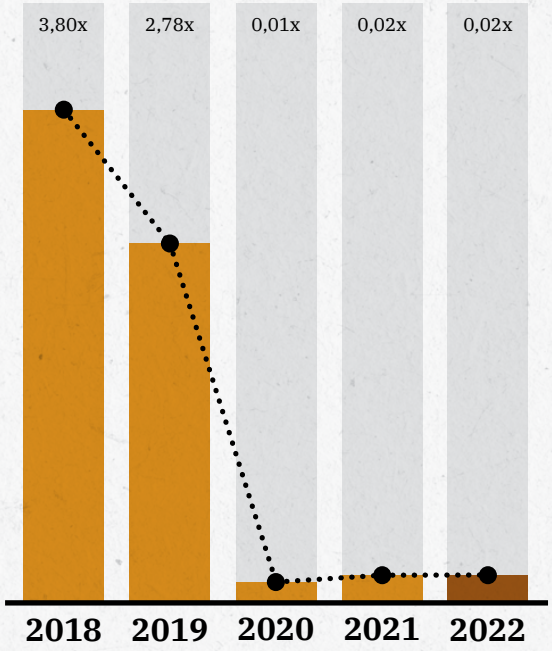
Jumlah Aset (dalam Miliar Rupiah)
Total Assets (in Billion Rupiah)



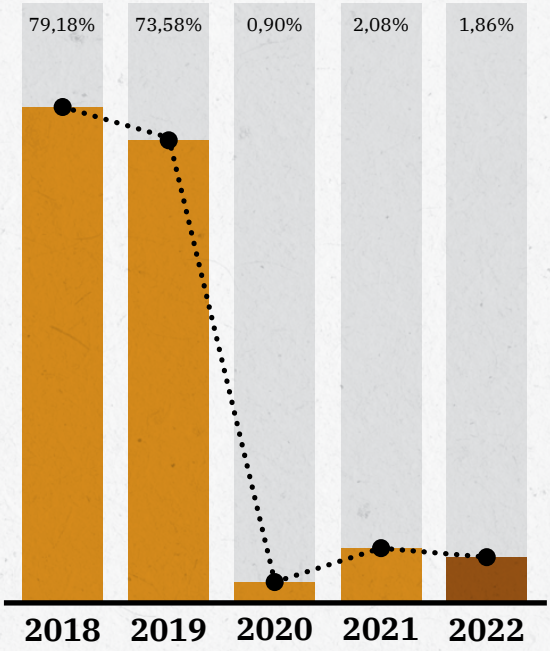


Laba Usaha (dalam Jutaan Rupiah)
Operating Profit (in Million Rupiah)

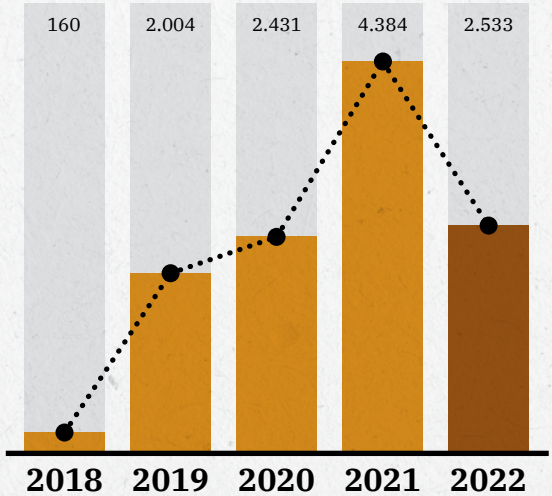
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas
Liability to Equity Ratio



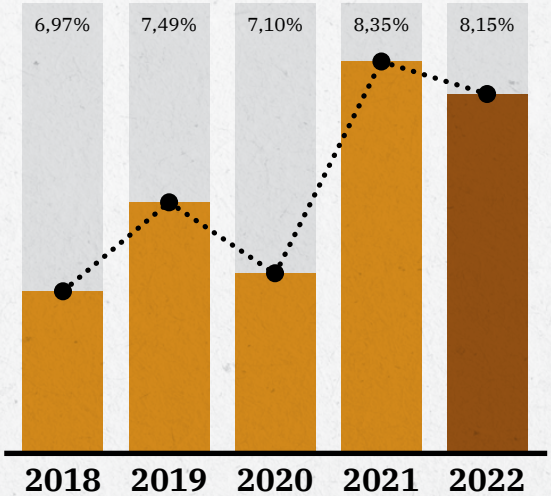
Rasio Total Liabilitas
Total Liabilities Ratio



Laba Bersih (dalam Jutaan Rupiah)
Net Income (in Million Rupiah)



Rasio Perputaran Aset
Asset Turnover Ratio



INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

2022 Annual Report

Laporan Tahunan 2022





Tema Laporan Tahunan

Annual Reports' Theme

"Memberikan Perlindungan, Melahirkan Harapan, Menjangkau Semua Lapisan"

Giving Protection, Bringing Hopes, and Reaching Out to All Layers

P3IEI pada tahun 2022 mengusung tema Memberikan Perlindungan, Melahirkan Harapan, Menjangkau Semua Lapisan". Pada tahun 2022, P3IEI mencatat pertumbuhan signifikan atas Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebesar 11,49%, kemudian total aset serta jumlah pemodal yang dilindungi tercatat meningkat masing-masing sebesar 20,22% dan 37,78%. P3IEI pada 2022 juga terus memperkuat fondasi Perusahaan sebagai institusi pelindung investor di Pasar Modal Indonesia untuk mempersiapkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi di masa mendatang. Capaian fundamental yang ditorehkan P3IEI antara lain yaitu turut serta dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang telah disahkan sebagai UU P2SK pada 12 Januari 2023 dan menjadi tonggak penguatan perlindungan terhadap investor, kemudian mendorong penerapan prinsip perlindungan investor berbasis syariah melalui terbentuknya tim pengusung fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta mendapatkan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perluasan cakupan perlindungan investor.

Dukungan yang terus mengalir tersebut juga telah mendorong kegiatan sosialisasi dan edukasi P3IEI semakin meluas ke beragam lapisan masyarakat. Hal ini dapat tercermin di antaranya dari kesuksesan kegiatan Investor Protection Month (IPM) 2022 bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang telah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) dalam *Login* Aplikasi Pasar Modal di Kota Terbanyak se-Indonesia. Penyelenggaraan International Class untuk pertama kalinya juga disambut positif oleh para pemangku kepentingan. Capaian-capaian Perusahaan tersebut juga diiringi dengan peningkatan Perusahaan dari sisi internal dalam tata kelola, operasional, serta kegiatan penunjang lainnya. Tahun 2022 telah menandai upaya gigih Perusahaan yang perlahan mampu bertumbuh membawa harapan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat.

Indonesia SIPF in 2022 carries the theme "Giving protection, bringing hopes, and reaching out to all layers". In 2022, Indonesia SIPF recorded a significant growth in the Investor Protection Fund (IPF) of 11.49%, then total assets and number of protected investors recorded an increase of 20.22% and 37.78% respectively. Indonesia SIPF in 2022 also continued to strengthen the company's foundation as an investor protection institution in the Indonesian capital market through preparation to achieve higher goals in the future. The fundamental achievements made by Indonesia SIPF included participation in the drafting of Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (RUU P2SK) which was ratified as the P2SK Law on 12 January 2023 and became a milestone in strengthening protection for investors, then encouraging the application of sharia principles through the formation of a National Sharia Board Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) fatwa team, as well as obtaining Financial Services Authority (FSA/OJK) support in expanding the scope of investor protection.

The continuous support has also encouraged Indonesia SIPF's outreach and education activities to expand to various levels of society. This can be reflected, among others, in the success of the Investor Protection Month (IPM) 2022 joint event with PT Indonesia Custodian Central Depository (KSEI) which has broken the The Indonesian World Record Museum (MURI) record as the Highest Capital Market Application Logins in Cities throughout Indonesia. The execution of the first International Class was also positively welcomed by stakeholders. The company's achievements were also accompanied by improvements from the internal management in governance, operations and other supporting activities. The year 2022 has marked Indonesia SIPF's persistent efforts to gradually grow, bring hope and protection to all layers of society.

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan

The Continuity of Annual Reports' Theme

P3IEI menggarisbawahi kesinambungan antar tema laporan yang diusung dari tahun ke tahun. Perusahaan menekankan tema atas peran yang dijalankan yakni memberikan perlindungan terhadap pemodal. Pada tahun 2018, Perusahaan memfokuskan diri pada perlindungan hingga seluruh pelosok nusantara. Pada tahun 2019, P3IEI terus berkembang sehingga dapat membawa keyakinan bagi para investor untuk melangkah lebih maju dan mengembangkan kapabilitas. Pada tahun 2020, Perusahaan berkomitmen untuk bisa mewujudkan kepercayaan dan mendorong pertumbuhan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi investor di tengah pandemi Covid-19. Tahun 2021, P3IEI terus mewujudkan pertumbuhan yang signifikan dalam peningkatan perlindungan investor. Sedangkan pada tahun 2022, P3IEI membawa tema Memberikan Perlindungan, Melahirkan Harapan, Menjangkau Semua Lapisan untuk memberikan keberlanjutan kerja Perusahaan yang terus memberikan perlindungan terbaik bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

Indonesia SIPF emphasizes the continuity of the themes in its reports yearly. The Company highlights the theme of its role in providing protection to investors. In 2018, the Company focused on protection throughout the Archipelago. In 2019, Indonesia SIPF continued to develop, instilling confidence in investors to advance and enhance their capabilities. In 2020, the Company has committed to built trust and accelerate growth to give the best protection to investors amid the Covid-19 protection. In 2021, Indonesia SIPF continued to achieve significant growth in enhancing investor protection. In 2022, the company adopted the theme of Providing protection, nurturing hope, reaching all layers to ensure the sustainability of its work, and providing the best protection for all segments of Indonesian society.



2021

Pada tahun 2021 P3IEI mengusung tema "Mewujudkan Kepercayaan dan Mendorong Pertumbuhan untuk Memberikan Perlindungan Terbaik bagi Investor". Tahun 2021 yang masih dibayangi dengan pandemi tidak membatasi P3IEI untuk mewujudkan pertumbuhan yang signifikan dalam peningkatan perlindungan pemodal ditambah lagi dengan meningkatnya *coverage* hingga Rp200 juta per pemodal dan Rp100 miliar per kustodian yang berlaku efektif pada Januari 2021. Pada tahun 2021, Dana Perlindungan Pemodal tercatat tumbuh sebesar 9,93%, disertai dengan peningkatan jumlah investor yang tumbuh 104%. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik juga semakin meningkatkan layanan yang diberikan P3IEI. Selain itu, P3IEI bergabung dalam International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) untuk lebih meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Tahun 2021 menggarisbawahi pencapaian P3IEI bahwa pada setiap tantangan yang dihadapi, selalu ada peluang untuk bertumbuh.

In 2021 Indonesia SIPF carried the theme "Establishing Trust and Promoting Growth to Provide Ultimate Investor Protection." The year 2021 was still overshadowed by the ongoing pandemic. This situation did not limit Indonesia SIPF to realizing significant growth in increasing investor protection coupled with expanded coverage of up to IDR200 million per investor and IDR100 billion per custodian, effectively in January 2021. In 2021, the Investor Protection Fund recorded a growth of 9.93%, accompanied by an increase in the number of Sub Securities Accounts of protected investors, which multiplied by 104%. Applying the principles of good corporate governance also improved the services provided by Indonesia SIPF. In addition, Indonesia SIPF joined the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) to increase stakeholders' trust towards the company. The year 2021 highlighted Indonesia SIPF's achievements that there will always be an opportunity for growth in every challenge encountered.



2020

Pada tahun 2020 P3IEI mengusung tema "Membawa Optimisme Melalui Perlindungan di Segala Kondisi." Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi para investor nusantara. Aset investor dan kinerja di pasar modal selama 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19. Walaupun demikian kinerja P3IEI dapat dikatakan cukup baik melihat peningkatan jumlah investor sebanyak 804.497 SRE atau tumbuh 59,59% *year-to-date*. Hal ini tak terlepas dari gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang dilakukan oleh segenap pelaku pasar modal, termasuk P3IEI cukup berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. P3IEI adaptif mengubah konsep sosialisasi, edukasi dan promosi berfokuskan pada *platform online*. Tema tahun ini sendiri melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor yang maksimal meskipun dalam kondisi pandemi.

In 2020 Indonesia SIPF carried the theme "Bringing Optimism through Protection in All Conditions." The year 2020 was quite a challenging year for investors in the archipelago. Investor assets and performance in the capital market during 2020 experienced a decline due to the COVID-19 pandemic. Even so, Indonesia SIPF's performance could be said to be quite good, seeing an increase in the number of investors by 804,497 SRE or growing 59.59% year-to-date. This achievement was inseparable from the ongoing socialization, education, and promotion activities carried out by all capital market players, including Indonesia SIPF, which had succeeded in attracting public interest to invest in the capital market. Indonesia SIPF adaptively changed the concept of socialization, education, and promotion by focusing on online platforms. This year's theme continued the theme of previous years by focusing on maximum investor protection even in pandemic conditions.

2019

Pada tahun 2019 P3IEI menggunakan tema "Membawa Keyakinan untuk Melangkah ke Depan dan Memperluas Kapabilitas". Tema pada tahun 2019 ini melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor. Sepanjang tahun 2019, P3IEI telah menginisiasi serta mengembangkan berbagai kegiatan, baik secara internal maupun eksternal untuk menumbuhkan keyakinan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Antara lain meliputi pengembangan Dana Perlindungan Pemodal yang optimal; intensifikasi kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi baik di dalam maupun luar negeri; pengembangan layanan bagi investor maupun Anggota DPP; serta penguatan dari segi finansial internal maupun Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selain itu di akhir tahun 2019, P3IEI juga telah mencanangkan beberapa program pengembangan strategis guna menopang keyakinan tersebut di masa yang akan datang, khususnya perluasan kapabilitas P3IEI dalam kaitannya dengan pengembangan perlindungan investor di Pasar Modal Indonesia.

Throughout 2019, Indonesia SIPF had initiated and expanded its internal and external activities to reassure stakeholders' confidence towards the Company. To which involving the Investor Protection Fund (IPF) optimum growth; intensification of the company's socialization, education, and promotion within or across the country; the service improvement for Investor and IPF Members; also strengthen the internal financial and good corporate governance. Furthermore, at the end of 2019, Indonesia SIPF had also made a few strategic development programs to support such confidence in the future, specifically on the Indonesia SIPF capabilities enhancement in associate with investor protection extensification in Indonesia Capital Market.



Kesinambungan Tema Laporan Tahunan

The Continuity of Annual Reports' Theme

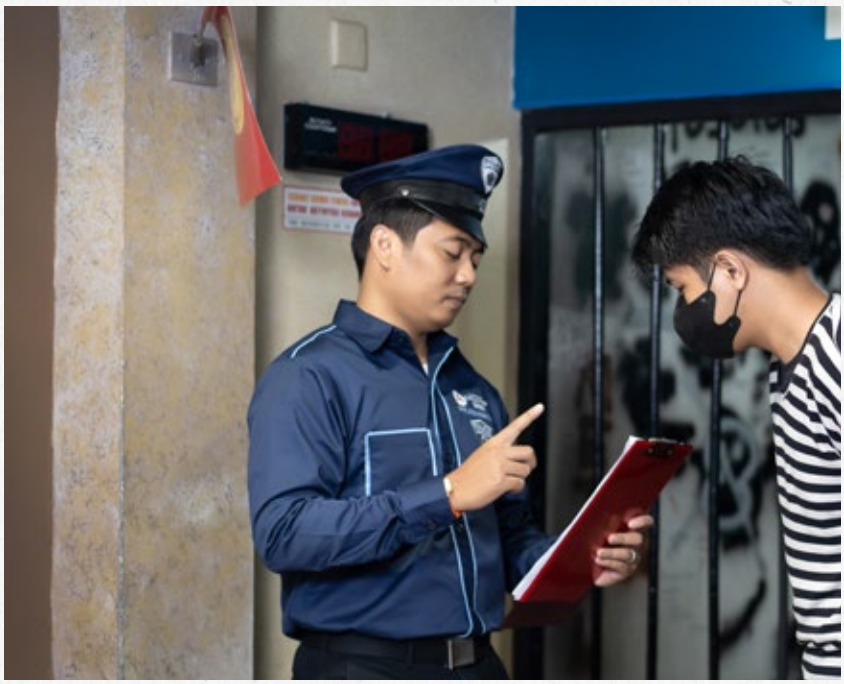
2018

Pada tahun 2018 P3IEI menggunakan tema "Melindungi Pemodal Hingga Pelosok Nusantara" dengan latar belakang bahwa sepanjang tahun 2018, dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait perlindungan aset investor di Pasar Modal Indonesia, P3IEI telah melakukan berbagai kegiatan program sosialisasi, edukasi, dan literasi melalui kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam rangka penyebarluasan konsep perlindungan maka P3IEI juga menyebarluaskan informasi tentang perlindungan investor dalam bentuk media cetak ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di seluruh Indonesia.

In 2018 the Company used the theme "Protecting Investors Throughout the Archipelago" with the background that throughout 2018, to increase understanding regarding the protection of investor assets in the Indonesian Capital Market, Indonesia SIPF has carried out various activities in the program of socialization, education, and literacy through visits to different regions in Indonesia. Not only that, to disseminate the concept of protection, Indonesia SIPF also shares information about investor protection in the form of print media to Indonesian Stock Exchange Representative Offices (KP BEI) throughout Indonesia.









Daftar Isi

Index

02 **Ikhtisar Data Keuangan Penting**
Summary of Key Financial Highlight

05 **Tema Laporan Tahunan**
Annual Reports' Theme

06 **Kesinambungan Tema Laporan Tahunan**
The Continuity of Annual Reports' Theme

14 **Ikhtisar Kinerja 2022**
2022 Performance Summary

14 **Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlight

17 **Ikhtisar Dana Perlindungan Pemodal**
Investors Protection Fund Highlights

18 **Jejak Langkah**
Milestones

25 **Peristiwa Penting 2022**
Important Events 2022

36 **Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2022**
Responsibility for The 2022 Annual Report

01 Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

Management Report

43 Laporan Direksi
- *Board of Directors Report*

43 Pencapaian Kinerja Perusahaan
- *Achievement of Company's Performance*

44 Perbandingan antara Hasil yang dicapai dengan Target
- *Comparison between The Results to The Target*

45 Kendala yang Dihadapi
- *Obstacles Encountered*

45 Gambaran dan Analisis tentang Prospek Usaha
- *Description and Analysis of Business*

46 Pengelolaan *Human Capital*
- *Human Capital Management*

48 Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi
- *Performance Assessment of Committees Under The Board of Directors*

49 Pengawasan Internal dan Kepatuhan
- *Internal Control System*

49 Kata Penutup
- *Closing Remarks*

51 Laporan Dewan Komisaris
- *Board of Commissioners Report*

51 Penilaian terhadap Kinerja Direksi
- *Performance Assessment of Directors*

52 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- *Corporate Governance*

53 Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan
- *Views on Business Prospects*

53 Kata Penutup
- *Closing Remarks*

54 Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Direksi atas Laporan Tahunan 2022
- *Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2022 Annual Report*

55 Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2022
- *Board of Commissioner' Statement of Responsibility for the 2022 Annual Report*

02 Profil Perusahaan

Company Profile

60 Informasi Umum
- *General Information*

62 Riwayat Singkat Perusahaan
- *Brief History of The Company*

63 Visi dan Misi
- *Vision and Mission*

64 Budaya dan Nilai Perusahaan
- *Corporate Culture and Value*

65 Kegiatan dan Bidang Usaha
- *Corporate Activities and Scope of Business*

66 Struktur Organisasi
- *Organizational Structure*

68 Profil Direksi
- *Board of Directors Profile*

72 Profil Dewan Komisaris
- *Board of Commissioners Profile*

76 Pengelolaan *Human Capital*
- *Human Capital Management*

82 Keterkaitan dan Kepuasan Pegawai
- *Relationship and Satisfaction of Employees*

85 Informasi Pemegang Saham
- *Shareholder Information*

85 Wilayah Operasi Saat Ini
- *The Current Area of Operation*

85 Produk dan Jangkauan Pasar
- *Product and Market Reach*

86 Lembaga dan Profesi Penunjang
- *Supporting Agencies and Professions*

87 Penghargaan dan Pengakuan Eksternal
- *External Awards and Acknowledgments*

88 Informasi Situs Perusahaan
- *Company Site Information*

89 Transparansi Penyampaian Laporan
- *Transparency of Report Submission*

91 Pandangan Atas Prospek Usaha Perusahaan
- *Views on Business Prospects*

03 Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion And Analysis

96 Gambaran Umum
- *Overview*

98 Bisnis
- *Business*

98 Pengelolaan DPP
- *IPF Management*

102 Keanggotaan DPP
- *IPF Membership*

104 *Monitoring* Risiko Anggota DPP
- *Risk Monitoring of IPF's member*

108 Pengelolaan Investasi Lain
- *Other Investment Management*

109 Keuangan
- *Finance*

115 Posisi Keuangan
- *Financial Position*

04 Governansi Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG)

122 Governansi Perusahaan
- *Good Corporate Governance*

122 Perjalanan Tata Kelola Perusahaan 2014 - 2022
- *GCG Milestones 2014-2022*

123 Capaian Penilaian Penerapan GCG
- *Achievements Of GCG Assessment*

124 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- *Purpose of Good Corporate Governance Implementation*

125 Tahapan Implementasi GCG
- *GCG Implementation Stage*

125 Struktur Tata Kelola Perusahaan
- *Good Corporate Governance Structure*

127 Prinsip Tata Kelola Perusahaan
- *GCG Principle*

128 Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
- *Corporate Governance Policy*

128 Dewan Komisaris
- *Board of Commissioners*

129 Direksi
- *Board of Directors*

130 Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi, & Rapat Direksi
- *Meeting of The Board of Commissioners, Meeting of The Board of Commissioners Inviting The Board of Directors, & Meeting of The Board of Directors*

138 Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris & Direksi
- *Assessment of Performance on Board of Commissioners &Directors*

138 Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi
- *Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors*

138 Organ Penunjang Dewan Komisaris
- *Board of Commissioners Supporting Organs*

139 Organ Penunjang Dewan Direksi
- *Board of Directors Supporting Organs*

142 Sistem Pengendalian Internal
- *Internal Control System*

144 Manajemen Risiko
- *Risk Management*

146 Divisi Perusahaan
- *Company Divisions*

150 Standar Etika Perusahaan
- *Company Ethical Standards*

150 Sistem *Whistleblowing*
- *Whistleblowing System*

151 Permasalahan Hukum Perusahaan
- *Company's Law Issues*

151 Akses Informasi & Data Perusahaan
- *Access to Information & Company Data*

151 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berkelanjutan
- *Corporate Social Sustainability*

05 Laporan Keuangan

Financial Statements

158 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2022
- *Liability Statement Letter Pertaining to The Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for The Fiscal Year of 2022*

159 Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
- *The Statement of The Board of Directors Regarding The Responsibility for The Risk Management and Internal Control of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund)*

160 Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia dan Laporan Auditor Independen
- *Financial Report of Indonesia Securities Investor Protection Fund and Independent Auditor Report*

196 Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal dan Laporan Auditor Independen
- *Financial Report of Investor Protection Fund and Independent Auditor Report*

Ikhtisar Kinerja 2022

2022 Performance Summary

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlight

DESKRIPSI. *Description*	2022	2021	2020	2019	2018
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN *Profit or Loss and Other Comprehensive Income*					
PENDAPATAN. *Revenues*					
Pendapatan Jasa DPP • *Service Revenue for Investor Protection Funds*	2,523,409,804	2,581,052,852	3,405,845,509	3,504,066,704	2,569,818,043
Pendapatan Bunga • *Interest Revenue*	15,414,912,924	16,095,175,571	11,681,929,409	11,931,148,459	10,871,618,586
Jumlah Pendapatan Usaha • *Total Operating Revenues*	**17,938,322,728**	**18,676,228,423**	**15,087,774,918**	**15,435,215,163**	**13,441,436,629**
BEBAN USAHA. *Operating Expenses*					
Gaji dan Tunjangan • *Salaries and Allowances*	9,325,971,411	8,481,391,321	9,055,986,762	10,398,305,821	10,538,446,943
Beban Administrasi • *Administration Expense*	1,429,867,103	1,129,313,134	1,172,485,389	1,197,631,390	1,090,847,984
Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi • *Refinement and Socialization Expense*	3,688,133,596	3,734,980,431	1,619,809,017	1,133,975,986	742,301,118
Penyusutan • *Depreciation*	349,228,494	395,166,539	373,582,982	250,023,185	263,990,917
Pendidikan dan Pelatihan • *Education and Training*	204,140,017	135,042,935	152,119,341	202,127,426	191,302,058
Beban Konsultan • *Consultant Expense*	194,419,358	172,726,922	176,077,149	167,436,711	182,780,159
Lainnya • *Other Expenses*	73,928,790	84,347,814	90,025,033	64,470,926	46,836,043
Jumlah Beban Usaha • *Total Operating Expense*	**15,265,688,769**	**14,132,969,096**	**12,640,085,673**	**13,413,971,445**	**13,056,505,222**
LABA SEBELUM PAJAK • *Income Before Tax*	**2,672,633,959**	**4,543,259,327**	**2,447,689,245**	**2,021,243,718**	**384,931,407**
Beban Pajak • *Tax Expense*	(139,450,768)	(159,081,055)	(17,029,235)	(17,520,334)	(225,195,337)
LABA TAHUN BERJALAN • *Income for The Year*	**2,533,183,191**	**4,384,178,272**	**2,430,660,010**	**2,003,723,384**	**159,736,070**
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain • *Other Comprehensive Income (Loss)*	(5,639,215,463)	4,073,377,632	3,746,801,561	12,292,777,637	(8,118,439,775)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN • *Comprehensive Profit (Loss) for The Year*	**(3,106,032,272)**	**8,457,555,904**	**6,177,461,571**	**14,296,501,021**	**(7,958,703,705)**

LAPORAN POSISI KEUANGAN. *Financial Position*

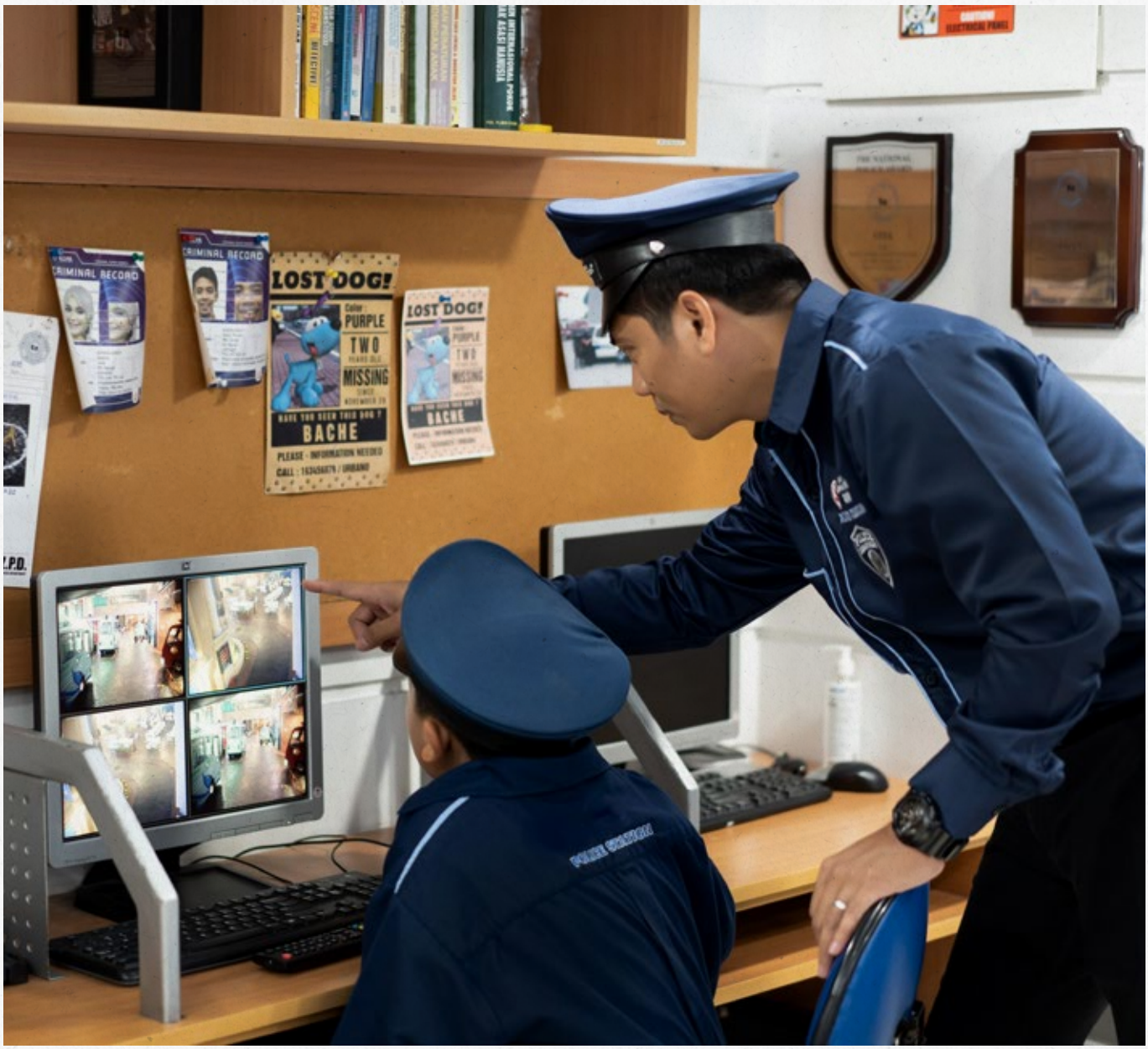
ASET. *Assets*

Kas dan Setara Kas • *Cash and Equivalent*	2,724,417,089	2,502,898,542	2,859,006,344	5,614,433,772	1,078,475,075
Piutang Usaha • *Account Receivables*	2,523,408,641	2,581,051,688	3,405,845,509	3,504,066,704	2,569,818,043
Piutang Lain-lain • *Other Receivables*	1,876,222,856	1,783,358,151	1,962,720,882	2,009,411,588	1,901,849,951
Biaya Dibayar Dimuka • *Prepaid Expenses*	1,653,917,718	596,374,095	1,516,851,992	1,213,921,625	303,668,625
Aset Keuangan Lainnya • *Other Financial Assets*	50,261,751,245	50,214,720,513	40,828,220,000	35,767,250,000	39,344,900,000
Uang Muka dan Jaminan • *Advances and Guarantees*	37,950,000	37,950,000	34,950,000	34,950,000	34,950,000
JUMLAH ASET LANCAR • *Total Current Assets*	**59,077,667,549**	**57,716,352,989**	**50,607,594,727**	**48,144,033,689**	**45,233,661,694**
Cadangan Ganti Rugi Pemodal • *Investor Compensation on Reserve*	160,449,787,899	165,152,397,338	160,789,932,000	157,169,300,000	146,869,995,000
Aset Tetap • *Fixed Asset*	522,222,924	860,809,056	1,119,863,217	688,818,483	635,826,985
Aset Pajak Tangguhan • *Deferred Tax Assets*	0	0	0	0	0
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR • *Total Non-Current Assets*	**160,972,010,823**	**166,013,206,394**	**161,909,795,217**	**157,858,118,483**	**147,505,821,985**
JUMLAH ASET • *Total Assets*	**220,049,678,372**	**223,729,559,383**	**212,517,389,944**	**206,002,152,172**	**192,739,483,679**

LIABILITAS. *Liabilities*

Utang Pajak • *Tax Payables*	357,292,014	288,381,912	77,877,321	103,883,653	214,521,682
Utang Lain-lain • *Other Payables*	83,760,464	7,448,613	1,870,000	9,062,969	51,445,515
Beban Akrual •*Accrued Expenses*	2,590,014,225	2,304,696,568	1,388,132,489	1,389,053,850	2,316,241,825
Utang Kepada Pihak Berelasi • *Payable to Related Parties*	880,596,469	1,642,806,863	2,932,494	2,979,155	2,979,155
Liabilitas Sewa • *Rent Liabilities*	97,791,055	90,646,505	82,641,578	0	0
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK • *Total Short-Term Liabilities*	**4,009,454,227**	**4,333,980,461**	**1,553,453,882**	**1,504,979,627**	**2,585,188,177**
Utang Kepada Pihak Berelasi • *Payable to Related Parties*	0	0	0	150,000,000,000	150,000,000,000
Cadangan Imbalan Kerja • *Employee Benefit Reserves*	0	154,272,990	89,539,529	64,291,968	17,915,946
Liabilitas Sewa • *Rent Liabilities*	78,358,364	173,407,879	264,054,384	0	0
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG • *Total Long-Term Liabilities*	**78,358,364**	**327,680,869**	**353,593,913**	**150,064,291,968**	**150,017,915,946**
Modal Saham • *Capital Stock*	210,000,000,000	210,000,000,000	210,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000
Laba Ditahan (Defisit) • *Retained Earnings (Deficit)*	5,961,865,781	9,067,898,053	610,342,149	(5,567,119,422)	(19,863,620,444)
JUMLAH EKUITAS • *Total Equity*	**215,961,865,781**	**219,067,898,053**	**210,610,342,149**	**54,432,880,578**	**40,136,379,556**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS • *Total Liabilities and Equity*	**220,049,678,372**	**223,729,559,383**	**212,517,389,944**	**206,002,152,173**	**192,739,483,679**

DESKRIPSI. *Description*	2022	2021	2020	2019	2018
PROFITABILITAS. *Profitabilities*					
Tingkat Pengembalian Aset • *Return on Asset (ROA)*	1.15%	1.96%	1.14%	0.97%	0.08%
Tingkat Pengembalian Ekuitas • *Return on Equity (ROE)*	1.17%	2.00%	1.15%	3.68%	0.40%
Marjin Laba Bersih • *Net Profit Margin*	14.12%	23.47%	16.11%	12.98%	1.19%
Marjin Laba/(Rugi) Kotor • *Gross Profit Margin*	14.90%	24.33%	16.22%	13.10%	2.86%
Pertumbuhan Pendapatan • *Revenue Growth*	(3.95%)	23.78%	(2.25)	14.83%	9,66%
LIKUIDITAS. *Liquidity*					
Rasio Lancar • *Current Ratio*	14.73x	13.32x	32.58x	31.99x	17.50x
Rasio Kas • *Cash Ratio*	0.68x	0.58x	1.84x	3.73x	0.42x
Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset • *Ratio of Working Capital to Total Asset*	0.25x	0.24x	0.23x	0.23x	0.22x
RASIO LIABILITAS. *Leverage Ratios*					
Rasio Total Liabilitas • *Total Liabilities Ratio*	1.86%	2.08%	0.90%	73.58%	79.18%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas • *Liability to Equity Ratio*	0.02x	0.02x	0.01x	2.78x	3.80x
Rasio Liabilitas Terhadap Aset • *Liability to Asset Ratio*	0.02x	0.02x	0.01x	0.74x	0.79x
Rasio Liabilitas Jangka Panjang • *Long-Term Liability Ratio*	0.04%	0.15%	0.17%	73.38%	78.89%
RASIO PERPUTARAN. *Turnover Ratios*					
Rasio Perputaran Aset • *Asset Turnover Ratio*	8.15%	8.35%	7.10%	7.49%	6.97%
Rasio Perputaran Modal Kerja • *Working Capital Turnover Ratio*	32.57%	34.99%	30.76%	33.10%	31.52%
Rasio Perputaran Aset Jangka • *Long-Term Asset Turnover Ratio*	34.35x	21.70x	13.47x	22.41x	21.14x
TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN. *Employee Productivity Level*					
Pendapatan (Rp) • *Revenue (Rp)*	17,938,322,728	18,676,228,423	15,087,774,918	13,441,436,629	12,257,365,799
Jumlah Karyawan (orang) • *Number of Employees (person)*	11	11	9	13	13
Produktivitas per karyawan (Rp/orang) • *Productivity per employee (Rp/person)*	1,630,756,612	1,697,838,948	1,676,419,435	1,033,956,664	942,874,292



Ikhtisar Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

Investors Protection Fund Highlights

DESKRIPSI. *Description*	2022	2021	2020	2019	2018
Bank • Bank	**85,068,030**	101,828,206	234,200,591	33,615,606	21,729,174
Deposito Berjangka • Time Deposit	**138,652,721,091**	195,408,746,584	200,210,100,502	166,631,206,602	129,260,443,698
Surat Berharga Negara • Government Securities	**125,037,770,000**	42,009,935,000	16,592,535,000	24,993,750,000	33,129,350,000
Piutang Bunga • Interest Receivables	**1,683,710,504**	894,019,419	865,349,975	920,991,746	856,425,261
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal • IPF Membership Receivables	**0**	2,994,684	28,259,678	9,327,137	0
Liabilitas • Liabilities	**(2,526,987,148)**	(2,582,244,518)	(3,406,396,673)	3,504,066,704)	(2,569,818,043)
Aset Bersih • Net Asset	**262,932,282,477**	235,835,279,375	214,524,049,073	189,084,824,388	160,698,130,090

Jejak Langkah

2007

- Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

  The Bapepam-LK Study Team conducted further research on the establishment of a Capital Protection Fund in the Indonesian Capital Market Industry.

2010

- Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam *Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014, pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

  The Ministry of Finance set out a plan to establish a program to establish a Capital Protection Fund in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010-2014, in Strategy 5 program 2 regarding the establishment of a Investor Protection Fund.

2012

- *Technical Assistant* dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian *New Company* sebagai wadah Pada Perlindungan Investor.

  Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

- Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.

  Hiswara Legal Consultant Bunjamin Tanjung recommends several Legal Aspects of Investor Protection.

- Akta Pendirian PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) Nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai Perseroan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.

  P3IEI Establishment Deed Number 16 from Notary Ashoya Ratam as a company that runs the Investor Protection Fund program.

- SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

  Decree of the Minister of Law and Human Rights Number: AHU-64709.AH.01.01. 2012 concerning the Company's Legal Entity.

2013

- Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013 .

  The granting of a business license for the Provider of IPF Institution (PDPP) to Indonesia SIPF has the authority as an IPF Institution based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority number 43 / D.04 / 2013

- Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

  Inauguration of Indonesia SIPF by Nurhaida as the Chief Executive of the OJK Capital Market Supervisor.

- Penerapan Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

  Implementation of Bapepam-LK Regulation number VI.A.4 regarding Financing Protection Funds and VI.A.5 concerning Providers of Investor Protection Funds.

Milestones

2014

- P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.

  Indonesia SIPF began to fully operate as an IPF Institution.

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015

  Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) Indonesia SIPF in the framework of approval of the increase in paid up capital and approval of the 2015 RKAT

2015

- Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah).

  Agreement on the Provision of Investor Compensation Reserves (CGRP) between PT Indonesia Stock Exchange (BEI), PT Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (IDClear), PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and PT Indonesia Securities Investor Protection Program Provider (Indonesia SIPF). The realization of the use of CGRP is only carried out by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to pay the compensation of the Investor worth IDR150,000,000,000 (one hundred and fifty billion rupiah).

- Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp100 juta per pemodal atau naik 300% dari Rp25 juta per pemodal dan Rp50 miliar per Kustodian.

  Decree of OJK Board of Commissioners No. 46 / D.04 / 2015 concerning the Determination of the Highest Limitation for Every Investor and Each Custodian in the context of Payment of Compensation to Investors by Using the Investor Protection Fund. The highest limit of investor compensation is set at IDR100 million per Investor or an increase of 300% from IDR25 million per Investor and IDR50 billion per Custodian.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30/SEOJK.04/2015 tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal.

  Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK) Number 30/SEOJK.04/2015 concerning Custodian Bank Membership Fees for Investor Protection Funds.

2016

- Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.

  The joining of the Custodian Bank as a IPF Member and the scope of protection in the form of Securities and Funds.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

  Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds and POJK No. 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds.

- Restrukturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.

  Restructuring of Investor Compensation Reserve Funds for the continuity of the Company's business.

- Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

  Increase management fees for investment in IPF from 10% (ten percent) to 30% (thirty percent) of the net income from investment.

Jejak Langkah

2017

- Pelaksanaan strategi eksternalisasi konsep perlindungan pemodal

  Implementation of the strategy of externalizing the concept of investor protection

- Restrukturisasi organisasi Perusahaan

  P3IEI / Indonesia SIPF company organization restructuring

- Pengesahan Penyempurnaan Pedoman *Good Corporate Governance*

  Ratification of the Improvement of Good Corporate Governance Guidelines

- Prosedur Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal *(Helpdesk)*

  Procedures for Consultation and Investor Complaints (Helpdesk)

2018

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan DPP

  Completion of proposals regarding IPF Improvement Strategy

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Perluasan Instrumen Investasi CGRP (Cadangan Ganti Rugi Pemodal)

  Completion of proposals related to the Investor Compensation Reserve Funds (CGRP) Investment Instrument Expansion Strategy

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan Batasan Maksimal Ganti Rugi DPP

  Completion of proposals related to the IPF Maximum Limitation Compensation Limiting Strategy

- Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.

  Conducting a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members.

- Penetapan nilai-nilai budaya Perusahaan yang baru yaitu “I – PROTECT” ***(integrity, professionalism, teamwork, customer focus)***

  Determination of the Company's new cultural values, namely "I - PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)

- Kunjungan dan sosialisasi ke 49 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yang bekerjasama dengan APEI dan KP BEI.

  Visitation and socialization to 49 IPF members and to the Indonesia Stock Exchange Representative Office (KP BEI) in Jakarta, West Java, North Sulawesi, North Sumatra, West Sumatra and Riau Islands in collaboration with APEI and KP BEI.

- Distribusi materi sosialisasi dan literasi perlindungan pemodal melalui DPP ke 30 Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan 150 Galeri Investasi di seluruh Indonesia.

  Distribution of information dissemination and investor protection through IPF to 30 Indonesian Stock Exchange Representative Offices and 150 Investment Galleries throughout Indonesia.

- Pelaksanaan penilaian tata kelola perusahaan *(self assessment GCG)* pertama kali

  First corporate governance assessment (GCG self assessment)

Milestones

2019

- Penambahan Anggota Baru DPP, menjadi 128 anggota yang terdiri atas 106 PPE dan 22 Bank Kustodian. Pada tahun 2019 terdapat penambahan empat anggota DPP yang terdiri atas satu PPE dan tiga Bank Kustodian yakni;
  - PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
  - PT Bank Syariah Mandiri (BK)
  - PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
  - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK)

  Addition of New IPF Members, to 128 members consisting of 106 Securities Broker Dealers and 22 Custodian Banks. In 2019 there were an additional four IPF members consisting of one Securities Broker Dealer and three Custodian Banks namely;
  - *PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)*
  - *PT Bank Syariah Mandiri (BK)*
  - *PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)*
  - *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK)*
- Nilai DPP pada tahun 2019 mencapai Rp189,08 miliar.

  IPF value in 2019 reached IDR189.08 billion.
- Kunjungan dan sosialisasi ke 38 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Pontianak, Solo, Aceh, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, dan Makassar. Kemudian ada juga pelaksanaan sosialisasi Bersama APEI, KSEI, SPM BEI, dan PT Indo Premier Sekuritas.

  Visitation and socialization to 38 IPF members and to the Indonesia Stock Exchange Representative Offices (KP BEI) in Pontianak, Solo, Aceh, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, and Makassar. Then there is also the joint socialization of APEI, KSEI, SPM BEI, and PT Indo Premier Sekuritas.
- Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Integrated Data Service (IDS), Human Resources Information System (HRIS), Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS), dan Sistem Monitoring

  Implementation of operational support systems namely Integrated Data Service (IDS), Human Resources Information System (HRIS), Letter Archive Management Information System (SIPAS), and Monitoring System
- Evaluasi penerapan tata kelola Perusahaan (*self assessment* GCG)

  Evaluate the implementation of corporate governance (GCG self-assessment)
- Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga Investor Protection Fund (IPF) regional yaitu Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - Amerika, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Jepang dan Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.

  Building institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions namely the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - America, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Japan and the Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.
- Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP

  Conducting a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members

Jejak Langkah

2020

- Nilai DPP pada tahun 2020 mencapai Rp214,52 miliar.

  The IPF value in 2020 will reach IDR214.52 billion.

- Pergantian Direksi Perusahaan untuk periode 2020-2022

  Change of the Company's Board of Directors for the period 2020-2022

- Penyelesaian Kajian Strategis Perusahaan:
  1. Kajian Evaluasi Penyempurnaan Model Bisnis dan Kelembagaan Perlindungan Pemodal;
  2. Kajian Perluasan Perlindungan Investor *Equity Crowdfunding* dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif;
  3. Kajian Alternatif Kontribusi DPP;
  4. Kajian Kesiapan Menjadi Administrator Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI).

  Completion of the Company's Strategic Review:
  1. *Evaluation Study on the Improvement of Investor Protection Business Models and Institutions;*
  2. *The Study on the Expansion of Investor Equity Crowdfunding Protection and Collective Investment Contract Mutual Funds;*
  3. *Study of Alternative IPF Contribution;*
  4. *Readiness Study to Become Administrator of the Disgorgement Fund.*

- Pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama Anggota DPP, 9 (sembilan) kegiatan bersama Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Palu, Jambi, Riau, Jawa Barat, Bali, NTB, Aceh, Bengkulu, dan Jawa Timur. Kemudian ada juga pelaksanaan sosialisasi Bersama KSEI, SPM BEI, dan TICMI.

  Implementation of 4 (four) socialization and education activities with IPF members, 9 (nine) activities with the Indonesia Stock Exchange Representative Office (IDX KP) in Palu, Jambi, Riau, West Java, Bali, NTB, Aceh, Bengkulu and East Java. Then there was also the implementation of joint socialization with KSEI, SPM BEI, and TICMI.

- Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Sistem Monitoring Kinerja Perusahaan dan Sistem Informasi Perusahaan yang Terintegrasi, Implementasi Portal Keanggotaan DPP, serta infrastruktur penunjang *work from home* (WFH).

  Implementation of operational support systems, namely the Company Performance Monitoring System and Integrated Company Information Systems, Implementation of IPF Membership Portal, and work from home (WFH) supporting infrastructure.

- Pengembangan dan implementasi layanan pengaduan pemodal melalui fitur *Whatsapp Business.*

  Development and implementation of investor complaint services through the Whatsapp Business feature.

- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP

  Evaluation and refinement of the IPF Investment Instrument Policy

- Konversi dana CGRP dari pinjaman menjadi modal.

  Converting CGRP funds from loans to capital.

- Penyusunan Kebijakan dan Prosedur *Business Continuity Management* (BCM).

  Formulation of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.

- Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG).

  Implementation of the Recommendations for the Evaluation of Good Corporate Governance (GCG).

- Pelaksanaan *courtesy meeting* dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - Amerika Serikat dalam rangka Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga Investor Protection Fund (IPF) regional.

  Conducted a courtesy meeting with the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - United States in order to build institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions.

- Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.

  Conducting Surveys on the Level of Understanding of Investor Protection for Investors, Prospective Investors and IPF Members.

- Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Sustainability* (CSS) Tahun 2020 yang turut melibatkan Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia terbaik di seluruh wilayah Indonesia.

  Implementation of 2020 Corporate Social Sustainability (CSS) activities which involved the best Indonesia Stock Exchange Investment Galleries in all regions of Indonesia.

- Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim Ganti Rugi atas Kehilangan Aset Pemodal yang turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Self-Regulatory Organization* (SRO), Anggota DPP, dan Pemodal.

  Implementation of the simulation for handling claims for compensation for lost investor assets, which involved the Financial Services Authority (OJK), the Self-Regulatory Organization (SRO), IPF members, and investors.

- Penetapan Iuran Keanggotaan Awal, Iuran Tahunan, serta penyesuaian Prosedur Operasional Standar bagi Anggota DPP berupa Perusahaan Efek Daerah (PED) yang termasuk sebagai PPE.

  The determination of Initial Membership Fees, Annual Fees, and adjustments to Standard Operating Procedures for IPF Members in the form of Regional Securities Companies (PED), which are included as Securities Broker-Dealers (PPE).

Milestones

2021

- Nilai DPP pada tahun 2021 mencapai Rp235,84 miliar.

  The value of IPF in 2021 reached IDR235.84 billion.

- Peningkatan besaran maksimal ganti rugi pemodal dari semula Rp100 juta / pemodal dan Rp50 miliar / kustodian menjadi Rp200 juta / pemodal dan Rp100 miliar / kustodian.

  Increase in the maximum amount of compensation for investors from the original IDR100 million / investor and IDR50 billion / custodian to IDR200 million / investor and IDR100 billion / custodian.

- Penyelesaian Kajian Strategis Perusahaan:
  1. Kajian dan Usulan Perubahan Ketentuan Terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP;
  2. Laporan Tindaklanjut Hasil Kajian Kesiapan Menjadi Administrator DKKI;
  3. Kajian Alternatif Instrumen Investasi DPP.

  Completion of the Company's Strategic Review:
  1. *Study and Proposed Changes to Provisions Related to Increasing the Coverage of IPF Protection;*
  2. *Follow-up report on the results of the Readiness Study to become the Administrator of Disgorgement Fund (DF);*
  3. *Study of Alternative IPF Investment Instruments.*

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama Anggota DPP, 19 (sembilan belas) kegiatan bersama Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) dan Galeri Investasi BEI.

  Implementation of socialization and education activities with IPF Members, 19 (nineteen) joint activities with the Indonesia Stock Exchange Representative Office (KP BEI) and the IDX Investment Gallery.

- Pelaksanaan 21 (dua puluh satu) kegiatan literasi bersama OJK, SRO, dan Anak Usaha Lain.

  Implementation of 21 (twenty one) literacy activities with OJK, SRO, and Other Subsidiaries.

- Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Sistem Manajemen Informasi Perusahaan, Sistem Manajemen Dokumen dan Rekaman versi 2, dan *Backup Server* secara *co-location*.

  Implementation of operational support systems, namely Company Information Management System, Document and Records Management System version 2, and co-location Backup Server.

- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.

  Evaluation and improvement of IPF Investment Instrument Policy.

- Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur *Business Continuity Management* (BCM).

  Improvement of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.

- Pelaksanaan Evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG).

  Implementation of Good Corporate Governance (GCG) evaluation.

- Pelaksanaan *event* internasional yang bekerjasama dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - Amerika Serikat dan TICMI dengan tema *"Capital Market International Conference"*.

  Implementation of an international event in collaboration with the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - United States and TICMI with the theme "Capital Market International Conference".

- Pelaksanaan *courtesy meeting* dengan Canadian Investor Protection Fund (CIPF) dalam rangka menjalin hubungan baik dan membahas potensi kerjasama yang dapat dilakukan.

  Conducted a courtesy meeting with the Canadian Investor Protection Fund (CIPF) to establish good relations and discuss potential collaborations.

- Ikut serta dalam Forum Internasional Lembaga Perlindungan Investor yang juga diikuti oleh Canadian Investor Protection Fund (CIPF/Kanada), Securities Investor Protection Corporation (SIPC/ Amerika Serikat), Japan Investor Protection Fund (JIPF/Jepang), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC/Australia), Financial Services Compensation Scheme (FSCS/Inggris), European Investor Compensation Company DAC (ICCL), dan FOGAIN (Spanyol).

  Participated in the International Forum of Investor Protection Institutions which was also attended by Canadian Investor Protection Fund (CIPF/Canada), Securities Investor Protection Corporation (SIPC/United States), Japan Investor Protection Fund (JIPF/Japan), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC) /Australia), Financial Services Compensation Scheme (FSCS/UK), European Investor Compensation Company DAC (ICCL), and FOGAIN (Spain).

- Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.

  Implementation of a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members.

- Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Sustainability* (CSS) Tahun 2021 yang turut melibatkan Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia terbaik di seluruh wilayah Indonesia.

  Implementation of the 2021 Corporate Social Sustainability (CSS) activities which also involved the best Indonesia Stock Exchange Investment Galleries in all regions of Indonesia.

- Pelaksanaan program pengembangan kompetensi, sertifikasi dan *gathering* bersama Anggota DPP.

  Implementation of competency development programs, certification and gatherings with IPF Members.

Jejak Langkah

Milestones

2022

- Nilai DPP pada tahun 2022 mencapai Rp262,93 miliar.

  The IPF value in 2022 reached IDR262.93 billion.

- Penyelesaian Rencana Strategis Perusahaan:
  1. Laporan Tindak Lanjut Kajian dan Usulan Perubahan Ketentuan Terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP;
  2. Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Distribusi DPP;
  3. Tindaklanjut Pemenuhan Kesiapan Menjadi Administrator DKKI;
  4. Penyusunan Konsep dan Usulan Pelaksanaan Simulasi Administrator DKKI;
  5. Studi Kelayakan Pengembangan Klaim *Online*;
  6. Kajian Alternatif Instrumen Investasi DPP.

  Completion of the Company's Strategic Plan:
  1. *Follow-up Report on the Study and Proposal for Amendments to Provisions Related to Increasing the IPF's Protection Coverage;*
  2. *Study of the Application of Sharia Principles in the Management and Distribution of IPF;*
  3. *Follow up on Fulfillment of Readiness to Become Administrator of DF;*
  4. *Drafting the Concept and Proposal for Implementation of the DF Administrator Simulation;*
  5. *Feasibility Study on Online Claim Development;*
  6. *Reviewed Alternatives of DPP Investment Instruments.*

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk *Training of Trainer* kepada perwakilan 73 (tujuh puluh tiga) Anggota DPP.

  Implementation of outreach and education activities in the form of Training of Trainers to 73 (seventy-three) IPF Members representatives.

- Pelaksanaan 43 (empat puluh tiga) kegiatan literasi bersama OJK, SRO, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI), Galeri Investasi BEI, Anak Usaha Lain, dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

  Implementation of 43 (forty-three) literacy activities with OJK, SRO, Indonesia Stock Exchange Representative Office (KP IDX), IDX Investment Gallery, Other Subsidiaries, and Other Stakeholders.

- Penyempurnaan Sistem Pemantauan Kinerja, Sistem Pemantauan Investasi, dan Pengembangan Sistem Pemantauan Beban dan Penyerapan Anggaran.

  Improvement of Performance Monitoring System, Investment Monitoring System, and Development of Expense Monitoring System and Budget Absorption.

- Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.

  Evaluation and improvement of the IPF Investment Instrument Policy.

- Penyusunan Pedoman Perusahaan seperti Pedoman Pengelolaan Investasi, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi, dan Pembaruan Prosedur Operasional Perusahaan seperti Prosedur Administrasi Keanggotaan DPP, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur Pengelolaan Aset Perusahaan, Prosedur Perpajakan, dan Prosedur Operasional Teknologi Informasi.

  Compilation of Company Guidelines such as Guidelines for Investment Management, Guidelines for Managing Conflict of Interest, Guidelines for Gratification Control, and Updating Company Standard Operational Procedures such as Procedures for DPP Membership Administration , Procedures for Procurement of Goods and Services, Procedures for Asset Management, Procedures for Taxation, and Procedures for Information Technology - Operational.

- Pelaksanaan Evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG).

  Evaluation of Good Corporate Governance (GCG).

- Penyusunan Materi Perlindungan Investor Bersama OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang digunakan dalam *Learning Management System* (LMS) OJK.

  Preparation of OJK Joint Investor Protection Materials in the Field of Consumer Education and Protection used in the OJK Learning Management System (LMS).

- Pelaksanaan *event* internasional yang bekerjasama dengan Canadian Investor Protection Fund (CIPF) – Kanada dan salah satu anak usaha *Self-Regulatory Organization* (SRO) The Indonesia Capital Market Institution (TICMI) dengan tema *"Capital Market International Conference"* sebagai *side-event* Presidensial G20 didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

  Organized international event in collaboration with the Canadian Investor Protection Fund (CIPF) – Canada and TICMI with the theme "Capital Market International Conference" as a side-event of G20 Presidency supported by Financial Service Authority (FSA/OJK).

- Ikut serta dalam Pertemuan Tahunan Forum Internasional Lembaga Perlindungan Investor yang dikukan secara daring *(online)* yang juga diikuti oleh Association of German Banks (BdB), BSM Market Supervision (Brazil), CIPF & MFDA Investor Protection Corporation, Financial Services Compensation Scheme (FSCS), Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN/ Spanyol), Indonesia SIPF, The Investor Compensation Company DAC, Japan Investor Protection Fund (JIPF), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC), Securities and Futures Investors Protection Center (Taiwan), dan Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

  Participated in the Annual Meeting of the International Forum of Investor Protection Institutions which is held online which is also attended by the Association of German Banks (BdB), BSM Market Supervision (Brazil), CIPF & MFDA Investor Protection Corporation, Financial Services Compensation Scheme (FSCS)), Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN/Spain), Indonesia SIPF, The Investor Compensation Company DAC, Japan Investor Protection Fund (JIPF), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC), Securities and Futures Investors Protection Center (Taiwan), and Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

- Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan dan Keyakinan Pemodal Terhadap Mekanisme Perlindungan di Pasar Modal.

  Carried out Investor Satisfaction and Confidence Survey on Protection Mechanisms in the Capital Market.

- Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan Anggota DPP atas Layanan yang Diberikan Perusahaan.

  Carried out IPF Member Satisfaction Level Survey on the Services Provided by the Company.

- Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Sustainability* (CSS) Tahun 2022 yang turut melibatkan Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia terbaik di seluruh wilayah Indonesia.

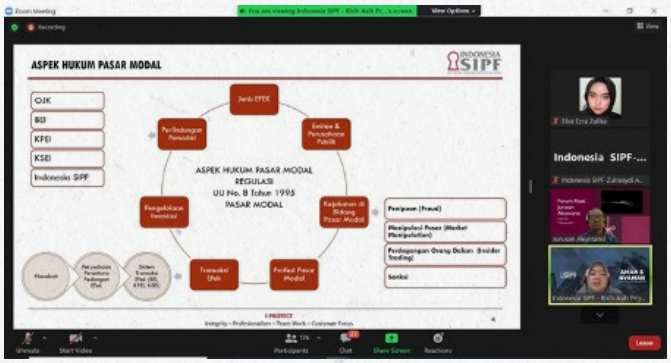
  Implementation of Corporate Social Sustainability (CSS) which involved the best Indonesian Stock Exchange Investment Galleries (KP BEI) in all regions of Indonesia.

- Pelaksanaan program pengembangan kompetensi dan *gathering* bersama Anggota DPP.

  Implementation of competency development programs and gatherings with IPF Members.

Peristiwa Penting 2022

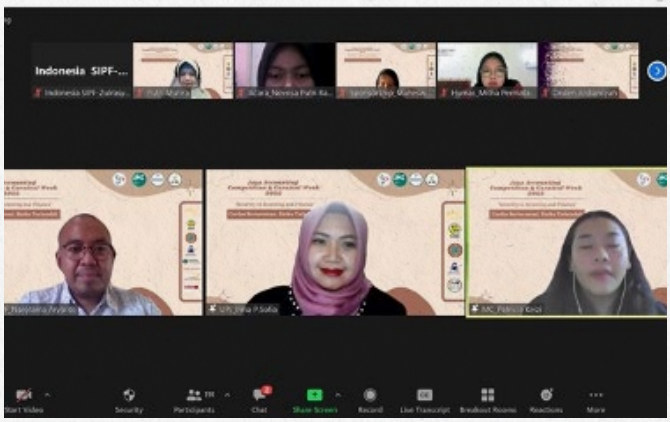
Important Events 2022



8 Februari 2022
February 8, 2022

Sosialisasi dan Edukasi pada Politeknik Negeri Jakarta
Socialization and Education at the Politeknik Negeri Jakarta





22 Februari 2022
February 22, 2022

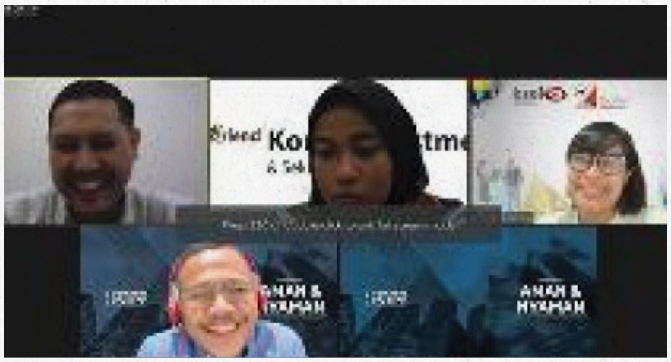
Narasumber dalam JACC WEEK 2022 Universitas Pembangunan Jaya
Guest Speaker at JACC WEEK 2022 at Pembangunan Jaya University



2 Maret 2022
March 2, 2022

IG Live Bersama KP BEI Sulawesi Utara dan Universitas Sam Ratulangi dengan tema "Kenali Risikonya, Pahami Investasinya"

IG Live with KP IDX North Sulawesi and Sam Ratulangi University with the theme "Know the Risk, Understand the Investment"



8 Maret 2022
March 8, 2022

Narasumber dalam Sekolah Pasar Modal: Mekanisme Perlindungan Investor di Pasar Modal Indonesia

Guest Speaker in Capital Markets School: Investor Protection Mechanisms in the Indonesian Capital Market

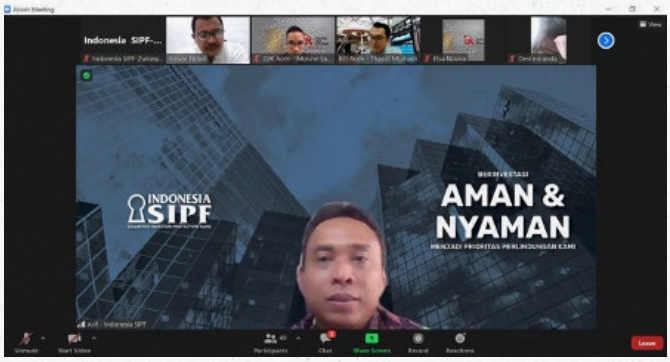


11 Maret 2022
March 11, 2022

Narasumber dalam Sekolah Pasar Modal Reguler yang diselenggarakan KP BEI NTT dan PT Phintraco Sekuritas

Guest Speaker at the Regular Capital Market School organized by the KP IDX NTT and PT Phintraco Sekuritas





21 Maret 2022
March 21, 2022

Narasumber Dalam SPM Yang Diselenggarakan Bersama OJK Regional Aceh dan KP BEI Aceh

Guest Speaker in the SPM held jointly with the OJK Regional Aceh and KP IDX Aceh



22 Maret 2022
March 22, 2022

Narasumber dalam Sekolah Pasar Modal Reguler yang diselenggarakan KP BEI Aceh dan PT Indo Premier Sekuritas

Guest Speaker at the Regular Capital Market School organized by the KP IDX Aceh and PT Indo Premier Sekuritas



26 Maret 2022
March 26, 2022

Narasumber Dalam Kegiatan Webinar ITB Investment

Guest Speaker in ITB Investment Webinar Activities



27 Maret 2022
March 27, 2022

Narasumber dalam webinar *Financial Talk Series*: Menjadi Lebih dari Sekedar Karyawan dengan Investasi yang diselenggarakan PT PLN

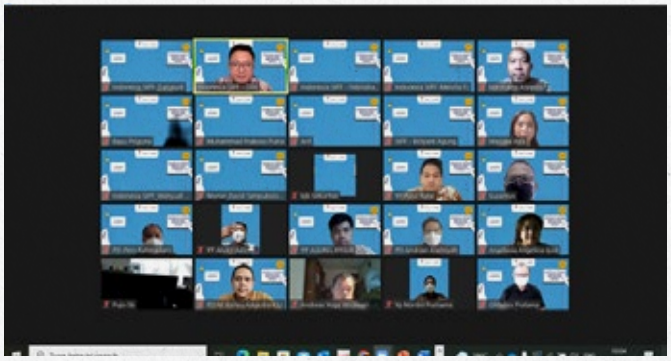
Guest Speaker in the webinar Financial Talk Series: Becoming More Than Just Employees with Investments held by PT PLN



14 April 2022
April 14, 2022

Investor Gathering dengan *partner* PT Indo Premier Sekuritas

Investor Gathering with partner PT Indo Premier Sekuritas



20 April, 18 & 31 Mei, 15 & 29 Juni 2022
April 20, 18 & May 31, June 15 & 29 2022

Training of Trainers Anggota DPP

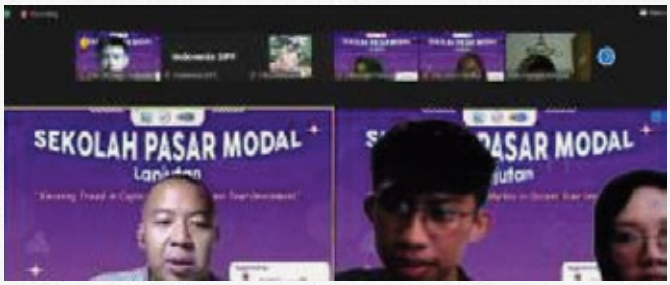
Training of Trainers to IPF members



26 April 2022
April 26, 2022

Narasumber dalam webinar yang diselenggarakan KP BEI Jakarta dan Universitas Tarumanegara dengan tema "Kenyamanan Berinvestasi dan Perlindungan Investor"

Guest Speaker in a webinar organized by the KP IDX Jakarta and Tarumanegara University with the theme "Convenience in Investing and Investor Protection"



27 Mei 2022
Mei 27, 2022

Narasumber Sekolah Pasar Modal ynag diselenggarakan KP BEI Jakarta dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dengan tema *"Knowing Fraud in Capital Market to Secure Your Investment"*

Guest Speaker at the Capital Market School organized by the KP IDX Jakarta and the Jakarta State Polytechnic (PNJ) with the theme "Knowing Fraud in Capital Market to Secure Your Investment"

28 Mei 2022
Mei 28, 2022

INDONESIA SIPF

Narasumber Sekolah Pasar Modal dengan KP BEI Yogyakarta dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Guest Speaker at the Capital Market School with KP BEI Yogyakarta and PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia



15 Juni 2022
June 15, 2022

Narasumber dalam "Forum Calon Investor: Ajak Generasi Milenial Melek Investasi di Pasar Modal Syariah" diselenggarakan oleh Galeri Investasi BEI Universitas Muhammadiyah Makassar

Guest Speaker in the "Prospective Investor Forum: Encouraging the Millennial Generation to be Literate on Investment in the Sharia Capital Market" organized by the IDX Investment Gallery, University of Muhammadiyah Makassar





21 Juni 2022
June 21, 2022

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2022

Annual General Meetings of Shareholders (GMS) 2022



24 Juni 2022
June 24, 2022

Narasumber dalam Sekolah Pasar Modal Reguler yang diselenggarakan KP BEI Kalimantan Tengah dan PT Phintraco Sekuritas

Guest Speaker at the Regular Capital Market School organized by the KP IDX Central Kalimantan and PT Phintraco Sekuritas



28 Juni 2022
June 28, 2022

Narasumber dalam Seminar Pasar Modal yang diselenggarakan KP BEI Sulawesi Selatan dan Galeri Investasi BEI Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tema "Strategi Investasi Saham Syariah di Era Digital"

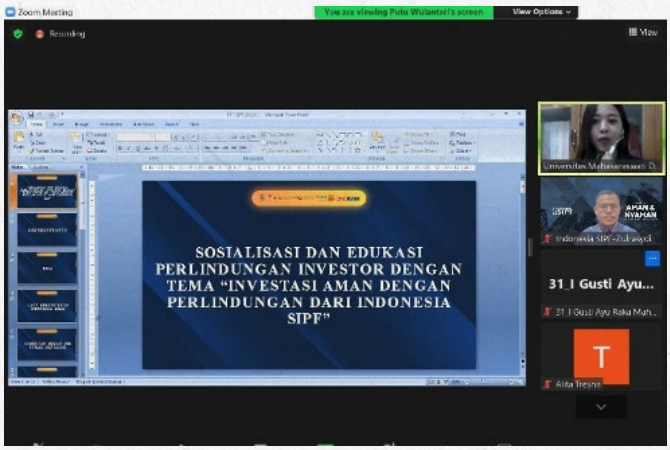
Guest Speaker at the Capital Market Seminar organized by the KP IDX South Sulawesi and the IDX Investment Gallery at the University of Muhammadiyah Makassar with the theme "Sharia Stock Investment Strategy in the Digital Age"



30 Juni 2022
June 24, 2022

Narasumber dalam webinar "Belajar Pasar Modal: Cerita Tentang SIPF" yang diselenggarakan KP BEI Kalimantan Selatan

Guest Speaker in the webinar "Learning Capital Markets: Stories About SIPF" held by KP IDX South Kalimantan



11 Juli 2022
July 11, 2022

Narasumber dalam webinar "Investasi Aman dengan Perlindungan dari Indonesia SIPF" yang diselenggarakan Galeri Investasi BEI Universitas Mahasaraswati

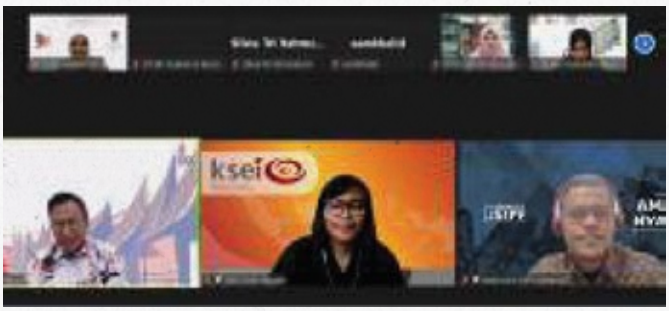
Guest Speaker in the webinar "Safe Investment with Protection from Indonesia SIPF" organized by the Mahasaraswati University IDX Investment Gallery



19 Juli 2022
July 19, 2022

Narasumber dalam Sekolah Pasar Modal Digital Level 1 yang diselenggarakan KP BEI Bangka Belitung dan PT Indo Premier Sekuritas

Guest Speaker at the Level 1 Digital Capital Market School organized by the IDX Bangka Belitung and PT Indo Premier Sekuritas



11 Agustus 2022
August 11, 2022

Narasumber dalam Sekolah Pasar Modal yang diselenggarakan KP BEI Sumatera Barat dan KSEI dengan tema "Perlindungan Investor Pasar Modal"

Guest Speaker at the Capital Market School organized by the IDX West Sumatera and KSEI with the theme "Capital Market Investor Protection"



29 Juli 2022
July 29, 2022

IG Live Bersama PT Maybank Sekuritas Indonesia dengan tema "Perlindungan Aset Investor Bersama Indonesia SIPF"

IG Live with PT Maybank Sekuritas Indonesia with the theme "Protection of Investor Assets with Indonesia SIPF"



11 Agustus 2022
August 11, 2022

IG Live Bersama KP BEI Sulawesi Utara, KSEI, PT Jasa Utama Capital Sekuritas dengan tema "Keamanan Ganda di Pasar Modal Indonesia"

IG Live with KP BEI North Sulawesi, KSEI, PT Jasa Utama Capital Sekuritas with the theme "Double Security in the Indonesian Capital Market"



11 Agustus 2022
August 11, 2022

Narasumber dalam Seminar Edukasi Pengenalan Lembaga-Lembaga di Pasar Modal Indonesia bersama KP BEI Jawa Timur

Guest Speaker in an Educational Seminar on Introduction to Institutions in the Indonesian Capital Market with the KP IDX East Java



18 Agustus 2022
August 18, 2022

Narasumber dalam Forum Investor dan *Workshop* Wartawan yang diselenggarakan KP BEI Sumatera Barat

Guest Speaker at the Investor Forum and Journalist Workshop held by the KP IDX West Sumatera



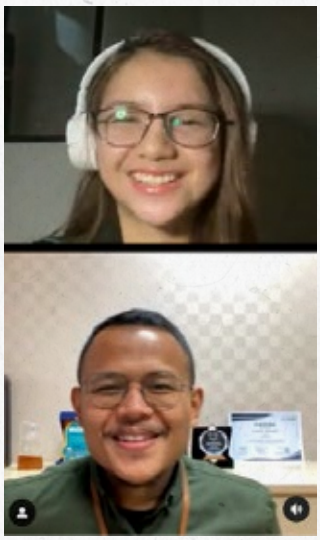




26-27 Agustus 2022
August 26-27, 2022

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu melalui Gebyar Pasar Modal 2022 Di Manado, Sulawesi Utara

Socialization and Education of the Integrated Capital Market through the 2022 Capital Market Festival in Manado, North Sulawesi



14 September 2022
September 14, 2022

IG Live Bersama KSPM Universitas Sam Ratulangi *"How SIPF Protect Your Investment"*

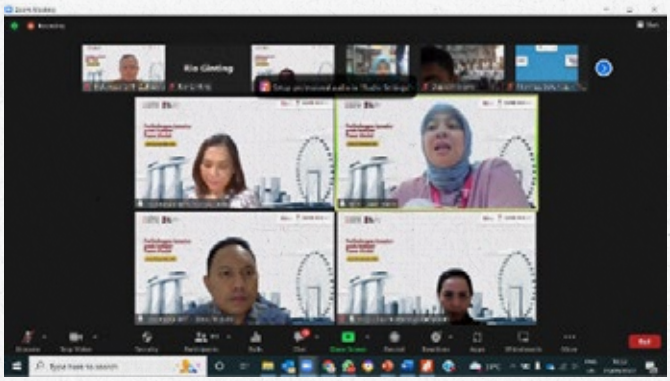
IG Live with KSPM Sam Ratulangi University "How SIPF Protect Your Investment"



21 September 2022
September 21, 2022

Webinar IPM 2022 "Komitmen Regulator dalam Menciptakan Pasar Modal yang Aman dan Terpercaya"

IPM 2022 Webinar "Regulatory Commitment in Creating a Safe and Reliable Capital Market"



23 September 2022
September 23, 2022

Webinar IPM 2022 "Perlindungan Investor pada Industri Pasar Modal"

IPM 2022 Webinar "Investor Protection in the Capital Market Industry"



26 September 2022
September 26, 2022

Narasumber dalam webinar "Investasi Cuan, Waspadai Penipuan" yang diselenggarakan KP BEI Jawa Barat dan OJK Regional Jawa Barat

Guest Speaker in the webinar "Investing Cash, Beware of Fraud" held by IDX KP West Java and the West Java Regional OJK



3 Oktober 2022
October 3, 2022

Narasumber dalam webinar "Investasi Aman di Pasar Modal Indonesia" yang diselenggarakan KP BEI Sulawesi Tengah dan OJK Sulawesi Tengah

Guest Speaker in the webinar "Safe Investment in the Indonesian Capital Market" organized by the Central Sulawesi IDX KP and Central Sulawesi OJK





5 Oktober 2022
October 5, 2022

Edukasi Pasar Modal dan Inklusi 1000 Investor Bersama KP BEI Sumatera Utara, PT Phintraco Sekuritas, GI BEI UIN Sumatera Utara

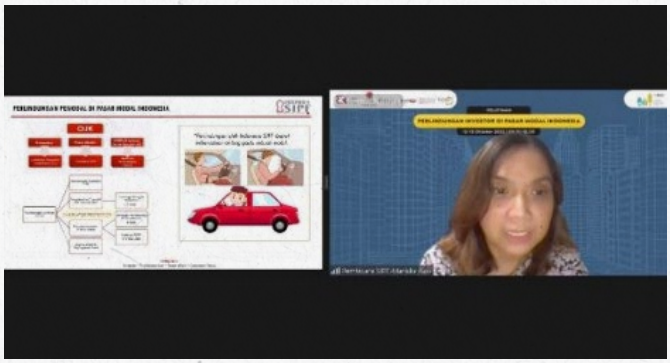
Capital Market Education and Inclusion of 1000 Investors with KP IDX North Sumatra, PT Phintraco Sekuritas, GI IDX UIN North Sumatra



6 Oktober 2022
October 6, 2022

Sharing Session dengan Pengurus GI BEI Se-Jawa Timur dan *Talkshow* Bersama OJK KR 4 Jawa Timur

Sharing Session with IDX GI Management throughout East Java and Talkshow with OJK KR 4 East Java



12-13 Oktober 2022
October 12-13, 2022

PPL WPPE dan *Workshop* Anggota DPP Tahun 2022

PPL WPPE and IPF Member Workshop 2022



14 Oktober 2022
October 14, 2022

Narasumber dalam seminar "Perlindungan Bagi Investor Junior Pasar Modal" yang diselenggarakan PT Pacific 2000 Sekuritas

Guest Speaker at the seminar "Protection for Junior Capital Market Investors" held by PT Pacific 2000 Sekuritas



18-19 Oktober 2022
October 18-19, 2022

Narasumber dalam Sekolah Pasar Modal Level 1 & 2 yang diselenggarakan KP BEI Jawa Tengah

Guest Speaker at the Level 1 & 2 Capital Markets School held by the KP IDX Central Java

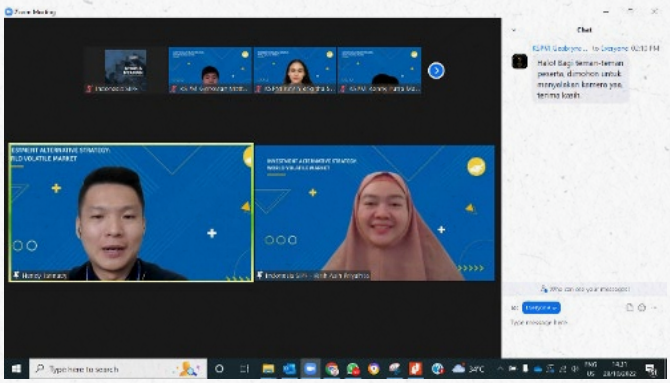


27 Oktober 2022
October 27, 2022

Narasumber dalam Webinar Edukasi Perlindungan Investor Pasar Modal yang diselenggarakan PT Bahana Sekuritas

Guest Speaker in the Capital Market Investor Protection Education Webinar held by PT Bahana Sekuritas





28 Oktober 2022
October 28, 2022

Narasumber dalam webinar *"Investment Alternative Strategy: World Volatile Market"* yang diselenggarakan Galeri Investasi BEI Universitas Multimedia Nusantara

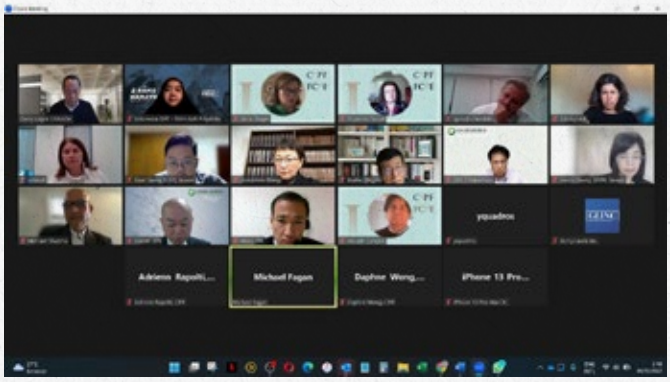
Guest Speaker in the webinar "Investment Alternative Strategy: World Volatile Market" held by the IDX Investment Gallery at Multimedia Nusantara University



31 Oktober 2022
October 31, 2022

Capital Market sebagai *side-event* presidential G20

Capital Market as G20 presidential side event



4 November 2022
November 4, 2022

Pertemuan Tahunan 2022 Forum International Lembaga Perlindungan Investor (IIPFF)

International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) 2022 Annual Meeting

Rangkaian Kegiatan Investor Protection Month (IPM)

Investor Protection Month (IPM) Activities

Penganugerahan Rekor MURI

Indonesia World Record Museum (MURI) Awarding







7 Oktober 2022
October 7, 2022

Seremoni Puncak Investor Protection Month (IPM) 2022

Investor Protection Month (IPM) 2022 Peak Ceremony

International Class

International Class







2 November 2022
November 2, 2022

International Class: Capital Market Investor Protection Comparative Study bersama dengan Securities Investor Association Singapore (SIAS), KSEI & TICMI

International Class: Capital Market Investor Protection Comparative Study with Securities Investor Association Singapore (SIAS), KSEI & TICMI





9 November 2022
November 9, 2022

Guest Speaker in IDX Riau Talk "Investasi Aman di Pasar Modal Indonesia"

Guest Speaker in IDX Riau Talk "Investasi Aman di Pasar Modal Indonesia"





26 November 2022
November 26, 2022

Narasumber Seminar "Perlindungan Bagi Investor Pemula Pasar Modal" yang diselenggarakan PT Pacific 2000 Sekuritas di Universitas Jayakarta

Guest Speaker Seminar "Protection for Beginner Capital Market Investors" held by PT Pacific 2000 Sekuritas at Jayakarta University





28 November 2022
November 28, 2022

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2022

Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) 2022





30 November 2022
November 30, 2022

Narasumber dalam seminar pasar modal *"Be a Smart Sharia Investor, Date Take a Risk To Invest In The Capital Market"* yang diselenggarakan Galeri Investasi BEI Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Guest Speaker at the capital market seminar "Be a Smart Sharia Investor, Date Take a Risk To Invest In The Capital Market" held by the IDX Investment Gallery, University of Muhammadiyah Purwokerto



3 Desember 2022
December 3, 2022

Narasumber dalam webinar "Perlindungan Investor Pasar Modal" yang diselenggarakan Galeri Investasi BEI Universitas Palangka Raya

Guest Speaker in the webinar "Protection of Capital Market Investors" held by the IDX Investment Gallery, University of Palangka Raya









10 Desember 2022
December 10, 2022

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu lewat Gebyar Pasar Modal 2022 Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Integrated Capital Market Socialization and Education through the 2022 Capital Market Festival in Banjarmasin, South Kalimantan



Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2022

Responsibility for The 2022 Annual Report

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2022 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

With God's blessing and grace, the Board of Commissioners and Directors of Indonesia SIPF delivered the 2022 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2022 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.



Narotama Aryanto
DIREKTUR UTAMA

President Director

Lucia Sintha Sari
KOMISARIS UTAMA

President Commissioner

Mariska Aritany Azis
DIREKTUR

Director

Dian Kurniasarie
KOMISARIS

Commissioner



Laporan kepada Pemangku Kepentingan

Management Report


B



Integrity



P3IEI selalu menjunjung tinggi integritas dalam setiap aktivitasnya guna memenuhi visi dan misinya untuk menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang andal dan terpercaya melalui pemberian rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Integritas adalah nilai yang menekankan tindakan dan perilaku yang bersifat konsisten dengan memegang teguh pada prinsip dan kode etik yang berlaku. Nilai ini mencakup pedoman perilaku bertindak jujur, disiplin, komitmen, dan kosisten terhadap nilai etika. Bertindak jujur diterapkan dalam sikap dan perkataan yang sesuai dengan fakta dan nilai-nilai yang disepakati, kemudian disiplin merujuk pada ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan standar yang telah ditetapkan dan/atau disepakati serta aturan Perusahaan yang berlaku. Komitmen diterapkan dalam perilaku yang konsisten sesuai dengan apa yang diucapkan dan diperjanjikan serta disepakati, dan konsisten terhadap nilai etika selalu diimplementasikan dalam menjunjung tinggi dan mematuhi nilai-nilai dan etika yang diterapkan dalam lingkungan Perusahaan

Indonesia SIPF always upholds integrity in every activity to fulfill its vision and mission of becoming a reliable and trusted organizer of the Investor Protection Program, providing a sense of security and comfort for investing in the Indonesian Capital Market. Integrity is a value that emphasizes actions and behaviors consistent with upholding principles and ethical codes. This value includes guidelines for acting honestly, being disciplined, committed, and consistent with moral values. Working honestly means behaving and speaking by facts and agreed-upon values, while discipline refers to obedience and compliance with established values, standards, and company rules. Commitment is demonstrated through consistent behavior aligned with what is promised, agreed upon, and with ethical values, always upholding and adhering to the values and ethics implemented in the company's environment.


ENG 1
APU
ENG 1

Laporan Direksi

Report of The Board of Directors

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya, izinkan kami untuk mempersembahkan laporan ini, menyoroti pencapaian dan kemajuan P3IEI di tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan yang telah diberikan kepada kami selama ini dalam melaksanakan tugas-tugas kami.

Sepanjang tahun 2022, P3IEI telah mencapai tonggak penting yang telah mendorong Perusahaan tumbuh lebih tinggi. Kami mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai bidang seperti peningkatan nilai Dana Perlindungan Pemodal (DPP), peningkatan cakupan perlindungan pemodal, partisipasi dalam berbagai acara untuk memperkuat perlindungan terhadap pemodal, hingga melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, dan lain-lain.

Senantiasa melaksanakan tugas kami dengan menerapkan nilai-nilai inti Perusahaan yaitu Integrity, Professionalism, Teamwork, dan Customer Focus *telah menjadi fondasi penting dalam meraih pencapaian kami. Kami berdedikasi untuk mempertahankan cita-cita tersebut dan melampaui harapan dalam setiap aspek bisnis seiring dengan kemajuan Perusahaan di masa depan. Kami dengan tulus menghargai kontribusi luar biasa yang telah diberikan oleh para pemegang saham, pemangku kepentingan, dan personil Perusahaan yang berdedikasi untuk kesuksesan kami. Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, kami yakin akan dapat terus meningkatkan pencapaian Perusahaan, mengeksplorasi peluang baru, dan memberikan perlindungan terbaik kepada para pemodal di Pasar Modal Indonesia.*

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,,

Praising God Almighty for His blessings, with great pleasure and pride, allow us to present this report, highlighting Indonesia SIPF's achievements and progress in the past year of 2022. We extend our gratitude, as the unwavering support and trust you have placed in us have been instrumental in performing our tasks.

Throughout the year, Indonesia SIPF has achieved significant milestones which have propelled the company to new heights. We experienced remarkable growth in many areas such as increasing Investor Protection Fund (IPF) value, raised coverage of investor protection, participating in various events to strengthen investor protection, promoting socialization and education to all layers of community, and many others.

Delivering our duties by implementing our core values of Integrity, Professionalism, Teamwork, and Customer Focus has been pivotal in gaining our achievements. We're dedicated to sustaining these ideals and exceeding expectations in every aspect of our business as we go forward. We sincerely appreciate the outstanding contributions made by our shareholders, stakeholders, and dedicated personnel to our success. With your ongoing support and collaboration, we are certain that we will continue to expand our accomplishments, explore novel opportunities, and provide the ultimate protection to investors in the Indonesian Capital Market.

Pencapaian Kinerja Perusahaan

Achievement of Company's Performance

P3IEI pada tahun 2022 mencatatkan kinerja yang baik meskipun berada di tengah tantangan ekonomi global yang tidak pasti. Perusahaan tercatat mengalami pertumbuhan antara lain pada DPP sebesar 11,49%, kemudian terdapat peningkatan total aset serta jumlah pemodal yang dilindungi masing-masing sebesar 20,22% dan 37,78%. Selain mencatatkan peningkatan nilai DPP, jumlah pemodal yang dilindungi, dan total nilai aset pemodal yang dilindungi, P3IEI pada tahun 2022 juga berhasil menyelesaikan rencana kerja strategis Perusahaan di antaranya menindaklanjuti Kajian & Usulan Perubahan Ketentuan terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP, Penyusunan Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Distribusi DPP, Pemenuhan Kesiapan Menjadi Administrator Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI), Penyusunan Konsep dan Usulan Pelaksanaan Simulasi Administrator, dan Melaksanakan Studi Kelayakan Pengembangan Klaim *Online*.

Jejak langkah signifikan yang dicapai P3IEI pada tahun 2022 juga meliputi partisipasi dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang telah disahkan sebagai UU P2SK pada 12 Januari 2023. Undang-Undang tersebut mereformasi kondisi sektor keuangan Indonesia dan secara spesifik memperkuat dasar hukum bagi perlindungan investor, khususnya mencakup DPP dan DKKI. Kemudian Perusahaan pada tahun 2022 mengusung penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perlindungan pemodal melalui terbentuknya tim pengusung fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), serta mendapatkan dukungan OJK dalam perluasan cakupan perlindungan pemodal.

Capaian yang diperoleh Perusahaan tidak terlepas dari upaya sosialisasi dan edukasi P3IEI yang terus diperluas untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kegiatan tersebut meliputi kegiatan Investor Protection Month (IPM) 2022 yang diselenggarakan bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) dalam *Login* Aplikasi Pasar Modal di Kota Terbanyak se-Indonesia. Perusahaan juga menyelenggarakan International Class pertama kali bersama dengan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) yang mendapatkan sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi lainnya dilakukan dengan turut melibatkan banyak pihak antara lain OJK, SRO, Anggota DPP, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI), Galeri Investasi BEI, Anak Usaha Lain, dan Pemangku Kepentingan Lainnya. P3IEI juga kembali melaksanakan kegiatan *Corporate Social Sustainability* (CSS) dengan melibatkan 5 (lima) Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia terbaik di seluruh wilayah Indonesia, serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh aktivitasnya.

Indonesia SIPF in 2022 recorded a good performance despite the uncertainty of global economic challenge. The company recorded growth, including the Investor Protection Fund (IPF) of 11.49%, then there was an increase in total assets and the number of investors protected by 20.22% and 37.78% respectively. In addition to recording growth in the increase in the value of IPF, the number of protected investors, and the total value of protected investor assets, Indonesia SIPF in 2022 has also succeeded in completing the Company's strategic work plans, including completing recovery & repair related to increasing the scope of IPF protection, studies on the application of sharia principles in the management and distribution of IPFs, fulfilling recovery as a Disgorgement Fund (DF) Administrator, the Drafting of the Concept and the Proposal for the Implementation of the DF Administrator Simulation, and a Feasibility study of online claims.

The significant steps that Indonesia SIPF has achieved in 2022 also include participation in the drafting of Law on Development and Strengthening of the Financial Sector (RUU P2SK) which was approved as the P2SK Law on 12 January 2023. The law reforms the condition of the Indonesian financial sector and specifically strengthening the legal basis for investor protection, specifically covering the IPF and DF. Furthermore the Company in 2022 has been promoting the principles of sharia investor protection mechanism by forming a team that bears the National Sharia Board Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) fatwa, as well as obtaining OJK's support in expanding the scope of investor protection.

The achievements achieved by the Company are inseparable from Indonesia SIPF 's outreach and education efforts which continue to be expanded to reach all levels of society. Some of these activities include the 2022 Investor Protection Month (IPM) activity which was held with PT KSEI and succeeded in breaking the the The Indonesian World Record Museum (MURI) record in the Most Capital Market Application Logins in Cities throughout Indonesia. The Company also held the first International Class with TICMI which received a positive response from stakeholders. Other outreach and educational activities are carried out by involving many parties including OJK, SRO, DPP members, Indonesia Stock Exchange Representative Offices (KP BEI), IDX Investment Galleries, Other Subsidiaries, and Other Stakeholders. P3IEI also once again carries out Corporate Social Sustainability (CSS) activities by involving 5 (five) of the best Indonesian Stock Exchange Investment Galleries in all regions of Indonesia, as well as implementing Good Corporate Governance (GCG) in all of its activities.



Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan Target

Comparison between The Results to The Target

Tahun 2022, Perusahaan terus mengupayakan peningkatan performa sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI). Secara umum target KPI yang telah ditetapkan Perusahaan telah tercapai bahkan berhasil dilampaui. Beberapa capaian yang ditorehkan Perusahaan atas kinerja 2022 antara lain:

In 2022, the Company continues to strive for performance improvement in accordance with the set targets in the form of key performance indicators (KPIs). In general, the KPI targets set by the Company have been achieved and even exceeded. Several achievements recorded by the Company regarding its performance in 2022 include:

No	KPI	Capaian *Realization*	Target	Capaian *Realization*	Keterangan *Notes*
1.	Indeks Kepuasan Pemodal *Investors' Satisfaction Index*	93 dari 100 *93 out of 100*	80 dari 100 *80 out of 100*	93 dari 100 *93 out of 100*	Tercapai *Achieved*
2.	Indeks Kepuasan Anggota *Members' Satisfaction Index*	82,8 dari 100 *82.8 out of 100*	80 dari 100 *80 out of 100*	82,8 dari 100 *82.8 out of 100*	Tercapai *Achieved*
3.	Tingkat Imbal Hasil Kotor dan Investasi dari DPP, Modal, dan Modal Hasil Konversi CGRP *Net Return and Investment Yield Ratio from Net Profit, Capital, and ICR Conversion Result Minimum*	5,88% *5,88%*	Minimal 4,05% *4.05% minimum*	145,18% *145.18%*	Tercapai *Achieved*
4.	Rasio Beban Usaha terhadap Pendapatan Usaha *Operating Expense Ratio to Operating Revenue*	84,18% *84.18%*	Maksimal 90% *90% maximum*	106,91% *106.91%*	Tercapai *Achieved*
5.	Jumlah Kerja Sama yang Dijalankan Bersama SRO dan/atau Anak Perusahaan Lain *Number of collaboration with SRO and/or Other Subsidiaries*	9 *9*	Minimal 8 *8 minimum*	112,50% *112.50%*	Tercapai *Achieved*
6.	Pelaksanaan Rencana Kerja Strategis yang On Time, On Budget, On Specification (OTOBOS) *Implementation of Strategic Work Plans that are On Time, On Budget, dan On Specification (OTOBOS)*	100% *100%*	100% *100%*	100% *100%*	Tercapai *Achieved*
7.	Pendapatan per Karyawan *Revenue per Employee*	Rp1.630.756.612 *IDR1,630,756,612*	Rp1,4 miliar *IDR 1.4 billions*	116,48% *116.48%*	Tercapai *Achieved*

Kendala yang Dihadapi

Obstacles Encountered

Pada tahun 2022, Perusahaan menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kinerja organisasi baik dari aspek investasi, keanggotaan, maupun hubungan dengan *stakeholder* secara umum. Dalam hal investasi, sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016, bahwa harta kekayaan DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Deposito pada Bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, kebijakan internal terkait investasi untuk Perusahaan juga telah ditentukan hanya di instrumen-instrumen yang disetujui oleh Pemegang Saham dan OJK yang dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga. Sehingga perubahan suku bunga tersebut akan mengakibatkan pada perubahan harga instrumen investasi yang dimiliki oleh DPP maupun Perusahaan.

Sedangkan dari aspek keanggotaan terkait perolehan Iuran Keanggotaan, terdapat beberapa Anggota DPP yang terlambat melakukan pembayaran iuran tahunan yang mengakibatkan terganggunya kinerja keuangan di periode tertentu. Dari aspek hubungan dengan *stakeholder*, masih perlu adanya peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* agar beberapa rencana strategis yang Perusahaan lakukan dapat berjalan dengan lancar seperti pembentukan dewan fatwa, penerapan prinsip syariah, kesiapan DKKI dan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Perusahaan tetap berkomitmen untuk memaksimalkan potensi yang ada dan memastikan kesuksesan jangka panjang, serta tetap menjaga koordinasi yang telah berjalan dengan baik dengan para *stakeholder* lain agar menjaga kesuksesaan pada tahun 2023 mendatang.

In 2022, the Company faced several challenges that affected its organizational performance in terms of investment, membership, and stakeholder relations in general. Regarding investment, as we know, based on OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016, the Company's wealth can only be invested in Government Securities (SBN) and/or Deposits in Banks owned by the Government of the Republic of Indonesia. In addition, the Company has internally determined investment policies that only allow approved instruments by the Shareholders and OJK, which are influenced by interest rate fluctuations. Therefore, changes in interest rates will result in changes in the prices of instruments owned by the Company.

In terms of membership, there were some IPF members who were late in paying their annual dues, which disrupted the financial performance in certain periods. In terms of stakeholder relations, there is still a need for improved coordination with stakeholders to ensure the smooth implementation of strategic plans such as the formation of a fatwa council, the application of Sharia principles, DF readiness, and follow-up actions on the Financial Sector Development and Strengthening Act (UU P2SK).

Despite facing these challenges, the Company remains committed to maximizing existing potentials and ensuring long-term success. It also strives to maintain the good coordination that has been established with other stakeholders to uphold success in the coming year of 2023.

Gambaran dan Analisis Tentang Prospek Usaha

Description and Analysis of Business Prospects

P3IEI selama tahun 2022 telah mencatatkan beberapa capaian positif seperti dalam peningkatan jumlah pemodal yang dilindungi, nilai DPP, dan total aset perlindungan pemodal. Upaya peningkatan perlindungan bagi para pemodal di sektor keuangan Indonesia juga semakin kuat dengan disahkannya UU P2SK di tahun 2023 serta *roadmap* Pasar Modal Indonesia tahun 2023-2027 yakni peningkatan perlindungan terhadap pemodalpasar modal melalui Implementasi Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI), Meningkatkan *Coverage* Dana Perlindungan Pemodal Reksa Dana dan Layanan Urun Dana.

Pasar modal syariah di Indonesia sendiri terus menunjukkan tren pertumbuhan, sehingga perlindungan investor berbasis syariah diharapkan juga tersedia dapat menghasilkan nilai tambah. Potensi pasar modal Syariah Indonesia sangat besar dan berpotensi besar dalam mendukung perekonomian nasional, salah satunya mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Maka, prospek tersebut perlu dikembangkan salah satunya melalui dukungan mekanisme yang disahkan berdasarkan fatwa DSN MUI dan keputusan OJK. Pada tahun 2022, hal ini telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya tim pengusung fatwa DSN MUI serta pembahasannya baik secara internal bersama dengan Pemegang Saham maupun dengan tim pengusung fatwa DSN MUI tersebut. Pembentukan fatwa dan finalisasi UU P2SK dilanjutkan pada tahun 2023. Langkah pembentukan Dewan Fatwa ini telah dipersiapkan sejak 2021 dan terus ditindaklanjuti untuk mendukung perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia.

Pada tahun 2023, Perusahaan-berkomitmen untuk melakukan optimalisasi pengelolaan DPP serta menciptakan kondisi keuangan Perusahaan yang sehat, tumbuh, dan stabil. Perusahaan memproyeksikan Tingkat Imbal Hasil Kotor Investasi DPP, Modal, dan Modal Hasil Konversi CGRP sebesar 100 bps di atas BI7DRR serta Beban Usaha meningkat maksimal 10%. Perusahaan juga melihat peluang peningkatan kerjasama yang dijalankan Bersama SRO dan/atau Anak Perusahaan lain. Secara keseluruhan, Perusahaan melihat peluang tahun 2023 menunjukkan tren investasi yang positif. Hal ini didasarkan pada proyeksi suku bunga yang memiliki pergerakan stabil, adanya potensi *upside* untuk obligasi tenor pendek, serta suku bunga deposito yang secara umum lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Selain itu Perusahaan akan terus melanjutkan upaya sosialisasi dan edukasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan dengan baik, memasuki tahun 2023 P3IEI berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan literasi masyarakat baik kepada para pemodal dan calon investor melalui beragam kegiatan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Perusahaan juga secara konsisten akan berkolaborasi dengan organisasi lain untuk lebih meningkatkan literasi masyarakat dan menjangkau *audience* yang lebih luas. Secara keseluruhan, P3IEI yakin bahwa Perusahaan memiliki posisi yang baik untuk terus tumbuh secara stabil dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang untuk menjadi penyelenggara program perlindungan pemodal yang terpercaya. Untuk mencapainya, Perusahaan secara konsisten mempraktekkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, P3IEI terus berusaha mengelola DPP secara optimal, selaras dengan upaya menguatkan peran dan fungsi kelembagaan, serta meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan melalui pemanfaatan informasi dan sistem penunjang operasional.

Indonesia SIPF achieved several positive milestones in 2022, such as an increase in the number of protected investors, IPF value, and total assets for investor protection. Efforts to enhance investor protection in the Indonesian financial sector have been strengthened with the enactment of the P2SK Law in 2023 and the Indonesian Capital Market Roadmap for 2023-2027. This roadmap aims to improve investor protection in the capital market through the implementation of Disgorgement and Disgorgement Fund (DF), increasing coverage for Mutual Fund Investor Protection Fund and Fund Management Services.

The Islamic Capital Market in Indonesia continues to show growth trends, and it is expected that Sharia-based investor protection will contribute added value. The potential of the Islamic Capital Market in Indonesia is significant and could greatly support the national economy, given the majority of the Indonesian population being Muslim. Therefore, it is necessary to develop these prospects, including through the support of mechanisms approved by the fatwa of DSN MUI (National Sharia Board-Majelis Ulama Indonesia) and the decisions of the OJK (Financial Services Authority). In 2022, steps were taken to establish a team for the fatwa of DSN MUI, and internal discussions were held with the Shareholders and the team for the fatwa. The formulation of the fatwa and the finalization of the P2SK Law will continue in 2023. The establishment of the Fatwa Council has been prepared since 2021 and is being pursued to support the development of the Islamic Capital Market in Indonesia.

In 2023, the Company is committed to optimizing the management of IPF and creating a healthy, growing, and stable financial condition. The Company projects a Gross Return on Investment Level for IPF, Capital, and ICS Conversion Capital of 100 bps above the BI7DRR (Bank Indonesia Seven-Day Reverse Repo Rate), and a maximum 10% increase in operating expenses. The Company also sees opportunities for increased cooperation with SROs (Self-Regulatory Organizations) and/or other subsidiaries. Overall, the Company sees positive investment trends for 2023, based on projections of stable interest rates, potential upside for short-term bonds, and generally higher deposit interest rates compared to 2022.

Additionally, the Company will continue its efforts in promoting and educating the Indonesian capital market, entering 2023 with a commitment to maximize efforts in improving financial literacy for both investors and potential investors through inclusive activities involving all segments of society. The Company will consistently collaborate with other organizations to further enhance financial literacy and reach a wider audience. Overall, Indonesia SIPF believes that it is well-positioned to sustain steady growth in the coming years and become a trusted provider of investor protection programs. To achieve this, the Company consistently practices good governance principles. In pursuit of sustainable growth, Indonesia SIPF strives to optimize IPF management, strengthen institutional roles and functions, and enhance synergy with stakeholders through the utilization of information and operational support systems.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Development

P3IEI telah memulai penerapan GCG sejak tahun 2014 dengan mengesahkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai panduan pelaksanaan yang formal dan disepakati oleh seluruh jajaran terkait. Perusahaan juga melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap Pedoman tersebut terakhir pada tahun 2021 demi menyesuaikan relevansi Pedoman tersebut terhadap kebutuhan organisasi.

Direksi secara konsisten menyosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan dan seluruh jenjang organisasi Perusahaan. Di tahun 2022, Perusahaan melakukan evaluasi dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan dan mencapai Kategori Baik dengan mendapatkan nilai 76 dari 100 dari target 75 sehingga mencatatkan peningkatan. Perusahaan juga mengembangkan infrastruktur baik infrastruktur perkantoran maupun aplikasi yang berperan menunjang dan meningkatkan keberlangsungan kegiatan operasional. Tata kelola ini akan senantiasa ditingkatkan untuk menghasilkan performa terbaik Perusahaan dalam menyelenggarakan perlindungan bagi pemodal di Pasar Modal Indonesia.

P3IEI mengadopsi prinsip-prinsip esensial dalam praktik *Good Corporate Governance* dalam melakukan tugas dan fungsinya. Perusahaan mengedepankan Akuntabilitas dengan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) serta rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan formal bagi karyawan, sesuai dengan pemisahan fungsi dan mekanisme *check and balance* yang efektif dan efisien. Prinsip Transparansi juga dikedepankan dengan mempublikasikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan Perusahaan secara rutin melalui beragam kanal media, mematuhi prinsip Tanggung Jawab dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan OJK terkait kelembagaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal hingga ketentuan-ketentuan terkait operasional Perusahaan seperti peraturan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain-lain. Prinsip Independensi dijalankan oleh Perusahaan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perusahaan. Penerapan prinsip Kewajaran diejawantahkan dengan pemenuhan hak-hak para Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. P3IEI berkomitmen untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja Perusahaan di masa mendatang.

Indonesia SIPF has started implementing GCG since 2014 by ratifying the Guidelines for Good Corporate Governance as a formal implementation guideline and agreed upon by all relevant levels. The company also makes adjustments and updates to the Guidelines, most recently in 2021 in order to adjust the relevance of the Guidelines to organizational needs.

The Board of Directors consistently socializes and implements GCG principles in every activity and at all levels of the Company's organization. In 2022, the company evaluates the implementation of Corporate Governance and achieved Good Category by obtaining a score of 76 out of 100 from the target of 75 out of 100 so that it recorded an improvement albeit small. The company also develops infrastructure, both office infrastructure and applications, which play a role in supporting and increasing the continuity of operational activities. This governance will continue to be improved to produce the Company's best performance in providing protection for investors in the Indonesian Capital Market.

Indonesia SIPF adopts essential principles in the practice of Good Corporate Governance in carrying out its duties and functions. The Company prioritizes Accountability by establishing Key Performance Indicators (KPI) as well as clear and formal details of duties and responsibilities for employees, in accordance with the separation of functions and an effective and efficient check and balance mechanism. The principle of Transparency is also put forward by publishing financial and non-financial information to the Company's stakeholders on a regular basis through various media channels, complying with the principle of Responsibility by complying with applicable laws and regulations, including OJK Regulations related to Institutions of Investor Protection Fund Providers to provisions -provisions related to company operations such as labor regulations, taxation, business competition, occupational health and safety, and others. The principle of Independence is carried out by the Company by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities and authorities of each part of the Company. The application of the principle of fairness is manifested in fulfilling the rights of stakeholders to receive fair, equal and free treatment from bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender or other matters that have nothing to do with performance. Indonesia SIPF is committed to complying with all applicable rules and regulations in carrying out its operational activities, and implementing the necessary steps to continuously improve the quality of corporate governance and performance in the future.

Pengelolaan *Human Capital*

Human Capital Management

Sumber daya manusia (SDM) merupakan tonggak kesuksesan Perusahaan sehingga dikenal sebagai modal manusia. SDM menjadi sumber yang mengarahkan, mempertahankan, dan mengembangkan organisasi untuk menjawab beragam tuntutan masyarakat dan zaman. Tercapainya visi dan misi Perusahaan juga didukung oleh keberagaman kompetensi dan karakteristik individu karyawan. Pada tahun 2022, Perusahaan memiliki total 11 orang karyawan. Tercatat bahwa 4 orang di antaranya atau 60 persen merupakan lulusan dari program magister (S2), sedangkan 6 orang sisanya atau 40 persen merupakan lulusan dari program S1. Lebih lanjut, berdasarkan demografi jenis kelamin, 2 orang atau 18 persen karyawan Perusahaan adalah wanita.

Untuk meningkatkan modal manusia yang merupakan aset berharga Perusahaan, P3IEI secara konsisten mengadakan memperhatikan, menjaga, dan mengembangkan seluruh karyawan mencakup semua lapisan jabatan. Upaya pelatihan serta sertifikasi diberikan kepada karyawan guna meningkatkan kualitas layanan bagi para pemangku kepentingan. Beberapa pelatihan yang diberikan antara lain mengenai peningkatan kemampuan komunikasi, audit internal, pelaporan dan visualisasi data, *project management*, GCG, manajemen talenta & karier, serta beragam pelatihan lain yang dibutuhkan karyawan. Investasi kepada SDM Perusahaan tersebut menunjukkan komitmen Perusahaan untuk terus meningkatkan kemampuan karyawan baik secara teknis atau *hardskill*, tetapi juga meningkatkan kapasitas *softskill* karyawan yang kini semakin vital.

Human resources (HR) is a cornerstone of the company's success so it is known as human capital. HR is a source that directs, maintains, and develops organizations to respond to the various demands of society and the times. The achievement of the company's vision and mission is also supported by the diversity of competencies and individual characteristics of employees. In 2022, Indonesia SIPF has a total of 11 employees. It was noted that 4 of them or around 40 percent were graduates of the master's program (S2), while 6 employees or 60 percent were graduates of the undergraduate program. As for demographics, 2 persons or approximately 18 percent of the Company's employees are women.

To improve human capital who are valuable assets of the company, Indonesia SIPF consistently pays attention to, maintains, and develops employees from all layers of positions. Training and certification efforts are provided to employees to improve the quality of the services provided, among others, through training regarding improving communication skills, internal audit, reporting and data visualization, project management, GCG, talent & career management, as well as various other trainings needed by employees. The investment in the company's human resources shows the Company's commitment to continuously improve the ability of employees both technically and hard skills, but also increase the capacity of employees' soft skills which are now increasingly vital.


National Dentist Association
Know Your Teeth

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Performance Assessment of Committees Under The Board of Directors



Komite Klaim

Claim Committee

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim, sehingga menunjukkan kondisi pasar modal yang sehat.

Throughout 2022, there were no incidents of loss of assets by Investors that required compensation payments using the Investor Protection Fund (IPF). Therefore, there were no appointments of members of the Claim Committee and no implementation of the Claim Committee activities, indicating a healthy capital market condition.

Komite Investasi

Investment Committee

Perusahaan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2022 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

Pada tahun 2022, Komite Investasi Perusahaan dalam menjalankan peran dan fungsinya senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi dalam pengelolaan DPP sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perusahaan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
2. Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
3. Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
4. Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi; dan
5. Total *return* yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP di tahun ini mengalami penurunan dari Rp5,99 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp5,86 miliar pada tahun 2022. Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2022 dibukukan sebesar Rp488 juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Agustus 2022 yaitu sebesar Rp687,56 juta, sedangkan yang terendah diperoleh pada Bulan Juli 2022 yaitu sebesar Rp338,87 juta.

As the IPF institution, the company has the authority to develop the IPF through investment activities per the OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. The Investment Committee holds monthly meetings to provide input and advice to the Board of Directors on investments. During 2022, the Investment Committee held 12 Monthly Meetings.

In 2022, the company's Investment Committee, in carrying out its role and function, always maintained the diversity of investment instruments in managing the IPF in accordance with the Investment Policy Guidelines owned by the company. Investment activities are carried out by considering the following:

1. The overall economic conditions in both the banking/money market and capital market sectors;
2. The minimum liquidity needs for the IPF, taking into account the compensation needs for investor asset losses during the claims period;
3. Investment choices based on the regulations set by OJK, namely in State Securities and/or Bank Deposits owned by the Government of the Republic of Indonesia;
4. The tax consequences of investment decisions; and
5. Optimal total returns considering risk levels and liquidity needs.

By prioritizing the aspects considered in managing the IPF, the IPF net investment income decreased from IDR5.99 billion in 2021 to IDR5.86 billion in 2022. Meanwhile, the IPF average monthly net investment income in 2022 was recorded at IDR488 million. The highest net investment income was obtained in August 2022 at IDR687.56 million, while the lowest was received in July 2022 at IDR338.87 million.

Pengawasan Internal dan Kepatuhan

Internal Control System

Kami berkomitmen penuh untuk menyediakan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi Anggota DPP sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang menjadi mandat dalam tugas kami, salah satunya melalui evaluasi terhadap sistem pengendalian internal Perusahaan di tahun 2022. Keberhasilan utama kami dalam meningkatkan sistem pengawasan internal dan kepatuhan mencakup tiga aspek. Aspek pertama adalah penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perusahaan dengan metode *Balanced Scorecard*, serta Standar Kinerja dan Evaluasi Penilaian Kinerja untuk Karyawan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI). Aspek kedua adalah peningkatan sistem penunjang maupun pedoman kerja Perusahaan, yaitu pengembangan sistem penunjang operasional berbasis teknologi informasi, pelaksanaan evaluasi serta pembaruan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan, dan pelaksanaan kegiatan *Good Corporate Governance* (GCG). Aspek terakhir adalah aktivitas pemantauan dan evaluasi, baik melalui rapat koordinasi pemantauan kinerja maupun kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan.

We are fully committed to provide the best protection and services for IPF members as mandated by the roles and responsibilities of our function within the company, with one of them being the 2022 evaluation of corporate internal control system. Our major milestones in refining the internal control and compliance system involve three aspects. The first aspect is the establishment of Corporate Strategic Plan and Corporate Work Plan in accordance with the Balanced Scorecard method, as well as Employee Performance Standards and Performance Assessment Evaluation based on Key Performance Indicators (KPI). The second aspect is the refinement of corporate supporting system and work guidelines, namely the development of IT-based operational supporting system, execution of evaluation and update on Corporate Standard Operating Procedure, and execution of Good Corporate Governance Activities. The third and last aspect is monitoring and evaluation activities, both through performance supervision coordination meetings as well as internal investigative activities conducted by the Internal Control and Compliance.



Kata Penutup

Closing Remarks

Di tengah kondisi perekonomian yang cukup *challenging*, kami cukup bersyukur dengan pencapaian yang telah kami capai di tahun lalu yang tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Kami telah memprioritaskan dan akan terus mengedepankan integritas, profesionalisme, kerja tim, dan fokus pada pelanggan untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan di setiap bidang. Komitmen kami terhadap nilai-nilai tersebut tidak tergoyahkan, dan kami akan terus bekerja keras untuk memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh pemodal untuk mencapai Pasar Modal Indonesia yang aman dan nyaman. Kami akan bertumbuh dari keberhasilan tahun lalu, dan berusaha untuk melampaui harapan dalam semua aspek bisnis. Kami optimis dalam melihat masa depan Perusahaan dan kami menghargai kepercayaan dan setiap dukungan yang diberikan untuk mencapai visi dan misi kami. Kami akan berusaha memberikan perlindungan terbaik bagi kepentingan investasi di pasar modal Indonesia dan berkontribusi untuk memajukan perekonomian Indonesia.

In the middle of quite challenging economic conditions, we are quite grateful with the achievements we have made in the past year which would not have been successful without the support of various stakeholders. We have prioritized and will continue to promote integrity, professionalism, teamwork and customer focus to gain growth and progress in every area. Our commitment to these values is unwavering, and we will continue to push ourselves to deliver the ultimate protection for all investors to be in a safe and convenient Indonesian Capital Market. We will build on the successes of the past year, and strive to exceed expectations in all aspects of our business. We are eager to see what the future holds for our company and we appreciate for continuing belief and support of our vision and mission. We will strive to provide the best protection for investment in Indonesia Capital Market interests and contribute to advancing the Indonesian economy.



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Perkenankan kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait kewajiban dan wewenang kami dalam melaksanakan tugas pengawasan serta pemberian masukan atas kegiatan yang dijalankan oleh Manajemen Perusahaan pada tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 14 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris akan terus berkomitmen mendukung upaya Perusahaan dalam peningkatan perlindungan aset investor melalui beragam kegiatan pengelolaan, pengawasan, pembinaan, penyebarluasan informasi, dan edukasi Pasar Modal.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Commissioners, allow us to present a report regarding our obligations and authorities in carrying out supervisory duties and providing input on activities carried out by the Company's management in 2022, as mandated in Article 69 of Company Act No. 40 Year 2007 and Article 14 & 15 of the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners will continue to be committed to supporting the Company's efforts to improve investor asset protection through various activities including management, supervision, guidance, information dissemination, and Capital Market education.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Performance Assessment of Directors

Perekonomian Indonesia masih dalam masa pemulihan setelah selama 2 tahun berada dalam kondisi berat akibat pandemi. Kondisi tersebut berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan. Kinerja keuangan yang masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi membuat banyak Perusahaan mengalami biaya tinggi dan pengembalian yang lebih rendah, salah satunya tercermin dalam penurunan tingkat obligasi.

Untuk mengatasi kondisi ini, Perusahaan tetap berupaya untuk memilih instrumen investasi dengan risiko yang terukur dan memberikan imbal hasil yang tinggi. Namun adanya keterbatasan kebijakan investasi Perusahaan berdasarkan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016, tidak banyak opsi yang dapat dipilih Perusahaan khususnya bagi pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang berdasarkan Peraturan OJK tersebut hanya bisa ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau deposito di bank milik Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, performa mayoritas bursa saham Asia-Pasifik tidak terlalu menggembirakan dikarenakan beberapa faktor seperti ketegangan geo-politik global yang berdampak pada kondisi global yang tidak terduga serta beberapa peristiwa yang menimbulkan gejolak pasar dan volatilitas Pasar Modal yang tinggi. Fluktuasi harga saham yang tidak stabil dan perubahan cepat dalam sentimen pasar menciptakan tantangan dalam menjaga stabilitas dan keamanan investasi bagi para pelaku pasar. Meski demikian, Pasar Modal Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan kapitalisasi pasar, rata-rata nilai transaksi harian, dan pencatatan saham.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2022 hanya tumbuh sebesar 4,08% dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 10,08%. Adapun nilai kapitalisasi Pasar Modal Indonesia di tahun 2022 meningkat lebih dari 15% dibandingkan nilai kapitalisasi Pasar Modal Indonesia di tahun 2021 menjadi Rp9.495 triliun. Catatan lainnya, nilai rata-rata transaksi perdagangan tumbuh 10,1% per 29 Desember 2022 menjadi Rp14,7 triliun dibandingkan tahun 2021. Pasar Modal Indonesia di tahun 2022 melanjutkan momentum pertumbuhannya dari tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan ketangguhannya, seiring dengan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Meski menghadapi beragam kendala tersebut, Perusahaan tetap memaksimalkan upaya dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang volatil dengan secara aktif menerapkan strategi untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang.

Dalam kondisi tersebut, P3IEI berhasil menunjukkan kinerja yang baik meskipun kondisi makro ekonomi dan Pasar Modal menemui beberapa kendala. Pada tahun 2022, melalui evaluasi dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja Direksi, program kerja Perusahaan dinilai telah terlaksana dengan baik. Perusahaan terus mencatatkan pertumbuhan positif antara lain dari jumlah investor terproteksi yang meningkat sebesar 37,78% dari 4.397.984 menjadi 6.059.522. Pertumbuhan ini seiring dengan DPP yang meningkat dari Rp235,84 miliar menjadi Rp262,93 miliar atau peningkatan sebesar 11,49% dan total aset investor yang dilindungi tumbuh 20,22% dari Rp5.426 triliun menjadi Rp6.523 triliun.

Selain itu pada tahun 2022, Perusahaan berhasil meraih banyak pencapaian, antara lain pemenuhan kesiapan sebagai administrator DKKI, peningkatan total aset dan jumlah investor yang dilindungi, serta partisipasi dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Semua pencapaian tersebut diraih oleh Perusahaan di tengah beberapa tantangan, antara lain penurunan tingkat obligasi dan ketidakstabilan kondisi perekonomian global.

The Indonesian economy is still in the recovery phase after three years of being heavily affected by the pandemic. This condition has impacted the financial performance of companies. The ongoing financial recovery post-pandemic has led to high costs and lower returns for many companies, as reflected in the decline in bond rates.

In response to this situation, the Company has attempted to invest in investment instrument which has a measurable risk yet able to deliver a high return. However with the limitation set forth by Company's investment policy based on Regulation OJK No. 49/POJK.04/2016, there was not much option could be selected by the Company based on such regulations especially for Investor Protection Fund (IPF) management which could only be invested in Government Securities (SBN) and/or deposits in government-owned banks in the Republic of Indonesia.

Furthermore, the performance of most Asia-Pacific stock exchanges could have been more encouraging due to several factors such as the global geo-political constraint which affected to unexpected global conditions and various events causing market turmoil and high volatility of the capital market. Unstable stock prices and rapid changes in market sentiment created challenges in maintaining stability and security for investments for market participants. Factors such as global political tensions also impacted the volatility of capital markets worldwide. However, the Indonesian Capital Market continued to show growth in terms of market capitalization, average daily transaction value, and stock listings.

The Composite Stock Price Index (IHSG) in 2022 only grew by 4.08% compared to the 10.08% growth in 2021. However, the capitalization value of the Indonesian Capital Market in 2022 increased by more than 15% compared to the capitalization value of the Indonesian Capital Market in 2021, reaching IDR 9.495 trillion. Another notable figure is the average trade transaction value, which grew by 10.1% as of December 29, 2022, reaching IDR 14.7 trillion compared to 2021. The Indonesian Capital Market in 2022 continued its growth momentum from previous years and demonstrated its resilience amid the Covid-19 pandemic.

Despite facing various challenges, the Company optimize its efforts and adapted to volatile market conditions by actively implementing strategies to manage risks and capitalize on opportunities.

In such conditions, Indonesia SIPF managed to deliver a good performance despite macroeconomic and Capital Market obstacles. In 2022, through careful evaluation and monitoring of the Board of Directors' performance, the Company's work program was considered well-implemented. The Company continued to achieve positive growth, including an increase in the number of protected investors by 37.78% from 4,397,984 to 6,059,522. This growth was accompanied by an increase in IPF from IDR 235.84 billion to IDR 262.93 billion, representing an 11.49% increase, and a 20.22% growth in total protected investor assets from IDR 5,426 trillion to IDR 6,523 trillion.

On top of that, in 2022 the Company achieved many accomplishments, including fulfilling the requirement preparation as the DKKI administrator, increasing total assets and the number of protected investors, as well as participating in formulating the Draft Law on Development and Strengthening of the Financial Sector (RUU P2SK). The Company attained all of these achievements amidst several challenges, such as the decline in bond rates and the instability of global economic conditions.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Good Corporate Governance

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, P3IEI mengadopsi aspek-aspek utama dalam praktik *Good Corporate Governance*. Dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, Perusahaan menggunakan *Key Performance Indicators* (KPI) serta rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan formal bagi karyawan, sesuai dengan pemisahan fungsi dan mekanisme *check and balance* yang efektif dan efisien.

P3IEI juga menerapkan prinsip transparansi dengan mempublikasikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan Perusahaan, antara lain Laporan Keuangan DPP dan PDPP selama tahun 2022, Laporan Kegiatan Tahunan, dan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham. Aktivitas terkait transparansi informasi yang dilakukan oleh P3IEI tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib seperti pengungkapan kinerja Perusahaan dalam pengelolaan DPP, namun turut mencakup informasi yang termuat dalam buletin triwulan dan *press release* kepada media dan masyarakat. Semua informasi yang dipublikasikan oleh Perusahaan dapat diunduh melalui website www.indonesiasipf.co.id.

P3IEI memenuhi prinsip tanggung jawab dalam praktik *Good Corporate Governance* dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK terkait kelembagaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Selain itu, P3IEI juga senantiasa mematuhi dan mengikuti perkembangan tentang ketentuan terkait ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketentuan-ketentuan formal lain terkait operasional Perusahaan. Prinsip independensi dijalankan oleh Perusahaan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perusahaan. P3IEI menerapkan prinsip kewajaran dengan memberikan secara layak dan utuh pemenuhan hak-hak para Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Hasil pengawasan yang kami lakukan selama periode tahun 2022 menunjukkan bahwa P3IEI telah berhasil mengembangkan infrastruktur organisasinya, baik infrastruktur perkantoran maupun aplikasi yang berperan menunjang keberlangsungan kegiatan operasional menjadi lebih baik. Kami meyakini bahwa P3IEI akan senantiasa terus berusaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kami juga meyakini dan mendukung komitmen penuh P3IEI untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK maupun instansi terkait dalam melakukan kegiatan operasionalnya guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja Perusahaan di masa mendatang.

In carrying out the Company's operational activities, Indonesia SIPF adopts the main aspects of the Good Corporate Governance's practices. In implementing the principle of accountability, the Company uses Key Performance Indicators (KPI) and a precise and formalized breakdown of employee roles and responsibilities by effective and efficient separation of functions and check-and-balance mechanisms.

Indonesia SIPF also applies the principle of transparency by publishing financial and non-financial information to the Company's stakeholders, including the Financial Statements of IPF and IPF Institution for 2022, Annual Activity Reports, and Annual Reports to the Financial Services Authority (OJK) and Shareholders. Activities related to information transparency carried out by Indonesia SIPF are not limited to mandatory information, such as disclosing the Company's performance in managing IPF. They include information published in quarterly bulletins and press releases to the media and the public. All information published by the Company can be downloaded through the website www.indonesiasipf.co.id.

Indonesia SIPF is dedicated to declaring its commitment to the responsibility principle by complying with applicable laws and regulations, including the Financial Services Authority regulation regarding the Investor Protection Fund Institution. Furthermore, Indonesia SIPF always complies with and follows up on recent updates on regulations related to labour and employment issues, taxation, business competition, occupational health and safety, and other formal legal products related to operational aspects of the Company. The Company carries out the principle of independency by respecting the rights and obligations, roles, responsibilities, and authority of each of the Corporate's organs. Indonesia SIPF also applies the principle of fairness by adequately and wholly fulfilling the rights of the Corporate Stakeholders to receive fair, equal, and bias-free treatment from discrimination related to differences in ethnicity, religion, origin, gender, and other matters unrelated to work performance.

In accordance with our supervision during 2022, Indonesia SIPF has presented their succeed in developing its organizational infrastructure, both in office infrastructure and application, that is tasked to support the sustainability of operational activities towards future improvements. We firmly believe that Indonesia SIPF will always endeavour to execute its operating actions by using Good Corporate Governance principles as its main foundations. We are fully confident and supportive of Indonesia SIPF's wholehearted commitment to comply with every rule and regulation established by the Financial Services Authority and other related institutions in conducting its operational activities to improve the quality of corporate governance and performance in the future.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan

Views on Business Prospects

Melanjutkan tren dari tahun-tahun sebelumnya, Pasar Modal syariah di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan, sehingga perlindungan investor berbasis syariah diharapkan juga tersedia dan dapat memberikan nilai tambah. Potensi Pasar Modal syariah Indonesia sangat besar dan dapat berpotensi besar dalam mendukung perekonomian nasional, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, prospek tersebut perlu terus dikembangkan, salah satunya melalui dukungan penerapan mekanisme dan proses bisnis di P3IEI yang didasarkan prinsip-prisip syariah melalui penetapan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)-. Pada tahun 2022, hal ini telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya tim pengusung fatwa syariah dari DSN MUI untuk P3IEI.

Selain itu Dewan Komisaris merasa bahwa prospek usaha akan makin membaik dengan telah disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (-UU P2SK). Undang-Undang tersebut mereformasi kondisi sektor keuangan Indonesia dan secara spesifik memperkuat dasar hukum bagi perlindungan investor, khususnya mencakup Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI) dan Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Peningkatan perlindungan terhadap investor Pasar Modal yang menjadi salah satu misi OJK dalam *Roadmap* Pasar Modal Indonesia periode tahun 2023 hingga 2027.

Melanjutkan upaya sosialisasi dan edukasi Pasar Modal Indonesia yang telah berjalan dengan baik, memasuki tahun 2023 P3IEI berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal guna meningkatkan literasi masyarakat baik kepada para investor dan calon investor melalui beragam kegiatan inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Perusahaan juga secara konsisten akan berkolaborasi dengan organisasi lain untuk lebih meningkatkan literasi masyarakat dan menjangkau *audience* yang lebih luas. Secara keseluruhan, P3IEI yakin bahwa Perusahaan memiliki posisi yang baik agar terus tumbuh secara stabil dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang untuk menjadi penyelenggara program perlindungan investor yang terpercaya. Untuk mencapainya, Perusahaan secara konsisten mempraktekkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perkembangan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2023 dinilai optimis. Dewan Komisaris telah memberi persetujuan atas Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2023 dan menilai bahwa prospek usaha Perusahaan yang telah disusun oleh Dewan Direksi sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja Perusahaan untuk tahun 2023 sudah cukup baik dan sejalan dengan arah serta tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Continuing the previous year's trend, the sharia Capital Market in Indonesia continues to show a growth trend, so that sharia-based investor protection is also expected to be provided and deliver added value. The potential for the Indonesian sharia Capital Market is enormous and expected to have great potential in supporting the national economy, one of which is considering that the majority of Indonesia's population is Muslim. Along these lines, this prospect needs to be continually developed, one of them is through a support on Indonesia SIPF business process and mechanism implementation based on sharia principles which represented by the National Sharia Board Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) fatwa approval. In 2022, this was followed up by forming a team that bears the sharia fatwa from DSN MUI to Indonesia SIPF.

Furthermore, the Board of Commissioners believes that the business prospects will improve further with the enactment of the Draft Financial Sector Development and Strengthening Act (UU P2SK). This law reforms Indonesia's financial sector conditions and explicitly strengthens the legal basis for investor protection, mainly encompassing the Disgorgement Fund (DF) and the Investor Protection Fund (DPP). It also aligns with the goal of enhancing investor protection in the Indonesian Capital Market, one of the missions in the FSA roadmap for period of 2023 until 2027.

Continuing well-performed efforts to promote and educate regarding the Indonesian Capital Market, entering 2023, Indonesia SIPF is committed to increasing public literacy for investors and potential investors through various activities that are inclusive of all elements of society. The company will also consistently collaborate with other organizations to further increase public literacy and reach a wider audience. Overall, Indonesia SIPF believes that the company is well-positioned to continue growing in a stable and sustainable manner in the coming years to become a trusted provider of investor protection programs. To achieve this, the company consistently practices the principles of good governance.

The development of the Indonesian Capital Market in 2023 is believed to be optimistic. The Board of Commissioners has given approval for the 2023 Annual Work and Budget Plan (RKAT) and perceives that the Company's business prospects, which have been prepared by the Board of Directors as stated in the Company's work plan for 2023, are proper and in line with the Company's short term and long term direction and objectives.

Kata Penutup

Closing Remarks

Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga P3IEI dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Pencapaian yang dicatatkan Perusahaan pada tahun 2022, kami sadari tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran Direksi dan karyawan P3IEI serta para Pemangku Kepentingan lainnya. Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI, dan KSEI sebagai Pemegang Saham Perusahaan, serta kepada semua pihak atas kerjasamanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi Perusahaan beserta seluruh karyawan atas seluruh dedikasi, kerja keras, dan kolaborasinya sehingga Perusahaan dapat terus memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2022.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh Pemegang Saham, Anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya, P3IEI dapat menjadi bagian dalam peningkatan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Terima kasih telah bersama kami selama ini. Dengan optimisme dan keyakinan, kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal demi terciptanya Pasar Modal Indonesia yang aman dan nyaman bagi kita semua. Akhir kata, Dewan Komisaris akan senantiasa mendorong kontribusi Perusahaan yang signifikan bagi kemajuan Pasar Modal Indonesia.

We are grateful for all the abundance of grace from the God Almighty, so that Indonesia SIPF can become an Investor Protection Fund Institution as mandated by the regulations. We realize that the achievements recorded by the Company in 2022 could not have been achieved without the support of Indonesia SIPF's Directors and employees as well as our dear stakeholders. Thank you to OJK as the Capital Market regulator in Indonesia, to IDX, KPEI, and KSEI as shareholders of the Company, and all parties for their cooperation in building a trusted Investor Protection Fund Institution. We also express our appreciation to the Company's Directors and all employees for their dedication, hard work and collaboration so that the Company is still able to provide added value to stakeholders and show good performance in 2022.

We are optimistic that with the support of OJK, all shareholders, IPF members, business partners and stakeholders, Indonesia SIPF can take a part in efforts to improve investors' confidence in investing in the Indonesian Capital Market. Thank you for being with us all this time. With optimism and enthusiasm, we always strive to provide optimal service for the establishment of a safe and comfortable Indonesian Capital Market for all of us. Finally, the Board of Commissioners will continue to encourage the Company's significant contribution to the progress of Indonesia Capital Market.



Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Direksi atas Laporan Tahunan 2022

Board of Directors' Statement of Responsibility for the 2022 Annual Report

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2022 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

With God's blessing and grace, the Board of Directors of Indonesia SIPF delivered the 2022 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2022 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.

Jakarta, 23 Juni 2023

Narotama Aryanto
DIREKTUR UTAMA

President Director

Mariska Aritany Azis
DIREKTUR

Director



Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2022

Board of Commissioner' Statement of Responsibility for the 2022 Annual Report

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2022 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

With God's blessing and grace, the Board of Commissioner of Indonesia SIPF delivered the 2022 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2022 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.

Jakarta, 23 Juni 2023

Lucia Sintha Sari
KOMISARIS UTAMA

President Commissioner

Dian Kurniasarie
KOMISARIS

Commissioner



Profil Perusahaan

Company Profile


METROPOLITAN
THEATER
KIDZANIA



Professionalism



Nilai Professionalism menekankan pada pemberian hasil kinerja terbaik sesuai dengan tuntutan profesi dengan selalu mengembangkan diri dalam menjaga kualitas profesi. Profesionalisme lebih lanjut dijabarkan ke dalam konsep kompeten, bertanggung jawab, bekerja efisien & efektif, serta meningkatkan pengetahuan & pengembangan diri. Melalui nilai kompeten, karyawan diekspektasi memiliki kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dalam lingkup tanggung jawabnya agar dapat menghasilkan output/outcome dengan kualitas yang telah ditetapkan atau disepakati, kemudian bertanggung jawab dalam pengertian bersunguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan perannya serta tidak melepaskan diri dari apapun hasil dari perbuatannya. Karyawan Perusahaan juga diharapkan bekerja efisien & efektif guna menghasilkan *output/outcome* yang optimal dengan menggunakan sumber daya seminim mungkin dan dengan cara yang cermat, cepat dan tepat. Selanjutnya, karyawan didorong untuk terus meningkatkan pengetahuan & pengembangan diri serta menjaga kompetensi untuk selalu dapat mengikuti perkembangan internal maupun eksternal agar selalu dapat berkontribusi dengan baik bagi pencapaian sasaran Perusahaan

Professionalism emphasizes delivering the best performance by the profession's demands, continuously developing oneself to maintain professional quality. Professionalism is further described by the concepts of competence, responsibility, efficient and effective work, knowledge, and self-development. Through competence, employees are expected to have the skills and abilities to perform their responsibilities within their scope, producing outputs/outcomes of predetermined or agreed-upon quality. Responsibility means earnestly carrying out tasks and roles and not absolving oneself from the consequences of one's actions. Employees are also expected to work efficiently and effectively, aiming to produce optimal outputs/outcomes using minimal resources and carefully, quickly, and accurately. Furthermore, employees are encouraged to continually improve their knowledge and self-development, maintaining competence to adapt to internal and external developments and contribute effectively to achieving company goals.

Informasi Umum

General Information

Nama dan Domisili Perusahaan

◎ *Company Name and Domicile*

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)

Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)

Berlokasi di Jakarta, Indonesia

◎ *Based in Jakarta, Indonesia*

Alamat Perusahaan

◎ *Company Address*

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

- Phone +6221 - 5155553
- Fax +6221 - 5155556
- Email: helpdesk@indonesiasipf.co.id
- www.indonesiasipf.co.id

Tanggal Pendirian

◎ *Date of Establishment*

7 Desember 2012 • *December 7, 2012*

Modal Dasar

◎ *Authorized Capital*

Rp 240 miliar • *IDR 240 billion*

Modal Ditempatkan

◎ *Issued Capital*

Rp 210 miliar • *IDR 210 billion*

Kepemilikan

◎ *Ownership*

33.33%
Bursa Efek Indonesia (BEI)
◎ *Indonesia Stock Exchange*

33.33%
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
◎ *Indonesia Clearing and Guarantee Corporation*

33.33%
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
◎ *Indonesia Central Securities Depository*

Jumlah Pegawai

◎ *Number of Employees*

Per Desember 2022 sebanyak 11 orang

◎ *As of December 2022 there were 11 employees*

Wilayah Operasional Perusahaan

◎ *Company Operational Area*

Cakupan Perusahaan mencapai seluruh wilayah Indonesia, tetapi hanya memiliki kantor di Jakarta.

◎ *The company covers all regions of Indonesia, but it only has an office in Jakarta.*

Keanggotaan Asosiasi Industri

◎ *Membership of Industry Association*

Tidak Ada

◎ *None*



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Law of the Republic of Indonesia (UU) Number 8 of 1995 concerning Capital Markets

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds

Akta Pendirian Perseroan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik
Deed of Establishment of Company Number 16 December 7, 2012 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary

Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated 11 September 2013 concerning Granting of Business Licensing for the Provider of Capital Protection Funds to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Akta Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dibuat dihadapan Eko Putranto, Sarjana Hukum, Notaris
Deed of Amendment to Increase of Issued / Paid Up Capital No. 10 dated June 26, 2020. Made before Eko Putranto, Bachelor of Law, Notary

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of The Company



Pada tahun 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) membentuk Tim Studi untuk melakukan penelitian mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim tersebut merekomendasikan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dengan membangun infrastruktur yang memadai, termasuk peraturan dan kesiapan para pelaku pasar modal. Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Tim PT Bursa Efek Indonesia melakukan riset dari tahun 2010 hingga 2012 untuk mempersiapkan pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Pada 23 September 2012, *Technical Assistant* dari Asian Development Bank merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal. Pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai Perusahaan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal. OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 dan VI.A.5 serta POJK No. 49/POJK.04/2016 dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menjadi dasar pelindungan oleh PDPP.

Dengan mengacu pada peraturan tersebut, P3IEI menjadi Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal melalui izin usaha yang diterbitkan oleh OJK pada tanggal 11 September 2013. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang dapat digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal dan dikelola oleh P3IEI. Pada tanggal 6 Agustus 2015, diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Pada 2021, terdapat kenaikan batas paling tinggi ganti rugi pemodal yang ditetapkan menjadi Rp200 juta per pemodal atau naik 100% dari Rp100 juta per pemodal dan Rp100 miliar per Kustodian dari Rp50 miliar per Kustodian. Kenaikan tersebut sejalan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.Kep-69/D.04/2020 yang diterbitkan pada 2 Januari 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

In 2007, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) formed a Study Team to research the establishment of an Investor Protection Fund in the Indonesian Capital Market. The team recommended the establishment of an Investor Protection Fund by building adequate infrastructure, including regulations and readiness of market participants. In 2010, the Ministry of Finance incorporated this plan in the Capital Market Master Plan and Non-Bank Financial Industry 2010-2014 under Strategy 5, Program 2. The Financial Services Authority (OJK) issued a policy regarding establishing the Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operational activities.

From 2010 to 2012, the Indonesian Stock Exchange (IDX) researched to prepare for establishing the Investor Protection Fund. On September 23, 2012, the Technical Assistant from the Asian Development Bank recommended establishing a new company or institution as a place for Investor Protection. On December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) was established as a company to organize the Investor Protection Fund Program. OJK issued Bapepam-LK Regulation No. VI.A.4 and VI.A.5 and POJK No. 49/POJK.04/2016 and POJK No. 50/POJK.04/2016 regarding the Investor Protection Fund and the Investor Protection Fund Institution. In 2023, Indonesia Government has ratified Law No. 4 Year 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) which becomes the foundation of IPF Institution coverage.

Referring to these regulations, Indonesia SIPF became the company authorized as the Investor Protection Fund Organizer through a business license issued by the OJK on September 11, 2013. The Investor Compensation Fund (CGRP) is a fund that can be used to provide compensation to investors and is managed by Indonesia SIPF. On August 6, 2015, the Investor Compensation Fund Provision Agreement was signed between the Indonesia Stock Exchange, the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, the Indonesian Central Securities Depository, and PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. In 2021, there was an increase in the maximum compensation limit for investors, set at IDR200 million per investor, or an increase of 100% from IDR100 million per investor and IDR100 billion per investor Custodian from IDR50 billion per Custodian. This increase aligns with the Financial Services Authority Commissioner's Decision No. Kep-69/D.04/2020, issued on January 2, 2021, regarding the amendment to the Financial Services Authority Commissioner's Decision No. KEP-46/D.04/2015 regarding Determining the Maximum Limit for Payment of Compensation for Each Investor and Each Custodian Using the Investor Protection Fund.

Visi dan Misi

Vision and Mission

VISI *Vision*

MENJADI PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN PEMODAL YANG HANDAL DAN TERPERCAYA DI PASAR MODAL INDONESIA.

To become a reliable and trustworthy Investor Protection Program Institution in the Indonesian Capital Market.

MISI *Mission*

MEMBERIKAN RASA AMAN DAN NYAMAN DALAM BERINVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA MELALUI PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PEMODAL.

To provide a sense of security and convenient in investing in the Indonesian Capital Market by providing protection for investor assets.

Budaya dan Nilai Perusahaan

Corporate Culture and Value

P3IEI mengharuskan semua pimpinan dan karyawan Perusahaan untuk mematuhi dan mengimplementasikan nilai-nilai, budaya, dan norma perilaku yang ada dalam lingkungan kerja sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Ada beberapa nilai budaya inti yang harus diterapkan, di antaranya:

Indonesia SIPF requires all leaders and employees of the company to adhere to and implement the values, culture, and behavioral norms present in the daily work environment. This is aimed at achieving the company's vision, mission, and goals. There are several core cultural values that must be applied, including:

I - PROTECT

Integrity. *Integritas*

Bertindak Jujur, Disiplin,
Komitmen, Konsisten terhadap Nilai Etika

Act Honestly, Discipline,
Commitment, Consistent with Ethical Values

Professionalism. *Profesionalisme*

Kompeten, Bertanggung Jawab, Bekerja Efisien & Efektif,
Meningkatkan Pengetahuan & Pengembangan Diri

Competent, Responsible, Work Efficiently & Effectively,
Increase Knowledge & Self-Development

Team Work. *Kerjasama*

Mengedepankan Kepentingan Bersama,
Proaktif, Fokus pada Tujuan

Prioritizing Common Interests
Proactive, Focus on Objectives

Customer Focus. *Fokus pada Pelanggan*

Komunikatif, Responsif,
Berempati, Adaptif

Communicative, Responsive,
Empathize, Adaptive

Kegiatan dan Bidang Usaha

Corporate Activities and Scope of Business



Berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor S-1504/PM.21/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan Pemegang Saham P3IEI melalui Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham pada tanggal 17 Januari 2022, serta telah dilegalisasi melalui Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 04 Februari 2022, P3IEI telah secara resmi melakukan Perubahan pada Akta Pendirian No. 16 Tanggal 7 Desember 2012 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Based on the approval of the Financial Services Authority through letter number S-1504/PM.21/2021 dated December 27, 2021, and the Shareholders of Indonesia SIPF through the decision taken outside the Shareholders' Meeting on January 17, 2022, which was subsequently legalized through Deed of Statement of Decision taken outside the Shareholders' Meeting number 01 dated February 4, 2022, Indonesia SIPF has officially made amendments to the Articles of Association No. 16 dated December 7, 2012, of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia regarding the Purpose and Objectives, as well as the Company's activities, as follows:

1. Maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dalam bidang perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia termasuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengadministrasian dana perlindungan pemodal;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu,
   a. Mengelola dan mengadministrasikan dana perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
   b. Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
   c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut;
   d. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
   e. Melakukan tindakan untuk pengembalian *(recovery)* dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hal pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian termasuk namun tidak terbatas, ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
   f. Mewakili pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal;
   g. Mengadministrasikan dan menjalankan kegiatan lain sehubungan dengan tugas dan peran terkait Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia; dan
   h. Melakukan kegiatan lain sehubungan dengan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia sesuai dengan arahan dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau pemangku kebijakan terkait lainnya.

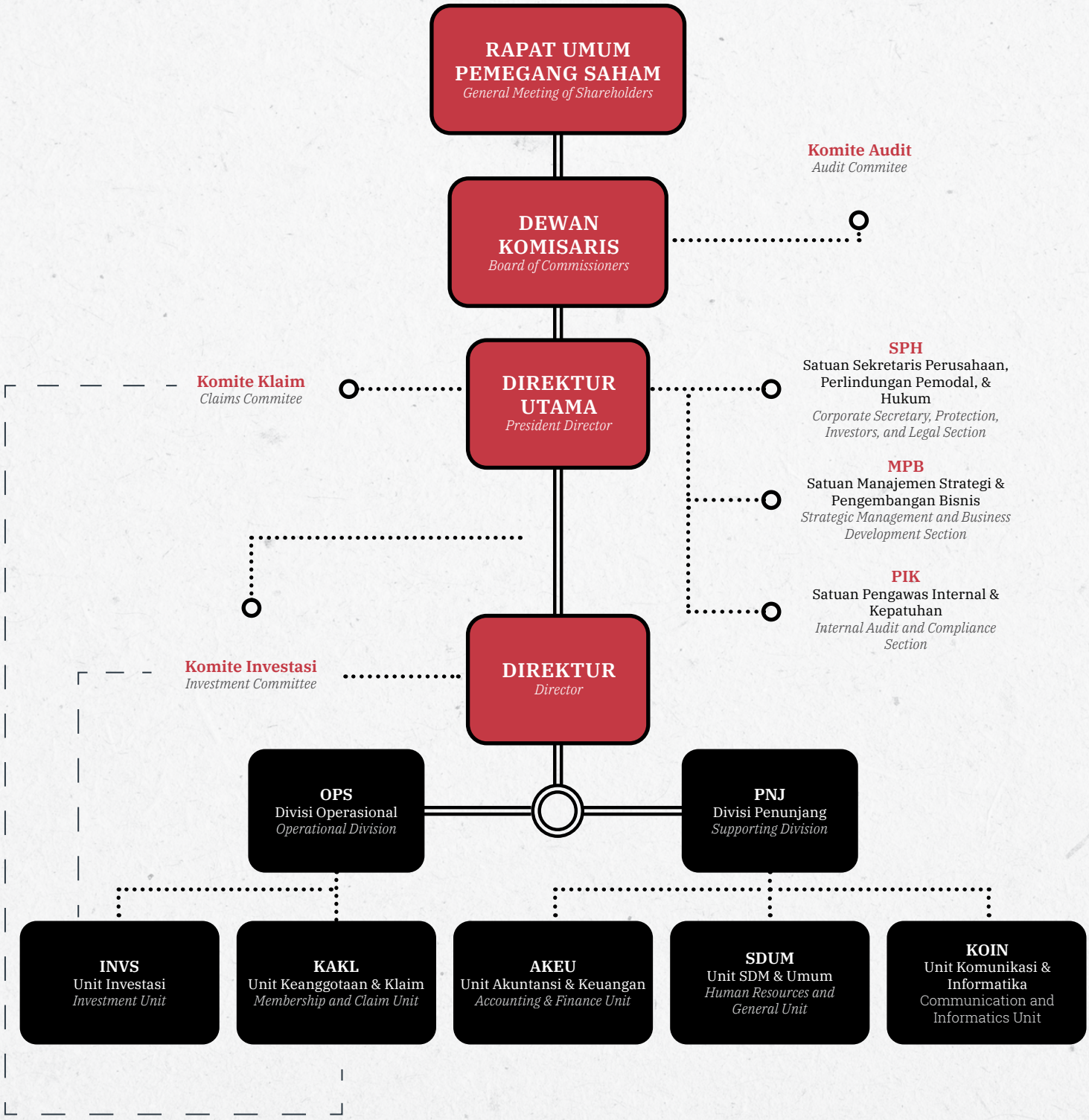
Perubahan Maksud dan Tujuan pada Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka upaya P3IEI untuk dapat memperluas cakupan perlindungan yang dapat diberikan kepada pemodal di Pasar Modal Indonesia. Selain itu, dengan dilakukannya perubahan ini diharapkan dapat membuat peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal lebih leluasa dalam memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia kedepannya, khususnya dalam hal perlindungan pemodal.

1. The Company's purpose and objectives are to engage in investor protection in the Indonesian Capital Market, including implementing, managing, and administrating investor protection funds.
2. To achieve the purpose above and its objectives, the Company may carry out the following business activities:
   a. Managing and administering investor protection funds in the Indonesian Capital Market.
   b. Investing investor protection funds in the Indonesian Capital Market.
   c. Conducting inspections, verifications, and analyses of claims submitted by investors in the Indonesian Capital Market, making claim payments approved by the Financial Services Authority, and taking other actions related to such claims.
   d. Receiving additional funds and/or collecting fees related to investor protection activities in the Indonesian Capital Market.
   e. Taking actions to recover funds that have been disbursed from the Investor Protection Fund for claim payments based on subrogation against parties who have caused losses, including but not limited to participating in legal processes inside and outside the Court.
   f. Representing investors in requesting compensation for the loss of Investor Assets that the Investor Protection Fund does not compensate.
   g. Administering and implementing other activities related to the duties and roles concerning Disgorgement and Disgorgement Fund in the Indonesian Capital Market.
   h. Carrying out other activities related to investor protection in the Indonesian Capital Market with the guidance and approval of the Financial Services Authority (OJK) and/or other relevant policyholders.

The amendment of the Purpose and Objectives in these Articles of Association is carried out in Indonesia SIPF's efforts to expand the scope of protection that can be provided to investors in the Indonesian Capital Market. Moreover, with this amendment, it is expected that Indonesia SIPF's role as the Implementer of Investor Protection Funds will give more freedom to positively contribute to the future development of the Indonesian Capital Market, particularly regarding investor protection.

Struktur Organisasi

Organizational Structure





Profil Direksi

Board of Directors Profile



Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA
President Director

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Lahir di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1985 (37 Tahun).
Born in Jakarta on December 4, 1985 (37 years old).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0033406.

PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2008
- Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan gelar profesi PPAk pada tahun 2010

PERJALANAN KARIR

- Auditor Junior di KAP Kosasih & Nurdiyaman (Desember 2005 - April 2006)
- Konsultan Akuntansi di Transaction Support Consultant (Agustus 2006 - Desember 2006)
- Asisten Dosen Program Diploma III Akuntansi (FEUI) (Agustus 2007 - Desember 2008)
- Auditor Senior di KAP RSM AAJ Associates (Oktober 2008 - Desember 2009)
- Asisten Dosen Program S1 Ekstensi Akuntansi FEUI (Agustus 2009 - Juni 2010)
- Program MT PT BCA Tbk (Juli 2010 - Juni 2011)
- Penugasan Khusus pada Tim Monitoring Anak Usaha PT BCA Tbk, Jakarta (Juni 2011 - Desember 2011)
- Internal auditor supervisor di PT BCA Tbk (Januari 2012 - September 2013)
- Manager senior internal audit di PT Bursa Efek Indonesia (September 2013 - September 2020).
- Selain menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI, saat ini beliau juga aktif sebagai pengajar Program Sertifikasi The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) sejak Maret 2019.

PERIODE MENJABAT

- 2019-2022 (Periode Pertama)
- 2022-2025 (Periode Kedua)

RANGKAP JABATAN

- Tidak memiliki jabatan struktural lain diluar P3IEI.

POSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

He is the current President Director of Indonesia SIPF, serving in this role based on the deed Notary Deed Number 16 dated June 21, 2022 made by Notary Eko Putranto, SH, domiciled in South Jakarta which was registered with the Ministry of Law and Human Rights with Number AHU-AH.01.09-0033406.

EDUCATION

- Bachelor of Economics from the Faculty of Economics, University of Indonesia (FEUI) in 2008
- Master of Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia and PPAk professional degree in 2010

CAREER EXPERIENCE

- Junior Auditor at KAP Kosasih & Nurdiyaman (December 2005 - April 2006)
- Accounting Consultant at Transaction Support Consultant (August 2006 - December 2006)
- Assistant Lecturer for the Diploma III Accounting Program at FEUI (August 2007 - December 2008)
- Senior Auditor at KAP RSM AAJ Associates (October 2008 - December 2009)
- Assistant Lecturer for the S1 Extension Accounting Program at FEUI (August 2009 - June 2010)
- Management Trainee Program at PT BCA Tbk (July 2010 - June 2011)
- Special Team Member for Monitoring Subsidiaries at PT BCA Tbk, Jakarta (June 2011 - December 2011)
- Internal Audit Supervisor at PT BCA Tbk (January 2012 - September 2013)
- Senior Manager of Internal Audit at PT Bursa Efek Indonesia (September 2013 - September 2020).
- Apart from serving as the President Director of Indonesia SIPF, currently he is also active as a lecturer at The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) Certification Program since March 2019.

TERM OF OFFICE

- 2019-2022 (First Period)
- 2022-2025 (Second Period)

CONCURRENT POSITION

- Does not have other structural positions outside Indonesia SIPF.



Mariska Aritany Azis

DIREKTUR
Director

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1984 (38 tahun).
Born in Jakarta on May 12, 1984 (38 years old).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur P3IEI berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0033406.

PENDIDIKAN

- Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001.

PERJALANAN KARIR

- Auditor di KAP Osman Bing Satrio & Rekan dari September 2001 hingga Juni 2005
- Manager Keuangan dan Akuntansi di PT Smart Energy Indonesia & Group dari Juni 2005 hingga Februari 2010
- Manager Keuangan dan Akuntansi di PT MindChamps Indonesia & Group dari Maret 2010 hingga April 2013.
- Kepala Divisi Penunjang di PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia dari Mei 2013 hingga September 2020
- Pelaksana Tugas Kepala Divisi Operasional II PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia pada Januari 2014 - Juni 2014 dan Juni 2016 - Agustus 2016.

PERIODE MENJABAT

- 2019-2022 (Periode Pertama)
- 2022-2025 (Periode Kedua)

RANGKAP JABATAN

- Beliau tidak memiliki jabatan struktural lain diluar P3IEI.

POSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

She has been the Director of Indonesia SIPF based on the deed Notary Deed Number 16 dated June 21, 2022, made by Notary Eko Putranto, SH, domiciled in South Jakarta, which was registered with the Ministry of Law and Human Rights with Number AHU-AH.01.09-0033406.

EDUCATION

- Bachelor of Economics from the Faculty of Economics, University of Indonesia (FEUI) in 2001.

CAREER EXPERIENCE

- Auditor at KAP Osman Bing Satrio & Rekan (September 2001 - June 2005)
- Financial and Accounting Manager at PT Smart Energy Indonesia & Group (June 2005 - February 2010)
- Financial and Accounting Manager at PT MindChamps Indonesia & Group (March 2010 - April 2013)
- Head of Supporting Division at PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (May 2013 - September 2020)
- Acting Head of Operational Division II at PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (January 2014 - June 2014 and June 2016 - August 2016).

TERM OF OFFICE

- 2019-2022 (First Period)
- 2022-2025 (Second Period)

CONCURRENT POSITION

- Does not have other structural positions outside Indonesia SIPF.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Affiliate Relations of Members of The Board of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan Dengan *Financial Relations With*						Hubungan Keluarga Dengan *Family Relations With*					
		Dewan Komisaris *Board of Commissioner*		Direksi *Board of Director*		Pemegang Saham Utama dan Pengendali *Controlling Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioner*		Direksi *Board of Director*		Pemegang Saham Utama dan Pengendali *Board of Director*	
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Narotama Aryanto	Direktur Utama *President Director*	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Mariska Aritany Azis	Direktur *Director*	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Changes in The Composition of The Members of The Board of Directors and The Reasons for The Changes

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0033406. Perubahan susunan Direksi sesuai dengan periode masa jabatan Direksi yang habis pada tahun 2022. Perubahan susunan Direksi untuk masa jabatan 2022-2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut

Based on Notarial Deed Number 16 dated June 21, 2022, made by Notary Eko Putranto, S.H., located in South Jakarta and registered with the Ministry of Law and Human Rights under Number AHU-AH.01.09-0033406. The change in the composition of the Board of Directors is in accordance with the Director's term of office, that ended in 2022. The change in the composition of the Board of Directors for the 2022-2025 term can be seen in the following table

Nama Jabatan *Position Title*	Masa Jabatan *Length of Service*	
	2019-2022 (hingga 21-6-2022) (up to 6-21-2022)	2022-2025 (mulai 21-6-2022) (since 6-21-2022)
Direktur Utama *President Director*	Narotama Aryanto	Narotama Aryanto
Direktur *Director*	Mariska Aritany Azis	Mariska Aritany Azis


INDONESIA
SIPF
INDONESIA
SIPF

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Lucia Sintha Sari

KOMISARIS UTAMA
President Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Lahir di Kendari, pada tanggal 9 Desember 1968 (54 Tahun).
Born in Kendari on December 9, 1968 (54 years old).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Juni 2022 berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0033406.

PENDIDIKAN

- Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada tahun 1992.

PERJALANAN KARIR

- Staf Manajemen Risiko PT Kliring Deposit Efek Indonesia (November 1993-September 1997)
- PIC Unit Perhitungan Hak dan Kewajiban KPEI (Oktober 1997-Desember 2000)
- Kepala Unit SDM KPEI (Januari 2001-Mei 2013)
- Kepala Divisi SDM dan Urusan Umum KPEI (Juni 2013-Januari 2018)
- Kepala Satuan Pemeriksa Internal KPEI (Februari 2018-Juni 2022).

PERIODE MENJABAT

- 2022-2025 (Periode Pertama)

RANGKAP JABATAN

- Selain menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI, saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sejak 1 Juli 2022.

POSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

She has served as the President Commissioner of P3IEI since June 2022, based on Deed No. 16 dated June 21, 2022, made by Notary Eko Putranto, S.H., located in South Jakarta and registered with the Ministry of Law and Human Rights under number AHU-AH.01.09-0033406.

EDUCATION

- She obtained her Bachelor's degree from the Faculty of Agricultural Technology at the Bogor Agricultural University, West Java, in 1992.

CAREER EXPERIENCE

- Risk Management Staff at PT Kliring Deposit Efek Indonesia (November 1993-September 1997)
- PIC of the Rights and Obligations Calculation Unit at IDClear (October 1997-December 2000)
- Head of the Human Resources Unit at IDClear (January 2001-May 2013)
- Head of the Human Resources and General Affairs Division at IDClear (June 2013-January 2018)
- Head of the Internal Audit Unit at IDClear (February 2018-June 2022).

TERM OF OFFICE

- 2022-2025 (First Period)

CONCURRENT POSITION

- In addition to serving as the President Commissioner of Indonesia SIPF, she currently also serves as the Corporate Secretary of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear) since July 1, 2022.



Dian Kurniasarie

KOMISARIS
Commissioner

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Lahir di Jakarta, pada tanggal 20 September 1970 (52 Tahun).
Born in Jakarta on September 20, 1970 (52 years old).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Beliau menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Juni 2022 berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0033406.

PENDIDIKAN

- Sarjana dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika Universitas Indonesia pada tahun 1995
- Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2011.

PERJALANAN KARIR

- Staf Business Analyst and Acceptance di PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) (Oktober 1995-Desember 1997)
- Staf Business Analyst and Acceptance KSEI (Desember 1997-Maret 2002)
- Kepala Unit Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI (Maret 2002-Oktober 2013).

PERIODE MENJABAT

- 2022-2025 (Periode Pertama)

RANGKAP JABATAN

- Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sejak Oktober 2013.

POSITION AND BASIS OF APPOINTMENT

She has been a Commissioner of Indonesia SIPF since June 2022, based on Deed No. 16 dated June 21, 2022, made by Notary Eko Putranto, S.H., located in South Jakarta and registered with the Ministry of Law and Human Rights under number AHU-AH.01.09-0033406.

EDUCATION

- Bachelor's degree from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, majoring in Mathematics, University of Indonesia in 1995
- Master of Management from the Faculty of Economics, University of Indonesia in 2011.

CAREER EXPERIENCE

- Business Analyst and Acceptance staff at PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) (October 1995-December 1997)
- KSEI Business Analyst and Acceptance Staff (December 1997-March 2002)
- Head of KSEI Research and Business Development Unit (March 2002-October 2013).

TERM OF OFFICE

- 2022-2025 (First Period)

CONCURRENT POSITION

- She currently also serves as the Head of the Business Research and Development Division at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) since October 2013.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Affiliate Relations of Members of The Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan Dengan *Financial Relations With*						Hubungan Keluarga Dengan *Family Relations With*					
		Dewan Komisaris *Board of Commissioner*		Direksi *Board of Director*		Pemegang Saham Utama dan Pengendali *Controlling Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioner*		Direksi *Board of Director*		Pemegang Saham Utama dan Pengendali *Board of Director*	
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Lucia Sintha Sari	Komisaris Utama *President Commissioner*	☐	☒	☐	☒	☒*	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Dian Kurniasarie	Komisaris *Commissioner*	☐	☒	☐	☒	☒**	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒

**Lucia Sintha Sari saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear) sejak 1 Juli 2022.*
Lucia Sintha Sari currently also serves as the Corporate Secretary of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear) since July 1, 2022

*** Dian Kurniasarie saat ini juga menjabat sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sejak Oktober 2013.*
Dian Kurniasarie currently also serves as the Head of the Business Research and Development Division at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) since October 2013.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Changes in The Composition of The Members of The Board of Commissioners and The Reasons for The Changes

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0033406. Perubahan susunan dewan komisaris sesuai dengan periode masa jabatan komisaris yang habis pada tahun 2022. Perubahan susunan dewan komisaris untuk masa jabatan 2022-2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut

Based on Notarial Deed Number 16 dated June 21, 2022, made by Notary Eko Putranto, S.H., located in South Jakarta and registered with the Ministry of Law and Human Rights under Number AHU-AH.01.09-0033406. The change in the composition of the board of commissioners is in accordance with the commissioner's term of office, that ended in 2022. The change in the composition of the board of commissioners for the 2022-2025 term can be seen in the following table.

Nama Jabatan *Position Title*	Masa Jabatan *Length of Service*	
	2019-2022 (hingga 21-6-2022) (up to 6-21-2022)	2022-2025 (mulai 21-6-2022) (since 6-21-2022)
Direktur Utama *President Director*	Dewi Arum Prasetyaningtyas	Lucia Sintha Sari
Direktur *Director*	Roni Gunardi	Dian Kurniasarie


INDONESIA
SIPI

Pengelolaan *Human Capital*

Human Capital Management

Modal manusia *(human capital)* merupakan dasar dari kesuksesan organisasi yang perlu untuk terus dikembangkan. Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi P3IEI tentunya sangat bergantung pada keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan dikelola dengan baik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengembangan SDM pada tahun 2022 difokuskan pada pengembangan yang berkelanjutan, pengembangan kompetensi sesuai standar jabatan, serta peningkatan budaya kerja Perusahaan yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan kode etik Perusahaan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perusahaan telah memberlakukan sistem pengembangan SDM, yang mencakup peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun perilaku karyawan.

Human capital is a cornerstone of organizational success that needs to be continuously developed. The smooth execution of tasks and functions of Indonesia SIPF is undoubtedly highly dependent on the presence of competent and well-managed human resources. As in previous years, the development of Human Resources (HR) in 2022 focused on sustainable development in several areas, the development of competencies per job standards, and the improvement of the company's work culture that supports its vision, mission, strategic objectives, and code of ethics. To create a conducive work environment, the company has implemented an HR development system, which includes improving employee competencies in technical skill and employee behavior.

Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja

Gender Equality and Employment Opportunities

P3IEI selalu menjunjung praktik pengelolaan SDM yang profesional tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, status sosial, *gender*, dan kondisi fisik karyawan atau calon karyawan P3IEI. Hal ini terutama berlaku dalam aspek seperti rekrutmen, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pengembangan karier, dan penugasan pekerjaan.

Berdasarkan jumlah pegawai pada akhir 2022, P3IEI memiliki 10 pegawai tetap yang dibagi menjadi 2 pegawai perempuan dan 8 pegawai pria. Hal ini ditunjukkan oleh tabel komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan status (tetap, kontrak) (2018 – 2022).

Indonesia SIPF always upholds professional HR management practices without discriminating against race, ethnicity, religion, social status, gender, and physical condition of its employees or prospective employees. This applies particularly to aspects such as recruitment, performance assessment, compensation system, career development, and job allocation.

Based on the number of employees at the end of 2022, Indonesia SIPF had 10 permanent employees consisting of 2 female employees and 8 male employees. This is shown by the table of employee composition by gender and employment status (permanent, contract) from 2018 to 2022.

Profil Pegawai

Employee Profile

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin & Status Kepegawaian Periode Desember (2018-2022)
Number of Employees Based on Gender & Employment Status December (2018-2022)

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status (Tetap, Kontrak) *Employee Composition Based on Status (Permanent, Contract)*	2022		2021		2020		2019		2018	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
Status Tetap *(Permanent)*	8	2	8	2	6	3	8	3	8	3
Status Kontrak *(Contract)*	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-
TOTAL	9	2	9	2	8	3	10	3	10	3

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Usia Periode Desember (2018-2022)
Number of Permanent Employees by Age December (2018-2022)

Kelompok Usia Pegawai Tetap *Permanent Employee based on Age Group*	2022		2021		2020		2019		2018	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
< 25 Thn *(Years Old)*	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25 - 35 Thn *(Years Old)*	6	2	7	2	5	2	5	3	5	3
36 - 45 Thn *(Years Old)*	2	-	1	-	1	-	1	-	2	-
TOTAL	8	2	8	2	6	2	6	3	8	3

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female

Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Usia Periode Desember (2018-2022)
Number of Permanent Employees by Age December (2018-2022)

Tingkat Pendidikan Pegawai Tetap *Permanent Employee based on Education Level*	2022		2021		2020		2019		2018	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
SMA *(High Shool)*	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S1 *(Bachelor)*	5	1	5	1	3	1	3	2	4	2
S2 *(Master)*	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
TOTAL	8	2	8	2	6	2	6	3	8	3

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female

Kesempatan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai

Employment Opportunities and Employee Levels

Perekrutan karyawan di P3IEI dilakukan secara transparan, selektif, daya guna, dan hasil guna dengan berdasarkan pada RKAT dan perencanaan kebutuhan SDM sebagai acuan. Unit SDM & Umum bertanggung jawab dalam proses rekrutmen, yang melalui serangkaian tahap seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, psikotes, tes kesehatan, dan tes lainnya yang diperlukan. Pengumuman rekrutmen mencantumkan jenis lowongan pekerjaan, syarat-syarat pelamar, alamat tempat pengajuan lamaran, dan batas waktu pengajuan. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan, namun juga melakukan promosi berdasarkan kebutuhan operasional dan kualifikasi posisi. Semua kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi Perusahaan.

Indonesia SIPF's employee recruitment process is carried out transparently, selectively, effectively, and efficiently based on the annual work plan and the human resources planning as a reference. The HR & General Unit is responsible for the recruitment process, which includes a series of selection stages such as administrative selection, written tests, interviews, psychological tests, health tests, and other necessary tests. The recruitment announcement includes job vacancies, requirements for applicants, the address for submitting applications, and the deadline for submission. The company provides equal opportunities for qualified employees to fill vacant positions and also promotes them based on operational needs and position qualifications. All of these policies are carried out while taking into account the company's organizational structure.

Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan

Participation in The Health Insurance (BPJS) Program

Perusahaan wajib mengikutsertakan semua karyawannya dalam Program BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur oleh Pemerintah sebagaimana tercakup dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga mengatur pemberian sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan semua karyawannya dalam Program BPJS Kesehatan.

The company is required to include all of its employees in the BPJS Kesehatan program as regulated in the company's regulations. This is because BPJS Kesehatan is one form of social security regulated by the government as stated in Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administrators. In addition, based on Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administrators, administrative sanctions are imposed on employers who do not include all of their employees in the BPJS Kesehatan program.

Peserta BPJS Kesehatan P3IEI tahun 2022

BPJS Participants at P3IEI 2022

Dewan Komisaris beserta keluarga tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan P3IEI. Direksi dan karyawan beserta keluarganya masing-masing wajib diikutsertakan dalam besaran iuran BPJS Kesehatan P3IEI dengan besaran iuran yang ditanggung karyawan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perusahaan yang berlaku serta besaran iuran tidak dibagi per karyawan atau anggota keluarga. Total jumlah Direksi yang diikutsertakan dalam program BPJS adalah 2 orang beserta 4 orang total anggota keluarga Direksi, dengan total iuran tahun 2022 sebesar Rp14.400.000. Adapun total jumlah Karyawan yang diikutsertakan dalam program BPJS adalah 11 orang beserta 16 orang total anggota keluarga Karyawan, dengan total iuran sebesar Rp70.696.458.

The Board of Commissioners and their families were not included in the BPJS Kesehatan program of Indonesia SIPF. The Directors and employees and their respective families were required to participate in the BPJS Kesehatan contribution of Indonesia SIPF with the amount of contributions borne by employees in accordance with the provisions of the applicable Company Regulations and the contribution amounts were not divided per employee or family member. The total number of Directors participating in the BPJS program was 2 persons with a total of 4 family members, with a total contribution in 2022 of IDR14,400,000. The total number of Employees participating in the BPJS program was 11 people with a total of 16 family members, with a total contribution of IDR70,696,458.

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

SDM yang berkualitas dan profesional merupakan dua kunci utama guna mendukung dan membangun Perusahaan menjadi sebuah entitas yang andal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan standar kualitas tinggi, Perusahaan secara terus-menerus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, dengan detail sebagai berikut:

Qualified and professional human resources are two of the main keys to supporting and building the Company into a reliable and credible entity. Therefore, the Company's development process cannot be separated from the process of coaching and developing human resources that are tailored to the needs of the Company.

In improving the quality of human resources with high quality standards, Indonesia SIPF continuously provides training and employee competency development, with the following details:

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan P3IEI 2022
Indonesia SIPF 2022 Board of Commissioners, Directors, and Employees Competency Development

PELATIHAN. *Training*

Inhouse Training: Communication Skill Enhancement *Inhouse Training: Communication Skill Enhancement*	**Direksi dan Seluruh Karyawan** *Directors and all employees*
Special Directorship Program *Special Directorship Program*	**2 (dua) Dewan Komisaris** *2 (two) Board of Commissioners*
IIA *Indonesia Conference: Impactful Internal Audit In a Changing World* *IIA Indonesia Conference: Impactful Internal Audit In a Changing World*	**1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Karyawan** *1 (one) Director and 1 (one) Employee*
Pelatihan *Visualizing Your Data With* Excel 365 Dashboard *Training on Visualizing Your Data With Excel 365 Dashboard*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Pelatihan *Talent Management & Career System* *Training on Talent Management & Career System*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Project Management Professional* (PMP) *Preparation Exam *Project Management Professional (PMP) Preparation Exam*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Seminar Model Baru Meningkatkan Deteksi Gagal Bayar Obligasi *Seminar on New Model for Improving Bond Default Detection*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Pelatihan *Digital Marketing* *Training on Digital Marketing*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Pelatihan *Legislatif Drafting* *Training on Legislative Drafting*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Pelatihan Pendidikan Dasar *Corporate Secretary* *Training on Basic Education for Corporate Secretary*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Pelatihan PSAK *For Professional* *Training on PSAK For Professionals*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
ICSA *Corporate Governance Workshop Series* *ICSA Corporate Governance Workshop Series*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Pelatihan *Budgeting* *Training on Budgeting*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Aman Berinvestasi Surat Utang *Via Risk Scoring Model* *Investing Safely in Bonds Via Risk Scoring Model*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Pelatihan ISO 9001: 2015 *Training on ISO 9001: 2015*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Pelatihan *Sustainability Reporting and* GRI *Standard* *Training on Sustainability Reporting and GRI Standard*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
***Dashboard Design using* Power BI** *Dashboard Design using Power BI*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*

SERTIFIKASI. *Certification*

Sertifikasi Analis Efek *Certification of Securities Analyst*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*
Sertifikasi Analis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi *Certification of Risk Management Officer*	**1 (satu) Karyawan** *1 (one) Employee*

Fungsi-fungsi di Perusahaan senantiasa disesuaikan guna memenuhi pengembangan Perusahaan dalam mencapai visi dan misi serta menjalankan kegiatan operasionalnya. Pemenuhan kebutuhan SDM Perusahaan yang memadai menjadi dasar kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan Perusahaan dalam menjalankan inisiatif strategis, yaitu pengembangan kompetensi karyawan, dengan kegiatan sebagai berikut:

Pengembangan dan Implementasi Program Pelatihan Berbasis *Training Need Analysis* (TNA) dan Sertifikasi

Perusahaan sangat memahami bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen dasar agar Perusahaan dapat menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi SDM yang sangat terbatas secara jumlah saat ini menuntut adanya pelaksanaan fungsi yang beragam pada satu jabatan tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka setiap tahun Perusahaan menjalankan upaya peningkatan kompetensi karyawan melalui pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi berbasis *Training Needs Analysis* (TNA).

Program Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis TNA bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan dan standarisasi kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing karyawan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan program ini mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi karyawan, rekomendasi pelatihan untuk masing-masing karyawan, pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi, dan evaluasi program.

Melalui program kegiatan ini, maka dapat teridentifikasi program pelatihan dan sertifikasi yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi masing-masing karyawan yang terlaksana secara tepat waktu, tepat anggaran, dan sesuai spesifikasi yang diharapkan.

Analisis Pemenuhan Kompetensi Dasar Jabatan

Sebagai komponen pendukung utama dalam pencapaian kinerja Perusahaan, SDM Perusahaan harus memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi karyawan dapat dilihat dari kemampuan karyawan melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas dan tanggung jawabnya. Analisis pemenuhan kompetensi jabatan menjadi faktor penting untuk menilai kemampuan dan potensi kinerja karyawan untuk menunjang pencapaian tujuan Perusahaan. Analisis pemenuhan kompetensi tersebut juga akan menjadi dasar kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan.

Melalui kegiatan ini, maka Perusahaan memperoleh laporan hasil analisis penilaian tingkat kompetensi masing-masing karyawan sesuai jabatannya. Dengan cakupan kegiatan yang dilakukan diantaranya identifikasi kompetensi dasar, evaluasi standar kompetensi, analisis pemenuhan kompetensi, dan rekomendasi pengembangan kompetensi untuk masing-masing karyawan.

Analisis Evaluasi Jabatan dan Struktur Upah Seluruh Jabatan

Struktur organisasi Perusahaan saat ini masih relatif sederhana dengan *span of control* yang pendek. Namun demikian Perusahaan perlu memahami tingkat kepentingan masing-masing jabatan terhadap pelaksanaan fungsi Perusahaan. Semakin penting suatu jabatan terhadap pelaksanaan fungsi Perusahaan, maka semakin tinggi kontribusinya terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Untuk mengkompensasi hal tersebut, maka perlu ditetapkan tingkat remunerasi untuk menjaga penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Memahami hal tersebut, maka Perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi jabatan *(job evaluation)* dan struktur upah *(salary structure)*.

Evaluasi Jabatan dan Struktur Upah adalah suatu teknik untuk menentukan perbedaan-perbedaan diantara jabatan-jabatan dan tingkat pembayaran di dalam Perusahaan sehingga Perusahaan dapat menjaga sumber daya manusianya dengan baik. Penyusunan Kajian Evaluasi Jabatan dan Struktur Upah seluruh jabatan bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan masing-masing jabatan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan, dan menjadi dasar pembayaran terhadap jabatan tersebut guna menjaga ketersediaan sumber daya.

Kegiatan ini terdiri dari dua bagian yaitu evaluasi jabatan yang mencakup kajian mengenai peran dan tanggung jawab setiap jabatan sehingga menjadi kerangka kerja dasar dalam mengelola dan menghargai peran dalam organisasi, struktur gaji yang mencakup kajian perbandingan data pasar meliputi *pay positioning*, analisis terhadap struktur gaji saat ini serta rekomendasi struktur gaji baru dan implikasi biaya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, Perusahaan memperoleh penyampaian hasil analisis laporan kajian evaluasi jabatan dan struktur upah untuk di setiap jabatan.

The functions in the Company are constantly adjusted to meet the development of the Company in achieving its vision and mission as well as carrying out its operational activities. Fulfillment of adequate human resources needs in the Company becomes the basis for the ability to carry out tasks and functions and achieve the Company's goals in implementing strategic initiatives, namely the development of employee competencies, with the following activities:

Development and Implementation of Training Programs based on Training Need Analysis (TNA) and Certification.

The company understands that human resources are the basic element in achieving the company's goals and objectives. The limited number of human resources requires various functions to be carried out by one position. To overcome this issue, the company conducts annual efforts to improve employee competence through training and certification programs based on Training Needs Analysis (TNA).

The TNA-based training and certification program aims to improve the fulfillment and standardization of competencies required by each employee to carry out their tasks and responsibilities. The implementation of this program includes identifying the training and certification needs of employees, recommending training for each employee, implementing the training and certification program, and evaluating the program.

Through this program, appropriate training and certification programs can be identified to meet the competency needs of each employee, which is carried out on time, within budget, and according to the expected specifications.

Basic Job Competency Fulfillment Analysis

As a main supporting component in achieving company performance, the company's human resources must have adequate competencies. Employee competencies can be seen from their ability to carry out a job or task and their responsibilities. Analysis of job competency fulfillment is an important factor in assessing the ability and potential of employee performance to support the achievement of the company's goals. This analysis of competency fulfillment will also be the basis for identifying the competency development needs required by employees.

Through this activity, the company obtains a report on the analysis of the level of competency assessment for each employee according to their position. Activities carried out include identifying basic competencies, evaluating competency standards, analyzing competency fulfillment, and recommending competency development for each employee.

Job Evaluation and Salary Structure Analysis for All Positions

The company's organizational structure is still relatively simple with a short span of control. However, the company needs to understand the level of importance of each position in relation to the company's functions. The more important a position is to the company's functions, the higher its contribution to achieving the company's goals. To compensate for this, it is necessary to establish a level of remuneration to maintain the provision of needed resources. Understanding this, the company needs to conduct job evaluation and salary structure analysis.

Job Evaluation and Salary Structure Analysis is a technique for determining differences between positions and payment levels within the company so that the company can manage its human resources well. The preparation of Job Evaluation and Salary Structure Study for all positions aims to identify the level of importance of each position in achieving the company's goals and serve as the basis for payment towards that position in order to maintain the availability of resources.

This activity consists of two parts, namely job evaluation which includes a study of the roles and responsibilities of each position so that it becomes a basic framework for managing and appreciating roles in the organization, and salary structure which includes a study of market data comparisons including pay positioning, analysis of the current salary structure, and recommendations for a new salary structure and cost implications. Therefore, through this activity, the company obtains a report on the results of the job evaluation and salary structure analysis study for each position.

Remunerasi

Remuneration

P3IEI memiliki komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawannya. Struktur remunerasi didasarkan pada Surat Keputusan Direksi mengenai Struktur dan Skala Upah P3IEI, Penyesuaian Tunjangan di Luar Gaji Pokok P3IEI, serta Peraturan Perusahaan yang berlaku. Setiap tahun, P3IEI menyesuaikan upah karyawan dengan mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran penyesuaian upah tersebut mempertimbangkan perubahan IHK, kinerja karyawan, dan keadaan keuangan Perusahaan.

Struktur gaji yang berlaku di P3IEI didasarkan pada struktur jabatan, dengan mempertimbangkan jenis industri, ukuran bisnis, dan faktor lain yang relevan. Penetapan gaji untuk setiap karyawan harus sesuai dengan struktur gaji yang ditetapkan. P3IEI juga secara berkala melakukan review terhadap struktur gaji agar tetap kompetitif dengan industri sejenis.

Keputusan tentang kebijakan remunerasi juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal P3IEI, termasuk kondisi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, perekonomian Indonesia, Pasar Modal Indonesia dan dunia, serta lingkungan bisnis.

Indonesia SIPF is committed to ensuring the welfare of all its employees. The remuneration structure is based on the Board of Directors' Decree on the Structure and Wage Scale of Indonesia SIPF, the Adjustment of Allowances Outside of Indonesia SIPF's Basic Salary, and the Company's applicable regulations. Every year, Indonesia SIPF adjusts its employees' wages by referring to the changes in the Consumer Price Index (CPI) set by the Central Bureau of Statistics (BPS). The amount of the wage adjustment shall consider the ICP change, employee's performance, and company's financial situation.

The salary structure at Indonesia SIPF is based on the job structure, considering the type of industry, business size, and other relevant factors. The determination of salaries (offerings, promotions, and others) for each employee must be based on the established salary structure. Indonesia SIPF also periodically reviews its salary structure to remain competitive with similar industries.

In addition, the decision on remuneration policies also considers Indonesia SIPF's internal and external conditions, including the company's situation, long-term plans, the Indonesian economy, the Indonesian and global capital markets, and the business environment.


BENDA SEJARAH
01
02

Hubungan Industrial

Industrial Relations

P3IEI berkomitmen untuk membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara Perusahaan dengan karyawan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran bahwa kemajuan kinerja Perusahaan tidak akan tercapai tanpa terciptanya hubungan yang baik dan harmonis antara Perusahaan dan karyawan. Jalinan hubungan yang baik dan harmonis dari hubungan industrial tersebut memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Pada tahun 2022, P3IEI dengan total karyawan sejumlah 11 orang, telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disepakati bersama antara Perusahaan dengan karyawan untuk periode masa berlaku 2021 – 2023, hal tersebut membuktikan bahwa proses komunikasi dan kerja sama yang dibangun antara Perusahaan dan karyawan dapat menghasilkan hal yang positif bagi kemajuan Perusahaan serta kesejahteraan karyawan di masa yang akan datang.

Sehingga dengan kondisi Perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari 20 orang, maka P3IEI belum diwajibkan untuk mengatur tentang keberadaan serikat pekerja dalam Perusahaan. Akan tetapi merujuk pada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa kehadiran serikat pekerja dilindungi oleh Undang-Undang, kemudian di dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 disebutkan mengenai larangan bagi siapa pun yang menghalangi terbentuknya serikat pekerja dan adanya denda bagi Perusahaan yang melakukan pemecatan serta ancaman bagi yang menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat pekerja yang tercantum dalam Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan memfasilitasi karyawan dan memberikan kebebasan untuk bergabung dalam serikat pekerja.

Indonesia SIPF is committed to building and maintaining harmonious industrial relations as a healthy and constructive working relationship system between the Company and its employees. This is done in recognition that the Company's performance can only be achieved with a good and harmonious relationship between the Company and its employees. The goal of fostering a good and harmonious relationship through industrial relations is to enhance productivity and employee well-being.

In 2022, Indonesia SIPF, with only 11 employees, already had a Company Regulation mutually agreed upon between the Company and its employees for 2021-2023. This demonstrates that the communication and cooperation established between the Company and its employees can yield positive outcomes for the Company's progress and the well-being of employees in the future.

Therefore, as the Company has fewer than 20 employees, Indonesia SIPF is not yet required to regulate the existence of labor unions within the Company. However, in Law Number 21 of 2000 concerning Labor Unions, Article 5 states that the presence of labor unions is protected by law, and Article 28 prohibits anyone from obstructing the formation of labor unions. There are penalties for the Company that terminates employees and threats to individuals who are members or officials of labor unions, as stated in Article 43 of Law Number 21 of 2000. Based on these provisions, the Company facilitates employees and grants them the freedom to join labor unions.

Sinergi P3IEI dan Serikat Pekerja

Synergy of Indonesia SIPF and Units of Workers

P3IEI tidak terlibat dalam pembentukan atau bergabung dengan serikat pekerja. Sebagai gantinya, P3IEI memastikan hubungan yang seimbang dengan karyawan guna mencapai suasana kerja yang harmonis, memberikan perlindungan dan keamanan kerja, ketenangan dan kepuasan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan yang disahkan dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2885 Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. Peraturan ini menjadi pedoman umum Perusahaan yang menjelaskan hak dan kewajiban Perusahaan dan karyawan.

Indonesia SIPF is not involved in the formation or joining of labor unions. Instead, Indonesia SIPF ensures a balanced relationship with its employees to achieve a harmonious work environment, provide protection and job security, peace of mind, and job satisfaction to improve work productivity, in accordance with the provisions set forth in Company Regulation ratified by Head of the Jakarta Capital City Manpower, Transmigration, and Energy Decree Number 2885 Year 2021 date 18th October 2021 concerning Company Regulation Ratification approved by the Head of the Jakarta Provincial Office of Manpower and Transmigration. This regulation serves as a general guideline for the company that explains the rights and obligations of both the company and employees.

Keterkaitan dan Kepuasan Pegawai

Relationship and Satisfaction of Employees

Produktivitas Pegawai

Employee Productivity

Pegawai merupakan sumber daya manusia yang menjadi salah satu tonggak kesuksesan Perusahaan. Peningkatan produktivitas pegawai dapat dicapai melalui implementasi pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Produktivitas pegawai diukur melalui perhitungan *output* Perusahaan yaitu hasil usaha dibandingkan input Perusahaan yaitu pegawai. Tingkat produktivitas dihitung dari besaran tingkat pendapatan yang diterima oleh Perusahaan dibandingkan dengan banyaknya jumlah pegawai.

Employees are one of the pillars of the company's success. Improved employee productivity can be achieved through the implementation of good human resource management. Employee productivity is measured by calculating the company's output, which is the business results divided by the input, which is the employees. The level of productivity is calculated based on the level of income received by the company divided by the number of employees.

DESKRIPSI. *Description*	2022	2021	2020	2019	2018
TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN. *Employee Productivity Level*					
Pendapatan (Rp) • *Revenue (Rp)*	17,938,322,728	18,676,228,423	15,087,774,918	15,435,215,163	13,441,436,629
Jumlah Karyawan (orang) • *Number of Employees (person)*	11	11	09	11	13
Produktivitas per karyawan (Rp/orang) • *Productivity per employee (Rp / person)*	**1,630,756,612**	**1,697,838,948**	**1,676,419,435**	**1,403,201,378**	**1,033,956,664**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai produktivitas pegawai P3IEI secara nominal mengalami penurunan pada tahun 2022 dikarenakan terdapat penurunan pendapatan yang terjadi pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh eksternal dari menurunnya suku bunga pasar terutama pada Deposito dan Obligasi pada tahun 2022. Meski demikian, Perusahaan akan terus berusaha untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang dengan melalui pemilihan produk investasi yang memiliki tingkat imbal hasil yang lebih baik dengan tetap memperhatikan Pengelolaan risiko pada tingkat yang terkendali.

Based on the table above, it can be seen that Indonesia SIPF's employee productivity value has decreased in 2022 by numbers due to a decrease in revenue that occurred in that year. This condition due to external factor arising from declining of market interest rates specifically in Time Deposit and Bonds. Nevertheless, the company will continue to strive to enhance productivity in the future, by assessing the investment instrument which shall have a better rate of return, while still prioritizing the risk management in a controllable level.



Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Employment Complaints Mechanism

Sebagai perwujudan dari hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan Karyawan, maka karyawan mempunyai hak dalam menyampaikan keluhan, pengaduan maupun saran-saran yang menyangkut dengan pekerjaan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku, maka pada dasarnya penyampaian keluhan maupun penanganannya dilaksanakan secara bertahap yaitu:

As a manifestation of the harmonious relationship between the Company and the Employees, employees have the right to express complaints, grievances, and suggestions related to their work. As regulated in the provisions of the applicable Company Regulations, the submission of complaints and their handling is carried out gradually, namely:

Langkah 1

Step 1

Karyawan dapat mengungkapkan keluhan-keluhannya serta membahasnya dengan atasan langsung karyawan tersebut atau melalui Unit Sumber Daya Manusia dan Umum

Employees can express their complaints and discuss them with their direct supervisors or through the Human Resources and General Unit

JIKA TIDAK TERSELESAIKAN
If Not Resolved

Langkah 2

Step 2

Mengkonsultasikan persoalan dengan Direksi untuk memperoleh keputusan atau jawaban atas permasalahan yang dihadapi

Consulting with the Board of Directors to obtain decisions or answers to the problems faced

JIKA TIDAK TERSELESAIKAN
If Not Resolved

Langkah 3

Step 3

Karyawan dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi DKI Jakarta untuk menengahi masalah tersebut

Employees can request assistance in resolving the issue from the Jakarta Provincial Office of Manpower and Transmigration to mediate the problem.

Informasi Pemegang Saham

Shareholder Information

PEMEGANG SAHAM. *Shareholder*	**% Kepemilikan.** *Ownership %*
Bursa Efek Indonesia (BEI) • *Indonesia Stock Exchange*	33.33%
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) • *Indonesian Clearing and Guarantee Corporation*	33.33%
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • *Indonesia Central Securities Depository*	33.33%
JUMLAH • *Total*	100.00%

Wilayah Operasi Saat Ini

The Current Area of Operation

Cakupan Perusahaan mencapai seluruh wilayah Indonesia, tetapi hanya memiliki kantor di Jakarta.

The company covers all regions of Indonesia, but it only has an office in Jakarta.

Produk dan Jangkauan Pasar

Products and Market Reach

P3IEI memberikan layanan perlindungan aset untuk pemodal dengan membayar ganti rugi atas kehilangan aset yang diurus oleh Anggota Dana Perlindungan Pemodal, yaitu Bank Kustodian atau Perantara Pedagang Efek. Pembayaran ini menggunakan Dana Perlindungan Pemodal yang diadministrasikan oleh P3IEI.

Indonesia SIPF provides asset protection services for Investors by paying compensation for the loss of assets managed by members of the Investor Protection Fund, namely the Custodian Bank or Broker-Dealer. This payment uses the Investor Protection Fund managed by Indonesia SIPF.

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Agencies and Professions



AUDITOR EXTERNAL. *External Auditor* KAP Heliantono & Rekan.

Alamat • *Address*	Aminta Plaza Building 7th Floor Suite 704 Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310
Jasa yang Diberikan • *Service Description*	Audit Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 *Audit of Financial Statements for Financial Years ended December 31, 2022 and 2021*
	Audit Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 *Audit of Investor Protection Fund Financial Statement for Financial Years ended December 31, 2022 and 2021*
Biaya • *Fee*	Rp100,000,000
Periode Penugasan • *Work Period*	2022
Periode Penggunaan Jasa oleh Kantor Akuntan Publik • *Service Period provided by Public Accounting Firm*	2019-sekarang *2019-present*

Untuk tahun buku 2022, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan untuk melaksanakan lingkup penugasan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Juni 2022. Jumlah *fee* yang diberikan oleh P3IEI terhadap KAP Heliantono & Rekan untuk jenis Jasa tersebut adalah sebesar Rp100.000.000. Selama periode penggunaan jasa oleh kantor akuntan publik tahun 2012 hingga 2022, Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sendiri telah melakukan audit sebanyak 4 kali , yaitu untuk tahun buku 2019, 2020, 2021 dan 2022.

For the 2022 fiscal year, the Company appointed Heliantono & Rekan Public Accountant Firm to perform the scope of the Annual Financial Statement Audit Services. This appointment was made during the Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2022. The fee paid by Indonesia SIPF to Heliantono & Rekan for this type of service is IDR100,000,000. During the audit service provided by public accounting firms between 2012 to 2022, Heliantono & Rekan Public Accountant Office has only conducted audits four times, namely for the fiscal years of 2019, 2020, 2021, and 2022.



Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

External Awards and Acknowledgments

Pada tahun 2022, Perusahaan menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) setelah berhasil melakukan pemecahan rekor kategori *Login* Aplikasi Pasar Modal di Kota Terbanyak se-Indonesia bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dilaksanakan selama perhelatan *event* Investor Protection Month (IPM) 2022.

In 2022, the Company received an award from the Indonesian World Record Museum (MURI) after successfully breaking the record for the category of Capital Market Application Logins in the Most Cities throughout Indonesia with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) which was held during the Investor Protection Month 2022.

Informasi Situs Perusahaan

Company Site Information

P3IEI konsisten berupaya untuk memberikan informasi terkait Perusahaan yang akurat, transparan dan dapat diandalkan kepada seluruh para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Perusahaan juga terus berusaha untuk menyampaikan informasi yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja melalui situs Perusahaan.

Selain melalui *website*, informasi juga disampaikan Melalui Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan WhatsApp resmi Perusahaan yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Indonesia SIPF always strives to provide accurate, transparent, and reliable company-related information to all shareholders and other stakeholders. In addition, the company also strives to convey information that is easily accessed anytime and anywhere through the company's website.

Besides through the website, information is also conveyed through Facebook, YouTube, Twitter, Instagram and the company's official WhatsApp managed by the Corporate Secretary.



Peta Situs www.indonesiasipf.co.id

Site Map www.indonesiasipf.co.id

Beranda	Home
Tentang Kami	About Us
◎ Latar Belakang	◎ History
◎ Visi & Misi Perusahaan	◎ Vision & Mission
◎ Management	◎ Organization
◎ DPP	◎ Investor Protection Fund
◎ Tata Kelola Perusahaan	◎ Good Corporate Governance
◎ Nilai Budaya Perusahaan	◎ Corporate Culture Values
Perlindungan Pemodal	Investor Protection
Anggota DPP	IPF member
◎ PPE	◎ Broker Dealer (PPE)
◎ Bank Kustodian	◎ Custody Bank
Publikasi	Publication
◎ Kegiatan	◎ Events
◎ Pengumuman	◎ Announcement
◎ Berita	◎ News
◎ Laporan Tahunan	◎ Annual report
◎ Regulasi	◎ Regulation
◎ Bulletin	◎ Bulletins
◎ Marketing Kit	◎ Marketing Kit
◎ Statistik	◎ Statistics
◎ Investor Protection Month 2022	◎ Investor Protection Month 2022
FAQ	FAQ

Transparansi Penyampaian Laporan

Transparency Of Report Submission

P3IEI senantiasa selalu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan keterbukaan informasi, P3IEI mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bentuk penyampaian keterbukaan informasi Perusahaan dilakukan secara rutin dan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham yang dikirimkan melalui surat.

Indonesia SIPF always applies the principles of transparency and accountability. Related to information disclosure, Indonesia SIPF refers to Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness. The form of submission of company information disclosure is carried out routinely and periodically to the Financial Services Authority (OJK) and shareholders sent by mail.

Penyampaian Keterbukaan Informasi Kepada Publik

Submission of Information Disclosure to the Public

Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan DPP *IPF Monthly Financial Position and Activity Report*	**Tanggal Penyampaian** *Submission Date*
Januari *• January*	15 Februari 2022 *• February 15, 2022*
Februari *• February*	15 Maret 2022 *• March 15, 2022*
Maret *• March*	18 April 2022 *• April 18, 2022*
April *• April*	17 Mei 2022 *• May 17, 2022*
Mei *• May*	15 Juni 2022 *• June 15, 2022*
Juni *• June*	15 Juli 2022 *• July 15, 2022*
Juli *• July*	15 Agustus 2022 *• August 15, 2022*
Agustus *• August*	15 September 2022 *• September 15, 2022*
September *• September*	17 Oktober 2022 *• October 17, 2022*
Oktober *• October*	15 November 2022 *• November 15, 2022*
November *• November*	15 Desember 2022 *• December 15, 2022*
Desember *• December*	16 Januari 2023 *• January 16, 2023*

Penyampaian *Coverage Analysis* Terkait DPP *Submission of Coverage Analysis Related to IPF*	**Tanggal Penyampaian** *Submission Date*
Januari *• January*	15 Februari 2022 *• February 15, 2022*
Februari *• February*	15 Maret 2022 *• March 15, 2022*
Maret *• March*	18 April 2022 *• April 18, 2022*
April *• April*	17 Mei 2022 *• May 17, 2022*
Mei *• May*	15 Juni 2022 *• June 15, 2022*
Juni *• June*	15 Juli 2022 *• July 15, 2022*
Juli *• July*	15 Agustus 2022 *• August 15, 2022*
Agustus *• August*	15 September 2022 *• September 15, 2022*
September *• September*	17 Oktober 2022 *• October 17, 2022*
Oktober *• October*	15 November 2022 *• November 15, 2022*
November *• November*	15 Desember 2022 *• December 15, 2022*
Desember *• December*	16 Januari 2023 *• January 16, 2023*

Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan *Submission of Subsidiary Monthly Report*	Tanggal Penyampaian *Submission Date*
Januari • *January*	10 Februari 2022 • *February 10, 2022*
Februari • *February*	10 Maret 2022 • *March 10, 2022*
Maret • *March*	12 April 2022 • *April 12, 2022*
April • *April*	18 Mei 2022 • *May 18, 2022*
Mei • *May*	10 Juni 2022 • *June 10, 2022*
Juni • *June*	11 Juli 2022 • *July 11, 2022*

Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan *Submission of Subsidiary Monthly Report*	Tanggal Penyampaian *Submission Date*
Juli • *July*	10 Agustus 2022 • *August 10, 2022*
Agustus • *August*	09 September 2022 • *September 09, 2022*
September • *September*	12 Oktober 2022 • *October 12, 2022*
Oktober • *October*	09 November 2022 • *November 09, 2022*
November • *November*	09 Desember 2022 • *December 09, 2022*
Desember • *December*	10 Januari 2023 • *January 10, 2023*

Laporan Realisasi RKAT Triwulanan P3IEI *Indonesia SIPF Quarterly RKAT Realization Report*	Tanggal Penyampaian *Submission Date*
Q1	**12 April 2022** • *April 12, 2022*
Q2	**12 Juli 2022** • *July 12, 2022*
Q3	**12 Oktober 2022** • *October 12, 2022*
Q4	**12 Januari 2023** • *January 12, 2023*
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan *Audited* • *Submission of the Audited Annual Financial Statements*	**15 Maret 2022** • *March 15, 2022*
Laporan Kegiatan Tahunan P3IEI • *Indonesia SIPF Annual Activity Report*	**28 Maret 2022** • *March 28, 2022*
Laporan Hasil RUPS Tahunan • *Indonesia SIPF Annual GMS Results Report*	**23 Juni 2022** • *June 23, 2022*
Penyampaian Laporan Tahunan P3IEI 2021 • *Submission of Indonesia SIPF 2021 Annual Report*	**21 Juni 2022** • *June 21, 2022*
Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Tahunan P3IEI • *Submission of Deed of Decree of Indonesia SIPF Annual GMS*	**21 Juli 2022** • *July 21, 2022*
Laporan Hasil RUPS Luar Biasa • *Extraordinary GMS Results Report*	**29 November 2022** • *November 29, 2022*
Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa P3IEI • *Submission of Deed of Decree of Indonesia SIPF Extraordinary General Meeting*	**13 Januari 2023** • *January 13, 2023*
Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris Atas Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik P3IEI • *Report of the Evaluation Results of the Board of Commissioners of the Public Accountant and or Indonesia SIPF Public Accountant Office*	**9 Juni 2022** • *June 9, 2022*
Laporan Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik P3IEI • *Report of the Recommendations of the Board of Commissioners in Appointing a Public Accountant and or Indonesia SIPF Public Accountant Office*	**12 Juli 2022** • *July 12, 2022*

Pandangan Atas Prospek Usaha Perusahaan

Views on Business Prospects

Sebagai Perusahaan yang memberikan perlindungan bagi pemodal di Pasar Modal Indonesia, kinerja Perusahaan setiap tahunnya tidak terlepas dari kinerja pasar modal itu sendiri. Pada tahun 2023, pasar modal diperkirakan akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi pemodal. Perekonomian global menghadapi beberapa hambatan, termasuk kenaikan inflasi dan suku bunga yang memungkinkan akan menyebabkan ketidakstabilan di pasar modal.

Meski menghadapi tantangan, Perusahaan yakin dapat terus melindungi pemodal di Pasar Modal Indonesia. Perusahaan telah memiliki rekam jejak yang kuat dan memiliki posisi yang baik untuk membantu pemodal. Perusahaan memiliki tim profesional berpengalaman yang berkomitmen untuk melindungi pemodal. Perusahaan juga memiliki fondasi keuangan yang kuat.

As a company that provides protection for investors in the Indonesian capital market, Indonesia's SIPF performance each year is tied to the performance of the capital market itself. The 2023 capital market is expected to be a challenging year for investors. The global economy faces several headwinds, including rising inflation and interest rates. This is likely to lead to volatility in the capital markets.

Despite the challenges, Indonesia SIPF is confident it can continue to protect investors in the capital market. The company has a strong track record of success and is well-positioned to help investors. The company has a strong team of experienced professionals committed to protecting investors. Indonesia SIPF also has a solid financial foundation.





Analisis dan Diskusi Manajemen

Management Discussion & Analysis





Teamwork

Teamwork adalah nilai yang menekankan untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan Perusahaan serta mengoptimalkan potensi setiap anggota tim. Nilai ini diturunkan ke dalam tiga konsep yakni mengedepankan kepentingan bersama, proaktif, dan fokus pada peran. Mengedepankan kepentingan bersama merujuk pada mengutamakan pencapaian tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam target-target yang telah disepakati bersama diatas kepentingan pribadi, sementara proaktif ialah memperlihatkan tanggung jawab untuk berinisiatif memanfaatkan potensi dan mengambil peluang bagi kepentingan Perusahaan. Karyawan juga didorong untuk fokus melaksanakan peran yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar pencapaian tujuan bersama dapat terjamin.



Teamwork is a value that emphasizes prioritizing collective interests in achieving company goals and optimizing the potential of each team member. This value is translated into three concepts: prioritizing collective interests, being proactive, and focusing on roles. Prioritizing collective interests means achieving company goals set in mutually agreed-upon targets above personal interests. Being proactive entails taking the responsibility to initiate and leverage potential and seize opportunities for the company's benefit. Employees are also encouraged to focus on their roles, fulfilling their duties to the best of their abilities to achieve collective goals.

Gambaran Umum

General Overview

Analisis dan diskusi manajemen pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Perusahaan terus melakukan pengelolaan DPP secara konsisten melalui berbagai kegiatan, termasuk investasi, pengelolaan keanggotaan DPP, manajemen risiko, dan pengelolaan kondisi keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan, nilai DPP pada tahun 2022 tumbuh 11,49 % menjadi Rp262,93 miliar dan terus meningkat setiap tahunnya. Kontribusi dari aktivitas investasi atas DPP pada tahun 2022 terdiri dari Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp21,95 miliar dan Hasil Investasi sebesar Rp8,41 miliar. Rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp488 juta.

Per akhir tahun 2022, Anggota DPP terdiri dari 97 Perantara Pedagang Efek (PPE) dan 23 Bank Kustodian (BK), dengan total anggota sebanyak 120.



Analysis and management discussion in 2022 shows that the company continues to consistently manage its IPF through various activities, including investment, membership management, risk management, and financial management.

Based on the financial report, the value of IPF in 2022 grew by 11.49% to IDR262.93 billion and continues to increase yearly. The contribution of investment activities to IPF in 2022 consists of Annual Membership Fees of IDR21.95 billion and Investment Return of IDR8.41 billion. The average monthly net investment result of IPF in 2022 was recorded at IDR488 million.

As of the end of 2022, IPF members comprised 97 Securities Broker-Dealer (SBD) and 23 Custodian Banks (BK), totaling 120 members.



Bisnis

Business

Pengelolaan DPP

IPF Management

Nilai DPP terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, demikian juga dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, DPP bernilai Rp262,93 miliar. Sehingga per tanggal 31 Desember 2022, DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 11,49% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2021 yakni Rp235,84 miliar.

Iuran Keanggotaan Tahunan yang berhasil dihimpun oleh DPP pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Iuran Keanggotaan Tahunan berjumlah sebesar Rp21,95 miliar atau naik 44,3% dari Iuran Keanggotaan Tahunan 2021 yakni sebesar Rp15,21 miliar. Akan tetapi, hasil investasi yang diperoleh oleh P3IEI mengalami penurunan sebesar 2,23% dari Rp8,60 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp8,41 miliar pada tahun 2022.

Komposisi hasil investasi tersebut terdiri dari penghasilan bunga dari Deposito Berjangka, Surat Berharga Negara (SBN), dan Jasa Giro Bank, serta Realisasi Perubahan Nilai Wajar. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016, bahwa harta kekayaan dari DPP hanya dapat diinvestasikan pada SBN dan/atau Deposito pada Bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

The IPF value has continued to increase each year, including in 2022. In 2022, the IPF value was IDR262.93 billion. As of December 31, 2022, the IPF had grown by 11.49% compared to its position on December 31, 2021, which was IDR235.84 billion.

The Annual Membership Fee collected by IPF in 2022 also increased compared to the previous year. In 2022, the Annual Membership Fee amounted to IDR21.95 billion, an increase of 44.3% from the 2021 Annual Membership Fee of IDR15.21 billion. However, the Investment Results obtained by Indonesia SIPF decreased by 2.23% from IDR8.60 billion in 2021 to IDR8.41 billion in 2022.

The composition of the Investment Returns consists of interest income from Time Deposits, Government Debt Instruments, and Bank Giro Services and the Realization of Changes in Fair Value. This is in accordance with OJK Regulation No. 49 / POJK.04 / 2016, which states that the wealth of the IPF can only be invested in State Securities (SBN) and/or Deposits in Banks owned by the Government of the Republic of Indonesia.



Perkembangan DPP

Development of IPF

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2022, DPP meningkat sebesar 11,49% dari sebesar Rp235,84 miliar pada akhir Desember 2021 menjadi Rp262,93 miliar pada Desember 2022.

Regarding the management activities of the IPF, which includes the collection of funding sources and investment activities during 2022, the IPF increased by 11.49% from IDR235.84 billion at the end of December 2021 to IDR262.93 billion in December 2022.

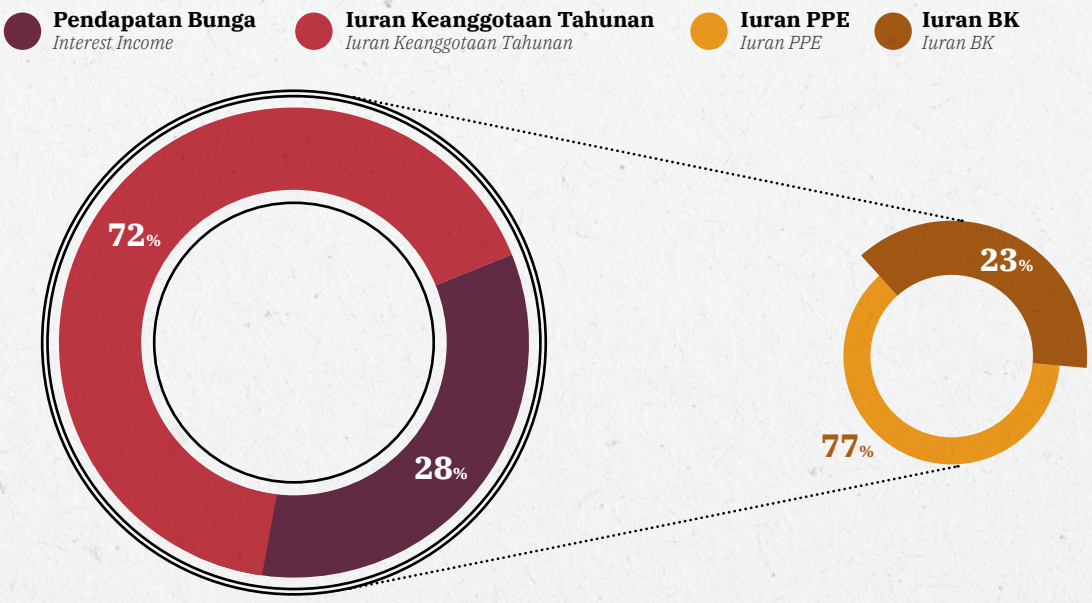
	2022	2021	2020	2019	2018
	Jumlah (Rp) *Amount (Rp)*				
Saldo Awal DPP *IPF Beginning Balance*	235,835,279,375	214,524,049,073	189,084,824,388	160,698,130,091	139,182,157,691
Iuran Keanggotaan Awal *Initial Membership Contribution*	100,000,000	110,000,000	0	400,000,000	0
Iuran Keanggotaan Tahunan *Annual Membership Contribution*	21,954,276,612	15,213,848,662	17,290,375,116	18,231,385,241	17,075,547,167
Pendapatan Bunga *Interest Income*	8,411,366,013	8,603,509,508	11,352,822,242	11,680,222,346	8,566,060,145
Biaya Administrasi *Administrative Costs*	(30,764,719)	(22,475,016)	(9,411,000)	(12,746,586)	(8,294,821)
Gain / Loss SBN *Gov. Securities Gain / Loss*	(814,465,000)	(12,600,000)	211,285,000	1,591,900,000	(1,547,522,048)
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP *IPF Balance Before IPF Investment Management Services Fee*	**265,455,692,281**	**238,416,332,227**	**217,929,895,746**	**192,588,891,092**	**163,267,948,134**
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP *IPF Investment Management Services Fee*	(2,523,409,804)	(2,581,052,852)	(3,405,846,673)	(3,504,066,704)	(2,569,818,043)
Saldo Akhir DPP *IPF Ending Balance*	**262,932,282,477**	**235,835,279,375**	**214,524,049,073**	**189,084,824,388**	**160,698,130,091**

Pada Tabel di atas tersaji informasi bahwa kontribusi atas DPP pada tahun 2022 bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp21,95 miliar dan dari Hasil Investasi sebesar Rp8,41 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1 anggota baru DPP, sehingga terdapat penambahan kontribusi DPP dari iuran keanggotaan awal sebesar Rp100 juta.

In the table above, it shows that the contribution to the IPF in 2022 comes from the Annual Membership Fee of IDR21.95 billion and Investment Results of IDR8.41 billion. In addition, there was 1 new IPF member in 2022, resulting in an increase in IPF contribution from the initial membership fee of IDR100 million.

Selanjutnya, pada Grafik di bawah menunjukkan posisi DPP per 31 Desember 2022 dimana kontribusi DPP berasal dari Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 72% dan Hasil Investasi sebesar 28%. Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa komposisi Iuran Keanggotaan Tahunan DPP 2022 sebesar 77% berasal dari PPE dan 23% berasal dari BK.

Furthermore, the graph below shows the position of the IPF as of December 31, 2022, where the contribution to the IPF comes from the Annual Membership Fee of 72% and Investment Results of 28%. It can be further explained that the composition of the IPF's Annual Membership Fee in 2022 is 77% from Securities Broker-Dealers (SBD) and 23% from Custodian Bank (BK).



Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

Collection of IPF Funding Sources



Penghimpunan DPP dilakukan berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2022, terkumpul total iuran keanggotaan DPP tahun 2022 sebesar Rp21,95 miliar. Sumber pendanaan DPP yang dihimpun bersumber dari Iuran Keanggotaan Anggota DPP yang terdiri atas:

1. Iuran Keanggotaan Tahunan oleh PPE yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP. Di tahun 2022, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-01/D.04/2022 tentang Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Tahun 2022, maka pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan ini dilakukan secara bersama-sama antara *Self-Regulatory Organization* (SRO) dan PPE dengan porsi masing-masing yaitu 50% oleh SRO dan 50% oleh PPE. Total penghimpunan keseluruhan Iuran Keanggotaan Tahunan PPE 2022 yaitu sebesar Rp16,97 miliar dengan Nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2021 yang dititipkan pada PPE sebesar Rp1.697,72 triliun. Dari total tersebut 100% SRO telah membayarkan porsinya dan 100% PPE telah memenuhi kewajibannya;
2. Iuran Keanggotaan Tahunan BK sebesar Rp4,98 miliar yang dihitung berdasarkan faktor risiko BK tahun 2022 sebesar 0,1710 dikalikan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK sebesar Rp2.911,86 triliun. Total penghimpunan keseluruhan Iuran Keanggotaan Tahunan BK 2022 yaitu sebesar Rp4,98 miliar dan 100% BK telah memenuhi kewajibannya; dan
3. Iuran Keanggotaan Awal yang dibayarkan oleh 1 Anggota DPP baru sebesar Rp100 juta, yaitu PT Bank OCBC NISP Tbk (BK).

Sehingga terkumpul total Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2022 sebesar Rp21,95 miliar dengan tingkat pemenuhan penagihan/pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan 2022 adalah sebesar 100%. Pada tahun 2022 terdapat penghapusan kewajiban Iuran Keanggotaan Tahunan tahun 2021 yaitu sebesar Rp2,27 juta.

IPF funds are collected based on funding sources determined in OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016 of 2016 concerning Investor Protection Funds. In 2022, the total membership fee collected for IPF amounted to IDR21.95 billion. The funding sources for IPF come from the Membership Fees of IPF Members, which consist of the:

1. Annual Membership Fees by Securities Broker-Dealers determined at 0.001% of the average monthly total value of Customer Assets in the previous year entrusted to IPF Members. In 2022, based on OJK Commissioner Council Decision No. KEP-01/D.04/2022 regarding Payment of Annual Membership Fees for Investor Protection Funds for Securities Trading Intermediaries that Administer Customer Securities Accounts in 2022, the payment of Annual Membership Fees is carried out jointly between the Self Regulatory Organization (SRO) and Securities Broker-Dealers with each having a share of 50%. The total collection of Securities Broker-Dealers Annual Membership Fees in 2022 is IDR16.97 billion, with the average value of Customer Assets entrusted to Securities Broker-Dealers in 2021 amounting to IDR1,697.72 trillion. Of this total, 100% of the SRO has paid its share, and 100% of the Securities Broker-Dealers have fulfilled their obligation.
2. Annual Membership Fee of BK at IDR4.98 billion which is determined by the total risk factor of Custodian Bank in 2022 of 0.1710 multiplied by 0.001% of the average monthly total value of Customer Assets in the previous year entrusted to Custodian Bank. Total amount of the Annual Membership Fee collection reached IDR4.98 billion and 100% of Custodian Bank has fulfilled their obligation; and
3. Initial Membership Fee paid by one new IPF member amounting to IDR100 million, namely PT Bank OCBC NISP Tbk (Custodian Bank).

Thus, the total IPF Membership Fees collected in 2022 amounted to IDR21.95 billion, with a collection/payment fulfilment rate of 100% for the 2022 Annual Membership Fees. In 2022, there was a written off of the 2021 Annual Membership Fee obligation amounting to IDR2.27 million.

Sumber Pendanaan DPP *IPF Funding Source*	Custodian Bank (BK)	Securities Broker-Dealers (SBD)	Self Regulatory Organization (SRO)
Iuran Keanggotaan Tahunan *Annual Membership Contribution Fee*	4,979,287,764	8,486,357,036	8,488,631,812
Iuran Keanggotaan Awal *Initial Membership Fee*	100,000,000	-	-
Sub-Total *Sub-Total*	5,079,287,764	8,486,357,036	8,488,631,812
Total Keseluruhan *Grand Total*			**22,054,276,612**

	2022		2021	
	Jumlah (Rp) *Amount (Rp)*			
	Securities Broker Dealers (PPE)	Custodian Bank (BK)	Securities Broker Dealers (PPE)	Custodian Bank (BK)
Rata – Rata Bulanan Nilai Aset Nasabah Tahun Sebelumnya *Total Asset of Customers in the Previous Year*	Rp1,697.90 Triliun *Rp1,697.90 Trillion*	Rp2,911.86 Triliun *Rp2,911.86 Trillion*	Rp 1,010.02 Triliun *Rp 1,010.02 Trillion*	Rp2,636.58 Triliun *Rp2,636.58 Trillion*
Iuran Keanggotaan Awal *Initial Membership Contribution*	-	Rp100,000,000	Rp110,000,000	-
Iuran Keanggotaan Tahunan *Annual Membership Contribution*	Rp16,974,988,848	Rp4,979,287,764	Rp10,085,705,740	Rp5,128,142,922
Total Iuran *Total Contribution*		**Rp21,954,276,612**		**Rp15,213,848,662**

Kegiatan Investasi DPP

IPF's Investment Activities

Perusahaan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Berdasarkan fungsi tersebut serta sebagai salah satu komitmen Perusahaan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik *(Good Corporate Governance)*, Perusahaan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP. Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2022 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

Pada tahun 2022, Komite Investasi Perusahaan dalam menjalankan peran dan fungsinya senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi dalam pengelolaan DPP sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perusahaan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangan:

1. Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
2. Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset pemodal selama periode klaim;
3. Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
4. Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi; dan
5. Total *return* yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP di tahun ini mengalami penurunan dari Rp5,99 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp5,86 miliar pada tahun 2022. Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2022 dibukukan sebesar Rp488 juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Agustus 2022 yaitu sebesar Rp687,56 juta sedangkan yang terendah diperoleh pada Bulan Juli 2022 yaitu sebesar Rp338,87 juta.

As an IPF institute, the company has the authority to manage development of the IPF through investment activities per the OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund. Based on this function and as one of the company's commitments to always prioritize good corporate governance principles, the company has established an Investment Committee to assist the Board of Directors in making decisions on IPF investment development and monitoring. The Investment Committee holds monthly meetings to provide input and advice to the Board of Directors on investments. During 2022, the Investment Committee held 12 Monthly Meetings.

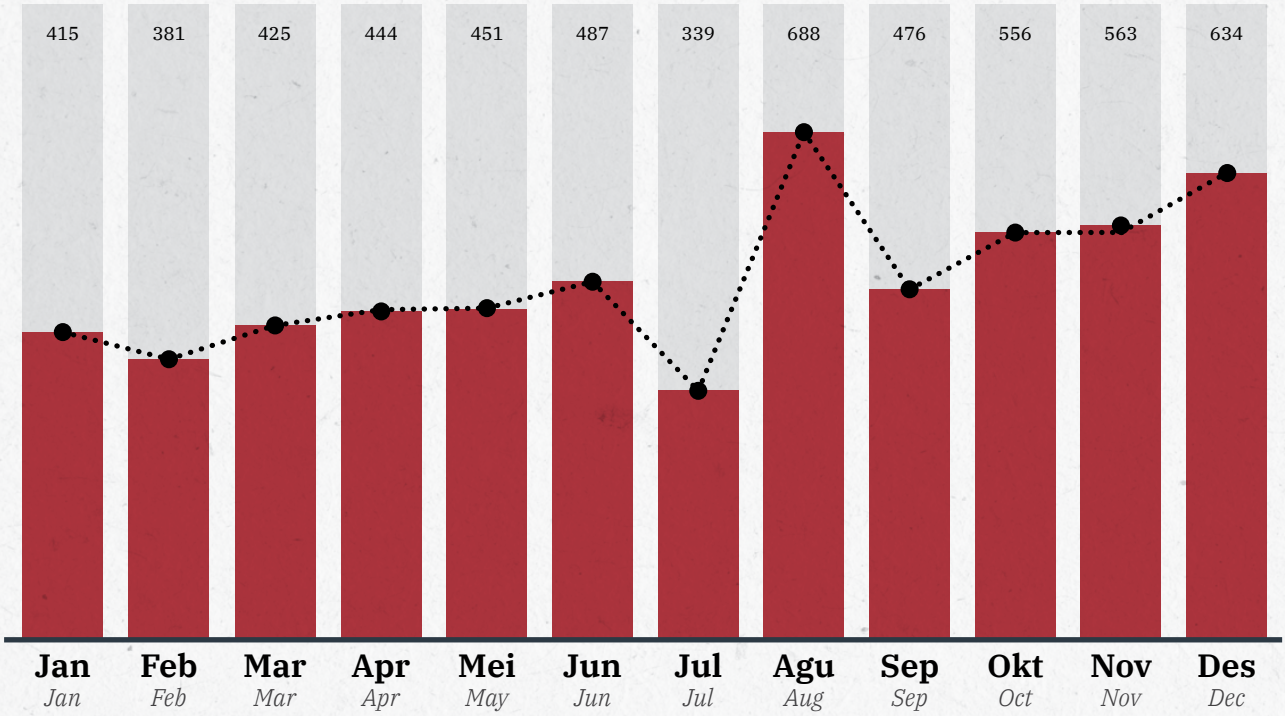
In 2022, the company's Investment Committee, in carrying out its role and function, always maintained the diversity of investment instruments in managing the IPF in accordance with the Investment Policy Guidelines owned by the company. Investment activities are carried out by considering the following:

1. The overall economic conditions in both the banking/money market and capital market sectors;
2. The minimum liquidity needs for the IPF, taking into account the compensation needs for investor asset losses during the claims period;
3. Investment choices based on the regulations set by OJK, namely in Government Bond and/or Bank Deposits owned by the Government of the Republic of Indonesia;
4. The tax consequences of investment decisions;
5. Optimal total returns considering risk levels and liquidity needs.

By prioritizing the aspects considered in managing the IPF, the IPF net investment income decreased from IDR5.99 billion in 2021 to IDR5.86 billion in 2022. Meanwhile, the IPF average monthly net investment income in 2022 was recorded at IDR488 million. The highest net investment income was obtained in August 2022 at IDR687.56 million, while the lowest was received in July 2022 at IDR338.87 million.

Hasil Investasi Bersih DPP 2022 / dalam juta rupiah

IPF Net Investment Return 2022 / in million rupiah



Keanggotaan DPP

IPF Membership

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK).

Anggota DPP per Akhir Tahun 2022 sebanyak 120 yang terdiri dari 97 Perantara Pedagang Efek (PPE) yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan 23 Bank Kustodian (BK). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang dikarenakan adanya pencabutan keanggotaan 6 Anggota DPP dan terdapat 1 Anggota DPP baru.

Pada tahun 2022 terdapat 1 Anggota DPP baru, yaitu:

1. PT Bank OCBC NISP Tbk (BK)

Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 6 anggota yang dicabut dari Keanggotaan DPP, yaitu:

1. PT Onix Sekuritas (PPE)
2. PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia (PPE)
3. PT Corpus Sekuritas Indonesia (PPE)
4. PT Citigroup Sekuritas Indonesia (PPE)
5. PT Sinergi Millenium Sekuritas Indonesia (PPE)
6. PT Batavia Prosperindo Sekuritas (PPE)

Based on Articles 16 and 17 of the OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund (IPF), Securities Broker-Dealers (SBD) who administer customer securities accounts, and Custodian Banks are mandatory members of the IPF.

As of the end of 2022, the number of IPF members was 120, consisting of 97 Securities Broker-Dealers (SBD) who administer customer securities accounts and 23 Custodian Banks. This number decreased compared to 2021 due to the revocation of membership of 6 IPF members and the addition of 1 new IPF member.

In 2022, there was one new IPF member, namely:

1. PT Bank OCBC NISP Tbk (Custodian Bank)

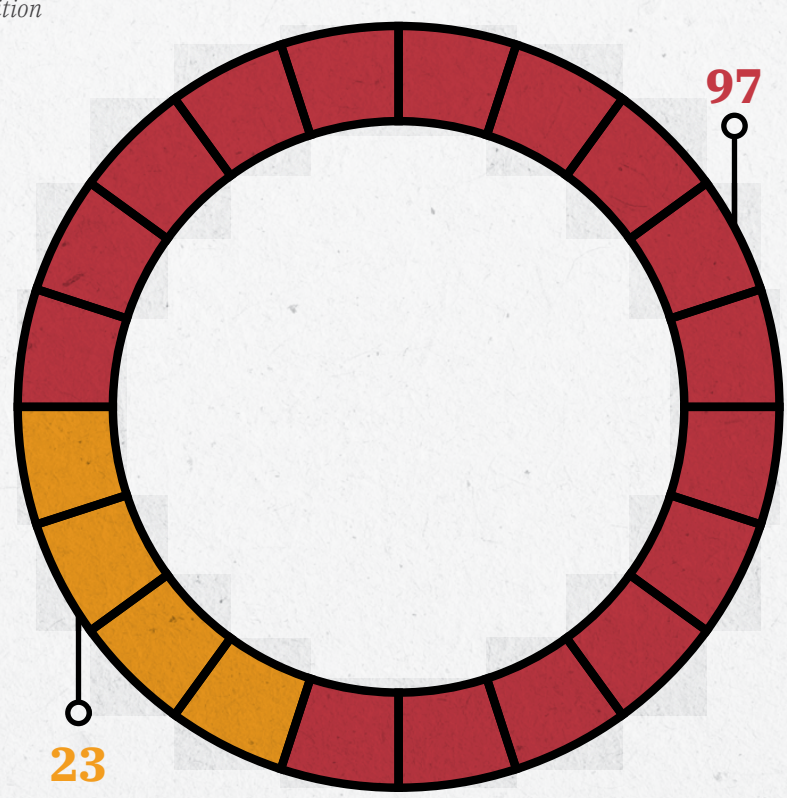
Meanwhile, in 2022, there were six members whose membership was revoked from the IPF, namely:

1. PT Onix Sekuritas (SBD)
2. PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia (SBD)
3. PT Corpus Sekuritas Indonesia (SBD)
4. PT Citigroup Sekuritas Indonesia (SBD)
5. PT Sinergi Millenium Sekuritas Indonesia (SBD)
6. PT Batavia Prosperindo Sekuritas (SBD)



Komposisi Anggota DPP

IPF Member's Composition



Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. **Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:**
   a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
   b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. **Bagi BK:**
   a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan
   b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.
3. **Bagi PED:**
   a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing PED; dan
   b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah yang dititipkan pada tahun sebelumnya, dengan kelonggaran berupa pembayaran sebesar 50% selama 3 tahun sejak PED menjadi Anggota DPP.

The details of the IPF membership fees are as follows:

1. **For Broker Dealers administering client Securities accounts, it will be effective since January 1, 2014 with the following conditions:**
   a. The initial membership fee is IDR100,000,000 (one hundred million rupiah) for each PPE administering the client's Securities account; and
   b. The annual membership fee is 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the Customer's Assets in the previous year, which is deposited in the PPE administering the customer's Securities account.
2. **For Custodian Banks:**
   a. Initial membership fee of IDR100,000,000 (one hundred million rupiah) for each Custodian Bank; and
   b. The annual membership fee of all Risk Factors is multiplied by 0.001% (one per hundred thousand) of the average monthly total value of Investor Assets in the previous year deposited with the Custodian Bank.
3. **For Municipal Broker-Dealers (PED)**
   a. Initial membership fee of IDR10,000,000 (ten million rupiahs) for each PED; and
   b. The annual membership fee of 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the Customer's Assets in the previous year, with leeway in terms of 50% payment in the first three years of becoming IPF member.

Monitoring Risiko Anggota DPP

Risk Monitoring of IPF's Member

Sistem *Monitoring* Risiko yang digunakan oleh Perusahaan bertujuan untuk me*monitor* risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal. Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini *(early warning system)* bagi Perusahaan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang dan kondisi kustodian dicabut izinnya, diwakili oleh variabel *Profit Margin*, MKBD, *Aset Turn Over*, *Debt to Equity Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan*, *Return of Equity*, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode *extreme value* VaR, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian.Terdapat penyempurnaan metode statistik yang digunakan mulai tahun 2022 yaitu terkait VaR Kustodian dimana sebelumnya penghitungan *probability* VaR menggunakan normalisasi Min-Max, kini menggunakan pendekatan distribusi Log Logistik. Selain itu penyempurnaan dilakukan terkait pengelompokan Kustodian yang berisiko kini menggunakan pengelompokan berdasarkan klastering

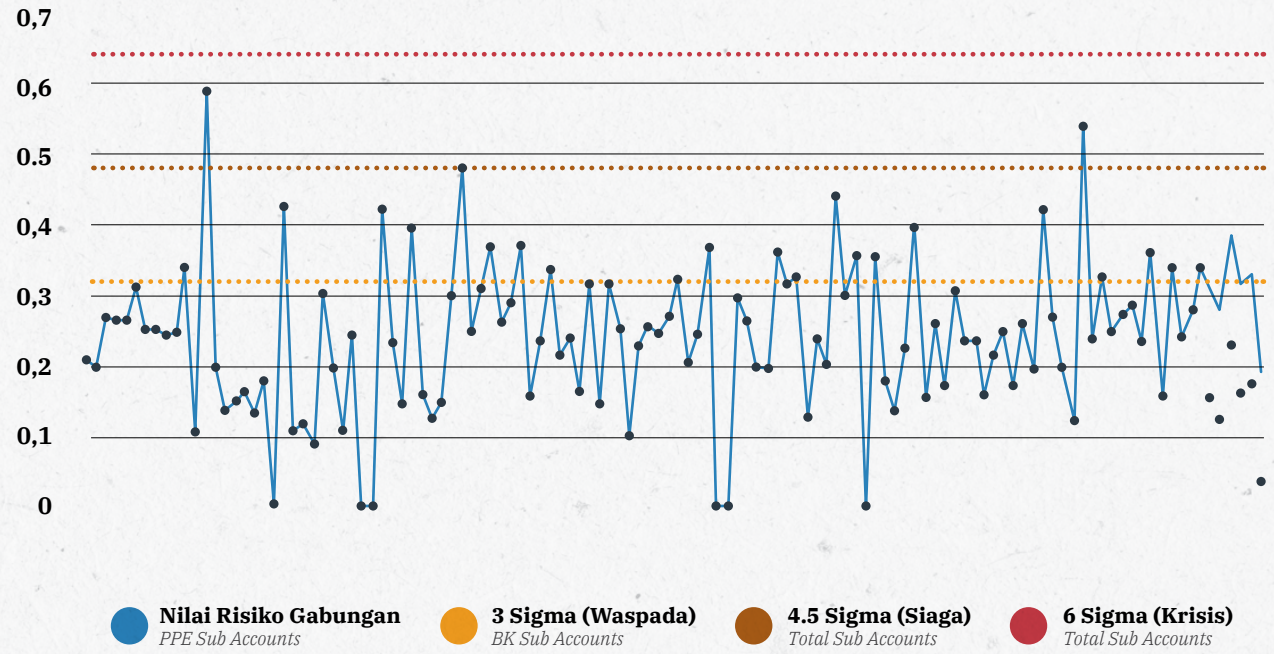
The Risk Monitoring System used by the Company aims to monitor risks related to the loss of investor assets among IPF members. The system functions as an early warning system for the Company in estimating compensation payments using IPF and as a reference for evaluating the adequacy of IPF required to fulfill future obligations or in a specific period.

The system is developed from a risk assessment model considering investor and custodian risk factors. Investor risk factors describe the possibility of losing investor assets due to market conditions represented by the Composite Stock Price Index (IHSG), transaction frequency, transaction value, and market capitalization. Meanwhile custodian risk factors represent the custodian's inability to pay for lost investor assets and the revocation custodian's license , represented by variables such as Profit Margin, MKBD, Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return on Equity, the number of assets entrusted, and the number of Sub-Security Accounts.

The risk assessment model is estimated using the extreme value VaR approach, where all investors are assumed to have the same risk due to market risk variables. In contrast, the custodian risk is calculated individually. Thus, the calculation results in the VaR of the Custodian, which describes the magnitude of the custodian risk. In 2022 there is an improvement of statistical method regarding the custodian risk, specifically for VaR of the Custodian which previously the Probability VaR was using Min-Max normalization, now using Log-Logistic distribution. Besides, the grouping of risk of custodian is now using clustering.

Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2022

Distribution of Risk Value for IPF Members in 2022



Tabel Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2022

Risk Distribution Table for IPF Members in 2022

No.	Tingkat Risiko *Risk Level*	Jumlah Kustodian *Number of Custodian*	Persentase *Percentage*
1.	Normal. *Normal*	96	80.00%
2.	Waspada. *Alert*	22	18.33%
3.	Siaga. *Standby*	2	1.67%
4.	Krisis. *Crisis*	0	0.00%
Jumlah *Total*		120	100%

Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69/D.04/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan pemodal.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200 juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 miliar.

Dengan adanya Sistem *Monitoring* tersebut, Perusahaan dapat mengestimasi *monitoring* terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP, Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan

Based on the system's calculations, the estimated loss of investor assets will be compensated using the IPF if the custodian's funds are insufficient to offset the investors. The compensation using the IPF follows the highest limit of compensation as stipulated in the Decision of the OJK Commissioner Number KEP-69/D.04/2020 regarding Amendments to the OJK Commissioner Decision Number KEP-46/D.04/2015 concerning the Determination of the Highest Limits of Payment of Compensation for Each Investor and Each Custodian Using the Investor Protection Fund.

This decision states that the highest limit for each investor at one custodian for the payment of compensation using the IPF is IDR200 million. Furthermore, the highest limit for each custodian in paying compensation to investors using the IPF is IDR100 billion.

With this monitoring system, the company can estimate and monitor essential parameters such as the risk profile of IPF members, the amount of IPF needed, and the ability of the IPF to provide coverage. The value of investor assets managed by 120 IPF members as of December 31, 2022 is approximately IDR6.523 trillion. As of the end of 2022, IPF members consist of 97 Securities Broker-Dealers (SBD) and

coverage. Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 120 (seratus dua puluh) Anggota DPP per tanggal 31 Desember 2022 berkisar sebesar Rp6.523 triliun. Pada akhir tahun 2022, Anggota DPP terdiri dari 97 Perantara Pedagang Efek (PPE) & 23 Bank Kustodian dengan total aset kelolaan sebesar Rp2.523,97 triliun yang dikelola PPE dan sebesar Rp3.999,35 triliun yang dikelola Bank Kustodian, adapun jumlah Sub Rekening Efek (SRE) pemodal adalah sebanyak 5.878.835 SRE pada PPE dan sebanyak 180.687 SRE pada Bank Kustodian.

P3IEI mengembangkan lebih lanjut Sistem *Monitoring* Risiko Anggota DPP untuk melakukan *coverage analysis* terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp262,93 miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan aset pemodal dari 5 (lima) Kustodian Anggota DPP dan jika ditambah dengan CGRP senilai Rp150 miliar maka mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan aset pemodal dari 9 (sembilan) Kustodian Anggota DPP, seperti yang terlihat pada Tabel Aset Pemodal. Adapun pertumbuhan aset pemodal dan sub-rekening efek pemodal selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

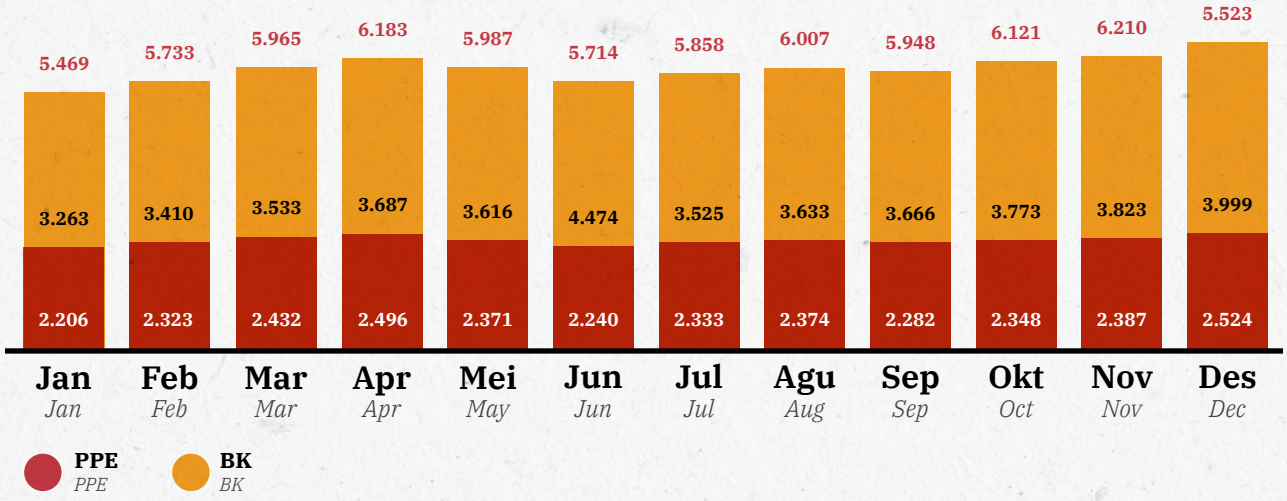
23 Custodian Banks with a total managed asset of IDR2.523,97 trillion managed by SBD and IDR3.999,35 trillion operated by Custodian Banks, and the number of investor Sub-Securities Accounts (SRE) is 5,878,835 SRE for SBD and 180,687 SRE for Custodian Banks.

P3IEI further developed the Risk Monitoring System for IPF Members to conduct coverage analysis related to IPF's ability. The analysis results of the IPF value as of December 31, 2022, showed that the IPF value of IDR262,93 billion could cover losses from investor asset losses from 5 (five) IPF member custodians. If added with the Investor Compensation Reserve worth IDR150 billion, it can cover losses from investor asset losses from 9 (nine) IPF member custodians, as seen in the Investor Asset Table. The growth of investor assets and sub-securities accounts in 2022 is as follows:

Aset Pemodal Tahun 2022

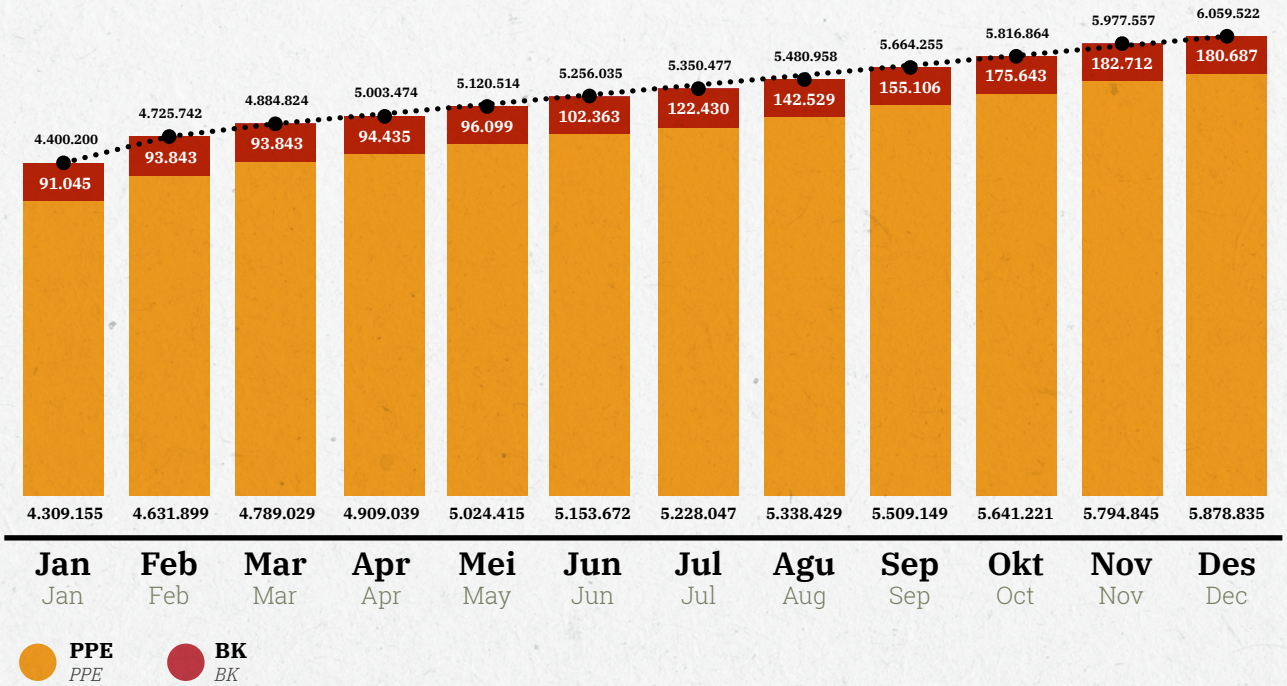
Investor Assets in 2022

Dalam Triliun Rupiah • *In Trillion Rupiah*



Jumlah SRE Tahun 2022

Total SRE of 2022





Kemampuan DPP & CGRP dalam Melakukan *Coverage*

IPF & ICS Coverage

No.	Anggota DPP yang perlu di *cover* oleh DPP dan CGRP *IPF members who needs to be covered by the IPF and ICS*	2022	2021	2020
1.	PPE perlu di *cover* DPP. *Broker Dealer (BD) who needs to be covered by IPF*	5 PPE (10.593 Pemodal) *5 SBD (10,593 Investors)*	2 PPE (830.643 Pemodal) *2 SBD (830,643 Investors)*	9 PPE (281.044 Pemodal) *9 SBD (281,044 Investors)*
2.	PPE perlu di *cover* DPP + CGRP. *Broker Dealer (BD) who needs to be covered by IPF + ICS*	9 PPE (1.286.018 Pemodal) *9 SBD (1,286,018 Investors)*	3 PPE (1.041.374 Pemodal) *3 SBD (1,041,374 Investors)*	13 PPE (866.016 Pemodal) *13 SBD (866,016 Investors)*
3.	BK perlu di *cover* DPP. *Custodian Bank (CB) who needs to be covered by IPF*	0 BK (0 Pemodal) *0 CB (0 Investors)*	0 BK (0 Pemodal) *0 CB (0 Investors)*	0 BK (0 Pemodal) *0 CB (0 Investors)*
4.	BK perlu di *cover* DPP + CGRP. *Custodian Bank (CB) who needs to be covered by IPF + ICS*	0 BK (0 Pemodal) *0 CB (0 Investors)*	0 BK (0 Pemodal) *0 CB (0 Investors)*	0 BK (0 Pemodal) *0 CB (0 Investors)*
TOTAL DPP (miliar) *TOTAL IPF (billion)*		**262.93**	**235.84**	**214.52**
TOTAL DPP + CGRP (miliar) *TOTAL IPF + ICS (billion)*		**412.93**	**385.84**	**364.52**



Jumlah PPE yang dapat di*cover* oleh DPP per akhir tahun 2022 mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya, yaitu dari 9 PPE di tahun 2020 dan sempat mengalami penurunan ke 2 PPE di Tahun 2021, kini menjadi 5 PPE. Jumlah PPE yang dapat di*cover* oleh DPP dan CGRP per akhir tahun 2022 juga mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3 PPE di Tahun 2021 menjadi 9 PPE. Adapun BK sejak tahun 2020 tidak ada yang masuk dalam Anggota DPP yang perlu mendapatkan perlindungan baik oleh DPP maupun DPP dan CGRP.

The number of SBD that IPF can cover at the end of 2022 has increased again from the previous year, which was 9 SBD in 2020 and had dropped to 2 PPE in 2021, now becoming 5 SBD. The number of SBD members that IPF and ICR can cover at the end of 2022 has also increased from the previous year, which was 3 SBD in 2021 to 9 SBD. As for Custodian Bank, since 2020, no members have required protection from either IPF or IPF and ICR.

Pengelolaan Investasi Lain

Other Investment Management

Modal Hasil Konversi Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP)

Capital as Result of Investor Compensation Reserve (ICR) Conversion

Per akhir Desember 2022, komposisi portofolio CGRP terdiri dari instrumen obligasi swasta sebesar Rp125 miliar atau 83,33% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,29% dan tenor 4,06 tahun, instrumen Surat Berharga Negara sebesar Rp5 miliar atau 3,33% dari total investasi dengan kupon 5,57% dengan tenor 1,14 tahun, dan instrumen reksadana sebesar Rp20 miliar atau 13,33% dari total portofolio. Realisasi hasil investasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal hingga Desember 2022 adalah sebesar Rp11.749.417.140 atau 100,76% dari Target RKAT 2022 Rp11.660.581.159.

As of the end of December 2022, the composition of ICR's portfolio consisted of private bond instruments totaling IDR125 billion or 83.33% of the total portfolio with an average weighted coupon rate of 9.29% and a tenor of 4.06 years, government securities instruments totaling IDR5 billion or 3.33% of the total investment with a coupon rate of 5.57% and a tenor of 1.14 years, and mutual fund instruments totaling IDR20 billion or 13.33% of the total portfolio. The realized investment return of the Investor Compensation Reserve as of December 2022 was IDR11,749,417,140 or 100.76% of the 2022 Annual Work Plan Budget target of IDR11,660,581,159.

Modal Non Konversi CGRP

Capital Non ICR Conversion

Per akhir Desember 2022, komposisi portofolio Modal PDPP terdiri dari instrumen deposito berjangka sebesar Rp2,2 miliar atau 4,29% dari total portofolio dengan *rate* 4,00% p.a tenor 3 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp35 miliar atau 68,32% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,02% dan tenor 3,94 tahun. Realisasi pendapatan bunga dan jasa giro hingga Desember 2022 atas investasi modal PDPP adalah sebesar Rp3.665.495.783 atau 98,31% dari target RKAT 2022 sebesar Rp3.728.436.355.

As of the end of December 2022, the composition of the IPF Institution's capital portfolio consisted of time deposit instruments totaling IDR2.2 billion or 4.29% of the total portfolio with a rate of 4.00% p.a and a tenor of 3 months, followed by private bond instruments totaling IDR35 billion or 68.32% of the total portfolio with an average weighted coupon rate of 9.02% and a tenor of 3.94 years. The realized interest income and giro service income until December 2022 from the IPF Institution's capital investment amounted to IDR3,665,495,783 or 98.31% of the 2022 Annual Work Plan Budget target of IDR3,728,436,355.

Keuangan

Finance

Tinjauan Umum

General Overview

Laporan Keuangan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perusahaan beserta Laporan Auditor Independen dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Indonesia SIPF's Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Partners with fair opinions on all material matters. The financial performance and cash flows for the year ended December 31, 2022 comply with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

The Company's Financial Statements along with the Independent Auditor's Report are attached and form an integral part of this Annual Report.

Laba Usaha dan Laba Bersih

Operating Profit and Net Profit

Pada tahun 2022, Perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp2.672.633.959. Terdapat penurunan sebesar 41% dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terdapat penurunan dari segi jumlah pendapatan usaha dan peningkatan jumlah beban usaha.

Jumlah pendapatan usaha pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan (4%) dari Rp18.676.228.423 menjadi Rp17.938.322.728. Sedangkan dari segi beban usaha mengalami kenaikan sebesar 8% pada tahun 2022 dari Rp14.132.969.096 menjadi Rp15.265.688.769.

Selain itu terdapat rugi komprehensif lain yang dibukukan sebesar Rp5.639.215.463. Sehingga pada tahun 2022, Perusahaan mencatatkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp3.106.032.272.

In 2022, the Company recorded a profit before tax of IDR2,672,633,959. This represents a 41% decrease compared to the previous year due to a decrease in revenue and an increase in operating expenses.

Revenue decreased slightly (4%) from IDR18,676,228,423 to IDR17,938,322,728 in 2022, while operating expenses increased by 8% from IDR14,132,969,096 to IDR15,265,688,769.

In addition, there was other comprehensive loss of IDR5,639,215,463. Therefore, in 2022, the Company recorded a comprehensive loss for the year of IDR3,106,032,272.

Deskripsi *Description*	2022	2021	Perubahan *Change*	%
Jumlah Pendapatan Usaha *Total Operating Revenues*	17,938,322,728	18,676,228,423	(737,905,695)	-4%
Jumlah Beban Usaha *Total Operating Expenses*	15,265,688,769	14,132,969,096	1,132,719,673	8%
Laba Sebelum Pajak *Income Before Tax*	2,672,633,959	4,543,259,327	(1,870,625,368)	-41%
Beban Pajak *Tax Expense*	(139,450,768)	(159,081,055)	19,630,287	-12%
Laba Tahun Berjalan *Income for The Year*	2,533,183,191	4,384,178,272	(1,850,995,081)	-42%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain *Other Comprehensive Income (Loss)*	(5,639,215,463)	4,073,377,632	(9,712,593,095)	-238%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan *Comprehensive Income (Loss) for The Year*	(3,106,032,272)	8,457,555,904	(11,563,588,176)	-137%



Pendapatan *Operating Income*

Pendapatan Perusahaan sebagai PDPP berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP dan Pendapatan Bunga. Pada tahun 2022, Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar Rp2,52 miliar, turun sebesar Rp57,6 juta atau 2,23% dari pendapatan jasa di tahun 2021. Selain itu, Pendapatan Bunga yang diperoleh Perusahaan sebesar Rp15,41 miliar, turun sebesar Rp680,26 juta atau 4,23% dari pendapatan bunga tahun sebelumnya. Sehingga secara total, pada tahun 2022 Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp17,94 miliar atau mengalami penurunan sebanyak Rp737,91 juta (3,95%) dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2021.

The Company's revenue as an IPF Institution comes from the IPF Management Services Fee and interest income. In 2022, service revenue decreased by IDR57.6 million. In 2022, the Company successfully generated IPF Service Fee Revenue of IDR2.52 billion, a decrease of IDR57.6 million or 2.23% compared to the service fee revenue in 2021. Additionally, the Company earned Interest Income of IDR15.41 billion, a decrease of IDR680.26 million or 4.23% from the previous year's interest income. Therefore, in total, the Company recorded revenue of IDR17.94 billion in 2022, experiencing a decrease of Rp737.91 million (3.95%) compared to its performance in 2021.

Deskripsi *Description*	2022	2021	Perubahan *Change*	%
PENDAPATAN USAHA. *Operating Income*				
Pendapatan Jasa DPP *IPF Management Service Fees*	2,523,409,804	2,581,052,852	(57,643,048)	(2.23%)
Pendapatan Bunga *Interest Income*	15,414,912,924	16,095,175,571	(680,262,647)	(4.23%)
Jumlah Pendapatan Usaha *Total Operating Income*	**17,938,322,728**	**18,676,228,423**	**(737,905,695)**	**(3.95%)**



Beban Usaha

Operating Expenses

Pada tahun 2022 terdapat kenaikan beban usaha Perusahaan sebesar Rp1,13 miliar dibandingkan dengan tahun 2021. Beban usaha pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp15,27 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp14,13 miliar. Beban pendidikan dan pelatihan mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan beban usaha lainnya yakni sebesar 51,17% dibandingkan periode sebelumnya. Namun, selain peningkatan, terdapat pula beban usaha yang mengalami penurunan, yaitu beban penyempurnaan dan sosialisasi, penyusutan, dan beban lainnya.

In 2022, there was an increase in the Indonesia SIPF's operating expenses by IDR1.13 billion compared to 2021. The operating expenses in 2022 amounted to IDR15.27 billion compared to IDR14.13 billion in 2021. The highest increase in operating expenses was in education and training expenses, which increased by 51.17% compared to the previous period. However, in addition to the increase, there were also operating expenses that decreased, such as development and socialization expenses, depreciation, and other expenses.

Deskripsi *Description*	2022	2021	Perubahan *Change*	%
BEBAN USAHA. *Operating Expenses*				
Gaji dan Tunjangan *Salaries and Allowances*	9,325,971,411	8,481,391,321	844,580,090	9.96%
Beban Administrasi *Administrative Expense*	1,429,867,103	1,129,313,134	300,553,969	26.61%
Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi *Socialization and Development Expense*	3,688,133,596	3,734,980,431	(46,846,835)	(1.25%)
Penyusutan *Depreciation Expense*	349,228,494	395,166,539	(45,938,045)	(11.62%)
Pendidikan dan Pelatihan *Education and Training*	204,140,017	135,042,935	69,097,082	51.17%
Beban Konsultan *Consultant Expense*	194,419,358	172,726,922	21,692,436	12.56%
Lainnya *Others*	73,928,790	84,347,814	(10,419,024)	(12.35%)
Jumlah Beban Usaha *Total Operating Expense*	**15,265,688,769**	**14,132,969,096**	**1,132,719,673**	**8.01%**

Beban Gaji dan Tunjangan

Salary and Allowance Expenses

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Pada tahun 2022, Perusahaan mencatatkan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp9,33 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 9,96% dibandingkan dengan tahun 2021 yang bernilai Rp8,48 miliar. Peningkatan tersebut antara lain karena terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan Direksi dan Karyawan pada tahun 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7% dan peningkatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas kenaikan gaji dan tunjangan tersebut. Peningkatan gaji dan tunjangan pada tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan IHK tahun 2022 dan tingkat kinerja karyawan tahun 2021, dan telah dianggarkan dalam RKAT Tahun 2022. Secara detail, beban gaji dan tunjangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

The expenses for salaries and allowances consist of expenses for the salaries and allowances of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees. In 2022, the company recorded salary and allowance expenses of IDR9.33 billion, an increase of 9.96% compared to IDR8.48 billion in 2021. The increase is mainly due to salary and allowance adjustments for the Board of Directors and Employees in 2022, with an average increase of 7%, as well as an increase in Article 21 Income Tax (PPh) on the salary and allowance increase. The salary and allowance increase in 2022 was carried out considering the changes in the Consumer Price Index in 2022 and the employee performance level in 2021, and it has been budgeted in the 2022 Annual Work Plan (RKAT). The details of the salary and allowance expenses can be seen in the following table:



Deskripsi *Description*	2022	2021	Perubahan *Change*	%
GAJI DAN TUNJANGAN. *Salaries and Allowances*				
Karyawan *Employees*				
Gaji *Salaries*	1,444,886,868	1,206,793,669	238,093,199	19.73%
Tunjangan dan Manfaat *Allowances and Benefits*	3,493,705,712	2,792,189,136	701,516,576	25.12%
Direksi *Board of Directors*				
Gaji *Salaries*	1,227,096,000	1,185,600,000	41,496,000	3.50%
Tunjangan dan Manfaat *Allowances and Benefits*	2,687,130,035	2,817,216,849	(130,086,814)	(4.62%)
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*				
Gaji *Salaries*	228,000,000	228,000,000	0	0.00%
Tunjangan dan Manfaat *Allowances and Benefits*	245,152,796	251,591,667	(6,438,871)	(2.56%)
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan *Total Salary and Allowance Expenses*	**9,325,971,411**	**8,481,391,321**	**844,580,090**	**9.96%**

Beban Administrasi

Administrative Expenses

Perusahaan mencatatkan beban administrasi pada tahun 2022 sebesar Rp1,43 miliar atau mengalami peningkatan sebanyak 26,61% dibandingkan dengan beban administrasi pada tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp1,13 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada biaya keperluan kantor, biaya utilitas, sewa, dan rapat.

The company recorded administrative expenses in 2022 amounting to IDR1.43 billion or an increase of 26.61% compared to administrative expenses in 2021, which amounted to IDR1.13 billion. This increase was due to an increase in office supplies, utility costs, rent, and meetings.

Deskripsi *Description*	2022	2021	Perubahan *Change*	%
BEBAN ADMINISTRASI. *Administrative Expenses*				
Keperluan Kantor *Office Supplies*	935,119,945	697,944,123	237,175,822	33.98%
Telpon, Internet, Listrik dan Utilitas Lainnya *Telephone, Internet, Electricity and Other Utilities*	309,993,723	294,768,870	15,224,853	5.17%
Asuransi *Insurance*	75,000,000	75,000,000	0	0.00%
Sewa *Rent*	75,443,099	50,008,750	25,434,349	50.86%
Rapat *Meeting*	34,310,336	10,591,391	23,718,945	223.95%
Pemeliharaan *Maintenance*	0	1,000,000	(1,000,000)	(100.00%)
Jumlah Beban Administrasi *Total Administrative Expense*	**1,429,867,103**	**1,129,313,134**	**300,553,969**	**26.61%**

Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi

Socialization and Development Expense

Perusahaan mencatatkan beban penyempurnaan dan sosialisasi pada tahun 2022 sebesar Rp3,69 miliar atau mengalami penurunan sebanyak 1,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,73 miliar.

The company recorded the expenses of development and socialization in 2022 amounted to IDR3.69 billion or a decrease of 1.25% compared to the previous year which was recorded at IDR3.73 billion.

Deskripsi *Description*	2022	2021	Perubahan *Change*	%
BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI. *Development and Socialization Expenses*				
Kontribusi dengan SRO *Sharing Cost with SRO*	2,138,629,480	2,199,999,998	(61,370,518)	(2.79%)
Sosialisasi dan Publikasi *Socialization and Publication*	1,066,167,064	1,088,167,612	(22,000,548)	(2.02%)
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal *Development of Investor Protection Fund Members*	383,337,052	346,812,821	36,524,231	10.53%
Pengembangan Sistem Perlindungan Modal *Development of Investment Protection System*	100,000,000	100,000,000	-	-
Jumlah Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi *Total Development and Socialization Expenses*	**3,688,133,596**	**3,734,980,431**	**(46,846,835)**	**(1.25%)**

Penyusutan

Depreciation

Penyusutan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp349,23 juta atau mengalami penurunan sebanyak 11,62% dibandingkan dengan penyusutan tahun 2021.

Depreciation in 2022 was recorded at IDR349.23 million or decreased by 11.62% compared to depreciation in 2021.

Pendidikan dan Pelatihan

Education and Training Expenses

Beban pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp204,14 juta atau mengalami peningkatan sebesar 51,17% dibandingkan pada periode sebelumnya. Perusahaan melihat pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam memperbaiki performa Perusahaan dan meningkatkan kualitas sumber daya Perusahaan yang ada.

The expenses for education and training in 2022 were recorded at IDR204.14 million, an increase of 51.17% compared to the previous period. The company sees the importance of education and training in improving its performance and enhancing the quality of its existing human resources.

Beban Konsultan

Consultant Expenses

Beban konsultan merupakan biaya jasa akuntan publik/perpajakan dan konsultan hukum/notaris. Beban Konsultan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp21,69 juta atau 12,56% menjadi Rp194,42 juta dibandingkan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp172,73 juta.

The consultancy expenses are the costs of public accounting/tax services and legal/notary consultants. The consultancy expenses increased in 2022 by IDR21.69 million or 12.56% to IDR194.42 million compared to 2021 which was recorded at IDR172.73 million.

Lainnya

Other Expenses

Pada tahun 2022, Perusahaan memiliki beban lainnya tercatat sebesar Rp73,93 juta atau mengalami penurunan sebanyak 12,35% dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar Rp84,35 juta.

In 2022, other expenses were recorded at IDR73.93 million or decreased by 12.35% compared to 2021 expenses' of IDR84.35 million.

Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalent

Kas dan setara kas pada akhir tahun 2022 sebesar Rp2,72 miliar atau mengalami peningkatan sebanyak 8,85% atau sebanyak Rp221,52 juta. Pada tahun 2022, arus kas dari aktivitas operasi bernilai negatif Rp703,30 juta, arus kas dari aktivitas investasi bernilai Rp1,01 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencatatkan hasil negatif Rp89,56 juta.

Cash and cash equivalents at the end of 2022 amounted to IDR2.72 billion, an increase of 8.85% or IDR221.52 million. In 2022, the cash flow from operating activities was negative at IDR703.30 million, the cash flow from investing activities was IDR1.01 billion. The cash flow from financing activities recorded a negative result of IDR89.56 million.

Deskripsi. *Description*	2022	2021	Perubahan *Change*	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi *Cash Flow from Operating Activities*	(703,303,728)	7,328,686,446	(8,031,990,174)	(109.60%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi *Cash Flow from Investing Activities*	1,014,378,603	(7,602,152,670)	8,616,531,273	(113.34%)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan *Cash Flow from Financing Activities*	(89,556,328)	(82,641,578)	(6,914,750)	8.37%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas *Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalent*	221,518,547	(356,107,802)	577,626,349	(162.21%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun *Cash and Cash Equivalent at the Beginning of Year*	2,502,898,542	2,859,006,344	(356,107,802)	(12.46%)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun *Cash and Cash Equivalent at The Ending of Year*	**2,724,417,089**	**2,502,898,542**	**221,518,547**	**8.85%**



Posisi Keuangan

Financial Position

Posisi keuangan Perusahaan menunjukkan performa yang baik dari Perusahaan sepanjang tahun 2022. Jumlah aset lancar mengalami peningkatan menjadi Rp59,08 miliar atau meningkat sebanyak 2,36%. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2022 adalah Rp160,97 miliar mengalami sedikit penurunan sebanyak 3,04%. Sehingga total aset pada akhir tahun 2022 adalah Rp220,05 miliar. Penurunan tersebut antara lain karena terdapat penurunan nilai wajar aset keuangan CGRP dalam bentuk obligasi korporasi dan SBN dibandingkan dengan nilai wajar tahun 2021. Namun demikian dengan rata-rata tingkat kupon obligasi tersebut yang masih relatif tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka rata-rata nilai wajar aset keuangan tersebut masih berada pada harga premium.

Dalam hal liabilitas, liabilitas jangka pendek tahun 2022 adalah Rp4,01 miliar atau mengalami penurunan sebanyak 7,49%. Sedangkan liabilitas jangka panjang berjumlah Rp78,36 juta atau mengalami penurunan sebanyak 76,09%. Dalam sisi ekuitas, jumlah ekuitas pada tahun 2022 adalah Rp215,96 miliar.

The financial position of the company showed good performance throughout the year 2022. The total current assets increased to IDR59.08 billion, or a 2.36% increase. The total non-current assets in 2022 were IDR160.97 billion, a slight decrease of 3.04%. Therefore, the total assets at the end of 2022 were IDR220.05 billion.

Regarding liabilities, the short-term liabilities in 2022 amounted to IDR4.01 billion, a decrease of 7.49%. Meanwhile, the long-term liabilities amounted to IDR78.36 million, a decrease of 76.09%. In terms of equity, the total equity in 2022 was IDR215.96 billion.The decrease is mainly due to a decline in the fair value of ICS financial assets in the form of corporate bonds and Government Securities (SBN) compared to the fair value in 2021. However, despite this, the average coupon rate of these bonds remains relatively high compared to market interest rates, resulting in the average fair value of these financial assets still being at a premium price.

Deskripsi. *Description*	2022	2021	Perubahan *Change*	%
LAPORAN POSISI KEUANGAN. *Financial Position*				
ASET. *Assets*				
Kas dan Setara Kas • *Cash and cash equivalent*	2,724,417,089	2,502,898,542	221,518,547	8.85%
Piutang Usaha • *Account receivable*	2,523,408,641	2,581,051,688	(57,643,047)	(2.23%)
Piutang Lain-lain • *Other receivable*	1,876,222,856	1,783,358,151	92,864,705	5.21%
Biaya Dibayar Dimuka • *Prepaid expenses*	1,653,917,718	596,374,095	1,057,543,623	177.33%
Aset Keuangan Lainnya • *Other financial assets*	50,261,751,245	50,214,720,513	47,030,732	0.09%
Uang Muka dan Jaminan • *Deposit and Guarantees*	37,950,000	37,950,000	0	0.00%
Jumlah Aset Lancar • *Total Current Assets*	**59,077,667,549**	57,716,352,989	1,361,314,560	2.36%
Cadangan Ganti Rugi Pemodal • *Investor Compensation Reserve (CGRP)*	160,449,787,899	165,152,397,338	(4,702,609,439)	(2.85%)
Aset Tetap • *Fixed assets*	522,222,924	860,809,056	(338,586,132)	(39.33%)
Aset Pajak Tangguhan • *Deferred tax assets*	0	0	0	0
Jumlah Aset Tidak Lancar • *Total Non Current Assets*	**160,972,010,823**	166,013,206,394	(5,041,195,571)	(3.04%)
Jumlah Aset *Total Assets*	**220,049,678,372**	223,729,559,383	(3,679,881,011)	(1.64%)
LIABILITAS. *Liabilities*				
Utang Pajak • *Tax payable*	357,292,014	288,381,912	68,910,102	23.90%
Utang Lain-lain • *Other liabilities*	83,760,464	7,448,613	76,311,851	1024.51%
Beban Akrual • *Accrued expenses*	2,590,014,225	2,304,696,568	285,317,657	12.38%
Utang Kepada Pihak Berelasi • *Debt to Related Parties*	880,596,469	1,642,806,863	(762,210,394)	(46.40%)
Liabilitas Sewa • *Rent Liabilities*	97,791,055	90,646,505	7,144,550	7.88%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek • *Total Short Term Liabilities*	**4,009,454,227**	4,333,980,461	(324,526,234)	(7.49%)
Utang Kepada Pihak Berelasi • *Debt to Related Parties*	0	0	0	0%
Cadangan Imbalan kerja • *Employment Benefit Reserve*	0	154,272,990	(154,272,990)	(100.00%)
Liabilitas Sewa • *Rent Liabilities*	78,358,364	173,407,879	(95,049,515)	(54.81%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang • *Total Long Term Liabilities*	**78,358,364**	327,680,869	(249,322,505)	(76.09%)



EKUITAS. *Equity*

Modal Saham *• Paid-up Capital*	210,000,000,000	210,000,000,000	0	0.00%
Laba Ditahan (Defisit) *• Retained Earnings (Deficit)*	5,961,865,781	9,067,898,053	(3,106,032,272)	(34.25%)
Jumlah Ekuitas *• Total Equity*	**215,961,865,781**	219,067,898,053	(3,106,032,272)	(1.42%)
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas *• Total Liabilities and Equity*	**220,049,678,372**	223,729,559,383	(3,679,881,011)	(1.64%)



Governansi Perusahaan

Good Corporate Governance


INDONESIA
SIPF



Customer Focus

Customer Focus adalah nilai yang menekankan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi tingkat kepuasaan mitra kerja maupun pelanggan. Nilai ini dijabarkan ke dalam konsep komunikatif, responsif, berempati, dan adaptif. Komunikatif diartikan ke dalam komunikasi yang efektif dan efisien agar mudah dimengerti dan dipahami, kemudian responsif merujuk pada memberikan tanggapan atau reaksi sesegera mungkin atas sebuah situasi yang membutuhkan respon dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Karyawan juga didorong untuk menunjukkan empati dengan memposisikan diri dalam situasi orang lain, berusaha memahami perasaannya dan menerima perbedaan-perbedaan serta melihat sudut pandang orang lain, agar dapat mengetahui dan memahami keadaan yang sebenarnya. Di zaman yang manghadapi banyak perubahan ini, karyawan didorong untuk adaptif dengan menunjukkan sikap terbuka dan dinamis serta tanggap terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta melakukan penyesuaian secara cepat dan tepat.



Customer Focus is a value that emphasizes consistently providing the best service to meet the satisfaction levels of both partners and customers. This value is elaborated through communicative, responsive, empathetic, and adaptive concepts. Communicative means effective and efficient communication that is easily understood and comprehended. Responsiveness refers to timely responses or reactions to situations requiring a responsible and accountable response. Employees are encouraged to show empathy by putting themselves in others' positions, seeking to understand their feelings, accepting differences, and considering others' perspectives to understand and comprehend the situation. In this ever-changing world, employees are urged to be adaptive by demonstrating an open and dynamic attitude, responsive to environmental changes, and making quick and appropriate adjustments.

Governansi Perusahaan

Good Corporate Governance

P3IEI senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang merupakan aspek utama dari praktik tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*-GCG).

Dalam rangka menjalankan prinsip Transparansi dan menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, P3IEI menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan melalui publikasi informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan Perusahaan. Informasi tersebut antara lain Laporan Keuangan DPP dan PDPP selama tahun 2022, Laporan Kegiatan Tahunan, Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham, serta laporan lainnya baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Aktivitas terkait transparansi informasi yang dilakukan oleh P3IEI tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib seperti pengungkapan kinerja Perusahaan dalam pengelolaan DPP, namun turut mencakup informasi yang termuat dalam kegiatan utama dan lainnya di P3IEI seperti publikasi kegiatan, pengumuman, berita, regulasi, bulletin kepada media dan masyarakat.

P3IEI menjalankan prinsip Akuntabilitas agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan melalui penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) bersama-sama dengan penyusunan rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan formal bagi karyawan, sesuai dengan pemisahan fungsi dan mekanisme *check and balance* yang efektif dan efisien.

P3IEI berkomitmen mewujudkan prinsip Tanggung Jawab dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait kelembagaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta mengikuti perkembangan tentang ketentuan terkait ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketentuan-ketentuan formal lain terkait operasional Perusahaan.

Prinsip Independensi dijalankan oleh Perusahaan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perusahaan. P3IEI menerapkan prinsip Kewajaran dengan memberikan secara layak dan utuh pemenuhan hak-hak para Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Sebagai langkah yang dibangun dalam melaksanakan kegiatannya, P3IEI senantiasa menerapkan perilaku beretika dengan mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat *(respect)*, memenuhi komitmen,

Indonesia SIPF committed to implement the principles of accountability, transparency, responsibility, independence and fairness which are the main aspects of Good Corporate Governance (GCG) practices.

In order to carry out the principle of Transparency, Indonesia SIPF to maintain objectivity in conducting business, corporations provide material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders by publishing financial and non-financial information to Company stakeholders, including Financial Reports of DPP and PDPP for 2022, Annual Activity Report, Annual Report to the Financial Services Authority and Shareholders, as well as other reports in accordance with applicable regulations. Activities related to information transparency carried out by Indonesia SIPF are not limited to mandatory information such as disclosure of Company performance in DPP management, but also include information contained in the main activities and others in Indonesia SIPF such as publication of activities, announcements, news, regulations, bulletins to the media and public.

Indonesia SIPF implements the principle of Accountability in order to be accountable for its performance in a transparent and fairly manner. For this reason, the Company must be managed properly, measurably and in accordance with the interests of the Company while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Prerequisites needed to achieve sustainable performance. through the establishment of Key Performance Indicators (KPI) together with the preparation of clear and formal details of duties and responsibilities for employees, in accordance with the separation of functions and an effective and efficient check and balance mechanism.

Indonesia SIPF is committed to realizing the principle of Responsibility by complying with applicable laws and regulations, both those relating to the Financial Services Authority Regulations regarding the Institution of Investor Protection Fund Providers as well as compliance with other applicable laws and regulations and keeping abreast of developments regarding provisions related to employment, taxation, business competition, occupational health and safety, as well as other formal provisions related to the Company's operations.

The principle of Independence is carried out by the Company by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities and authorities of each organ of the Company. Indonesia SIPF applies the principle of Fairness by providing proper and complete fulfillment of the rights of Stakeholders to receive fair, equal and free treatment from bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender or other things that do not exist relation to performance.

As a step that is built in carrying out its activities, Indonesia SIPF always behaves ethically by prioritizing honesty, treating all parties with respect, fulfilling commitments, building and maintaining moral values and beliefs consistently. Indonesia

Highlight Aktivitas GCG Tahun 2022

Highlight of 2022 GCG Activities

1. Tindak lanjut Perbaikan Tata Kelola Perusahaan secara berkelanjutan
2. Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
3. Evaluasi dan pembaharuan atas Pedoman, Piagam, dan Prosedur Operasional Standar Perusahaan

1. Continous improvement on Corporate's Governance
2. Corporate's Social Responsibility Activity Execution
3. Corporate's Updates dan Revision on Operational Guidelines, Charter, Standar Operational Procedures

Perjalanan Tata Kelola Perusahaan 2014 - 2022

2014

- Pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

  Ratification of Good Corporate Governance Guideline

2016

- Adanya pembaruan landasan hukum dari Peraturan Bapepam VI.A.5 menjadi Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

  Update of Corporate legal basis, which brought about shift from Peraturan Bapepam VI.A.5 into Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016

membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. P3IEI memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan *(fairness)* dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk mendukung penerapan tata kelola Perusahaan (GCG) yang baik. Dari hasil evaluasi praktik GCG yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, P3IEI menitikberatkan dalam meningkatkan komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan sepanjang tahun 2022, yaitu dalam bentuk perbaikan berkelanjutan baik yang berkaitan dengan piagam, pedoman, dan prosedur maupun praktik dari implementasi tersebut.

SIPF pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principle of fairness and is managed independently so that each company organ does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.

The company is always committed to supporting the implementation of good corporate governance (GCG). From the results of the evaluation of GCG practices that have been carried out in 2021, Indonesia SIPF focuses on increasing commitment to the implementation of sustainable governance throughout 2022, namely in the form of continuous improvement both in relation to the charter, guidelines, and procedures as well as the practice of this implementation.

Capaian Penilaian Penerapan GCG

Achievements Of GCG Assessment

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan evaluasi terbatas secara internal atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang dicapai P3IEI yaitu melalui perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan selama tahun 2022 dan dengan merujuk kepada hasil penilaian secara menyeluruh pada tahun 2021. Adapun evaluasi terbatas tersebut menghasilkan nilai 76 dari 100 dari target 75 sehingga mencatatkan peningkatan Tata Kelola Perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang dapat digarisbawahi antara lain Penyusunan Pedoman Perusahaan seperti Pedoman Pengelolaan Investasi, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi, dan Pembaruan Prosedur Operasional Standar Perusahaan seperti Prosedur Administrasi Keanggotaan DPP, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur Pengelolaan Aset Perusahaan, Prosedur Perpajakan, dan Prosedur Operasional Teknologi Informasi. Perusahaan juga melakukan evaluasi dan pembaruan beberapa Prosedur Operasional Perusahaan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi dapat menghasilkan kinerja maksimal.

Selain itu, P3IEI juga telah melakukan serangkaian kegiatan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik melalui pengelolaan gratifikasi, pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan Perusahaan, hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan,dan penyelenggaraan pengawasan internal yang berkualitas dan efektif.

In 2022, Indonesia SIPF conduct internal limited review of the Good Corporate Governance implementation through continuous improvement that the company performed in 2022 and with refer to the assessment performed in 2021. This limited review achieved by Indonesia SIPF is 76 out of 100 from the target of 75 so it recorded an increase in corporate governance. GCG activities that can be underlined includes the preparation of Company Guidelines such as Guidelines for Investment Management, Guidelines for Managing Conflict of Interest, Guidelines for Gratification Control, and Renewal of Company Standard Operationg Procedures such as Procedures for DPP Membership Administration , Procedures for Procurement of Goods and Services, Procedures for Asset Management, Procedures for Taxation , and Procedures for Information Technology - Operational . The Company has also review and updated several the Company's Operational Procedures to ensure that all tasks and functions can produce maximum performance.

In addition, Indonesia SIPF has also carried out a series of activities to implement good corporate governance through gratification control, operational and financial control of the Company, added value relationship to the Company and stakeholders, and performance that produce quality and and effective internal controls.

GCG Milestones 2014 - 2022

2017

- Pembaruan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

  Update process of Good Corporate Governance Guideline

2019

- Inisiasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis pengembangan komunitas dalam bentuk pembangunan taman bacaan/perpustakaan

  Initiation of community-development centered CSR activity in the form of library construction

2020

- Implementasi aktivitas CSR berupa pemberian bantuan dana pengembangan dan dukungan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia pilihan melalui *Business Plan Competition* sebagai tahapan seleksi mitra penerima bantuan

  Implementation of CSR activities, namely allocation of development fund and support of socialization programs towards chosen Investment Galleries of Indonesia Stock Exchange using Business Plan Competition as the tool for selecting prospective partners

2021

- Pembaharuan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pedoman Etika dan Perilaku, dan Piagam Perusahaan
- Pembaharuan Prosedur Operasional Perusahaan
- Pembaharuan Struktur Organisasi Perusahaan

Update of Good Corporate Governance Guidelines, Code of Ethics and Conduct, and The Corporate's Charter

Update of the Corporate's Standard Operational Procedures.

Update of the Corporate's Organization Structure

2022

- Penyusunan Pedoman Perusahaan seperti Pedoman Pengelolaan Investasi, Pedoman Penangangan Benturan Kepentingan, Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi, dan Pembaruan Prosedur Operasional Standar Perusahaan seperti Prosedur Administrasi Keanggotaan DPP, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur Pengelolaan Aset Perusahaan, Prosedur Perpajakan, dan Prosedur Operasional Teknologi Informasi.
- Evaluasi dan Pembaruan Prosedur di lingkungan Operasional Perusahaan lainnya.

Compilation of Company Guidelines such as Guidelines for Investment Management, Guidelines for Managing Conflict of Interest, Guidelines for Gratification Control, and Updating Company Standard Operational Procedures such as IPF Procedures for Membership Administration , Procedures for Procurement of Goods and Services , Procedures for Asset Management , Procedures for Taxation , and Procedures for Information Technology – Operational. .

Review and other updates of Operational Procedures in the Company's environment.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Purpose of Good Corporate Governance Implementation



Guna menjalankan perannya sebagai PDPP, Perusahaan perlu menjalankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan praktik GCG bertujuan untuk mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam jangka panjang. Atas dasar pentingnya pelaksanaan praktik GCG dalam jangka panjang, Perusahaan telah memulai penerapan GCG sejak tahun 2014 dengan mengesahkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai panduan pelaksanaan yang formal dan disepakati oleh seluruh jajaran terkait. Perusahaan juga melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap Pedoman tersebut terakhir pada tahun 2021 demi menyesuaikan relevansi Pedoman tersebut terhadap kebutuhan organisasi.

In order to perform its role as Investor Protection Fund Institution, the company has to implement Good Corporate Governance Practice. GCG Practice implementation is aimed to optimize the company's long-run value for its stakeholders. On the basis of long-run GCG implementation practice, the company has initiated GCG practice implementation since 2014 by ratificating Corporate GCG Guideline as a formal and agreed upon direction of GCG implementation. The company has also conducted latest improvements in 2021, in order to improve the suitability of the Guideline's relevance towards the organization's specific needs.

Tahapan Implementasi GCG

GCG Implementation Stage

Penerapan GCG oleh P3IEI dimulai sejak tahun 2014. Langkah pertama yang dilaksanakan dalam upaya penerapan GCG adalah pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah tersebut bertujuan agar Perusahaan memiliki sebuah panduan pelaksanaan yang formal dan keberadaannya disepakati oleh seluruh jajaran terkait guna menunjang penerapan GCG. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut telah mengalami pembaruan terakhir pada tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kesesuaian antara Pedoman tersebut dengan kebutuhan organisasi. Pedoman tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Praktik *Corporate Governance* yang berlaku umum di Industri Pasar Modal. Selanjutnya, pedoman tersebut diimplementasikan dan dirinci lebih lanjut dalam bentuk ketetapan dan panduan operasional Perusahaan. Seluruh tahapan implementasi praktik GCG tersebut merupakan salah satu langkah yang krusial bagi Perusahaan guna mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, sehingga Perusahaan mampu mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan praktik GCG juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Manajemen.

GCG Implementation has been carried out by Indonesia SIPF since 2014. The first step executed in regards to GCG Implementation is the ratification of the Good Corporate Governance Guideline. The objective of this step was to ensure that the company would have a formal implementation guideline, the existence of which also agreed upon by related parties, in order to support and enable the implementation of GCG. The Good Corporate Governance Guideline has undergone an latest update in 2021, with the objective to increase the suitability between the Guideline and organizational needs. The Guideline was constructed in accordance with Financial Services Authority Regulation or Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – OJK as well as Corporate Governance Practice commonly exercised in the Capital Market Industry. Afterwards, the Guideline was to be implemented and broken down into details in the forms of corporate operational resolutions and guidelines. The entire GCG practice implementation was one of the crucial steps taken by the company in order to further the agenda of professional management of the company, therefore enabling it to achieve an effective, efficient, and sustainable level of performance. In addition, the implementation of GCG practice is also expected to produce positive contribution in the planning and decision-making processes that are carried out by the Management.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

GCG Structure



Dalam penerapan GCG Perusahaan membagi organisasi menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu Organ Utama dan Organ Pendukung.

Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung *corporate governance* terdiri dari Komite Audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Investasi, Sekretaris Perusahaan, dan Pengawas Internal dan Kepatuhan yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab secara administratif kepada Direksi Perusahaan dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris Perusahaan.

In implementing GCG, the Company divides the organization into 2 (two) important parts, namely the Main Organs and Supporting Organs.

Supporting organs are parties who support the Main Organs in carrying out their duties and authorities, especially related to the implementation of GCG. Supporting organs in corporate governance consist of the Audit Committee which is tasked with assisting the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Claims Committee and the Investment Committee, the Corporate Secretary, and the Internal Audit and Compliance Oversight whose task is to assist the duties and responsibilities of the Company's Directors administratively and report to the Board of Commissioners functionally.

1. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan.

RUPS dalam Perusahaan terdiri dari:

i. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.

ii. RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

i. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan Keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.

iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perusahaan.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

2. Pelaksanaan RUPS 2022

- **RUPS Tahunan**

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 21 Juni 2022. RUPS Tahunan ini diwakili oleh 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

Rapat diselenggarakan dengan agenda Rapat sebagai berikut:

i. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2021.

ii. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perusahaan untuk Tahun Buku 2022.

iii. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI untuk Periode masa jabatan 2022-2025.

iv. Penetapan besaran Gaji dan/atau Tunjangan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode masa jabatan 2022-2025; dan

v. Pemberian Jasa Pengabdian kepada kepada Dewan Komisaris periode masa jabatan 2019-2022 dan Direksi Pengganti P3IEI periode masa jabatan 2020-2022.

- **RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)**

P3IEI menyelenggarakan RUPS-LB pada tanggal 28 November 2022. RUPS-LB ini diwakili oleh 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

i. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan untuk Tahun Buku 2023, sebagaimana telah disampaikan oleh Direksi Perusahaan dalam Rapat ini.

ii. Menugaskan Direksi Perusahaan untuk mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2023 tersebut kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.04/2016.

iii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang telah disetujui oleh Rapat (jika ada), dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Corporate Governance Mechanism

- **General Meeting of Shareholders (GMS)**

GMS is a means for shareholders to make decisions in accordance with the agenda of the GMS, the provisions of the Articles of Association, and legislation.

GMS in the Company consists of:

i. Annual GMS, which is a GMS that must be held every year, within a period of no later than 6 (six) months after the Company's fiscal year is closed.

ii. Other GMS, also known as Extraordinary GMS (RUPS-LB), is a GMS that is held at any time based on need.

The GMS can be held at the request of 1 (one) shareholder or better alone or jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights and / or the Board of Commissioners.

In the Annual General Meeting of Shareholders, the following matters are carried out:

i. The Board of Directors submits an annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners to obtain GMS approval. Financial statements that consist of at least the Balance Sheet and Income Statement for the Fiscal Year concerned to get the GMS approval.

ii. Determination of the use of net profit, if the Company has a positive profit balance by taking into account OJK regulations.

iii. Appointment, dismissal and / or alteration of the composition of the Directors and / or members of the Board of Commissioners.

iv. Determination of salary / honorarium and facilities for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners.

v. Appointment of a Public Accountant office that will audit the Company's books.

In the RUPS-LB it is not authorized to discuss and decide on the agenda of the meeting referred to in numbers i and ii.

2. Implementation of GMS 2022

- **Annual GMS**

Indonesia SIPF held an Annual GMS on June 21, 2022. This Annual GMS was represented by 210,000 (two hundred and ten thousand) shares or 100% (one hundred percent) issued by the Company.

The meeting is held with the Meeting agenda as follows:

i. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2021.

ii. Appointment of a Public Accountant Firm that will audit the Company's books for Fiscal Year 2022.

iii. Appointment of Company's Members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2022-2025 period.

iv. Ratification of the Board of Commissioners and Board of Directors remuneration for the 2022-2025 period; And

v. Approval of services allowance to the Board of Commissioners for the 2019-2022 period and the Substitute Directors for the 2020-2022 period.

- **Extraordinary GMS (RUPS-LB)**

Indonesia SIPF convenes the RUPS-LB on November 28, 2022. The RUPS-LB is represented by 210,000 (two hundred and ten thousand) shares or 100% (one hundred percent) issued by the Company. The unanimous deliberation to reach consensus decided to agree on the following matters:

i. Approved the Company's Annual Work Plan and Budget for Fiscal Year 2023, with notes as submitted by the shareholders at the Meeting to be requested for approval from the Financial Services Authority.

ii. To authorize the Company's Directors by first obtaining approval from the Board of Commissioners to revise the Work Plan and Annual Budget for Fiscal Year 2023 which has been approved by the Meeting upon request (if any), and/or with the approval of the Financial Services Authority.

iii. Granting authority to the Board of Directors of the Company, subject to prior approval from the Board of Commissioners, to revise the Annual Work Plan and Budget for the fiscal year 2023 that has been approved by the Meeting (if any), in order to obtain approval from the Financial Services Authority (OJK).

Bagan Struktur Organisasi Tata Kelola

Organizational Structure of Governance Chart

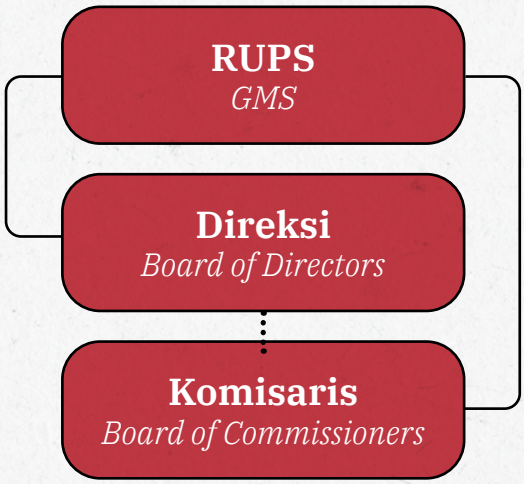
Prinsip Tata Kelola Perusahaan

GCG Principle

Transparansi *Transparency* || **Akuntabilitas** *Accountability* || **Responsibilitas** *Responsibility* || **Independen** *Independent* || **Kewajaran** *Fairness*

Organ Utama

Main Organs



Organ Pendukung

Supporting Organs

Komite Audit *Audit Committee*	**Komite Klaim** *Claims Committee*	**Satuan Pengawasan Internal** *Internal Control*
Komite Investasi *Investment Committee*	**Satuan Kepatuhan** *Compliance*	**Auditor Independen** *Independent Auditor*

Pedoman & Laporan

Guidelines & Reports

Pedoman Tata Kelola Perusahaan *Corporate Governance Guidelines*	**Piagam Dewan Komisaris** *Board of Commissioners Charter*	**Pedoman Etika & Perilaku** *Ethical & Behavioral Guidelines*	**Piagam Komite Audit** *Audit Commitee Charter*
Piagam Pengawasan Internal *Internal Control Charter*	**Piagam Direksi** *Board of Directors Charter*	**Peraturan Perusahaan** *Company Regulations*	**Piagam Manajemen Risiko** *Risk Management Charter*
Laporan Tahunan *Annual Report*	**Kebijakan & SOP** *Policy & Standart Operating*	**Laporan Hasil Penilaian CG** *Corporate Governance Assesment Report*	**Kebijakan Investasi** *Investment Policy*

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

GCG Policy

Terkait dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan memiliki beberapa peraturan dan kebijakan formal yang menjadi landasan operasional tata kelola tersebut. Selain Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan juga memiliki Pedoman Etika dan Perilaku serta Panduan Penerapan Manajemen Risiko untuk mengelola Perusahaan secara strategis. Perusahaan juga memiliki Peraturan Perusahaan yang menjadi pedoman formal karyawan dalam bersikap dan berperilaku, terutama terkait dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

In relation to GCG Implementation, the Company possesses several regulations and formal policies that serve the function of being the foundation of the governance process. Aside from GCG Guideline, the Company is also equipped with Ethical and Behavioral Guideline and Risk Management Implementation Guideline as tools to manage the Company from a strategic perspective. The Company also possesses Corporate Regulation that serves as the employees' formal guidelines of proper action and behaviour, especially in relation to the jobs that are considered as their areas of responsibility.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perusahaan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama
- 1 (satu) orang atau lebih Komisaris

The Board of Commissioners is a corporate organ that is tasked with and responsible for conducting supervision of the Directors' task, implementing, taking responsibility, and executing authority in regards to the management function of the company, without the necessity to be involved in the decision-making process of the company's operational activities. The Board of Commissioners also ensures that the company has carried out the principles of Good Corporate Governance in its activities across organizational levels.

The General Meeting makes the appointment and/or replacement of a Board of Commissioners member of Shareholders after the candidate has passed the fit and proper tests conducted by Financial Services Authority (OJK). The Board of Commissioners has several members and compositions designed accordingly to run their supervisory function effectively, independently, and objectively, devoid of conflict of interest that could hinder its ability to execute its task and responsibilities.

The initial requirement list of members of the Board of Commissioners should contain:

- 1 (one) person of President Commissioner
- 1 (one) person or more Commissioner

Susunan Dewan Komisaris P3IEI adalah sebagai berikut:

The current members of the Board of Commissioners of Indonesia SIPF is as follows:

Nama Jabatan *Position Title*	Masa Jabatan *Length of Service*	Nama Penjabat *Name of Title Holders*
Komisaris Utama *President Commissioner*	**2022-2025** **mulai 21 Juni 2022** *Starting June 21, 2022*	**Lucia Sintha Sari**
Komisaris *Commissioner*	**2022-2025** **mulai 21 Juni 2022** *Starting June 21, 2022*	**Dian Kurniasarie**

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Direksi juga bertugas menyosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan dan seluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh OJK atau komite yang dibentuk oleh OJK. Tata cara pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Direksi Perusahaan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang meliputi namun tidak terbatas atas rencana strategis pengembangan Dana Perlindungan Pemodal.

Adapun jumlah dan komposisi Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Direktur Utama
- 1 (satu) orang atau lebih Direktur

The Board of Directors is the corporate organ tasked with leading and managing the Company according to the vision, mission, and objectives that have been set and within the boundaries of authority established through the Law and Corporate Article of Association. Furthermore, The Board of Directors is also tasked with socializing and implementing GCG principles in every corporate activity and its structures.

Nomination, Appointment, Dismissal, and Reshuffle of the Board of Directors members are made through the General Meeting of Shareholders (GMS). Every member of the Board of Directors that has been appointed through the GMS is required to participate in a Fit and Proper Test conducted by an authorized Services Authority or other committee formed by Financial Services Authority (OJK). The Fit and Proper Test program for prospective members of the Board of Directors is conducted using several methods, namely administrative research, interviews, and/or request for a presentation that includes but is not limited to the strategic development plan for Investor Protection Fund.

The minimum quota and composition of the Board of Directors are listed as follows:

- 1 (one) President Director
- 1 (one) or more Director(s)

Susunan Direksi P3IEI adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of Indonesia SIPF is as follows:

Nama Jabatan *Position Title*	Masa Jabatan *Length of Service*	Nama Penjabat *Name of Title Holders*
Direktur Utama *President Director*	**2022-2025** **mulai 21 Juni 2022** *Starting June 21, 2022*	**Narotama Aryanto**
Direktur *Director*	**2022-2025** **mulai 21 Juni 2022** *Starting June 21, 2022*	**Mariska Aritany Azis**

Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi, dan Rapat Direksi

Meeting of The Board of Commissioners, Meeting of The Board of Commissioners Inviting The Board of Directors, and Meeting of The Board of Directors

Rapat Dewan Komisaris

Meeting of The Board of Commissioners

Dalam rangka melaksanakan tugasnya secara khusus, Direksi P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan berupa Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 13.

To carry out their specific duties, the Indonesia SIPF's Board of Directors regularly holds meetings in the form of a Board of Directors Meeting based on the Company's Articles of Association outlined in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012, Article 13.

Tanggal Rapat. *Date of Meeting*	Peserta Rapat. *Meeting Participant*	Agenda Rapat.	*Meeting Agenda*
26 Januari 2022 *January 26, 2022*	**Dewi Arum Prasetyaningtyas** Komisaris Utama *President Commissioner* **Roni Gunardi** Komisaris *Commissioner* **Narotama Aryanto** Direktur Utama *President Director* **Mariska Aritany Azis** Direktur *Director*	◎ Laporan Progres Kegiatan dan Rencana Kerja Periode Desember 2021-Januari 2022 ◎ Diskusi dan Pembahasan terkait Laporan Progress Kegiatan dan Rencana Kerja ◎ Diskusi dan Pembahasan Terkait Rencana Perbaikan Tata Kelola Perusahaan	◎ Progress Report and Work Plan for the period December 2021-January 2022 ◎ Discussion and Review of the Progress Report and Work Plan ◎ Discussion and Review of the Corporate Governance Improvement Plan
24 Februari 2022 *February 24, 2022*	**Dewi Arum Prasetyaningtyas** Komisaris Utama *President Commissioner* **Roni Gunardi** Komisaris *Commissioner* **Narotama Aryanto** Direktur Utama *President Director* **Mariska Aritany Azis** Direktur *Director*	◎ Laporan Progres Kegiatan dan Rencana Kerja Periode Januari - Februari 2022 ◎ Diskusi dan Pembahasan terkait Laporan Progres Kegiatan dan Rencana Kerja ◎ Diskusi dan Pembahasan Terkait Hasil Pemeriksaan Internal Tahun 2021 dan Rencana Pelaksanaan Pemeriksaan Internal Tahun 2022 ◎ Diskusi dan Pembahasan Terkait Usulan Rencana Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2022	◎ Progress Report and Work Plan for the period January-February 2022 ◎ Discussion and Review of the Progress Report and Work Plan ◎ Discussion and Review of Internal Audit Results for 2021 and Internal Audit Implementation Plan for 2022 ◎ Discussion and Review of Proposed Board of Commissioners Training Plan for 2022


INDONESIA
SIPF

25 Maret 2022 *March 25, 2022*	**Dewi Arum Prasetyaningtyas** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Roni Gunardi** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Diskusi dan Pembahasan terkait Laporan Progres Kegiatan dan Rencana Kerja Periode Februari - Maret 2022 ◎ Diskusi dan Pembahasan terkait Rencana Pelatihan Dewan Komisaris	◎ Discussion and Review of Progress Report and Work Plan for the period February-March 2022 ◎ Discussion and Review of Board of Commissioners Training Plan
26 April 2022 *April 26, 2022*	**Dewi Arum Prasetyaningtyas** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Roni Gunardi** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Diskusi dan Pembahasan terkait Laporan Progres Kegiatan dan Rencana Kerja Periode Maret - April 2022 ◎ Diskusi dan Pembahasan terkait KPI Dewan Komisaris	◎ Discussion and Review of the Progress Report and Work Plan for the period March-April 2022 ◎ Discussion and Review of Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPIs)
25 Mei 2022 *May 25, 2022*	**Dewi Arum Prasetyaningtyas** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Roni Gunardi** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Diskusi dan Pembahasan terkait Laporan Progres Kegiatan dan Rencana Kerja Periode April - Mei 2022	◎ Discussion and Review of Progress Report and Work Plan for the period April-May 2022
1 Juli 2022 *July 1, 2022*	**Lucia Shinta Sari** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Dian Kurniasarie** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ *Update* Mengenai Penerapan Prinsip Syariah ◎ Tindak Lanjut Usulan Perubahan Ketentuan terkait DPP dan PDPP ◎ *Review* Kinerja Investasi Perusahaan	◎ Update on the Implementation of Sharia Principles ◎ Follow-up on Proposed Amendments to IPF and IPF Institution Regulations ◎ Review of Company Investment Performance
28 Juli 2022 *July 28, 2022*	**Lucia Shinta Sari** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Dian Kurniasarie** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Pembahasan Terkait Rencana Pembentukan Forum *Treasury* ◎ *Update Investor Protection Month* ◎ *Update Capacity Building* ◎ Pengembangan E-Klaim ◎ *Update* Pengelolaan CGRP	◎ Discussion on the Formation Plan of the Treasury Forum ◎ Update on Investor Protection Month ◎ Update on Capacity Building ◎ Development of E-Claims ◎ Update on ICR Management

30 Agustus 2022 *August 30, 2022*	**Lucia Shinta Sari** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Dian Kurniasarie** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Pembahasan Simulasi DKKI ◎ Pembahasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal Rutin Tahun 2021	◎ Discussion on DF Simulation ◎ Discussion on Follow-up Actions for Routine Internal Audit Results for 2021
23 September 2022 *September 23, 2022*	**Lucia Shinta Sari** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Dian Kurniasarie** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Pembahasan Revisi RKAT 2022 ◎ Pembahasan Hasil *Coverage Analysis* ◎ Penanganan Risiko Investasi Perusahaan	◎ Discussion on Revised 2022 Budget Plan (RKAT) ◎ Discussion on Coverage Analysis Results ◎ Handling Company Investment Risks
24 Oktober 2022 *October 24, 2022*	**Lucia Shinta Sari** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Dian Kurniasarie** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Rencana Penyampaian Surat kepada OJK terkait *Progress Report* Program Kerja Strategis tahun 2022 ◎ Penyusunan RKAT 2023 ◎ Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2022	◎ Plan to Submit a Letter to the OJK regarding the Progress Report on the Strategic Work Program for 2022 ◎ Preparation of 2023 Budget Plan (RKAT) ◎ Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 2022
29 November 2022 *November 29, 2022*	**Lucia Shinta Sari** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Dian Kurniasarie** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Rencana Penyampaian Surat kepada OJK terkait *Progress Report* Program Kerja Strategis tahun 2022 ◎ Penyampaian Laporan Hasil Survei Kepuasan Anggota DPP ◎ Diskusi dengan CSS terkait penggunaan *sharing cost* tahun 2023	◎ Plan to Submit a Letter to the OJK regarding the Progress Report on the Strategic Work Program for 2022 ◎ Submission of IPF Member Satisfaction Survey Report ◎ Discussion with CSS regarding the use of sharing cost in 2023
29 Desember 2022 *December 29, 2022*	**Lucia Shinta Sari** **Komisaris Utama** *President Commissioner* **Dian Kurniasarie** **Komisaris** *Commissioner* **Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director*	◎ Penyampaian Tindak lanjut Laporan Hasil Survei Kepuasan Anggota DPP ◎ Diskusi dengan CSS BEI terkait KPI Anak Usaha ◎ Pemaparan Hasil Kajian E-Klaim dengan Pemegang Saham	◎ Follow-up on Member Satisfaction Survey Report ◎ Discussion with CSS BEI regarding Subsidiaries' Key Performance Indicators (KPIs) ◎ Presentation of E-Claims Study Results to Shareholders

Rapat Direksi

Meeting of The Board of Directors

Dalam rangka melaksanakan tugasnya secara khusus, Direksi P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan berupa Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 13.

To carry out their specific duties, the Indonesia SIPF's Board of Directors regularly holds meetings in the form of a Board of Directors Meeting based on the Company's Articles of Association outlined in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012, Article 13.

Tanggal Rapat. *Date of Meeting*	**Peserta Rapat.** *Meeting Participant*	**Agenda Rapat.**	*Meeting Agenda*
31 Januari 2022 *January 31, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak Lanjut Kajian Ketahanan DPP *Coverage Analysis.* ◎ Tindak lanjut hasil audit internal terkait pemenuhan dokumen penutupan proyek atau rencana kerja yang telah selesai. ◎ Tindak Lanjut penyusunan Pedoman Investasi yang melibatkan tim *treasury* SRO ◎ Tindak Lanjut *Capacity Building* dengan Anggota DPP, Kantor Perwakilan, dan Galeri Investasi BEI. ◎ Tindak Lanjut Tanggapan RKAT ◎ *Capacity Building* dengan Galeri Investasi ◎ Tindak Lanjut Tanggapan Anggaran Dasar ◎ Tindak Lanjut Perubahan Peraturan DPP dan PDPP ◎ Tindak Lanjut Survei Kepuasan ◎ Tindak Lanjut persetujuan Pedoman BCM ◎ Tindak Lanjut Persiapan Rapat dengan SRO	◎ Follow up on the DPP Coverage Analysis Resistance Study. ◎ Follow up on the results of internal audits regarding the fulfillment of project closing documents or work plans that have been completed. ◎ Follow up the preparation of Investment Guidelines involving the SRO treasury team ◎ Capacity Building Follow-up with DPP Members, Representative Offices, and the IDX Investment Gallery. ◎ Follow up on RKAT Responses ◎ Capacity Building with Investment Gallery ◎ Follow up on Responses to the Articles of Association ◎ Follow-up on Changes to IPF and PDPP Regulations ◎ Follow up Satisfaction Survey ◎ Follow up on BCM Guidelines approval ◎ Follow up on Meeting Preparation with SRO
25 Februari 2022 *February 25, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak Lanjut Persiapan Rakor terkait Masa Jabatan Direksi ◎ Tindak lanjut *briefing* Konsultan Sosmed ◎ Persiapan Rakor dengan SRO ◎ Tindak lanjut Proses Penagihan Iuran Keanggotaan ◎ Tindak lanjut penyusunan Materi Presentasi ke OJK terkait Alternatif Investasi dan Ketahanan DPP ◎ Tindak lanjut Rakor dengan SRO terkait *follow up* CSS ◎ Tindak lanjut Rakor dengan OJK Kajian Alternatif Instrumen Investasi Untuk DPP dan Ketahanan DPP ◎ Tindak lanjut Rapat dengan PIK terkait pembagian tugas Dekom ◎ Pembahasan Pengajuan Cicilan BNC Sekuritas	◎ Follow up on Coordination Meeting preparations regarding the Board of Directors' Term of Office ◎ Follow up the social media consultant briefing ◎ Preparation of Coordination Meeting with SRO ◎ Follow up of Membership Fee Billing Process: ◎ Follow up on preparation of Presentation Material to OJK regarding Investment Alternatives and DPP Resilience ◎ Follow up the Coordination Meeting with the SRO regarding CSS follow-up ◎ Follow up on Coordination Meeting with OJK Review of Alternative Investment Instruments for DPP and DPP Resilience ◎ Follow-up meeting with PIK regarding the division of duties of the Board of Commissioners ◎ Discussion of Submission of BNC Sekuritas Installments

31 Maret 2022 *March 31, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak Lanjut Iuran anggota DPP yang belum membayar ◎ Tindak Lanjut Pertemuan dengan OJK EPK ◎ Tindak lanjut *Sharing Session* terkait Pasar Modal Syariah	◎ Follow up dues for DPP members who have not paid ◎ Follow up meeting with OJK EPK ◎ Follow up Sharing Session related to Sharia Capital Market
28 April 2022 *April 28, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak Lanjut Pertemuan dengan LDT BEI terkait Pembahasan Sistem Portofolio *Credit Scoring* ◎ Tindak lanjut hasil pembahasan terkait rencana dokumentasi Laporan Tahunan ◎ Tindak lanjut Prosedur Keanggotaan DPP ◎ Tindak lanjut rencana pelaksanaan *International Conference* dengan OJK EPK terkait ◎ Tindak lanjut sistem pemantauan kinerja dengan TALENTA	◎ Follow-up Meeting with LDT IDX regarding the Discussion of the Credit Scoring Portfolio System ◎ Follow up on the results of discussions related to the Annual Report documentation plan ◎ Follow up of DPP Membership Procedures ◎ Follow up on the plan for implementing the International Conference with the related OJK EPK ◎ Follow up on performance monitoring system with TALENTA
31 Mei 2022 *May 31, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak Lanjut survei pemasangan logo Indonesia SIPF pada media informasi Anggota DPP ◎ Tindak lanjut finalisasi dan UAT *website* Administrator DKKI ◎ Tindak lanjut rencana kerjasama kegiatan edukasi dengan KP BEI Jawa Barat ◎ Tindak lanjut hasil pembahasan prosedur Keanggotaan ◎ Tindak lanjut penyusunan KPI Dewan Komisaris ◎ Tindak lanjut survei kepuasan dan kepercayaan investor terkait mekanisme perlindungan di Pasar Modal Indonesia ◎ Tindak lanjut hasil pembahasan surat dan kajian penerapan mekanisme syariah	◎ Follow-up survey on the installation of the Indonesian SIPF logo on DPP member information media ◎ Follow up on the finalization and UAT of the DF Administrator website ◎ Follow up on plans for collaborative educational activities with KP BEI West Java ◎ Follow up on results of discussion of Membership procedures ◎ Follow up the preparation of KPI for the Board of Commissioners ◎ Follow up the implementation of investor satisfaction and trust surveys related to protection mechanisms in the Indonesian Capital Market ◎ Follow up on the results of discussion of the letter and review of the application of the sharia mechanism
30 Juni 2022 *June 30, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak lanjut materi FnP Direksi dan Calon Dewan Komisaris ◎ Tindak lanjut hasil penyusunan Materi *Learning Management System* (LMS) dengan OJK ◎ Tindak lanjut pembahasan SOP Pengelolaan Asset dan Pengadaan Barang dan Jasa ◎ Tindak lanjut arahan Direksi terkait *International Conference*	◎ Follow up on FnP materials for the Board of Directors and Candidates for the Board of Commissioners ◎ Follow up on the results of the preparation of the LMS Material with the OJK ◎ Follow up the discussion of SOP for Asset Management and Procurement of Goods and Services ◎ Follow up on the direction of the Board of Directors regarding the International Conference

29 Juli 2022 *July 29, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak lanjut rencana pelaksanaan *courtesy meeting* dengan Anggota Dewan Komisioner OJK yang baru ◎ Tindak lanjut rencana pelaksanaan *International Class* dan *International Conference* ◎ Tindak lanjut hasil pembahasan SOP Pengelolaan Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa ◎ Tindak lanjut rencana pelaksanaan Pisah Sambut Dewan Komisaris lama dan baru ◎ Tindak lanjut masa kepemimpinan manajemen periode 2022-2025 ◎ Tindak lanjut Tanggapan OJK atas Prosedur Administrasi Keanggotaan DPP ◎ Tindak lanjut pemilihan vendor Pengembangan Sistem *Credit Scoring*	◎ Follow up on the plan to conduct a courtesy meeting with the new OJK Board of Commissioners ◎ Follow up the plan for implementing International Class and International Conference ◎ Follow up on the results of SOP discussion on Asset Management and Procurement of Goods and Services ◎ Follow up on the plan to implement the Farewell and Welcome of the old and new Board of Commissioners ◎ Follow up on the management leadership for the 2022-2025 period ◎ Follow-up of OJK's response to DPP Membership Administration Procedures ◎ Follow up the selection of Credit Scoring System Development vendors
31 Agustus 2022 *August 31, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak lanjut rencana pelaksanaan *courtesy meeting* dengan Anggota Dewan Komisioner OJK yang baru. ◎ Tindak lanjut rencana pelaksanaan *International Class* dan *International Conference* ◎ Tindak lanjut hasil Pembahasan Kajian Klaim *Online* (E-Klaim) ◎ Tindak lanjut pembahasan *Workshop* dan PPL Anggota DPP ◎ Tindak lanjut proyek Analisis Pemenuhan Kompetensi Dasar Jabatan ◎ Tindak lanjut finalisasi SOP Pengelolaan Aset dan Pengadaan	◎ Follow up on the plan to conduct a courtesy meeting with the new OJK Board of Commissioners. ◎ Follow up the plan for implementing International Class and International Conference ◎ Follow up on the results of the Online Claim Study Discussion (E-Claim) ◎ Follow-up discussion on IPF Members' Workshop and PPL ◎ Follow up on the Job Basic Competency Fulfillment Analysis project ◎ Follow up on the finalization of SOP for Asset Management and Procurement
30 September 2022 *September 30, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak lanjut Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kerjasama Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi BEI - Indonesia SIPF. ◎ Tindak lanjut hasil rapat dengan TICMI terkait Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan PPL & *Workshop*, TCMC, dan *International Class* ◎ Tindak lanjut hasil Rapat Pengembangan *Dashboard* Pemantauan Anggaran ◎ Tindak lanjut Pemilihan Vendor *Outing* 2022 ◎ Tindak lanjut Penyusunan Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan Distribusi DPP	◎ Follow up on the results of the Coordination Meeting of the BEI - Indonesia SIPF Socialization and Education Activity Cooperation Plan. ◎ Follow up on the results of the meeting with TICMI regarding Cooperation in the Implementation of PPL & Workshop Activities, TCMC, and International Class ◎ Follow up on the results of the Budget Monitoring Dashboard Development Meeting ◎ Follow up on Outing Vendor Selection 2022 ◎ Follow up on the preparation of the Study on the Application of Sharia Principles in the Management and Distribution of DPP

31 Oktober 2022 *October 31, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak lanjut Perubahan (Revisi) RKAT 2022. ◎ Tindak lanjut pembahasan *event* World Investor Week dengan OJK ◎ Tindak lanjut Survei Kepuasan Anggota DPP 2022 ◎ Tindak lanjut identifikasi awal ekspektasi pemangku kepentingan dalam penyusunan Inisiatif Strategis Perusahaan ◎ Tindak lanjut perumusan awal Sasaran Strategis Perusahaan Periode 2023-2025 ◎ Tindak lanjut hasil rapat dengan TICMI terkait Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan PPL & *Workshop* ◎ Tindak lanjut Kajian Klaim *Online* (E-Klaim) ◎ Tindak lanjut informasi kerjasama SRO dan AP 2020-2022 ◎ Tindak lanjut rencana sosialisasi bersama KP BEI Jawa Timur dan KP BEI Sumatera Utara	◎ Follow-up of Changes (Revisions) to the 2022 RKAT. ◎ Follow up the discussion on the World Investor Week event with OJK ◎ Follow up on the 2022 IPF Members Satisfaction Survey ◎ Follow up on the initial identification of stakeholder expectations in the preparation of the Company's Strategic Initiatives ◎ Follow up on the initial formulation of the Company's Strategic Targets for the 2023-2025 period ◎ Follow up on the results of the meeting with TICMI regarding Cooperation in the Implementation of PPL & Workshop Activities ◎ Follow up on Online Claim Review (E-Claim) ◎ Follow up on information on cooperation between SRO and AP 2020-2022 ◎ Follow up on the socialization plan with the IDX East Java KP and North Sumatra IDX KP
30 November 2022 *November 30, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak lanjut penilaian usulan Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2023 ◎ Tindak lanjut Persiapan Pelaksanaan *International Class* 2022 ◎ Tindak lanjut Persiapan Pelaksanaan TCMC 2022 ◎ Tindak lanjut Materi Konsultasi Publik RUU P2SK ◎ Tindak lanjut Laporan Survei Tingkat Keyakinan Indonesia SIPF ◎ Tindak lanjut tanggapan usulan KPI Perusahaan Tahun 2023 dari SRO ◎ Tindak lanjut tanggapan OJK Atas Revisi RKAT 2022	◎ Follow up on the evaluation of the Company's 2023 Working Plan proposal ◎ Follow up on the Preparation for International Class 2022 Implementation ◎ Follow up on the 2022 TCMC Implementation Preparation ◎ Follow up on Public Consultation Materials on Draft of P2SK Law ◎ Follow up on the Indonesia SIPF Assurance Level Survey Report ◎ Follow up on the response to the 2023 Company KPI proposal from the SRO ◎ Follow up on OJK's response to the 2022 RKAT revision
31 Desember 2022 *December 31, 2022*	**Narotama Aryanto** **Direktur Utama** *President Director* **Mariska Aritany Azis** **Direktur** *Director* **Ririh Asih Priyahita** **Zulrasydi Amin**	◎ Tindak lanjut Materi Kerjasama Perusahaan Anak SRO ◎ Tindak lanjut Detail Sasaran dan Inisiatif Strategis serta Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2023 ◎ Tindak lanjut Materi Buku RKAT Tahun 2023 ◎ Pembahasan Usulan Tertulis RUU PPSK ke Kementerian Keuangan ◎ Tindak lanjut Usulan Perubahan Ketentuan terkait DPP dan PDPP ◎ Tindak Lanjut Kesiapan sebagai Calon Administrator DKKI	◎ Follow up on SRO's Subsidiary Collaboration Materials ◎ Follow up on Detailed Targets and Strategic Initiatives and the Company's 2023 Working Plan ◎ Follow up on the 2023 Annual Working Plan and Budgeting Book Material ◎ Discussion of the P2SK Bill Written Proposal to the Ministry of Finance ◎ Follow up on Proposed Amendments to Provisions related to DPP and PDPP ◎ Follow-Up on Preparation as DF Administrator Candidate

Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment of Performance on Board of Commissioners and Directors

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan aspek yang menjadi perhatian khusus Perusahaan. Pada tahun 2022, P3IEI melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan di tahun 2021. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan adalah terkait usaha pencapaian KPI Perusahaan, baik yang berasal dari internal maupun dari OJK. Terkait dengan usaha pencapaian KPI Perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah menetapkan KPI untuk mendukung tugas pengawasan secara efektif dan efisien serta pemberian arahan kepada manajemen baik untuk kegiatan yang bersifat strategis maupun operasional. Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama juga telah mendorong terciptanya progres pencapaian KPI Internal Perusahaan yang optimum di tahun 2022.

Kinerja Dewan Komisaris dinilai berdasarkan KPI Dewan Komisaris tahun 2022, sedangkan kinerja Direksi dinilai berdasarkan KPI Perusahaan tahun 2022.

The performance of the Board of Commissioners and Board of Directors is an aspect that is of particular concern to the Company. In 2022, Indonesia SIPF will follow up on the results of the evaluation that was carried out in 2021. One of the follow-ups carried out is related to efforts to achieve the Company's KPIs, both from internal sources and from the OJK. In relation to efforts to achieve the Company's KPIs and in carrying out supervisory duties, the Board of Commissioners has established KPIs to support effective and efficient supervisory duties and to provide direction to management for both strategic and operational activities. The Board of Commissioners and the Board of Directors together have also encouraged progress to achieve optimum Company Internal KPIs in 2022.

The Board of Commissioners are assessed based on The Board of Commissioners's KPI in 2022, while The Board of Directors are assessed based on Corporate KPI in 2022.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dipublikasikan di dalam laporan keuangan Perusahaan. Pada tahun 2022, Dewan Komisaris menerima gaji sebesar Rp228.000.000 pada tahun 2022 dengan tunjangan senilai Rp245.152.796. Sementara, Direksi menerima gaji sebesar Rp1.227.096.000 dan tunjangan sebesar Rp2.687.130.035.

Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners is published transparently in the Company's financial reports. In 2022, the Board of Commissioners received salary of IDR228,000,000 in 2022 and allowances worth IDR245,152,796. Meanwhile, the Board of Directors received total salary of IDR1,227,096,000 and allowances of IDR2,687,130,035.

Organ Penunjang Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organs

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

The Audit Committee is formed by and answers to The Board of Commissioners per its role in assisting The Board of Commissioners in executing its duties and functions.

To perform its functions, The Audit Committee possesses several duties and responsibilities as follows:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee* untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal Audit serta Manajemen Risiko;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dengan mempertimbangkan cakupan dan kompleksitas Perusahaan, maka saat ini belum mempertimbangkan untuk memiliki Komite Audit. Meskipun demikian, untuk fungsi yang melekat di Komite Audit dalam rangka pengawasan dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh fungsi-fungsi yang ada di dalam Perusahaan seperti pengawasan internal, dan lain-lain.

1. Conducting reviews of financial information which would be published by the Company, namely financial reports, projections, and other reports related to Corporate financial details;
2. Conducting reviews of the Company's compliance with legal products and regulations related to its activities;
3. Offering recommendation to The Board of Commissioners regarding the appointment of Accountant with respect to independence, the scope of the assignment, and fee, to be presented to the General Meeting of Shareholders;
4. Conducting reviews on investigations carried out by the Internal Audit and Compliance and follow-up actions implemented by The Board of Directors on the Internal Audit and Compliance findings;
5. Conducting reviews on the implementation of risk management activities carried out by The Board of Directors;
6. Conducting reviews on complaints related to corporate accounting and financial reporting process and risk management;
7. Conducting review and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding potential conflict(s) of interest; and
8. Maintaining the confidentiality of corporate documents, data, and information.

To execute its duties and responsibilities, The Audit Committee is authorized to:

1. Access corporate documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources needed by the Company;
2. Communicate directly or indirectly with employees and other parties that carry out the functions of Internal Supervision, External Audit, and Risk Management;
3. Involve independent parties outside the Audit Committee members as needed to execute its duties, if needed; and
4. Act upon other authorities as given by The Board of Commissioners.

As the scope and complexity of the Company have not called for an urgency to possess an Audit Committee, presently, there has been no consideration to establish an Audit Committee. Despite such consideration, the function of the Audit Committee as a supervisory organ has been executed by the Board of Commissioners with assistance from other roles within the organization, namely the Internal Audit and Compliance and other related functions.

Organ Penunjang Direksi

Board of Directors Supporting Organs

Berdasarkan Kep-00019/P3IEI/DIR/0321 mengenai Struktur Organisasi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direksi melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab antar Anggota Direksi berdasarkan fungsi-fungsi Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap Direksi serta pengambilan keputusan final terkait strategi dan kegiatan operasional Perusahaan yang mencakup antara lain:

a. Fungsi Sekretaris Perusahaan;
b. Fungsi Perlindungan Pemodal;
c. Fungsi Hukum;
d. Fungsi Perencanaan Strategi Perusahaan;
e. Fungsi Pengelolaan Proyek;
f. Fungsi Pengembangan Bisnis;
g. Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit);
h. Fungsi Manajemen Risiko;
i. Fungsi Tata Kelola Perusahaan; dan
j. Fungsi *Whistleblowing system*.

2. Direktur

Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pengambilan keputusan final terkait operasional Perusahaan yang mencakup antar lain:

a. Fungsi Investasi;
b. Fungsi Keanggotaan;
c. Fungsi Penanganan Klaim;
d. Fungsi Keuangan;
e. Fungsi Akuntansi;
f. Fungsi Sumber Daya Manusia;
g. Fungsi Umum;
h. Fungsi Komunikasi; dan
i. Fungsi Teknologi Informasi.

Based on Kep-00019/P3IEI/DIR/0321 regarding the Organizational Structure of Indonesia SIPF. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors divides the duties and responsibilities among the members of the Board of Directors based on the Company's functions with the following details:

1. President Director

Responsible for coordinating with the Board of Directors as well as making final decisions related to the Company's strategy and operational activities, which include:

a. Corporate Secretary Function;
b. Investor Protection Function;
c. Legal Function;
d. Corporate Strategic Planning Function;
e. Project Management Function;
f. Business Development Function;
g. Internal Audit Function;
h. Risk Management Function;
i. Corporate Governance Function; and
j. Whistleblowing system function.

2. Director

Responsible for coordinating and making final decisions related to the Company's operations which include:

a. Investment Function;
b. Membership Functions;
c. Claim Handling Function;
d. Finance Function;
e. Accounting Function;
f. Human Resources Function;
g. General Functions;
h. Communication Function; and
i. Information Technology Function.

Komite Klaim

Claim Committee

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim merupakan komite *ad hoc* yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite Klaim merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian aset pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perusahaan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan aset pemodal yang diajukan pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
4. Memberikan usulan kepada Direksi Perusahaan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi;
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala; dan
6. Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan aset pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

Sehubungan dengan tanggung jawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan *interview* dengan pemodal maupun pihak–pihak yang terkait klaim pemodal; dan
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

Selama tahun 2022 tidak terdapat kejadian kehilangan aset pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim.

Claim Committee is an organization formed according to Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds. Claim Committee is an ad hoc committee formed and proposed to the Financial Services Authority to gain approval. The Claim Committee is the Directors' decision-making organ in the claim handling management and recovery of investor assets process.

The duties of the Claim Committee are listed as follows:

1. Giving guidelines regarding the investigation and claim verification process of investors to the Verification Team;
2. Conducting reviews on investigation and investor claim verification reports that the Verification Team runs;
3. Giving recommendations to the Directors in regards to whether to accept or reject a claim of loss of assets put forward by the Investor to the Investor Protection Fund and the amount of payment in the case of claim acceptance;
4. Giving recommendations to the Directors regarding the proportion of the maximum amount of claim agreed upon for each Investor and each custodian in the case that the Investor Protection Fund's asset is insufficient;
5. Investigating claim administration process regularly; and
6. The Claim Committee is responsible for disclosing recommendations to the Directors on claims submitted by the Investor(s). Guidance given may be in the forms of claim acceptance or rejection opinion in consideration of the evidence regarding loss of investor asset and the root cause of the loss.

With respect to said responsibility, the Audit Committee is authorized to:

1. Gain access to entire information related to the Investor's claim;
2. Conduct interviews or other parties related to the claim if circumstances require them to do so; and
3. Advise the directors regarding the need for a special investigation conducted by independent parties concerning claim verification or calculation of claim amount to be agreed upon.

Throughout the year 2022, there was no event of loss of investor assets that required compensation using the Investor Protection Fund. Therefore, there was neither appointment of Claim Committee members nor execution of Claim Committee activities

Komite Investasi

Investment Committee

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, Perusahaan membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi.

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perusahaan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perusahaan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi; dan
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, Komite Investasi dapat memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan kebijakan investasi;
2. Alokasi investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

To maintain an optimum implementation of financial investment activities within the Investor Protection Fund, the Company established an investment committee responsible to the Directors. It provided input, suggestions, and responses to the Directors regarding matters relating to investment and divestment guidelines.

The investment committee has the following duties:

1. Providing opinions on the objectives and investment policies of the Company;
2. Providing opinions on investment allocation per the objectives and investment policies in force in the Company;
3. Analyze investment proposals on certain investment products by taking into account financial, legal, risk, macroeconomic, and other related aspects;
4. Provide recommendations for consideration to the Board of Directors in the context of deciding the implementation of investment or divestment; and
5. Evaluate investment performance and submit it to the Directors at least every semester.

In connection with the tasks mentioned earlier, the Investment Committees can provide opinions or considerations related to, but not limited to, the following:

1. Investment objectives and policies;
2. Investment allocation; and
3. Investment plans or divestments in certain investment products.

Sekretaris Perusahaan

Company Secretary

Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Sekretaris Perusahaan, Fungsi Perlindungan Pemodal, Fungsi Hukum, dan Fungsi Layanan Pemodal dan *Stakeholders* dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan

a. Membina hubungan relasi antara Perusahaan dengan *stakeholders* yang meliputi antara lain pemegang saham, masyarakat, media, OJK, dan lembaga pemerintah lainnya;
b. Menyelenggarakan RUPS, Rapat Direksi, serta Rapat Dewan Komisaris;
c. Pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan kepada pemangku kepentingan dan didokumentasikan secara lengkap dan teratur;
d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan RUPS;
e. Menyediakan Pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan yang di-*review* secara periodik;
f. Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep *Corporate Branding*;
g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyampaian berita dan informasi Perusahaan dalam rangka mendapatkan dukungan pihak eksternal terhadap kegiatan Perusahaan;
h. Menyiapkan dan menyebarkan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kinerja Perusahaan kepada pemangku kepentingan; dan
i. Menyiapkan dan menyebarkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara periodik kepada *stakeholders* terkait.

2. Fungsi Perlindungan Pemodal

a. Membentuk Tim Pelaksana Hak Subrogasi;
b. Menyusun rencana pelaksanaan Hak Subrogasi dan Kuasa Ganti Rugi Pemodal;
c. Menggantikan kedudukan pemodal yang mendapatkan ganti rugi atas hilangnya aset pemodal dari DPP terhadap Kustodian karena subrogasi;
d. Melakukan proses litigasi, apabila Anggota DPP tidak mengembalikan DPP;
e. Membuat laporan pelaksanaan Hak Subrogasi; dan
f. Mengajukan usulan untuk mempailitkan Anggota DPP kepada OJK (apabila diperlukan).

3. Fungsi Hukum

a. Membantu membuat perjanjian kerja sama atau kesepakatan dengan pihak eksternal;
b. Membantu menangani apabila terjadi permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana yang menyangkut Perusahaan maupun DPP;
c. Membantu menangani apabila terjadi permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan terhadap pihak eksternal;
d. Membantu melakukan pengkinian panduan operasional Perusahaan akibat dinamika undang-undang dan peraturan yang terkait dengan operasional Perusahaan dan menginformasikannya kepada pihak internal Perusahaan yang terkait; dan
e. Melakukan pembaharuan kelengkapan legalisasi (dokumen hukum) Perusahaan secara berkala.

4. Fungsi Layanan Pemodal dan *Stakeholders* Lainnya

a. Menyediakan sarana layanan pemodal dan pemangku kepentingan lainnya terkait pengaduan dan *inquiry* data ataupun informasi yang dikelola oleh Perusahaan serta melakukan *review* secara periodik; dan
b. Menyiapkan dan menyampaikan materi edukasi serta sosialisasi kepada pemodal dan *stakeholders* lainnya serta melakukan *review* secara periodik.

Task Unit of Corporate Secretary, Capital, and Legal Protection

Responsible for carrying out the Corporate Secretary Function, Investor Protection Function, Legal Function, and Investor and Stakeholder Service Function with detailed duties and responsibilities as follows:

1. Corporate Secretary Function

a. Foster relationships between the Company and stakeholders, including shareholders, the public, the media, FSA, and other government institutions;
b. Hold GMS, Board of Directors Meeting, and Board of Commissioners Meeting;
c. The fulfillment of the Company's reporting obligations to stakeholders is thoroughly and regularly documented;
d. Administer and keep Company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register and Summary of Meetings of the Board of Directors, Meetings of the Board of Commissioners, and GMS;
e. Provide Guidelines for Management of Correspondence and Archives, which are reviewed periodically;
f. Develop and implement the concept of Corporate Branding;
g. Supervise and control the delivery of the Company's news and information to gain support from external parties for the Company's activities;
h. Prepare and disseminate accurate, complete, and up-to-date information regarding the Company's performance to stakeholders; and
i. Prepare and distribute the Company's Annual Report and Financial Statements periodically to relevant stakeholders.

2. Investor Protection Function

a. Establish a Subrogation Rights Implementing Team;
b. Prepare a plan to implement Subrogation Rights and Authorization for Compensation for Investors;
c. Replace the Investor's position who receives compensation for the loss of Investor Assets from the IPF to the Custodian due to subrogation;
d. Carry out the litigation process if the IPF Member does not return the IPF;
e. Make a report on the implementation of the Right of Subrogation; and
f. Submit a proposal for bankruptcy of IPF Members to FSA (if needed).

3. Legal Function

a. Assist in making cooperation agreements or agreements with external parties;
b. Assist in dealing with legal issues involving the Company and IPF, civil and criminal matters;
c. Assist in dealing with legal issues, both civil and criminal matters involving the Board of Commissioners, Directors, and employees of the Company against external parties;
d. Assist in updating the Company's operational guidelines due to the dynamics of laws and regulations related to the Company's operations and informing the relevant internal parties of the Company; and
e. Periodically updating the completeness of legalization of the Company.

4. Service Functions for Investors and Other Stakeholders

a. Providing service assistance for investors and other stakeholders related to complaints and inquiries of data or information managed by the Company and conducting periodic reviews; and
b. Prepare and deliver educational and socialization materials to investors and other stakeholders and conduct periodic reviews.

Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis

Strategy Management and Business Development

Satuan Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi *Strategic Management Officer*, Fungsi *Portfolio Management Officer*, Fungsi Pengembangan Bisnis, dan Fungsi *Business Continuity Management* dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi *Strategic Management Officer*

a. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perusahaan dan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, dan me-*review* secara periodik;
b. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja *(Key Performance Indicator)* Perusahaan, dan memonitor capaian kinerja Perusahaan; dan
c. Mengoordinasikan dan me*monitor* Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan.

Task Unit of Business Development and Strategy Management

Responsible for carrying out the Strategic Management Officer Function, Portfolio Management Officer Function, Business Development Function, and Business Continuity Management Function with detailed duties and responsibilities as follows:

1. The function of the Strategic Management Officer

a. Coordinate the preparation of the Company's Strategic Plan and the Company's Annual Work Plan, and review them periodically;
b. Coordinate the preparation of the Company's Key Performance Indicators, and monitor the Company's performance achievements; and
c. Coordinate and monitor the implementation of the Company's Strategic Plan and Annual Work Plan.

2. Fungsi *Project Management Officer*

a. Menyusun pedoman dan prosedur serta *project management tools* dalam pengelolaan proyek;
b. Melakukan verifikasi dan validasi *Project Charter* (PC) dan *Project Management Plan* (PMP) untuk dapat dimulainya sebuah proyek;
c. Melakukan analisis risiko portofolio semua proyek yang diusulkan dan yang sedang berjalan;
d. Mengevaluasi pelaksanaan portofolio proyek secara berkala, memberikan rekomendasi yang diperlukan, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada Direksi;
e. Memastikan proses *change management* dan pra-operasional dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
f. Mengkoordinasikan penilaian kinerja dari setiap proyek yang berjalan.

3. Fungsi Pengembangan Bisnis

a. Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Perusahaan, dalam rangka menyusun strategi pengembangan bisnis bersama *stakeholders* terkait;
b. Mengembangkan konsep inisiatif pengembangan bisnis yang bersifat strategis dan *corporate wide* secara komprehensif; dan
c. Mengkoordinasikan proses pengembangan bisnis, serta melakukan evaluasi hasil pengembangan sesuai dengan rencana dan tujuan Perusahaan.

4. Fungsi Business Continuity Management

a. Menyusun Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) dan me*review* secara periodik;
b. Mengkoordinasikan penerapan dan pengoperasian konsep dan mekanisme BCM;
c. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pengujian mekanisme BCM Perusahaan agar setiap pihak di Perusahaan memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penerapan BCM; dan
d. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan atas hasil evaluasi mekanisme BCM.

2. The function of the Project Management Officer

a. Develop guidelines and procedures as well as project management tools in project management;
b. Verify and validate the Project Charter (PC) and Project Management Plan (PMP) to enable a project to start;
c. Perform portfolio risk analysis of all proposed and ongoing projects;
d. Evaluating the implementation of the project portfolio regularly, providing the necessary recommendations, and periodically reporting to the Board of Directors;
e. Ensure that the change management and pre-operational processes are carried out per applicable procedures; and
f. Coordinate the performance appraisal of each ongoing project.

3. Business Development Function

a. Analyze the Company's internal and external environmental conditions to formulate a business development strategy with relevant stakeholders;
b. Develop a comprehensive strategic and corporate-wide business development initiative concept; and
c. Coordinate the business development process and evaluate the development results by the plans and objectives of the Company.

4). Business Continuity Management Function

a. Prepare Business Continuity Management (BCM) Guidelines and implement periodical review;
b. Coordinate the implementation and operation of BCM concepts and mechanisms;
c. Conducting socialization activities and testing the Company's BCM mechanism so that every party in the Company understands their roles and responsibilities in implementing BCM; and
d. Evaluate and provide the necessary recommendations on the results of the evaluation of the BCM mechanism.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan (PIK).

Satuan PIK bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit), Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi *Good Corporate Governance Officer*, Fungsi *Whistleblowing System Officer* dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit)

a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan internal secara rutin (periodik) sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan khusus, dengan mengacu kepada peta risiko Perusahaan, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, prosedur operasi standar, dan kode etik Perusahaan;
b. Melaporkan hasil kegiatan audit kepada *stakeholders* terkait dengan format dan periode masing-masing;
c. Me*monitor* pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal secara periodik untuk dilaporkan kepada *stakeholders* terkait; dan
d. Melakukan pendampingan kepada auditor eksternal untuk memastikan:
   - Kelancaran pelaksanaan audit sesuai dengan rencana,
   - Pemenuhan data dan informasi yang diperlukan,
   - Pengendalian keamanan data dan informasi yang diberikan kepada auditor eksternal, dan
   - Sebagai penghubung kepada *auditee*

2. Fungsi Manajemen Risiko

a. Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan, mensosialisasikan, dan me-*review* secara periodik;
b. Mengoordinasikan dan memberikan pendampingan kepada pihak terkait di Perusahaan dalam rangka implementasi Manajemen Risiko;
c. Mengoordinasikan penyusunan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan profil risiko Perusahaan; dan
d. Mengevaluasi dan melaporkan hasil penerapan manajemen risiko Perusahaan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.

Internal control system is carried out by Internal and Compliance Supervisory Task Unit

Responsible for carrying out the Internal Audit Function, Risk Management Function, Good Corporate Governance Officer Function, and Whistleblowing System Officer Function with detailed duties and responsibilities as follows:

1. Internal Audit Function

a. Carry out periodic internal inspection activities per the annual inspection plan and special inspections regarding the Company's risk map, compliance with laws and regulations, standard operating procedures, and the Company's code of ethics;
b. Report the results of audit activities to stakeholders related to their respective formats and periods;
c. Monitor the implementation of the follow-up recommendations on the internal audit results to the relevant stakeholders periodically; and
d. Assist external auditors in ensuring:
   - Smooth audit implementation by the plan,
   - Fulfillment of required data and information,
   - Data and information security controls are provided to external auditors, and
   - As a liaison to the auditee

2. Risk Management Function

a. Prepare Guidelines for the Implementation of Company Risk Management, disseminate them, and periodically review it;
b. Coordinate and assist related parties in the Company in implementing Risk Management;
c. Coordinate the preparation of the Company's risk appetite, risk tolerance, and risk profile; and
d. Evaluate and report the results of implementing the Company's risk management to related parties periodically.



3. Fungsi *Good Corporate Governance Officer*

a. Menyusun pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perusahaan, mensosialisasikan, dan me-*review* secara periodik;
b. Memberikan pendampingan kepada pihak terkait di Perusahaan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*; dan
c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perusahaan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.

4. Fungsi *Whistleblowing System Officer*

a. Menerima laporan pengaduan pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP;
b. Melakukan verifikasi terkait indikasi pelanggaran, melakukan investigasi bersama tim investigasi, dan melaporkan hasilnya kepada Direksi atau Dewan Komisaris; dan
c. Menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan kepada pihak terkait, termasuk kepada otoritas dan pelapor.

3. The function of a Good Corporate Governance Officer

a. Develop guidelines for implementing Good Corporate Governance of the Company, disseminate them, and periodically review them;
b. Assist related parties in the Company in the implementation of Good Corporate Governance; and
c. Evaluate and report the Company's Good Corporate Governance implementation to related parties periodically.

4. Whistleblowing System Officer Function

a. Receive reports of complaints from investors and the public related to the implementation of IPF Institution responsibilities;
b. Verify indications of violations, conduct investigations with the investigation team, and report the results to the Board of Directors or the Board of Commissioners; and
c. Submit reports on the results of complaint handling to related parties, including authorities and reporters.

Manajemen Risiko

Risk Management

P3IEI berkomitmen dalam menerapkan manajemen risiko dalam praktik bisnis Perusahaan. Tercatat dalam Piagam Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan di dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Komitmen ini selanjutnya diteruskan oleh Manajemen dengan menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang telah disusun pada tahun 2018, dalam rangka meyakinkan pemangku kepentingan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan dan mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang dihadapi Perusahaan.

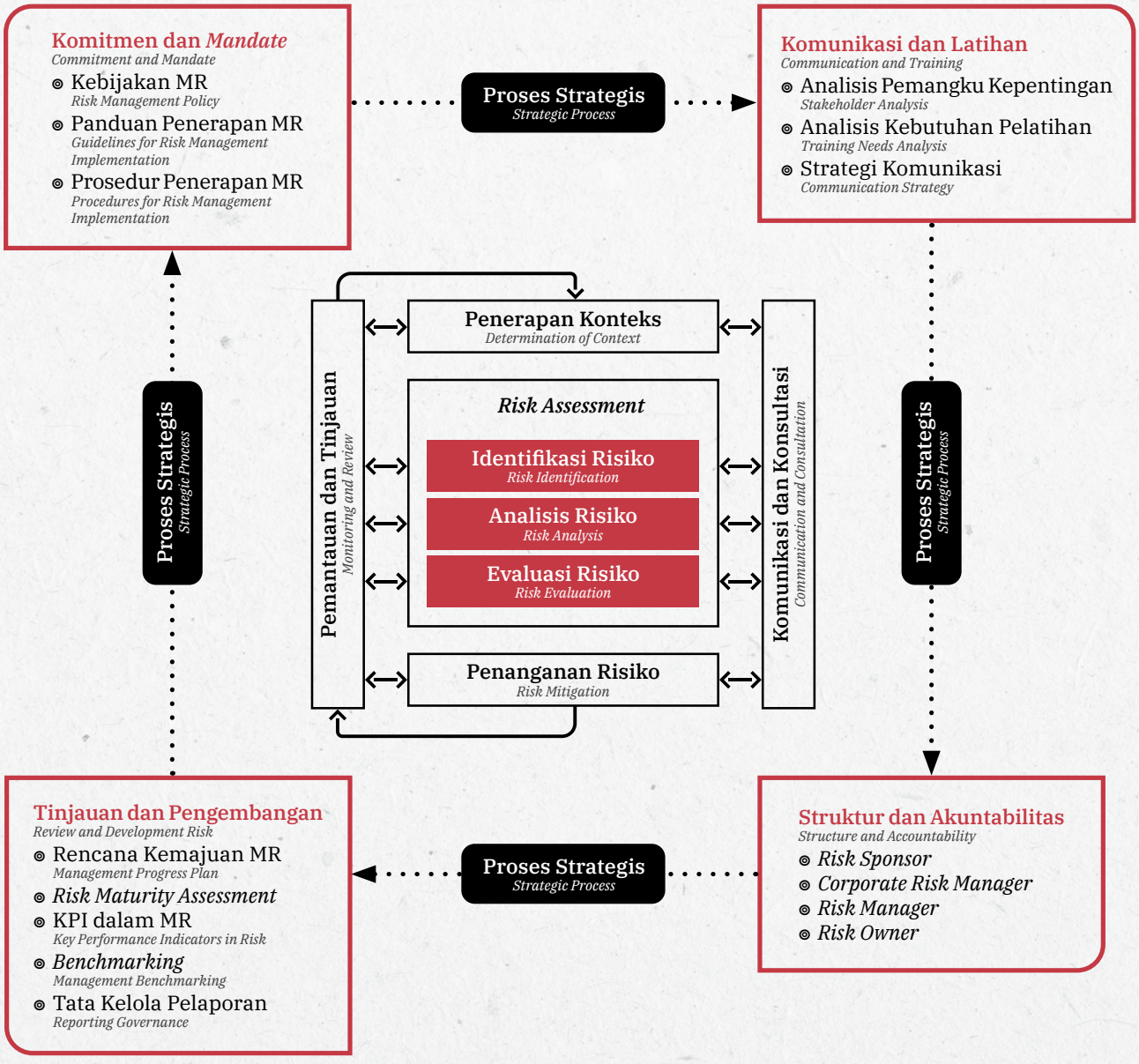
P3IEI menetapkan Pedoman Manajemen Risiko sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari kebijakan Perusahaan guna memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pedoman Manajemen Risiko digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penerapan dan pengelolaan risiko, yang didasarkan pada kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO 31000:2009 *Risk Management Principles and Guidelines* sebagai berikut:

Indonesia SIPF stated its commitment to implementing Corporate Risk Management by establishing the Risk Management Charter, united in the Corporate Governance Implementation Guidelines. Furthermore, the Management continued this commitment by selecting the Company Risk Management Guidelines in 2018 as support that provides reasonable assurance for the achievement of the Company's objectives and decreases the negative impact of uncertainty related to the Company.

Indonesia SIPF established its Risk Management Guidelines as an inseparable component of the Company's policies to meet the principles of good corporate governance. The Guidelines are used as a basis and reference in the application of risk management, which is guided by the risk management framework according to ISO 31000:2009 Risk Management Principles and Guidelines, as follows:

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Framework



1. Penetapan Konteks
Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai landasan dan batasan dalam implementasi manajemen risiko.

2. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko bertujuan untuk menjabarkan semua risiko kunci yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan Perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan suatu teknik yang sistematis dalam pendataan seluruh risiko kunci di tingkat Perusahaan berdasarkan konteksnya.

3. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap level risiko dan guna menyusun peta risiko. Bertujuan untuk membuat prioritas risiko dan mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya upaya pengendalian dan mitigasi terhadap risiko tersebut. Pengukuran risiko melibatkan dua faktor, yaitu kemungkinan (peluang kejadian) dan konsekuensi (dampak).

4. Evaluasi Risiko
Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko kunci. Langkah evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi risiko terhadap Perusahaan.

5. Penanganan Risiko
Penanganan Risiko bertujuan untuk menurunkan level risiko hingga pada area penerimaan risiko sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Mitigasi mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerugian terjadi.

6. Pemantauan dan Peninjauan
Pemantauan dan Peninjauan bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan.

7. Komunikasi dan Konsultasi
Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk menyebar informasi yang relevan terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

1. Determination of Context
Determination of the context aims to identify and establish the terms of reference and basic parameters as the foundation and limits in applying Risk Management.

2. Risk Identification
Risk identification aims to list all key risks that can hinder, delay or frustrate the achievement of the Company's goals or objectives. Tag is made using a systematic technique to record all critical risks at the Company level based on the context.

3. Risk Measurement
The purpose of risk measurement is to understand the level of risk and develop a risk map. The main objective is to prioritize risks and decide whether these risks need to be controlled and mitigated. Risk measurement involves two factors: possibilities and consequences (impacts).

4. Risk Evaluation
Risk evaluation aims to determine essential risk priorities. Risk evaluation is carried out by considering the significance of risks to the Company.

5. Risk Mitigation
Mitigation aims to reduce the level of risk to the risk acceptance area according to the predetermined risk appetite and tolerance. Mitigation refers to actions we take to prevent losses from occurring.

6. Monitoring and Review
Monitoring and review aim to ensure that all stages of the risk management process are carried out effectively according to the prescribed frameworks and parameters.

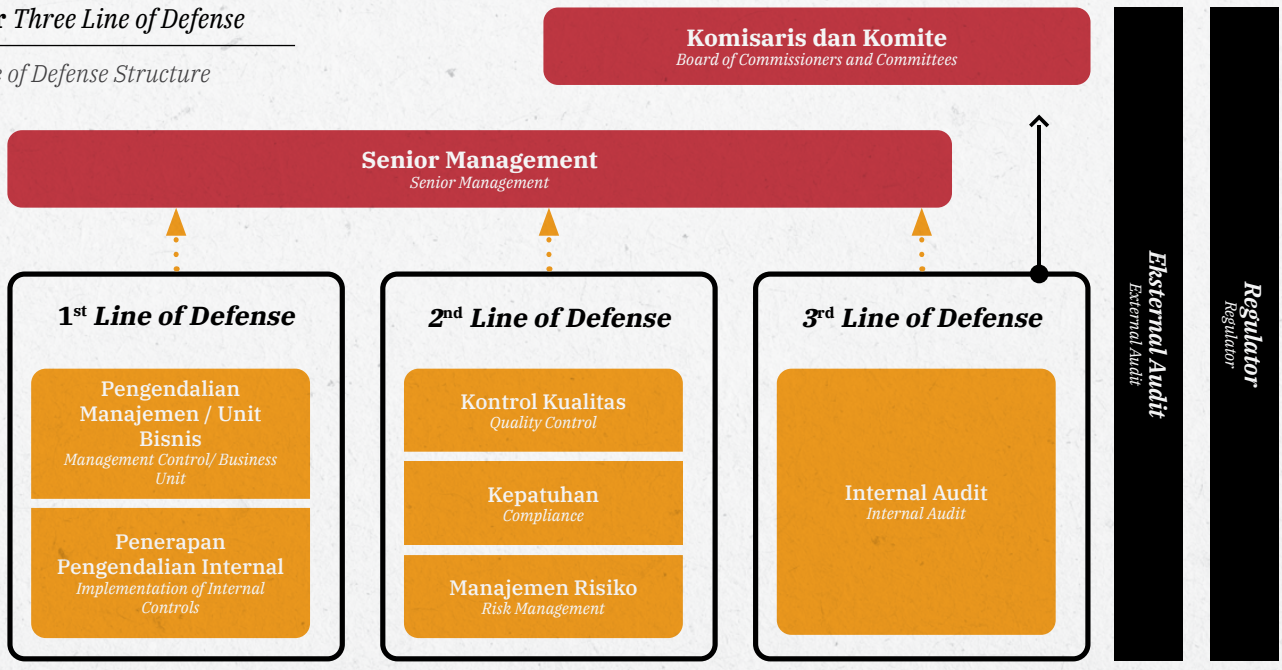
7. Communication and Consultation
Communication and consultation aim to circulate relevant information related to the implementation of Risk Management so that the related parties can carry out their respective duties and responsibilities properly.

Dalam rangka membangun kapasitas manajemen risiko di seluruh jajaran proses bisnis, Perusahaan akan mengembangkan pendekatan Tiga Garis Pertahanan, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh fungsi bisnis, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengawasan risiko.

To build risk management capacity throughout the business process range, the Company will develop the Three Lines of Defense approach, where risk management practice is carried out by business functions, risk management functions, and risk monitoring functions.

Struktur *Three Line of Defense*

Three Line of Defense Structure



1. Garis Pertahanan Pertama
Pertahanan lapis pertama dilakukan oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari Perusahaan, terutama yang merupakan lini depan organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan:
- Memastikan adanya lingkungan pengendalian yang kondusif di unit bisnis mereka.
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya serta dengan penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan dan tindakan yang diambil.
- Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnisnya, serta pemantauan dan transparansi atas efektivitas pengendalian internal tersebut.

2. Garis Pertahanan Kedua
Pertahanan lapis kedua dilakukan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi yang telah terstruktur seperti Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan:
- Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan.
- Mengawasi bagaimana fungsi bisnis dijalankan sesuai kebijakan manajemen risiko dan prosedur standar operasional yang ditetapkan Perusahaan.
- Memantau dan melaporkan risiko Perusahaan secara keseluruhan kepada organ-organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perusahaan.

3. Garis Pertahanan Ketiga
Pertahanan lapis ketiga dilakukan oleh auditor, baik internal maupun eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model ini karena mereka dianggap sebagai bagian internal Perusahaan yang independen dari fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan:
- Meninjau dan mengevaluasi keseluruhan desain dan implementasi manajemen risiko.
- Pastikan pertahanan tingkat pertama dan kedua beroperasi seperti yang diharapkan.

1. 1st Line of Defense
The first tier of defense is carried out by units or components, or business functions that carry out daily operational activities of the Company, especially those that are the front line of the organization. In this case, they are expected to:
- Ensure that there is a conducive control environment in their business units.
- Implement risk management policies that have been determined when carrying out their roles and responsibilities and in full awareness of considering risk factors in the decisions and actions they take.
- Be able to demonstrate the existence of adequate internal controls in their business units and monitor and transparent the effectiveness of these internal controls.

2. 2nd Line of Defense
The second tier of defense is carried out by risk management and compliance functions, mainly the readily structured functions such as the department or unit of risk management and compliance. In this case, they are expected to:
- Be responsible for developing and monitoring the overall implementation of company risk management.
- Supervise how business functions are carried out within the corridors of the Company's risk management policies and standard operational procedures.
- Monitor and report on company risks as a whole to the organs that have the highest accountability in the Company.

3. 3rd Line of Defense
Auditors, both internal and external, carry out the third tier of defense. The role of internal auditors is far more intense in this model because they are considered an inner part of the Company that is independent of other functions. In this case, internal auditors are expected to:
- Review and evaluate the overall design and implementation of risk management.
- Ensure that the first tier and second tier of defenses operate as expected.

Divisi Perusahaan

Company Divisions

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mendelegasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Divisi, Satuan, dan Unit dengan deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

1. Divisi Operasional

Bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan dan koordinasi fungsi-fungsi yang meliputi:
a. Fungsi Investasi;
b. Fungsi Keanggotaan; dan
c. Fungsi Penanganan Klaim.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Divisi Operasional dibantu oleh unit-unit berikut:

a. Unit Investasi
Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Investasi dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
i. Menyusun Anggaran Pendapatan Perusahaan dari hasil investasi.
ii. Menyusun rencana jangka panjang dan tahunan atas investasi DPP dan PDPP pada instrumen keuangan dalam rangka optimalisasi hasil investasi.
iii. Melaksanakan penempatan DPP dan dana PDPP pada instrumen keuangan sesuai dengan Pedoman Investasi dan Rekomendasi Komite Investasi.
iv. Melakukan *monitoring* portofolio investasi secara periodik.
v. Menyusun laporan kinerja dan rekomendasi investasi dan divestasi Perusahaan kepada Manajemen dan Komite Investasi.
vi. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Komite Investasi serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

b. Unit Keanggotaan dan Klaim
Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Administrasi Keanggotaan dan Fungsi Penanganan Klaim dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Fungsi Administrasi Keanggotaan
i. Melaksanakan proses penerimaan dan pencabutan status keanggotaan DPP sesuai dengan peraturan dan ketentuan.
ii. Mengadministrasikan dan me*monitor* pemenuhan Iuran Keanggotaan DPP.
iii. Melakukan *monitoring* pada Anggota DPP atas risiko pembayaran ganti rugi pemodal dan menyusun *Coverage Analysis* kemampuan DPP.
iv. Menyelenggarakan sosialisasi kepada Anggota DPP mengenai:
- Peran dan Fungsi DPP;

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors delegates the implementation of duties and responsibilities to Divisions, Task Units, and Units with a description of their respective duties and responsibilities as follows:

1. Operational Division

Responsible for implementing and coordinating functions which include:
a. Investment Function;
b. Membership Function; and
c. Claim Handling Function.

In carrying out its responsibilities, the Operational Division is assisted by the following units:

a. Investment Unit
Responsible for carrying out the Investment Function with detailed duties and responsibilities as follows:
i. Prepare the Company's Revenue Budget from investment returns.
ii. Prepare long-term and annual plans for IPF and IPF Institution's investments in financial instruments to optimize investment returns.
iii. Implement the placement of IPF and IPF Institution's investments on financial instruments under the Investment Guidelines and Investment Committee Recommendations.
iv. Monitoring the investment portfolio periodically.
v. Prepare performance reports and recommendations on the Company's investment and divestment to Management and the Investment Committee.
vi. Carry out the function as Secretary of the Investment Committee and coordinate with related parties.

b. Membership and Claim Unit
Responsible for carrying out the Membership Administration Function and Claim Handling Function with details of the duties and responsibilities as follows:
1. Membership Administration Function
i. Carry out the acceptance and revocation of IPF membership status following the rules and regulations.
ii. Administering and monitoring the fulfilment of IPF Membership Contributions.
iii. Monitoring IPF Members on the risk of paying compensation to Investors and compiling Coverage Analysis on IPF capabilities.
iv. Organizing socialization to IPF Members regarding:
- Roles and Functions of IPF;

- Peran dan Fungsi PDPP; dan
- Informasi lain terkait dengan DPP dan PDPP.

2. Fungsi Penanganan Klaim

i. Mengoordinasikan langkah-langkah inisiasi penanganan klaim setelah menerima pernyataan tertulis OJK, antara lain:
- Melakukan penyebaran informasi penyampaian klaim kepada publik;
- Pembentukan Tim Verifikasi yang dapat terdiri dari pihak internal atau pihak eksternal untuk membantu proses pengawasan dan verifikasi klaim; dan
- Pembentukan Komite Klaim.

ii. Mengoordinasikan proses penerimaan permohonan klaim dari para pemodal dan verifikasi kelengkapan klaim dari Pemodal.

iii. Mengoordinasikan proses verifikasi klaim bersama Tim Verifikasi dan pelaporan hasil verifikasi klaim kepada Komite Klaim.

iv. Mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Komite Klaim.

v. Mengadministrasikan keputusan klaim, menyampaikan informasi keputusan klaim kepada Pemodal, dan memonitor proses pembayaran klaim kepada Pemodal.

vi. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanganan Klaim kepada OJK.

vii. Melakukan simulasi penanganan klaim secara periodik.

2. Divisi Penunjang

Bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan dan koordinasi fungsi-fungsi yang meliputi:

a. Fungsi Akuntansi;
b. Fungsi Keuangan;
c. Fungsi Sumber Daya Manusia;
d. Fungsi Umum;
e. Fungsi Komunikasi; dan
f. Fungsi Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Divisi Penunjang dibantu oleh unit-unit sebagai berikut:

a. Unit Akuntansi dan Keuangan

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Akuntansi dan Fungsi Keuangan dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi

i. Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi keuangan Perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk ketentuan pencatatan atas hal-hal sebagai berikut:
- Pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direktur dan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
- Pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
- Pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direktur dan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

ii. Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan sehubungan dengan DPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan Perusahaan.

iii. Melakukan perhitungan dan pelaporan atas kewajiban perpajakan yang timbul dari setiap transaksi keuangan Perusahaan (di luar PPh 21 atas Personalia Perusahaan).

iv. Menyiapkan Laporan Keuangan Perusahaan dan DPP secara periodik kepada *stakeholders* terkait, sesuai dengan jenis dan periode laporan.

v. Melaksanakan dan menyimpan pencatatan dan pembukuan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Keuangan

i. Mengelola arus kas dengan optimal dan aman untuk mendukung operasional Perusahaan yang berkesinambungan.

ii. Mengadministrasikan pemenuhan kewajiban pembayaran dan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna meminimalkan risiko keuangan di kemudian hari.

iii. Melaksanakan proses penagihan sesuai kesepakatan, guna mendukung arus kas yang optimal.

iv. Menyiapkan anggaran tahunan Perusahaan guna memenuhi kebutuhan manajemen dan ketentuan pelaporan OJK.

v. Secara periodik melakukan evaluasi dan menyiapkan usulan revisi jika diperlukan atas anggaran tahunan Perusahaan.

vi. Memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana, dan memastikan perlakukan atas kondisi *overbudget* serta *unbudgeted* sudah sesuai dengan kebijakan.

vii. Menyiapkan laporan realisasi anggaran Perusahaan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis dan periode laporan.

b. Unit Sumber Daya Manusia dan Umum

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Sumber Daya Manusia dan Fungsi Umum dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Sumber Daya Manusia

i. Memastikan ketersediaan karyawan untuk melaksanakan fungsi-fungsi di Perusahaan melalui proses rekrutmen dan rotasi.

ii. Menyediakan kompetensi karyawan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis Perusahaan dengan optimal melalui program pelatihan internal maupun eksternal yang diperlukan.

iii. Menyediakan mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif, guna meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan.

iv. Merencanakan jenjang karier pegawai dan rencana suksesi guna

- Roles and Functions of IPF Institution; and
- Other information related to IPF and IPF Institution

2. Claim Handling Function

i. Coordinate the initiation steps for handling claims after receiving a written statement from FSA (OJK), including:
- Disseminate information on the submission of claims to the public;
- Establishment of a Verification Team, which may consist of internal or external parties to assist in the process of monitoring and verifying claims; and
- Establishment of a Claim Committee.

ii. Coordinate the process of receiving claim requests from Investors and verifying the completeness of claims from Investors.

iii. Coordinate the claim verification process with the Verification Team and report the results of claim verification to the Claim Committee.

iv. Coordinate the implementation of the Claim Committee Meeting.

v. Administer claim decisions, submit claim decision information to Investors, and monitor the claim payment process to Investors.

vi. Prepare a Report on the Implementation of Claim Handling to FSA.

vii. Perform periodic claim handling simulations.

2. Supporting Division

Responsible for implementing and coordinating functions which include:

a. Accounting Function;
b. Finance Function;
c. Human Resources Function;
d. General Function;
e. Communication Function; and
f. Information Technology Function

In carrying out its responsibilities, the Supporting Division is assisted by the following units:

a. Accounting and Finance Unit

Responsible for carrying out the Accounting and Finance Functions with the following details of duties and responsibilities:

1. Accounting Function

i. Make and maintain records of all financial transactions of the Company following generally accepted accounting principles, including the provisions for recording the following matters:
- Expenses related to Parties affiliated with the Directors and Commissioners of the Indonesia SIPF;
- Costs on Parties affiliated with Indonesia SIPF; and
- Expenses include salaries, other benefits, and facilities provided to the Director and Commissioner of Indonesia SIPF.

ii. Make and maintain records of all transactions and activities related to IPF under generally accepted accounting principles and separate from the recording and bookkeeping of the Company.

iii. Perform calculations and reports on tax obligations arising from each Company's financial transactions (excluding Income Tax 21 on Company Personnel).

iv. Prepare periodical reports regarding the Company's Financial and IPF's activities to relevant stakeholders, according to the type and period of the report.

v. Carry out and keep records and bookkeeping properly per the provisions of the applicable legislation.

2. Finance Function

i. Manage cash flow optimally and safely to support the Company's sustainable operations.

ii. Administer the fulfilment of payment and tax obligations under applicable regulations to minimize financial risk in the future.

iii. Carry out the billing process according to the agreement to support optimal cash flow.

iv. Prepare the Company's annual budget to meet management needs and OJK reporting requirements.

v. Periodically evaluate and prepare proposed revisions to the Company's annual budget.

vi. Ensure the use of the budget according to the plan, and ensure the treatment of overbudget and unbudgeted conditions is under the policy.

vii. Prepare reports on the realization of the Company's budget to related parties according to the type and period of the report.

b. Human Resources and General Unit

Responsible for carrying out the Human Resources Function and General Function with details of duties and responsibilities as follows:

1. Human Resources Function

i. Ensure the availability of employees to carry out functions through recruitment and rotation processes.

ii. Provide the necessary employee competencies to support the optimal implementation of the Company's business processes through essential internal and external training programs.

iii. Provide a mechanism for implementing an effective performance appraisal to increase employee motivation and job satisfaction.

iv. Planning employee career paths and succession plans to support the sustainability of the Company's business processes.

v. Carry out payment of salaries and allowances under the applicable compensation system.

vi. Manage industrial relations by referring to Company policies and the Manpower Act.

2. General Function

mendukung keberlangsungan proses bisnis Perusahaan.
v. Melaksanakan pembayaran upah dan tunjangan sesuai dengan sistem kompensasi yang berlaku.
vi. Mengelola hubungan industrial dengan mengacu kepada kebijakan Perusahaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Fungsi Umum
i. Memastikan penyediaan fasilitas termasuk sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka mendukung operasional Perusahaan.
ii. Mengadministrasikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
iii. Melakukan koordinasi terkait pengelolaan dan inventarisasi aset Perusahaan.
iv. Memberikan dukungan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
v. Memberikan dukungan terkait kebutuhan transportasi, *driver*, parkir dan perjalanan dinas personel Perusahaan.
vi. Menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor.

c. Unit Komunikasi dan Informasi

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Komunikasi dan Fungsi Teknologi Informasi dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Komunikasi
i. Mengelola kanal-kanal penyebaran informasi yang diperlukan Perusahaan.
ii. Menyelenggarakan *event-event* yang diperlukan untuk penyebaran informasi Perusahaan, dan pengelolaan informasi eksternal terkait Perusahaan agar terjadi pembentukan citra Perusahaan yang baik serta dukungan eksternal atas kegiatan Perusahaan.
iii. Menyediakan dan mengelola *marketing kit* Perusahaan sesuai dengan kebutuhan internal maupun eksternal.

2. Fungsi Teknologi Informasi
i. Menyediakan infrastruktur berbasis teknologi informasi agar operasional Perusahaan menjadi optimal mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Perusahaan.
ii. Menyediakan arsitektur teknologi informasi untuk memastikan pengembangan proses bisnis berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara terintegrasi.
iii. Mendukung pengembangan maupun penyempurnaan proses bisnis Perusahaan yang berbasis teknologi informasi.
iv. Secara berkesinambungan, membangun perlindungan atas informasi dan infrastruktur berbasis teknologi terhadap perlakuan tidak bertanggungjawab baik dari pihak internal maupun eksternal.

i. Ensure the provision of facilities, including office facilities and infrastructure, to support the Company's operations.
ii. Administering the procurement process of goods and services per applicable regulations.
iii. Coordinate the Company's assets' management and inventory.
iv. Provide administrative support for correspondence and archives.
v. Provide support related to transportation needs, drivers, parking, and official travel for Company personnel.
vi. Creating a comfortable and safe office environment.

c. Communication and Information Unit

Responsible for carrying out the Communication Function and Information Technology Function with details of the duties and responsibilities as follows:

1. Communication Function
i. Manage the information dissemination channels required by the Company.
ii. Organize necessary events to disseminate Company information and manage external data related to the Company to create an excellent corporate image and external support for the Company's activities.
iii. Provide and manage the Company's marketing kit according to internal and external needs.

2. Information Technology Function
i. Provide information-technology-based infrastructure so that the Company's operations are optimal in keeping up with the development of information technology by taking into account the conditions and situations of the Company
ii. Providing information technology architecture to ensure the development of information-technology-based business processes can be carried out in an integrated manner.
iii. Support the development and improvement of the Company's business processes based on information technology.
iv. On an ongoing basis, build information and infrastructure protection based on technology against irresponsible treatment from both internal and external parties.



Akuntan Publik

Public Accountant

Untuk tahun buku 2022, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan untuk melaksanakan lingkup penugasan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Juni 2022. Jumlah *fee* yang diberikan oleh P3IEI terhadap KAP Heliantono & Rekan untuk jenis Jasa tersebut adalah sebesar Rp100.000.000. Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sendiri telah melakukan audit sebanyak 4 (empat) kali, yaitu untuk tahun buku 2019-2022.

Rincian Kantor Akuntan Publik yang melakukan mengaudit Laporan Keuangan P3IEI sepanjang tahun 2012-2022 adalah:

For the financial year 2022, the Company appointed Heliantono & Rekan Public Accounting Firm to carry out the Annual Financial Statement Audit Service. This appointment was made during the Annual General Meeting of Shareholders on June 21, 2022. The amount of fee given for the audit services is IDR100.000.000. Public Accounting Firm Heliantono & Rekan has conducted 4 (four) audits of Indonesia SIPF's Financial Statement, namely for year 2019-2022.

The Public Accounting Firms that have audited the Financial Statements of Indonesia SIPF during 2012-2022 are:

Rincian Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan P3IEI sepanjang tahun 2012-2022 adalah:

The Public Accounting Firms that have audited the Financial Statements of Indonesia SIPF during 2012-2022 are:

Tahun Buku. *Financial Year*	Kantor Akuntan Publik. *Public Accounting Firm*
2022	Heliantono & Rekan
2021	Heliantono & Rekan
2020	Heliantono & Rekan
2019	Heliantono & Rekan
2018	Satrio Bing Eny & Rekan
2017	Satrio Bing Eny & Rekan
2016	Satrio Bing Eny & Rekan
2015	RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan
2014	Osman Bing Satrio & Eny
2013	Osman Bing Satrio & Eny
2012	RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan

Standar Etika Perusahaan

Company Ethical Standards

P3IEI memiliki Peraturan serta Pedoman Etika dan Perilaku sebagai landasan dalam menjalankan perannya sebagai PDPP. Penegakan Peraturan serta Pedoman Etika dan Perilaku tidak hanya terbatas pada Perusahaan saja, tapi juga melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan di luar internal Perusahaan.

Indonesia SIPF possesses Corporate Regulation and Ethical & Behavioral Guidelines as the foundations for its role as Investor Protection Fund Institution. The preservation of Corporate Regulation in Ethics and Behavior is not limited only within the Company but also involves stakeholders beyond the internal parties of the Company.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions That Contain Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Pada kegiatan operasional, P3IEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berafiliasi khususnya dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Pasar Modal Indonesia karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi pihak berafiliasi dilakukan sehubungan dengan operasional Perusahaan. Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berafiliasi telah dilaksanakan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perusahaan *(Arm's Length Transaction)* dan mematuhi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bebas dari konflik kepentingan.

In operational activities, Indonesia SIPF conducts transactions with affiliated parties, especially with stakeholders related to the Indonesian Capital Market due to ownership and/or management relationships. Affiliated party transactions are carried out in connection with the Company's operations. All transactions with affiliated parties have been carried out fairly in accordance with the Company's interests (Arm's Length Transaction) and comply with applicable policies and laws and regulations and are free from conflicts of interest.

Sistem *Whistleblowing*

Whistleblowing System

Karyawan dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan, Pedoman Etika dan Perilaku dapat melaporkan bukti dan informasi yang diketahui kepada unit yang ditunjuk oleh P3IEI melalui sistem pengaduan atau *whistleblowing system* (WBS). Hal ini didasarkan pada pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/ POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa satu Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan adalah memproses setiap pengaduan pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP.

Prosedur Pelaporan melalui WBS mencakup proses sebagai berikut:

1. Karyawan atau masyarakat dapat melaporkan pelanggaran serta membahasnya dengan atasan maupun Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang telah ditentukan.
2. Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor, serta melindungi pelapor dan pihak mana pun yang turut membantu melindungi proses investigasi pelanggaran dari kemungkinan-kemungkinan aksi pembalasan *(retaliation)* dari pihak terkait pelaporan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan mencakup perlindungan hukum apabila diperlukan.
3. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang didukung oleh bukti awal yang memadai.
4. Karyawan yang terbukti melanggar tetap memiliki hak untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum diberikan sanksi sesuai kebijakan Perusahaan.
5. Pemberian sanksi kepada karyawan dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan usulan Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan (sebagai koordinator investigasi) dan atasan langsung karyawan.

Employees and members of the society who are aware of violations against Corporate Regulation and/or Ethical and Behavioral Guidelines can report its proofs and known information to the units appointed through the whistleblowing system (WBS). This action is based upon Chapter 33 of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds, which states that the function of Internal Audit and Compliance is to process every report filed by investors and members of the society related to Investor Protection Fund Provider's fulfillment of responsibilities.

The procedure of reporting through WBS involved the following processes:

1. Employee(s) or member(s) of the society could report violations and discuss them with the supervisor(s) or Internal Supervisor and Compliance Unit that has been appointed.
2. The Company is obliged to protect the identity of the reporter(s) and the contents of the report(s), as well as to protect the reporter(s) and any party who assists in protecting the investigation process of said violation from the possibilities of retaliation acts from parties related to the report(s). The protection given by the Company should include legal protection if needed.
3. The Company will follow up on every violation report supported by preliminary findings that are deemed sufficient.
4. Employee(s) that is (are) found proven to have said violation(s) still possess(es) the rights to explain or defend the accused violation(s) before sanctions are given according to corporate regulation.
5. The Board of Directors determines sanctions given to violating employees in consideration of advice given by the Head of the Internal Audit and Compliance (as investigation coordinator) and the employee's direct supervisor.

Permasalahan Hukum Perusahaan

Company's Law Issues

Aspek hukum dan legalitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan sebuah organisasi. Sebagai Perusahaan yang bernaung di Indonesia, P3IEI memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sepanjang tahun 2022, organisasi Perusahaan maupun jajaran individunya tidak terlibat dalam perkara hukum apa pun.

Regulation and legality aspects are elements that cannot be dispersed from the dynamics of organizational growth. As a company that operates in Indonesia, Indonesia SIPF is obligated to obey the law and civic products upheld in Indonesia. In 2022, Indonesia SIPF and its members, were not involved in any legal dispute.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Information and Company Data

Terkait dengan perannya sebagai PDPP, P3IEI memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu terkait keterbukaan informasi, sosialisasi, dan edukasi. Oleh sebab itu, Perusahaan senantiasa mengelola hubungan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat umum dalam bentuk penyampaian informasi di kanal media resmi Perusahaan. P3IEI menyajikan informasi-informasi terbaru dalam bentuk brosur, buletin, *website* (www.indonesiasipf.co.id), Twitter (@indonesiasipf), Instagram (@indonesiasipf), serta WhatsApp Business di nomor +62811-3336-5553. Kanal tersebut dapat memudahkan masyarakat luas dalam bertanya, konsultasi dan/atau melakukan pengaduan. Kanal dapat dihubungi saat jam kerja, hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB, kecuali hari libur nasional dan hari libur bursa. Selain kanal dan akun media tersebut, P3IEI juga memaparkan informasi kinerja operasional dan keuangan dalam bentuk Laporan Tahunan Perusahaan yang diterbitkan setiap tahun.

As an IPF provider, Indonesia SIPF has exceptional attention to issues related to information transparency, socialization, and education. Therefore, the Company continuously communicates with its stakeholders and the general public by providing information on official corporate media channels. Indonesia SIPF presents its latest corporate information in the forms of corporate brochures, bulletins, website (www.indonesiasipf.co.id), Twitter (@indonesiasipf), Instagram (@indonesiasipf), and the WhatsApp Business at + 62811-3336-5553. This channel can make it easier for the wider community to ask questions, consult and/or make complaints. Channels can be contacted during working hours, Monday-Friday 08.00 - 17.00 WIB, except national holidays and stock exchange holidays. Aside from the media as mentioned earlier channels and accounts, Indonesia SIPF also displays information regarding its operational and financial performance in the annually-issued Corporate Annual Report.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berkelanjutan

Corporate Social Sustainability

Pemangku Kepentingan Perusahaan

Corporate Stakeholders

P3IEI sebagai lembaga perlindungan pemodal memiliki komitmen untuk berkontribusi aktif dalam memajukan sektor Pasar Modal Indonesia. Perusahaan memahami pentingnya tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberi pengaruh positif bagi komunitas secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan peran ini, Perusahaan melibatkan para pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, pemegang modal, dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang memiliki perhatian terhadap keberlangsungan dan kesuksesan Perusahaan. Sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan di pasar modal, P3IEI secara konsisten memberikan dukungan untuk memajukan Pasar Modal Indonesia khususnya dalam hal sosialisasi dan edukasi. Pengembangan juga diberikan kepada pemodal sebagai pihak yang menerima perlindungan langsung dari Perusahaan sebagai PDPP, dan Masyarakat Indonesia secara umum sebagai pihak yang menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari kemampuan Perusahaan menjalankan fungsi sebagai PDPP.

Indonesia SIPF as an investor protection institution has a commitment to actively contribute to advancing the Indonesian Capital Market sector. The Company understands the importance of social sustainability to stakeholders and the community as a form of and carrying out activities aimed at improving sustainable welfare and giving positive influence to the community. In carrying out this role, the Company involves stakeholders such as government institutions and capital holders who have an interest in the sustainability and success of the Company. As one of the financial services business actors in the capital market, Indonesia SIPF consistently provides support to advance the Indonesian Capital Market, especially in terms of socialization and education. Development is also given to Investors as parties who receive direct protection from the Company, and Indonesian society in general as parties who receive direct or indirect impacts from the Company's ability to carry out its functions as IPF institution.

Fokus Topik

Topic Focus

Sesuai dengan tema yang diusung P3IEI, Perusahaan berkomitmen untuk berpartisipasi meningkatkan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat terkait Pasar Modal Indonesia. Perusahaan secara khusus mendorong proses sosialisasi dan edukasi mengenai Pasar Modal Indonesia dalam fokus kegiatan tanggung jawab sosialnya melalui program *Corporate Social Sustainability* (CSS) yang ditujukan kepada masyarakat sepanjang tahun 2022. Program ini merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang baik dan bertujuan mendukung pengembangan sarana dan prasarana Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia (GI BEI) khususnya dalam sosialisasi dan edukasi berkesinambungan untuk memajukan Pasar Modal Indonesia. Pada tahun 2022, Perusahaan memilih 5 GI BEI Terbaik dari setiap wilayah kerja Kantor Perwakilan BEI seluruh Indonesia yang diberikan sejumlah dana untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada elemen masyarakat yang lebih luas.

In accordance with the theme that is carried out by Indonesia SIPF, the Company is committed to participating in improving the knowledge of all layers of society regarding the Indonesian Capital Market. The Company specifically encourages the socialization and education process regarding the Indonesian Capital Market in the focus of its social sustainability activities through the Corporate Social Sustainability (CSS) program aimed at the community throughout 2022. This program is part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and aims support in the development of facilities and infrastructure for the Indonesian Stock Exchange Investment Gallery (GI IDX), especially in socialization and continuous education to advance the Indonesian Capital Market. In 2022, the Company selects the 5 Best IDX GIs from each work area of IDX Representative Offices throughout Indonesia which then are given a certain amount of funds to carry out socialization and education to wider elements of society.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Berkelanjutan

Implementation Of Social Sustainability

Dukungan Pengembangan Galeri Investasi (GI) PT Bursa Efek Indonesia secara berkelanjutan dengan memberikan dana dukungan untuk masing-masing GI BEI terpilih yang tampak di dalam tabel sesuai besaran nominal hingga Rp5 juta. Dana tersebut dapat digunakan oleh masing-masing GI BEI untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pasar modal. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pengembangan kegiatan GI BEI, memfasilitasi kebutuhan media pembelajaran bagi GI BEI, dan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum.

Investment Gallery Development Support (GI) of PT Bursa Efek Indonesia on an ongoing basis by providing support funds for each of the selected GI BEI as seen in the table in the amount up to IDR5 million. The funds can be used by each GI IDX for the implementation of socialization and education activities related to the capital market. This activity aimed to take an active role in the development of GI BEI's activities, facilitating the learning media need for GI BEI, and improving early financial literacy and inclusion for students and communities.

Penerima Dana CSS 2022

CSS Fund Recipients 2022

No.	Nama Galeri Investasi *Investment Gallery*
1.	Politeknik Bisnis dan Pasar Modal (BCM College)
2.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3.	Universitas Palangka Raya
4.	Universitas Multimedia Nusantara
5.	Desa Sidorejo

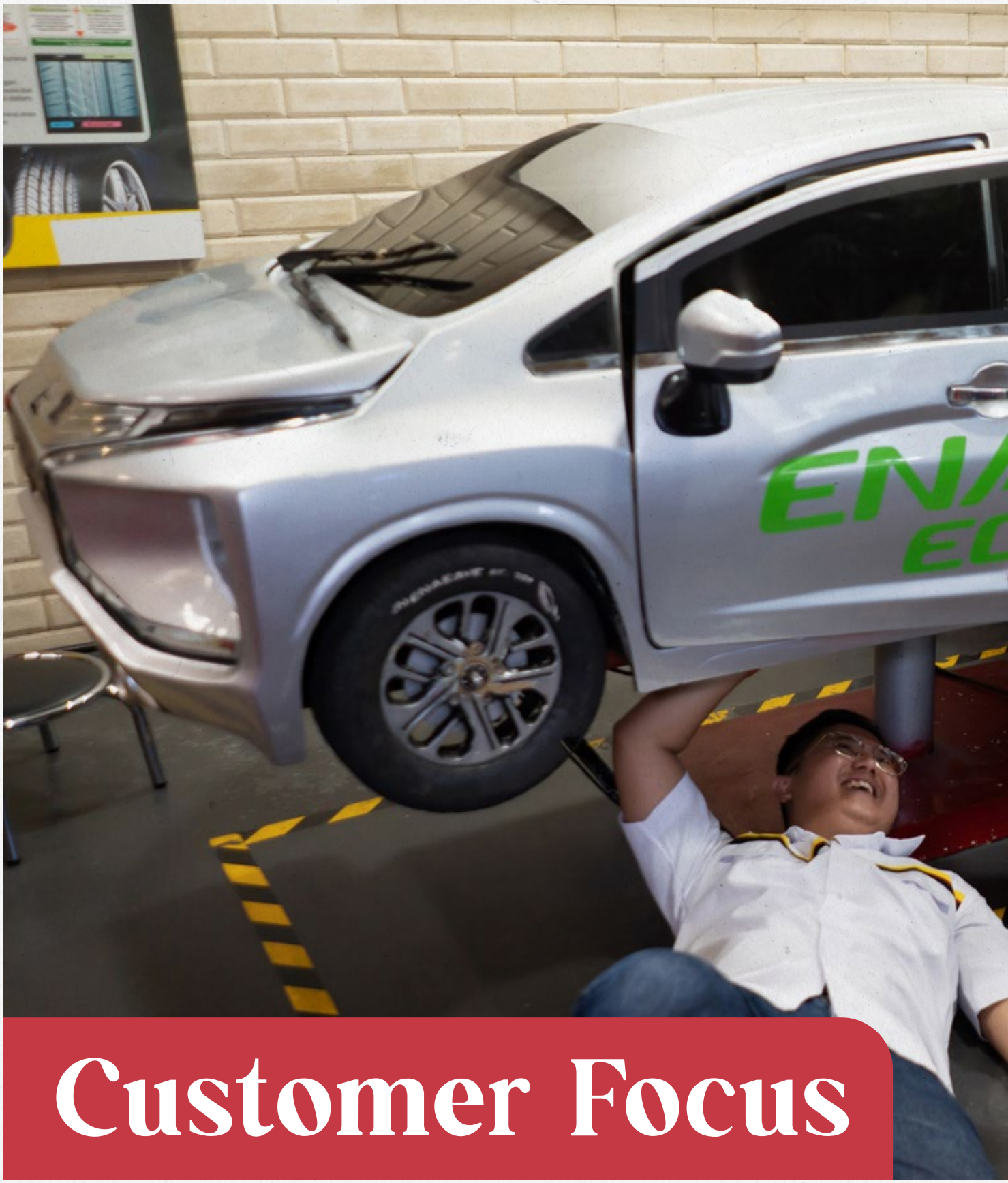

POLICE
POLICE



Laporan Keuangan

Financial Statements





Customer Focus

Customer Focus adalah nilai yang menekankan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi tingkat kepuasaan mitra kerja maupun pelanggan. Nilai ini dijabarkan ke dalam konsep komunikatif, responsif, berempati, dan adaptif. Komunikatif diartikan ke dalam komunikasi yang efektif dan efisien agar mudah dimengerti dan dipahami, kemudian responsif merujuk pada memberikan tanggapan atau reaksi sesegera mungkin atas sebuah situasi yang membutuhkan respon dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Karyawan juga didorong untuk menunjukkan empati dengan memposisikan diri dalam situasi orang lain, berusaha memahami perasaannya dan menerima perbedaan-perbedaan serta melihat sudut pandang orang lain, agar dapat mengetahui dan memahami keadaan yang sebenarnya. Di zaman yang manghadapi banyak perubahan ini, karyawan didorong untuk adaptif dengan menunjukkan sikap terbuka dan dinamis serta tanggap terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi serta melakukan penyesuaian secara cepat dan tepat.



Customer Focus is a value that emphasizes consistently providing the best service to meet the satisfaction levels of both partners and customers. This value is elaborated through communicative, responsive, empathetic, and adaptive concepts. Communicative means effective and efficient communication that is easily understood and comprehended. Responsiveness refers to timely responses or reactions to situations requiring a responsible and accountable response. Employees are encouraged to show empathy by putting themselves in others' positions, seeking to understand their feelings, accepting differences, and considering others' perspectives to understand and comprehend the situation. In this ever-changing world, employees are urged to be adaptive by demonstrating an open and dynamic attitude, responsive to environmental changes, and making quick and appropriate adjustments.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA TAHUN BUKU 2022

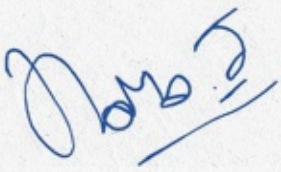
STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT OF PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND) FOR THE FISCAL YEAR 2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2022, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

◎ Jakarta, 2023

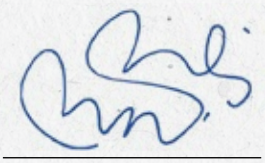
We, the undersigned, hereby declare that all information contained herein the Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for the fiscal year 2022 has been fully disclosed, and we take full responsibility for the accuracy of information on this annual report.

» Jakarta, 2023



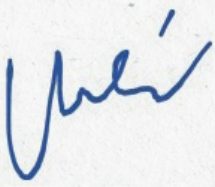
Narotama Aryanto
DIREKTUR UTAMA

President Director



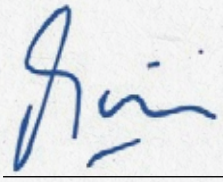
Mariska Aritany Azis
DIREKTUR

Director



Lucia Sintha Sari
KOMISARIS UTAMA

President Commissioner



Dian Kurniasarie
KOMISARIS

Commissioner

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

THE STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL OF PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND)

Jakarta, 2023

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia untuk Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk ahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut , yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2023 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dalam suatu sistem manajemen risiko yang baik dan telah memenuhi aturan dan pengendalian internal Perusahaan serta sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, pengolahan manajemen risiko Perusahaan, pemenuhan aturan serta sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Direksi,

Declare that:

The statement of the Board of Directors regarding the responsibility for the Financial Statements of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) as of December 31, 2022 and 2021 and for the Years Ended , which we signed on March 31, 2023 are founded upon sound system of risk management and internal regulation and control, and compliant towards the policies adopted by the Board of Commissioners and Board of Directors.

The company's risk management and internal control systems are operating efficiently and effectively in all material aspects.

Hereby this declaration has been made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors,

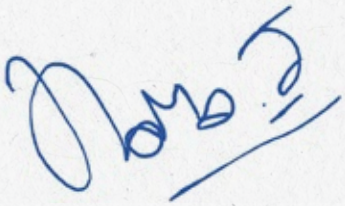
1. Nama. *Name*
Narotama Aryanto

Alamat Kantor. *Office Address*
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Alamat Domisili. *Domicile*
Tangerang Selatan

Nomor Telepon. *Telephone Number*
0811 1711 209

Jabatan. *Position*
Direktur Utama



Narotama Aryanto
DIREKTUR UTAMA

President Director

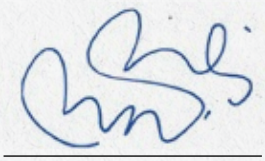
2. Nama. *Name*
Mariska Aritany Azis

Alamat Kantor. *Office Address*
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Alamat Domisili. *Domicile*
Depok

Nomor Telepon. *Telephone Number*
0878 8198 9215

Jabatan. *Position*
Direktur



Mariska Aritany Azis
DIREKTUR

Director

Laporan Keuangan

Financial Report

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022
For Year Ended 31 December 2022

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

Beserta Laporan Auditor Independen

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	Narotama Aryanto
	Alamat kantor	:	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Perum Pondok Jagung Blok AD. 13 Pondok Jagung – Serpong Utara Tangerang Selatan
	Nomor telepon	:	08111711209
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Mariska Aritany Azis
	Alamat kantor	:	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Jl. Lawu Blok J Kav. 288 RT/RW 007/014 Kel. Limo, Kec. Limo Depok
	Nomor telepon	:	087881989215
	Jabatan	:	Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI);

2. Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 02 Maret 2023



Narotama Aryanto
Direktur Utama



Mariska Aritany Azis
Direktur

HELIANTONO & REKAN
Parker Russell International
Registered Public Accountants

Aminta Plaza, 7th Floor # 704 Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan 12310 Indonesia
T: (+62 21) 766 1348-50 | F: (+62 21) 766 1351 | : info@heliantonorekan.com | : www.heliantonorekan.com
Branch: Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo

Nomor: 00151/2.0459/AU.1/05/0152-1/1/III/2023

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

List of offices and partner's name are available at the above address. Heliantono & Rekan is a Registered Public Accountants in Indonesia licensed No. KEP-093/KM.6/2001. Heliantono & Rekan is a member of Parker Russell International a worldwide association of independent accounting firms and business advisers. Parker Russell International refers to the network of independent member firms of Parker Russell International Limited, each of which is a separated legal entity.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan

00151

Rianita Soelaiman
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0152

Jakarta, 2 Maret 2023

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	2.724.417.089	2.502.898.542
Piutang Usaha	5	2.523.408.641	2.581.051.688
Piutang Lain-lain	6	1.876.222.856	1.783.358.151
Biaya Dibayar Dimuka	7	1.653.917.718	596.374.095
Aset Keuangan Lainnya	8, 24	50.261.751.245	50.214.720.513
Uang Muka dan Jaminan		37.950.000	37.950.000
Jumlah Aset Lancar		**59.077.667.549**	**57.716.352.989**
Aset Tidak Lancar			
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	9	160.449.787.899	165.152.397.338
Aset Tetap	10	522.222.924	860.809.056
Jumlah Aset Tidak Lancar		**160.972.010.823**	**166.013.206.394**
JUMLAH ASET		**220.049.678.372**	**223.729.559.383**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	11	357.292.014	288.381.912
Utang Lain-lain		83.760.464	7.448.613
Beban Akrual	12	2.590.014.225	2.304.696.568
Utang kepada Pihak Berelasi	24	880.596.469	1.642.806.863
Liabilitas Sewa - Bagian Lancar	13	97.791.055	90.646.505
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**4.009.454.227**	**4.333.980.461**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Panjang	13	78.358.364	173.407.879
Cadangan Imbalan Kerja	23	--	154.272.990
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**78.358.364**	**327.680.869**
Jumlah Liabilitas		**4.087.812.591**	**4.661.661.330**
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal Dasar - 240.000 saham			
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 210.000 saham	14	210.000.000.000	210.000.000.000
Saldo Laba		5.961.865.781	9.067.898.053
Jumlah Ekuitas		**215.961.865.781**	**219.067.898.053**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**220.049.678.372**	**223.729.559.383**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Bunga	15	15.414.912.924	16.095.175.570
Pendapatan Jasa	16	2.523.409.804	2.581.052.852
Jumlah Pendapatan		**17.938.322.728**	**18.676.228.423**
BEBAN USAHA			
Beban Gaji dan Tunjangan	17	9.325.971.411	8.481.391.322
Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi	18	3.688.133.596	3.734.980.431
Beban Umum dan Administrasi	19	1.429.867.103	1.129.313.133
Beban Penyusutan	10	349.228.494	395.166.539
Beban Pendidikan dan Pelatihan	20	204.140.017	135.042.935
Beban Konsultan	21	194.419.358	172.726.922
Beban Lain-lain - Bersih		73.928.790	84.347.814
Jumlah Beban Usaha		**15.265.688.769**	**14.132.969.096**
LABA SEBELUM PAJAK		**2.672.633.959**	**4.543.259.327**
BEBAN PAJAK	22	**(139.450.768)**	**(159.081.055)**
LABA TAHUN BERJALAN		**2.533.183.191**	**4.384.178.272**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		63.282.537	(170.191.368)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Laba (Rugi) Belum Terealisasi atas Perubahan Nilai Wajar		(5.702.498.000)	4.243.569.000
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		**(5.639.215.463)**	**4.073.377.632**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(3.106.032.272)**	**8.457.555.904**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Saham	Modal Lainnya	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 1 Januari 2021	**60.000.000.000**	**150.000.000.000**	**610.342.149**	**210.610.342.149**
Laba Tahun Berjalan	--	--	4.384.178.272	4.384.178.272
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	4.073.377.632	4.073.377.632
Saldo Per 31 Desember 2021	**60.000.000.000**	**150.000.000.000**	**9.067.898.053**	**219.067.898.053**
Laba Tahun Berjalan	--	--	2.533.183.191	2.533.183.191
Rugi Komprehensif Lain	--	--	(5.639.215.463)	(5.639.215.463)
Saldo Per 31 Desember 2022	**60.000.000.000**	**150.000.000.000**	**5.961.865.781**	**215.961.865.781**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaaan Kas Dari Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal		2.581.052.852	3.405.846.673
Penerimaan dari Penghasilan Bunga dan Kupon		13.474.678.012	15.524.855.212
Pembayaran Gaji dan Tunjangan		(7.144.554.770)	(6.330.016.795)
Pembayaran Beban Usaha dan Aktivitas Operasi Lainnya		(8.061.717.440)	(4.439.540.009)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(1.552.762.382)	(832.458.635)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(703.303.728)**	**7.328.686.446**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	10	(44.067.923)	(101.035.455)
Pembelian Aset Keuangan Lainnya		(23.339.948.723)	(21.027.546.841)
Pencairan Aset Keuangan Lainnya		24.370.895.249	12.302.210.876
Pembelian Aset Keuangan CGRP		(25.143.898.616)	(48.369.000.000)
Pencairan Aset Keuangan CGRP		25.171.398.616	49.593.218.750
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**1.014.378.603**	**(7.602.152.670)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Liabilitas Sewa		(89.556.328)	(82.641.578)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		**(89.556.328)**	**(82.641.578)**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		**221.518.547**	**(356.107.802)**
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode		**2.502.898.542**	**2.859.006.344**
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	4	**2.724.417.089**	**2.502.898.542**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("Perusahaan"), didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0029528.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah menjadi perusahaan yang bergerak dibidang perlindungan pasar modal termasuk penyelenggara, pengelolaan, dan pengadministrasian Dana Perlindungan Pemodal. Untuk mencapai usaha tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Mengelola dan mengadministrasikan Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
b. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut;
d. Menerima tambahan dana atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
e. Melakukan tindakan *recovery* dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan suborgasi atas hal pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian namun tidak terbatas, ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun luar pengadilan;
f. Mewakili pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya aset pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal;
g. Mengadministrasikan dan menjalankan kegiatan lain sehubungan dengan tugas dan peran terkait dengan pengembalian keuntungan tidak sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia; dan
h. Melakukan kegiatan lain sehubungan dengan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia sesuai dengan arahan dan persetujuan OJK dan/atau pemangku kebijakan terkait lainnya.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan telah memperoleh Izin Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016, Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 26). Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Perusahaan berwenang antara lain untuk :

1. Menatausahakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam-LK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2, Lantai Dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 11 karyawan pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 and 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Lucia Sintha Sari	Dewi Arum P.
Komisaris	Dian Kurniasarie	Roni Gunardi
Direksi		
Direktur Utama	Narotama Aryanto	Narotama Aryanto
Direktur	Mariska Aritany Azis	Mariska Aritany Azis

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

b. Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masin-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, yaitu sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak:
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (ii) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (iii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Piutang lain-lain dan Efek Beragun Aset (EBA). Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yaitu Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi, dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi yaitu Reksadana.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain, investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha dan utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi *input* terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
3) *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

f. Sewa

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
- Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:
- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan; dan
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual.

Harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut dan penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari “Aset tetap” dan “Liabilitas sewa” di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka-Pendek
Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi Sewa
Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:
- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Sebagai Pesewa
Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

g. Kas dan Setara Kas
Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Biaya Dibayar Dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset Tetap
Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Peralatan dan sistem komputer	4
Peralatan dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di*review* setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dihentikan pengakuanya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Jasa

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Modal tanggal 28 Desember 2012, yang telah diubah pada tanggal 2 Desember 2016 menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 49/POJK.04/2016, Perusahaan berhak mendapat imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

l. Imbalan Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun iuran pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti yang ditentukan program.

Imbalan Pasca-Kerja Manfaat Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca-kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perusahaan. Program imbalan pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kekurangan imbalan yang diberikan program pensiun dibandingkan dengan manfaat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dicatat sebagai imbalan pasca-kerja manfaat pasti tanpa pendanaan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga), tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dengan beban atau kredit yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin langsung dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

i. Biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
ii. Beban atau pendapatan bunga bersih; dan
iii. Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan.

m. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam penghitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

n. Provisi

Perusahaan mengakui provisi apabila memiliki kewajiban kini (baik secara hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu apabila besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan dapat diestimasi dengan andal.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, Perusahaan diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

a. Pertimbangan Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi
Perusahaan menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71 terpenuhi.

b. Sumber Estimasi Ketidakpastian
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Imbalan Kerja
Penentuan liabilitas kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskontokan tingkat kenaikan gaji. Walaupun asumsi perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataanya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap provisi imbalan kerja Perusahaan.

Nilai tercatat provisi imbalan kerja telah diungkapkan pada Catatan 23.

Estimasi Nilai Wajar
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia pada pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk pengunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2022	2021
Kas	**5.035.774**	**196.274**
Kas di Bank		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	419.560.682	203.605.457
PT Bank KB Bukopin Tbk	68.170.494	68.473.608
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.364.253	30.623.203
PT Bank Central Asia Tbk- Rekening Dana Nasabah	1.285.886	--
Sub Jumlah	519.381.315	302.702.268
Deposito Berjangka		
Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.200.000.000	2.200.000.000
Sub Jumlah	2.200.000.000	2.200.000.000
Jumlah	**2.724.417.089**	**2.502.898.542**
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka	2,90% - 4,00%	2,00% - 3,00%
Jangka Waktu	1 Bulan	1 Bulan

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal masing-masing sebesar Rp2.523.408.641 dan Rp2.581.051.688 per 31 Desember 2022 dan 2021.

Berdasarkan penelaahan secara individual atas piutang pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan tidak perlu mencatat kerugian ekspektasian piutang karena tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	2022	2021
Piutang Bunga	1.636.907.243	1.783.358.151
Piutang Kepada Pemegang Saham	239.315.613	--
Jumlah	**1.876.222.856**	**1.783.358.151**

Piutang kepada pemegang saham merupakan penggantian biaya atas kajian *Job Evaluation and Salary Structure* sebesar Rp239.317.613 (Catatan 24.c).

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2022	2021
Tunjangan Personalia	1.449.999.992	488.571.429
Lainnya	203.917.726	107.802.666
Jumlah	**1.653.917.718**	**596.374.095**

Biaya dibayar di muka - tunjangan personalia merupakan manfaat yang diberikan kepada Direksi untuk periode 2022 - 2025 sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 17 tanggal 21 Juni 2022 dari Eko Purwanto, S.H.

8. ASET KEUANGAN LAINNYA

	2022	2021
Obligasi Korporasi	25.752.920.000	35.955.745.000
Reksadana	14.508.831.245	14.258.975.513
Efek Beragun Aset	10.000.000.000	--
Jumlah	**50.261.751.245**	**50.214.720.513**

Obligasi Korporasi tercatat dengan nilai wajar masing-masing sebesar Rp25.752.920.000 dan Rp35.955.745.000 per 31 Desember 2022 dan 2021. Nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp752.920.000 dan Rp955.745.000 per 31 Desember 2022 dan 2021.

2022				
Obligasi	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Tingkat Bunga**	**Jatuh Tempo**
BJBR01BSBCN1	5.000.000.000	5.186.335.000	9,90%	06 Desember 2024
TPIA01CCN1	5.000.000.000	5.178.905.000	9,75%	12 Desember 2024
PNBN03SBCN1	5.000.000.000	5.165.915.000	9,50%	03 Juli 2025
BJBR02BSBCN1	5.000.000.000	5.147.080.000	9,35%	03 Maret 2027
WIKA01BCN1	5.000.000.000	5.074.685.000	9,25%	18 Desember 2025
Jumlah	**25.000.000.000**	**25.752.920.000**		

2021				
Obligasi	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Tingkat Bunga**	**Jatuh Tempo**
PNMP02BCN1	10.000.000.000	10.251.260.000	9,25%	12 Juli 2022
TPIA01CCN1	5.000.000.000	5.417.290.000	9,75%	12 Desember 2024
BJBR01BSBCN1	5.000.000.000	5.173.890.000	9,90%	06 Desember 2024
PNBN03SBCN1	5.000.000.000	5.126.660.000	9,50%	03 Juli 2025
WIKA01BCN1	5.000.000.000	5.031.265.000	9,25%	18 Desember 2025
BJBR02BSBCN1	5.000.000.000	4.955.380.000	9,35%	03 Maret 2027
Jumlah	**35.000.000.000**	**35.955.745.000**		

Reksadana tercatat masing-masing per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp14.508.831.245 dan Rp14.258.975.513. Nilai wajar reksadana dinyatakan berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB)/*Net Asset Value* (NAV) dari Bank Kustodian pada periode pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp468.830.023 dan Rp231.428.672 pada 31 Desember 2022 dan 2021.

2022			
Reksadana	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Periode Akuisisi**
RD DANAMAS STABIL	7.562.961.033	7.790.859.090	16 Juni 2022
RD SUCOR STABLE FUND	1.800.000.000	1.946.544.572	27 September 2021
RD SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND	1.250.000.000	1.265.692.953	8 September 2022
RD SUCOR STABLE FUND	1.000.000.000	1.068.948.029	14 Juni 2022
RD BNP PARIBAS SRI KEHATI	1.000.000.000	992.605.464	22 Desember 2022
RD SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND	575.812.204	580.572.983	19 Oktober 2022
RD SUCOR PREMIUM FUND	500.000.000	501.216.082	29 November 2022
RD SUCOR SHARIA SUKUK FUND	351.227.985	362.392.072	14 Juni 2022
Jumlah	**14.040.001.222**	**14.508.831.245**	

	2021		
Reksadana	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Periode Akuisisi**
RD DANAMAS RUPIAH PLUS	4.100.000.000	4.130.727.291	21 Oktober 2021
RD SUCOR MM	3.127.546.841	3.131.715.585	21 Desember 2021
RD SUCOR MM	2.000.000.000	2.101.226.136	14 Januari 2021
RD SUCOR STABLE FUND	1.800.000.000	1.833.278.547	27 September 2021
RD MEGA DANA KAS	1.000.000.000	1.028.401.742	20 Mei 2021
RD MEGA DANA KAS	1.000.000.000	1.026.878.399	02 Juni 2021
RD SUCOR STABLE FUND	1.000.000.000	1.006.747.812	25 November 2021
Jumlah	**14.027.546.841**	**14.258.975.513**	

Biaya perolehan EBA berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) SMF-BTN07 kelas A untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah Rp10.000.000.000. Nilai tercatat EBA-SP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.000.000.000.

9. CADANGAN GANTI RUGI PEMODAL

Merupakan bagian dana yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Perusahaan, sebagai Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP), masing-masing sebesar Rp50.000.000.000. Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Modal Hasil Konversi Nomor SP-00573/BEI.HKM/12-2020, PJ-073/KPEI/1220, SP-0148/DIR/KSEI/1220, SP-0004/P3IEI-SPH/1220 tanggal 7 Desember 2020 Perusahaan wajib mengelola dana CGRP secara optimal dengan mempertimbangkan risiko dan hasil investasi. Penempatan modal hasil konversi dilakukan sesuai dengan Pedoman Investasi yang berlaku di Perusahaan yang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, penempatan dana CGRP terdiri dari:

	2022	**2021**
Obligasi dan Surat Berharga Negara	139.378.803.000	144.905.976.000
Reksadana	21.070.984.899	20.246.421.338
Jumlah	**160.449.787.899**	**165.152.397.338**

a. Obligasi Korporasi dan Surat Berharga

Biaya perolehan Obligasi Korporasi dan Surat Berharga Negara untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp129.972.500.000 dan Rp130.000.000.000.

Nilai wajar Obligasi Korporasi dan Surat Berharga Negara tercatat sebesar Rp139.378.803.000 dan Rp144.905.976.000 per 31 Desember 2022 dan 2021. Nilai wajar Obligasi Korporasi dan Surat Berharga Negara dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.

Saldo keuntungan yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp9.406.303.000 dan Rp14.905.976.000 per 31 Desember 2022 dan 2021.

	2022			
Obligasi	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Tingkat Bunga**	**Jatuh Tempo**
ISAT02ECN1	30.000.000.000	32.315.160.000	9,25%	31 Mei 2027
BEXI03DCN3	20.000.000.000	21.612.700.000	9,75%	8 November 2025
BEXI03ECN4	20.000.000.000	21.696.840.000	9,40%	23 Februari 2027
ISAT02ECN3	20.000.000.000	21.272.340.000	8,70%	3 Mei 2028
PIKI01C	15.000.000.000	16.396.170.000	9,35%	4 Juli 2028
PPLN03CCN3	11.000.000.000	11.796.807.000	9,35%	19 Februari 2026
SMFP04CCN7	9.000.000.000	9.316.161.000	9,25%	12 Februari 2024
ORI019	5.000.000.000	4.972.625.000	5,57%	15 Februari 2024
Jumlah	**130.000.000.000**	**139.378.803.000**		

	2021			
Obligasi	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Tingkat Bunga**	**Jatuh Tempo**
ISAT02ECN1	30.000.000.000	33.707.580.000	9,25%	31 Mei 2027
BEXI04DCN3	20.000.000.000	22.564.280.000	9,75%	8 November 2025
BEXI03ECN4	20.000.000.000	22.618.480.000	9,40%	23 Februari 2027
ISAT02ECN3	20.000.000.000	21.924.160.000	8,70%	3 Mei 2028
PIKI01C	15.000.000.000	16.938.030.000	9,35%	4 Juli 2028
PPLN03CCN3	11.000.000.000	12.355.508.000	9,35%	19 Februari 2026
SMFP04CCN7	9.000.000.000	9.788.913.000	9,25%	12 Februari 2024
PNMP04ACN1	5.000.000.000	5.009.025.000	3,75%	20 Desember 2022
Jumlah	**130.000.000.000**	**144.905.976.000**		

b. Reksadana

Nilai Reksadana tercatat sebesar Rp21.070.984.898 dan Rp20.246.421.338 per 31 Desember 2022 dan 2021. Nilai Reksadana dinyatakan berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB)/*Net Asset Value* (NAV) dari Bank Kustodian pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp1.070.984.898 dan Rp246.421.338 per 31 Desember 2022 dan 2021.

	2022		
Reksadana	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Periode Akuisisi**
RD SUCOR STABLE FUND	10.000.000.000	10.769.650.466	18 Oktober 2021
RD DANAMAS STABIL	10.000.000.000	10.301.334.433	16 Juni 2022
Jumlah	**20.000.000.000**	**21.070.984.899**	

	2021		
Reksadana	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Periode Akuisisi**
RD SUCOR STABLE FUND	10.000.000.000	10.142.983.338	18 Oktober 2021
RD DANAMAS STABIL	10.000.000.000	10.103.438.000	27 September 2021
Jumlah	**20.000.000.000**	**20.246.421.338**	

10. ASET TETAP

	2022			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	2.200.034.708	8.991.000	--	2.209.025.708
Peralatan dan Perabotan Kantor	637.727.415	--	--	637.727.415
Jumlah	2.837.762.123	8.991.000	--	2.846.753.123
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	425.828.142	1.651.362	--	427.479.504
Jumlah	425.828.142	1.651.362	--	427.479.504
Akumulasi Penyusutan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	1.673.305.095	209.623.990	--	1.882.929.085
Peralatan dan Perabotan Kantor	546.978.338	47.294.024	--	594.272.362
Jumlah	2.220.283.433	256.918.014	--	2.477.201.447
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	182.497.776	92.310.480	--	274.808.256
Jumlah	182.497.776	92.310.480	--	274.808.256
Nilai Tercatat	**860.809.056**			**522.222.924**

	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	2.098.801.589	101.233.119	--	2.200.034.708
Peralatan dan Perabotan Kantor	602.848.157	34.879.258	--	637.727.415
Jumlah	2.701.649.746	136.112.377	--	2.837.762.123
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	425.828.142	--	--	425.828.142
Jumlah	425.828.142	--	--	425.828.142
Akumulasi Penyusutan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	1.420.211.584	253.093.511	--	1.673.305.095
Peralatan dan Perabotan Kantor	496.154.198	50.824.140	--	546.978.338
Jumlah	1.916.365.782	303.917.651	--	2.220.283.433
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	91.248.888	91.248.888	--	182.497.776
Jumlah	91.248.888	91.248.888	--	182.497.776
Nilai Tercatat	**1.119.863.218**			**860.809.056**

Beban penyusutan masing-masing sebesar Rp349.228.494 dan Rp395.166.539 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

11. UTANG PAJAK

	2022	2021
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	321.117.469	126.903.438
Pasal 23	1.744.629	2.397.419
Pasal 29	33.396.736	159.081.055
Pasal 4 ayat 2	1.033.180	--
Jumlah	**357.292.014**	**288.381.912**

12. BEBAN AKRUAL

	2022	2021
Tunjangan Personalia	1.704.232.745	1.809.024.421
Cadangan Penanganan Klaim	375.000.000	275.000.000
Jasa Konsultasi dan Profesi	88.334.615	128.207.439
Kantor dan Umum, dan Non Operasional	422.446.865	92.464.708
Jumlah	**2.590.014.225**	**2.304.696.568**

13. LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Liabilitas Sewa Bruto		
Pembayaran Sewa Minimum		
Tidak Lebih dari Setahun	106.560.000	105.600.000
Lebih dari 1 Tahun	79.920.000	184.800.000
Jumlah	186.480.000	290.400.000
Beban Keuangan di Masa Depan atas Sewa	(10.330.581)	(26.345.616)
Nilai Kini Liabilitas Sewa	**176.149.419**	**264.054.384**

	2022	2021
Nilai Kini Liabilitas Sewa adalah Sebagai Berikut:		
Tidak Lebih dari Setahun	97.791.055	90.646.505
Lebih dari 1 Tahun	78.358.364	173.407.879
Jumlah	176.149.419	264.054.384
Dikurangi: Bagian Lancar	97.791.055	90.646.505
Jumlah Bagian Jangka Panjang	**78.358.364**	**173.407.879**

Analisa jatuh tempo liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Dalam		
1 Tahun	97.791.055	90.646.505
2 Tahun	78.358.364	95.755.447
3 Tahun	--	77.652.433
Jumlah Nilai Kini Liabilitas Sewa	**176.149.419**	**264.054.384**

Seluruh dari transaksi sewa yang dilakukan oleh Perusahaan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2, memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, meskipun hak legalitas tempat spesifik dari ruangan kantor tersebut masih dimiliki oleh pihak ketiga lainnya.

Penambahan liabilitas sewa terjadi dari transaksi baru yang telah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada periode yang bersangkutan.

14. MODAL SAHAM

	31 Desember 2022 dan 2021		
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Kepemilikan	Jumlah Modal disetor
PT Bursa Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
Jumlah	**210.000**	**100%**	**210.000.000.000**

Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dari Eko Putranto, S.H. tentang perubahan modal dasar dan modal ditempatkan, modal dasar Perusahaan ditingkatkan menjadi sebesar Rp240.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp120.000.000.000, yang terbagi atas 240.000 lembar saham, sedangkan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebanyak 210.000 lembar saham atau senilai Rp210.000.000.000 dari sebelumnya sebanyak 60.000 lembar saham atau senilai Rp60.000.000.000. Peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0046853.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020.

Para pihak pemegang saham yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebelumnya telah melakukan penempatan dana masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 sebagai dana CGRP (Catatan 9).

15. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito berjangka, kupon obligasi, jasa giro, keuntungan reksadana dan kupon EBA.

16. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal.

17. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

	2022	2021
Karyawan:		
Gaji	1.444.886.868	1.206.793.669
Tunjangan	3.493.705.712	2.792.189.136
Direksi:		
Gaji	1.227.096.000	1.185.600.000
Tunjangan	2.687.130.035	2.817.216.849
Dewan Komisaris:		
Gaji	228.000.000	228.000.000
Tunjangan	245.152.796	251.591.667
Jumlah	**9.325.971.411**	**8.481.391.322**

18. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI

	2022	2021
Sharing Cost SRO	2.138.629.480	2.199.999.998
Sosialisasi dan Publikasi	1.066.167.064	1.088.167.612
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal	383.337.052	346.812.821
Pengembangan Sistem Perlindungan Modal	100.000.000	100.000.000
Jumlah	**3.688.133.596**	**3.734.980.431**

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2022	2021
Keperluan Kantor	935.119.945	697.944.122
Telpon, Internet, Listrik dan Utilitas Lainnya	309.993.723	294.768.870
Sewa	75.443.099	50.008.750
Asuransi	75.000.000	75.000.000
Rapat	34.310.336	10.591.391
Pemeliharaan	--	1.000.000
Jumlah	**1.429.867.103**	**1.129.313.133**

20. BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Merupakan beban seminar dan *workshop* di dalam negeri masing-masing sebesar Rp204.140.017 dan Rp135.042.935 pada 31 Desember 2022 dan 2021.

21. BEBAN KONSULTAN

Terdiri dari beban konsultan hukum/notaris, aktuaria, akuntan publik dan perpajakan masing-masing sebesar Rp194.419.358 dan Rp172.726.922 pada 31 Desember 2022 dan 2021.

22. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	2022	2021
Beban Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	139.450.768	159.081.055
Pajak Tangguhan	--	--
Jumlah	**139.450.768**	**159.081.055**

Rekonsiliasi Fiskal dan Penghitungan Beban Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.672.633.959	4.543.259.327
Beda Tetap		
Imbalan dalam bentuk Natura	157.757.900	163.762.943
Sumbangan	--	5.000.001
Pajak Penghasilan	1.432.344.365	831.164.900
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final	(15.414.912.924)	(16.083.726.313)
Lain-Lain	11.883.948.930	11.370.258.425
Jumlah Beda Tetap	(1.940.861.729)	(3.713.540.044)
Taksiran Laba Kena Pajak	731.772.230	829.719.283
Pembulatan	731.773.000	829.719.000
Beban Pajak Penghasilan		
2022 : 22% x 50% x Rp195.810.208	21.539.123	--
2022 : 22% x Rp535.962.022	117.911.645	--
2021 : 22% x 50% x Rp213.247.154	--	23.457.187
2021 : 22% x Rp616.472.129	--	135.623.868
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**139.450.768**	**159.081.055**
Dikurangi: Pajak Dibayar Dimuka		
Pasal 25	106.054.032	--
PP 46	--	--
Jumlah Kredit Pajak	106.054.032	--
Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29	**33.396.736**	**159.081.055**

Perusahaan telah menerapkan tarif PPh Badan terbaru sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

23. IMBALAN KERJA

Program Iuran Pasti
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun Imbalan Pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Imbalan Pasca-Kerja dan Jangka Panjang Lainnya
Perusahaan menyediakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti bagi para karyawan yang tidak didanai berupa imbalan pesangon yang besarnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan PP No 35/2021. Pemberian pesangon berdasarkan upah tetap bulanan.

Program pensiun manfaat pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.
Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut masing masing adalah 10 orang dan 9 orang pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Risiko Tingkat Suku Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbalan hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan kerja dicatat pada bagian dari beban gaji dan tunjangan.

Penghitungan imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaris Arya Bagiastra (d/h PT Gemma Mulia Inditama).

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam penghitungan imbalan pascakerja karyawan:

	2022	2021
Tingkat Diskonto	7,25%	7,31%
Tingkat Kenaikan Gaji	8%/Tahun	10%/Tahun
Tingkat Kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat Kecacatan	10% TMI IV	10% TMI IV
Usia Pensiun Normal	59 Tahun	56 Tahun
Tingkat Pengunduran Diri	18-29 tahun: 10%	18-29 tahun: 10%
	30-39 tahun: 5%	30-39 tahun: 5%
	40-44 tahun: 3%	40-44 tahun: 3%
	45-49 tahun: 2%	45-49 tahun: 2%
	50-55 tahun: 1%	50-55 tahun: 1%
	≥ 55 Tahun : 0%	≥ 55 Tahun : 0%
Mode Aktuaria	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 jumlah tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari provisi terkait dengan imbalan kerja program pensiun imbalan pasti adalah masing-masing sebesar Nihil dan Rp154.272.990.

Pada bulan April 2022, DSAK-IAI menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers tentang persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24 “Imbalan Kerja” sebagai respon atas *Agenda Decisions: IAS 19 Employee Benefits – Attributing Benefit to Period of Service* yang diterbitkan oleh IFRS Implementation Committee (IFRIC) pada bulan Mei 2021. Materi penjelasan tersebut mengklarifikasi penentuan periode dimana suatu entitas harus mengatribusikan manfaat untuk skema manfaat pensiun yang di perkenalkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang dimulai dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan menurut program sampai tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan selanjutnya.

Pada tahun 2022, Perusahaan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya secara prospektif. Manajemen meyakini dampaknya tidak material dan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan Perusahaan, sehingga seluruh akumulasi selisih pengukuran atribusi imbalan kerja dengan saldo sebelumnya baik dari yang berpengaruh terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dibukukan pada tahun berjalan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2022. Dampak atas perubahan metode atribusi imbalan kerja pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai akibat perubahan program manfaat mengakibatkan saldo liabilitas imbalan kerja per 31 Desember 2022 bersaldo minus, dimana berdasarkan penelaahan Perusahaan saldo tersebut tidak dapat langsung diakui sebagai aset program oleh Perusahaan.

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Liabilitas Pada Awal Periode/Tahun	154.272.990	89.539.529
Beban Imbalan Kerja	(338.517.220)	108.666.195
Pembayaran Iuran Dana Pensiun	(132.299.083)	(214.124.102)
Penghasilan Komprehensif Lain	(63.282.537)	170.191.368
Liabilitas Pada Akhir Periode/Tahun	**(379.825.850)**	**154.272.990**

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja yang ditetapkan adalah tingkat diskonto dan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan besar terjadi atas masing-masing asumsi pada akhir periode pelaporan, dimana asumsi lain konstan.

	2022	2021
Penurunan (-1%) pada Tingkat Bunga	959.492.413	912.485.508
Kenaikan (+1%) pada Tingkat Bunga	(710.949.012)	(653.326.665)
Penurunan (-1%) pada Tingkat Gaji	(712.985.726)	(657.505.505)
Kenaikan (+1%) pada Tingkat Gaji	953.982.345	903.714.559

Analisis sensitivitas disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan aktual atas kewajiban imbalan pasti dimana terdapat kemungkinan perubahan asumsi yang akan terjadi pada akhir periode pelaporan yang disebabkan oleh beberapa dari asumsi tersebut saling berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* diproyeksikan pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban Imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization* – SRO) merupakan pemegang saham Perusahaan. PT Penilai Harga Efek Indonesia, PT Indonesia Capital Market Library dan PT IDX Solusi Teknologi Informasi merupakan entitas dengan pemegang saham yang sama.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

a. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut, antara lain:

	2022	2021
Gaji/Honorarium	1.455.096.000	1.413.600.000
Tunjangan	2.932.282.831	3.068.808.516
Jumlah	**4.387.378.831**	**4.482.408.516**

b. Berdasarkan Perjanjian Penyediaan CGRP antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perusahaan No.SP-00263/BEI.HKM/08/2015; No.PJ-029/KPEI/0815; No.SP-0102/DIR/KSEI/0815; dan No.SP-003/P3IEI-OP11/0815, masing-masing pihak menyetujui untuk menyediakan dana kepada Perusahaan sebagai Dana CGRP masing-masing sebesar

Rp50.000.000.000 atau secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000 dan telah disetorkan pada tanggal 10 Agustus 2015.

Penggunaan atas CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal sesuai dengan persetujuan OJK apabila Dana Perlindungan Pemodal tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP dengan memindahkan CGRP ke Dana Perlindungan Pemodal dan akan mengurangi jumlah pinjaman Perusahaan kepada masing-masing pihak secara prorata.

Perusahaan wajib memisahkan penyimpanan antara harta kekayaan Perusahaan dengan Dana CGRP tersebut dan wajib menatausahakan serta melakukan investasi atas dana CGRP tersebut.

Berdasarkan Addendum I No.SP-0184/DIR/KSEI/1216, No.SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No.Add-010/KPEI/216 dan No.SP-0004/P3IEI-OPII/1216 tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan wajib menginvestasikan CGRP pemodal pada SBN, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu pada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PEFINDO.

SRO baik secara bersama-sama atau masing-masing dapat menarik kembali CGRP yang telah disetorkan SRO kepada Perusahaan, dan Perusahaan berkewajiban mengembalikan CGRP kepada SRO, apabila telah melampaui jangka waktu 25 tahun dari tanggal perjanjian atau Dana Perlindungan Pemodal yang dikelola dan ditatausahakan Perusahaan telah mencapai paling sedikit Rp2.000.000.000.000, mana yang lebih dulu tercapai.

SRO membebaskan Perusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi CGRP untuk tahun 2016. Berikutnya Perusahaan wajib membayarkan imbal hasil kepada SRO yang dibagi secara prorata dengan pembayaran awal sejumlah Rp2.000.000.000 di tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya dari jumlah imbal hasil tahun sebelumnya, sampai dengan CGRP dikembalikan kepada SRO.

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020, terdapat Perjanjian Penyelesaian atas Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi (selanjutnya disebut "Perjanjian Penyelesaian") antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (para pihak secara bersama-sama disebut sebagai Pihak Pertama) dengan Perusahaan (sebagai Pihak Kedua).

Pengakhiran Perjanjian CGRP dan penyelesaian pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan mengkonversi pinjaman yang menjadi setoran saham dalam Pihak Kedua. Konversi tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.10 tertanggal 26 Juni 2020, dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No.AHU-0046853.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tercantum dalam Surat Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0109927.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini Para Pihak telah setuju dan mufakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak menyetujui penyelesaian kewajiban, pembayaran pinjaman CGRP oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian CGRP yaitu total sebesar Ro150.000.000.000 dilakukan dengan cara mengkonversi pinjaman menjadi setoran modal dalam Pihak Kedua, yaitu sebagai berikut:
   a. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 dari BEI dikonversi menjadi setoran BEI sebanyak 50.000 lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham;

b. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 dari KPEI dikonversi menjadi setoran KPEI sebanyak 50.000 lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham;
c. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 dari KSEI dikonversi menjadi setoran KSEI sebanyak 50.000 lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham;

2. Dengan diterbitkannya saham Pihak Kedua kepada BEI, KPEI, dan KSEI sesuai dengan angka 1 diatas dalam Daftar Pemegang Saham Pihak Kedua, maka kewajiban pembayaran pinjaman CGRP dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Kedua tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran hasil investasi pinjaman CGRP kepada Pihak Pertama.

   Dengan demikian perjanjian CGRP menjadi berakhir sehingga semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian CGRP menjadi tidak berlaku.

   Dengan disetujuinya perjanjian ini maka segala hak dan kewajiban masing-masing pihak terangkum dalam addendum I No.SP-0184/DIR/KSEI/1216, No.SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No.Add10/KPEI/216 dan No.SP-0004/P3IEI-OPII/1216 tanggal 16 Desember 2016 tidak berlaku.

c. Dalam kegiatan usahanya Perusahaan memiliki saldo dan transaksi dengan sesama entitas dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Piutang Lain-lain - BEI	239.315.613	--
Jumlah	**239.315.613**	**--**

	2022	2021
Utang Usaha - BEI	880.596.470	1.642.540.272
Jumlah	**880.596.470**	**1.642.540.272**

	2022	2021
Beban *Sharing Cost SRO* - BEI	2.138.629.480	2.199.999.998
Beban Sewa Kantor - BEI	106.080.000	105.600.000
Beban Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Modal - TICMI	86.580.000	85.800.000
Beban Sosialisasi dan Publikasi - TICMI	59.078.600	47.000.000
Beban Keperluan Kantor - IDX STI	52.732.604	83.306.300
Beban Listrik - BEI	38.095.763	34.923.338
Beban Sosialisasi dan Publikasi - PHEI	11.100.000	11.000.000
Beban Seminar/*Workshop* Dalam Negeri - TICMI	--	11.550.000
Jumlah	**2.492.296.447**	**2.579.179.636**

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit, merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- Risiko likuiditas, Perusahaan mendefenisikan risiko likuiditas atas kolektibilitas piutang usaha sebagaimana yang disebutkan diatas, dimana dapat mengakibatkan Perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kewajiban keuangan.
- Risiko pasar merupakan risiko fluktuasi tingkat bunga dan perubahan harga aset keuangan sehubungan dengan kegiatan investasi Perusahaan pada instrumen keuangan.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan yang sejalan dengan tujuan Perusahaan, yang

salah satunya diturunkan menjadi pedoman pengelolaan investasi Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- Meminimalkan risiko pasar atas semua jenis transaksi
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak ketiga lainnya yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Aset keuangan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi risiko kredit yang signifikan terutama terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lainnya dan piutang pihak berelasi.

Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan hanya melakukan transaksi dengan pihak yang terakreditasi baik. Selain itu, jumlah piutang dipantau terus menerus untuk mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari instrumen keuangan lainnya termasuk uang tunai di bank mana risiko kredit timbul dari pihak lawan, Perusahaan memiliki kebijakan untuk menempatkan uang tunai pada bank yang memiliki peringkat kredit yang tinggi.

Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas didefenisikan sebagai risiko ketika posisi arus kas Perusahaan mengindikasikan pendapatan usaha jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek. Pengelolaan risiko likuiditas secara hati-hati akan dapat mempertahankan saldo kas dengan jumlah yang cukup di bank untuk mendukung kegiatan operasional secara tepat waktu.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perusahaan akan memonitor dan mempertahankan tingkat kas di bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perusahaan juga secara rutin akan mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan melakukan penelahaan atas kondisi pasar uang secara terus menerus untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga komitmen fasilitas kredit yang tersedia.

Risiko Pasar
Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Perusahaan secara aktif melakukan monitoring terhadap perkembangan terkini atas kondisi pasar keuangan domestik dan internasional. Perusahaan juga memanfaatkan laporan riset dan rekomendasi dari pihak-pihak terpercaya untuk menyusun strategi investasi yang tepat guna memitigasi risiko pasar.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2022		2021	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	2.724.417.089	2.724.417.089	2.502.898.542	2.502.898.542
Piutang Usaha	2.523.408.641	2.523.408.641	2.581.051.688	2.581.051.688
Piutang Lain-lain	1.876.222.856	1.876.222.856	1.783.358.151	1.783.358.151
Aset Keuangan Lainnya	50.261.751.245	50.261.751.245	50.214.720.513	50.214.720.513
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	160.449.787.899	160.449.787.899	165.152.397.338	165.152.397.338
Jumlah Aset Keuangan	**217.835.587.730**	**217.835.587.730**	**222.234.426.232**	**222.234.426.232**
Liabilitas Keuangan				
Beban Akrual	2.590.014.225	2.590.014.225	2.304.696.568	2.304.696.568
Utang Lain-lain	83.760.464	83.760.464	7.448.613	7.448.613
Utang Pihak Berelasi	880.596.469	880.596.469	1.642.806.863	1.642.806.863
Liabilitas Sewa	176.149.419	176.149.419	264.054.384	264.054.384
Jumlah Liabilitas Keuangan	**3.730.520.577**	**3.730.520.577**	**4.219.006.428**	**4.219.006.428**

b. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan (Catatan 14), tambahan modal disetor dan saldo laba.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan reviu performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

26. DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-715/BL/2012 tentang DPP beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Bank	85.068.030	101.828.206
Deposito Berjangka	138.652.721.091	195.408.746.584
Surat Berharga Negara	125.037.770.000	42.009.935.000
Piutang Bunga	1.683.710.504	894.019.419
Piutang Iuran Dana Perlindungan Modal	--	2.994.684
Liabilitas	(2.526.987.148)	(2.582.244.518)
Aset Bersih	**262.932.282.477**	**235.835.279.375**

27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Pada tanggal 12 Januari 2023 terjadi penjualan terhadap reksadana pada CGRP dengan nilai penjualan sebesar Rp21.110.155.709. Nilai NAV reksadana tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.070.984.898. Atas penjualan tersebut Perusahaan mencatatkan realisasi keuntungan sebesar Rp39.170.811.
b. Pada tanggal 12 Januari 2023 terjadi penjualan terhadap reksadana pada Aset Keuangan Lainnya dengan nilai penjualan sebesar Rp11.691.416.513. Nilai NAV reksadana tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.669.959.845. Atas penjualan tersebut Perusahaan mencatatkan realisasi keuntungan sebesar Rp21.456.668.
c. Pada tanggal 20 Februari 2023 terjadi penjualan terhadap reksadana CGRP dengan nilai penjualan sebesar Rp10.036.353.904. Nilai NAV reksadana tersebut per 31 Januari 2023 sebesar Rp10.014.688.648. Atas penjualan tersebut Perusahaan mencatatkan realisasi keuntungan sebesar Rp21.665.256.
d. Pada tanggal 16 dan 18 Januari 2023, Perusahaan melakukan pembelian reksadana untuk CGRP dengan dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000.001 dan Rp10.000.000.000.
e. Pada tanggal 18 Januari 2023, Perusahaan melakukan pembelian reksadana untuk Aset Keuangan Lainnya dengan dengan nilai nominal Rp11.770.000.000.

28. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2023.

Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal

Financial Report of Investor Protection Fund

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022
For Year Ended 31 December 2022

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Beserta Laporan Auditor Independen

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA-
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	Narotama Aryanto
	Alamat kantor	:	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Perum Pondok Jagung Blok AD. 13 Pondok Jagung – Serpong Utara Tangerang Selatan
	Nomor telepon	:	08111711209
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Mariska Aritany Azis
	Alamat kantor	:	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain	:	Jl. Lawu Blok J Kav. 288 RT/RW 007/014 Kel. Limo, Kec. Limo Depok
	Nomor telepon	:	087881989215
	Jabatan	:	Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia – Dana Perlindungan Pemodal (DPP);

2. Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia – Dana Perlindungan Pemodal (DPP) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Pengelolaan DPP.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 Maret 2023

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur

HELIANTONO & REKAN
Parker Russell International
Registered Public Accountants

Aminta Plaza, 7th Floor # 704 Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan 12310 Indonesia
T: (+62 21) 766 1348-50 | F: (+62 21) 766 1351 | : info@heliantonorekan.com | : www.heliantonorekan.com
Branch: Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo

Nomor: 00139/2.0459/AU.1/05/0152-1/0/III/2023

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("DPP") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan DPP tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap DPP berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan DPP dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi DPP atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan DPP.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

List of offices and partner's name are available at the above address. Heliantono & Rekan is a Registered Public Accountants in Indonesia licensed No. KEP-093/KM.6/2001. Heliantono & Rekan is a member of Parker Russell International a worldwide association of independent accounting firms and business advisers. Parker Russell International refers to the network of independent member firms of Parker Russell International Limited, each of which is a separated legal entity.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal DPP.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan DPP untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan DPP tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan

00139

Rianita Soelaiman
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0152

Jakarta, 1 Maret 2023

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Bank	4	85.068.030	101.828.206
Aset Keuangan Lainnya	5	263.690.491.091	237.418.681.584
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal	6	--	2.994.684
Piutang Bunga		1.683.710.504	894.019.419
JUMLAH ASET		**265.459.269.625**	**238.417.523.893**
LIABILITAS			
Beban Akrual	7	2.526.987.148	2.582.244.518
ASET BERSIH		**262.932.282.477**	**235.835.279.375**

Catatan terlampir atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
PENGHASILAN INVESTASI			
Penghasilan Bunga	8	8.411.366.013	8.453.929.508
Realisasi Perubahan Nilai Wajar	5	--	149.580.000
JUMLAH PENGHASILAN INVESTASI		**8.411.366.013**	**8.603.509.508**
BEBAN			
Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal	9	2.523.409.804	2.581.052.852
Administrasi		30.764.719	22.475.015
JUMLAH BEBAN		**2.554.174.523**	**2.603.527.867**
PENGHASILAN INVESTASI BERSIH		**5.857.191.490**	**5.999.981.640**
Perubahan Nilai Wajar			
Surat Berharga Negara			
Belum direalisasi		(814.465.000)	(12.600.000)
KENAIKAN ASET BERSIH		**5.042.726.490**	**5.987.381.640**

Catatan terlampir atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		**5.042.726.490**	**5.987.381.640**
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Iuran Keanggotaan Tahunan	10	21.954.276.612	15.213.848.662
Iuran Keanggotaan Awal		100.000.000	110.000.000
Jumlah Kontribusi dari Anggota Dana Perlindungan Permodal		22.054.276.612	15.323.848.662
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH		**27.097.003.102**	**21.311.230.302**
ASET BERSIH AWAL TAHUN		**235.835.279.375**	**214.524.049.073**
ASET BERSIH AKHIR TAHUN		**262.932.282.477**	**235.835.279.375**

Catatan terlampir atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Bunga	7.621.667.997	8.425.260.062
Pembayaran Jasa Pengelolaan	(2.581.052.852)	(3.405.846.673)
Pembayaran Beban Keuangan	(27.659.157)	(20.830.448)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	5.012.955.988	4.998.582.941
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Investasi dalam Surat Berharga Negara	(83.842.300.000)	(75.642.102.000)
Penempatan Deposito Berjangka	(142.026.626.106)	(130.465.245.294)
Pencairan Investasi dalam Surat Berharga Negara	--	50.191.380.000
Pencairan Deposito Berjangka	198.782.651.599	135.435.901.212
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(27.086.274.507)	(20.480.066.082)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Anggota DPP	22.056.558.343	15.349.110.756
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK	(16.760.176)	(132.372.385)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	101.828.206	234.200.591
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**85.068.030**	**101.828.206**

Catatan terlampir atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012 diputuskan bahwa ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diatur dalam Peraturan No.VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam - LK No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan No.VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Bank Kustodian (BK) wajib menjadi anggota DPP.

DPP dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Kontribusi dana awal dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
    - Bagi PPE – iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
    - Bagi BK – sesuai Surat Edaran (SE) No. 30/SEOJK.04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing BK dan iuran keangotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis Risiko Pemodal, Risiko Kustodian dan Risiko Aset Pemodal dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Penyelenggara DPP.
c. Dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksana hak subrogasi;
d. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
e. Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK

DPP bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. DPP akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan Pemodal.

DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi DPP setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam DPP.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, OJK menetapkan batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian

dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200.000.000 dan Rp100.000.000.000 untuk setiap Kustodian. Keputusan ini juga mencabut Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-46/D.04/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-70/D.04/2013.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh DPP ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara DPP.

DPP diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara DPP.

Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara DPP Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan DPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

b. Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masin-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional DPP.

c. Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan DPP (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Penyelenggara DPP telah menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Penyelenggara DPP mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (ii) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, DPP memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi Bank, Deposito Berjangka, Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal dan Piutang Bunga. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain meliputi Surat Berharga Negara.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap periode pelaporan, Penyelenggara DPP menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Penyelenggara DPP menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Penyelenggara DPP membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penyelenggara DPP telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

Liabilitas Keuangan
Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Penyelenggara DPP memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha dan utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan

menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi *input* terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
3) *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

f. Deposito Berjangka
Semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga efektif yang berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya.

h. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No.IV.A.4: Dana Perlindungan Modal, sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diterbitkanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK No.49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara DPP berhak mendapat imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisoner POJK No.KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP yang diperoleh PDPP meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

i. Provisi

Provisi diakui ketika DPP memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar DPP diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Penyelenggara DPP diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Penting dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian
Penyelenggara DPP menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71 terpenuhi.

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia pada pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk pengunaan model matematika. Masukan *(input)* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

4. BANK

	2022	2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.912.294	72.745.554
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.940.933	12.646.174
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.593.500	4.041.303
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.621.303	12.395.175
Jumlah	**85.068.030**	**101.828.206**

5. ASET KEUANGAN LAINNYA

	2022	2021
Deposito Berjangka:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	72.695.111.073	79.022.776.779
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	52.407.610.018	78.067.925.838
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.550.000.000	38.318.043.967
Investasi dalam Surat Berharga		
Surat Berharga Negara	125.037.770.000	42.009.935.000
	263.690.491.091	**237.418.681.584**
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	2,50% - 5,00%	3,25%-6,25%
Jangka waktu deposito berjangka	1 - 3 bulan	1 bulan

Investasi dalam Surat Berharga Negara

	2022			
Surat Berharga Negara	**Nilai Nominal Rp**	**Nilai Wajar Rp**	**Tingkat Kupon %**	**Jatuh Tempo**
SBN FR0086	35.000.000.000	34.331.710.000	5,50	15-04-2026
SBN FR0063	20.000.000.000	20.032.580.000	5,63	15-05-2023
SBN FR0070	15.000.000.000	15.495.840.000	8,38	15-03-2024
SBN FR0090	15.000.000.000	14.428.470.000	5,13	15-04-2027
SBN FR0074	10.000.000.000	10.353.360.000	7,50	15-08-2032
SBN FR0081	10.000.000.000	10.107.500.000	6,50	15-06-2025
ORI 019	20.400.000.000	20.288.310.000	5,57	15-02-2024
Jumlah	**125.400.000.000**	**125.037.770.000**		

	2021			
Surat Berharga Negara	**Nilai Nominal Rp**	**Nilai Wajar Rp**	**Tingkat Kupon %**	**Jatuh Tempo**
SBN FR0063	20.000.000.000	20.534.740.000	5,63	15-05-2023
SBN FR0070	15.000.000.000	16.346.010.000	8,38	15-03-2040
ORI 19	5.000.000.000	5.129.185.000	5,70	15-02-2024
Jumlah	**40.000.000.000**	**42.009.935.000**		

Biaya perolehan Surat Berharga Negara pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp125.584.800.000 dan Rp41.742.500.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 nilai wajar Surat Berharga Negara dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) atas nilai wajar Surat Berharga Negara yang belum direalisasi masing-masing sebesar (Rp547.030.000) dan Rp267.435.000 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

6. PIUTANG IURAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

	2022	2021
Iuran Keanggotaan Tahunan		
PPE	719.883	2.994.684
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(719.883)	--
Jumlah	**--**	**2.994.684**

Merupakan piutang iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek (PPE) per 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada 31 Desember 2022, Manajemen telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp719.883. Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan kerugian penurunan nilai telah memadai.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan melakukan Penghapusan Kewajiban Iuran Keanggotaan Tahun 2021 kepada PT Corpus Sekuritas Indonesia dan PT Sinergi Millenium Sekuritas masing-masing sebesar Rp1.314.322 dan Rp967.409 karena telah memenuhi kriteria penghapusan kewajiban iuran berdasarkan Prosedur Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) No: SOP-OPS/ANG/4.0/2022.

7. BEBAN AKRUAL

	2022	2021
Akrual atas beban pengelolaan DPP	2.523.409.804	2.581.052.852
Akrual lain-lain	3.577.344	1.191.666
Jumlah	**2.526.987.148**	**2.582.244.518**

8. PENGHASILAN BUNGA

	2022	2021
Surat Berharga Negara	4.274.757.566	3.533.394.528
Bunga Deposito Berjangka	4.072.419.764	4.911.294.728
Jasa Giro	64.188.683	9.240.252
Jumlah	**8.411.366.013**	**8.453.929.508**

9. BEBAN – PENGELOLAAN DPP

Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-62/D.04/2016 imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi DPP yang diperoleh Penyelenggara DPP sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi (Catatan 2 dan 7). Imbalan jasa pengelolaan DPP per 31 Desember 2022 dan 2021 masing–masing sebesar Rp2.523.409.804 dan Rp2.581.052.852.

10. IURAN KEANGGOTAAN

a. Iuran Keanggotaan Awal
Selama tahun 2022 dan 2021, terdapat registrasi anggota baru dan DPP telah menerima pembayaran atas Iuran Keanggotaan Awal DPP sebesar Rp100.000.000 dan Rp110.000.000.

b. Iuran Keanggotaan Tahunan

	2022	2021
PPE	16.974.988.848	10.085.705.740
BK	4.979.287.764	5.128.142.922
Jumlah	**21.954.276.612**	**15.213.848.662**

Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-01/D.04/2022 tentang Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal Bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Tahun 2022, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2022 seluruh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dibayarkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama dengan total jumlah kontribusi sebesar 50% dari seluruh beban Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2022 untuk PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2022 seluruh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dibayarkan oleh PPE secara proporsional sebesar 50% dari seluruh beban Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2022 untuk PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
3. Jumlah besaran Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2022 seluruh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).
4. Besaran Iuran Keanggotaan Tahunan yang dibebankan kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan Penyelesaian tidak memperhitungkan beban iuran keanggotaan tahunan yang dikenakan terhadap aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Penyelenggara DPP telah menyampaikan tagihan Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2022 kepada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah sebesar Rp16.977.263.625. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2022 ditagihkan kepada PPE dan SRO masing-masing sebesar 50% atau sebesar Rp8.488.631.813. Nilai Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2022 tersebut dihitung berdasarkan pada:

1. Surat Pernyataan dan Daftar Pihak Terafiliasi Dalam Rangka Pengecualian Perhitungan Aset Pemodal untuk penghitungan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Anggota DPP PPE; dan
2. Data dari KSEI berupa rata-rata bulanan nilai aset Nasabah Tahun 2021 pada masing-masing Anggota DPP dan data rata-rata bulanan nilai aset nasabah Tahun 2021 pada masing-masing Anggota DPP yang dikecualikan dari Penghitungan Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2022.

Seluruh Iuran Keanggotaan Tahunan Tahun 2022 bagi PPE telah dipenuhi oleh PPE Anggota DPP dan SRO (Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-00002/P3IEI/DIR/0122 perihal Besaran Faktor Risiko untuk Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2022, ditetapkan besaran Faktor Risiko untuk Bank Kustodian adalah sebesar 0,1710. Atas dasar tersebut, dan berdasarkan data yang diterima dari KSEI terkait rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun 2021 yang dititipkan pada Bank Kustodian sebesar Rp2.911.864.190.434.480, maka besaran total iuran Keanggotaan Tahunan DPP tahun 2022 untuk Bank Kustodian adalah sebesar Rp4.979.287.764. Seluruh Iuran Keanggotaan Tahunan DPP tersebut telah dipenuhi oleh Bank Kustodian.

11. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
Dalam kebijakan manajemen risiko keuangan DPP bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memerhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko tingkat bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen Risiko Kredit
Risiko kredit terkait dengan kerugian timbul sehubungan dengan kegagalan pihak lawan dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan DPP terdiri dari bank, deposito berjangka, investasi dalam Surat Berharga Negara, piutang iuran DPP dan piutang bunga.

Penempatan DPP pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan Investasi DPP, dan atas persetujuan manajemen.

Risiko kredit atas bank, deposito berjangka dan piutang adalah terbatas karena pihak lawan DPP adalah lembaga keuangan terpercaya.

Manajemen Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif DPP. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya.

Instrumen keuangan DPP pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang terekspos terhadap tingkat bunga arus kas adalah pada aset keuangan bank, deposito berjangka dan investasi dalam Surat Berharga Negara sebesar Rp263.775.559.121 dan Rp237.520.509.790.

Manajemen Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas dapat timbul dari pendanaan kredit oleh bank penyedia kredit. Dana yang dikucurkan bank dalam rangka pemenuhan kegagalan transaksi bursa. Tetapi risiko tersebut terbatas karena pihak lawan DPP merupakan lembaga keuangan terpercaya (bank Pemerintah).

Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan
Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2022		2021	
	Nilai tercatat	Nilai Wajar	Nilai tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Bank	85.068.030	85.068.030	101.828.206	101.828.206
Deposito Berjangka	138.652.721.091	138.652.721.091	195.408.746.584	195.408.746.584
Surat Berharga Negara	125.037.770.000	125.037.770.000	42.009.935.000	42.009.935.000
Piutang Iuran DPP	--	--	2.994.684	2.994.684
Piutang Bunga	1.683.710.504	1.683.710.504	894.019.419	894.019.419
Jumlah	**265.459.269.625**	**265.459.269.625**	**238.417.523.893**	**238.417.523.893**
Liabilitas Keuangan				
Beban Akrual	2.526.987.148	2.526.987.148	2.582.244.518	2.582.244.518
Jumlah	**2.526.987.148**	**2.526.987.148**	**2.582.244.518**	**2.582.244.518**

12. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada pasal 69B, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dapat memberikan perlindungan dana pemodal kepada investor yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek.
b. Pada tanggal 3 Februari 2023 dan 10 Februari 2023 telah terjadi penjualan Surat Berharga Negara Seri FR090 dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000, nilai perolehan sebesar Rp14.257.500.000 dan nilai penjualan sebesar Rp14.432.500.000. Atas penjualan tersebut DPP mencatatkan keuntungan bersih sebesar Rp157.500.000. Porsi imbalan jasa pengelolaan DPP bagi Penyelenggara DPP atas transaksi tersebut sebesar Rp47.250.000.
c. Pada tanggal 12 Januari 2023, Perusahaan melakukan investasi pada Obligasi Negara Ritel Seri ORI 19 dengan nilai perolehan sebesar Rp9.980.000.000. Selain itu pada tanggal 16 Februari 2023, Perusahaan juga melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri PBS-017 dengan nilai perolehan sebesar Rp9.970.000.000.

13. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan DPP merupakan tanggung jawab penyelenggara DPP dan telah disetujui oleh Direksi penyelenggara DPP untuk diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2023.

Kriteria Laporan Tahunan Berdasarkan Ketentuan OJK & Annual Report Award

Criteria for Annual Report based on OJK & Annual Report Award

Penyusunan laporan tahunan Perusahaan merujuk kepada Surat Edaran OJK 016/2021 yang dijabarkan melalui kriteria atau penilaian Annual Report Award (ARA). Penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi pengungkapan praktik governansi korporat termasuk keberlanjutan dalam laporan tahunan. P3IEI secara konsisten menyediakan informasi yang lengkap, andal, dan akurat mengenai aktivitas yang dilakukan Perusahaan untuk memberikan pertanggungjawaban yang lengkap, transparan dan dapat diandalkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kriteria-kriteria penting laporan tahunan yang ditetapkan ditampilkan dalam laporan tahunan ini. Kriteria ARA tahun 2022 bersifat *goes beyond compliance* yang diterapkan P3IEI pada laporan ini. Pemenuhan kriteria ARA tersebut meliputi:

The Annual Report Award (ARA) aims to improve the quality of information and good corporate governance through the presentation of an annual report. Indonesia SIPF consistently provides complete, reliable, and accurate information regarding the activities carried out by the Company to provide complete accountability to all stakeholders.

The ARA covered several important criteria as shown in this annual report. The 2022 ARA criteria go beyond compliance which is applied by P3IEI in this report. The compliance of the ARA criteria includes:

No.	Keterangan *Description*
1.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** Informasi kondisi keuangan Perusahaan disajikan dalam ikhtisar statistik rinci berdasarkan kinerja perusahaan dalam lima tahun terakhir yaitu 2018 hingga 2022. Beberapa rasio keuangan penting yang disajkan antara lain ROA, ROE, rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas, rasio total liabilitas, dan rasio perputaran aset. Disajikan pula ikhtisar jumlah aset yang dikelola Perusahaan. Perusahaan menjelaskan secara detil laporan kinerja sebagai PDPP serta hasil pengelolaan DPP. *Summary of Key Financial Data* *Information on the Company's financial condition is presented in a detailed statistical overview based on the company's performance in the last five years, namely 2018 to 2022. Some of the important financial ratios presented include ROA, ROE, current ratio, liabilities to equity ratio, total liabilities ratio, and asset turnover ratio. An overview of the total assets managed by the Company is also presented. The company explains in detail the performance report as IPF institution and the results of IPF management.*
2.	**Informasi Saham** *Stock Information*
3.	**Laporan Direksi** Direksi Perusahaan menjelaskan hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2022 dan pertumbuhan yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan Perusahaan pada tahun 2022 tercatat signifikan dan segenap bagian Perusahaan secara konsisten akan terus meningkatkannya di masa depan dan menindaklanjuti prospek usaha secara maksimal. *Report of the Board of Directors* *The Company's Board of Directors explains the performance results achieved in 2022 and the growth resulting from previous years. The Company's growth in 2022 was recorded as significant and all parts of the Company will consistently continue to increase it in the future and follow up on business prospects to the fullest.*
4.	**Laporan Dewan Komisaris** Dewan Komisaris Perusahaan menjelaskan hasil pengawasan atas kinerja yang dicapai Direksi dan organ penunjang perusahaan pada tahun 2022. Dewan komisaris juga menyampaikan prospek dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai di masa mendatang. *Report of the board of commissioners* *The Company's Board of Commissioners explains the results of monitoring the performance achieved by the Board of Directors and the company's supporting organs in 2022. The Board of Commissioners also conveys the Company's prospects and goals to be achieved in the future.*
5.	**Profil Perusahaan** Dalam bagian ini, Perusahaan menyajikan profil perusahaan secara lengkap meliputi informasi Perusahaan, riwayat, bidang usaha, struktur organisasi yang telah disempurnakan, visi misi dan budaya Perusahaan, pengelolaan karyawan yang terus dikembangkan sebagai modal manusia (human capital) yang menjadi tonggak penting Perusahaan, informasi pemegang saham, peristiwa penting, dan rincian lainnya. *Company Profile* *In this section, the Company presents a complete company profile including Company information, history, line of business, enhanced organizational structure, vision, mission and corporate culture, employee management which continues to be developed as human capital which is an important milestone of the Company, information shareholders, important events, and other details.*

6.	**Analisa dan Pembahasan Manajemen** Penjelasan lebih rinci mengenai pengelolaan DPP disajikan dalam laporan ini. Perusahaan secara konsisten melakukan pengelolaan DPP antara lain melalui kegiatan investasi, pengelolaan keanggotaan DPP, melakukan analisis manajemen risiko, dan mengelola kondisi keuangan Perusahaan dari sisi pendapatan dan biaya. *Management Analysis And Discussion* *A more detailed explanation of IPF management is presented in this report. The Company consistently manages IPF, including through investment activities, managing DPP membership, conducting risk management analysis, and managing the Company's financial condition in terms of income and costs.*
7.	**Tata Kelola / Governansi Perusahaan** Perusahaan terus melakukan peningkatan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui upaya GCG kepada para pemangku kepentingan dan melakukan evaluasi secara berkala. Pada laporan disajikan implementasi GCG yang telah dilakukan sejak tahun 2014, kebijakan struktur dan mekanismenya. Dijelaskan pula mengenai tanggung jawab dan laporan kegiatan Dewan Komisaris dan Direksi, kinerja komite-komite yang menunjang peran Dewan, hingga tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, disajikan informasi mengenai kegiatan CSS sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan yang berfokus pada peningkatan sosialisasi dan edukasi para pelaku dan masyarakat umum mengenai pasar modal Indonesia. *Corporate Governance* *The company continues to make improvements in the implementation of good corporate governance through GCG efforts to stakeholders and conducting periodic evaluations. The report presents the GCG implementation that has been carried out since 2014, the policy structure and mechanisms. It also explains the responsibilities and reports on the activities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the performance of committees that support the role of the Board, to information and communication technology governance. Furthermore, information is presented regarding CSS activities as a form of corporate social responsibility to stakeholders which focuses on increasing socialization and education of actors and the general public regarding the Indonesian capital market.*
8.	**Laporan Keuangan** Laporan tahunan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit dan pernyataan tanggung jawab atas laporan tahunan yang disajikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Laporan keuangan dinyatakan telah disusun dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. *Through the financial statements, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors declared responsibility for the presented annual report, as well as responsibility for risk management and internal control by the Company's Board of Directors. The financial statements are stated to have been carefully prepared and in accordance with the existing policies.*
9.	**Laporan Keberlanjutan** *Sustainability Report*
10.	**Lainnya** Perusahaan memberikan informasi tambahan atas isi laporan tahunan untuk memberikan penjelasan yang dapat dipercaya dan akurat bagi seluruh pemangku kepentingan. *Others* *The Company provided additional information on the annual report content to provide reliable and accurate explanations for all stakeholders.*